Robin Osborne

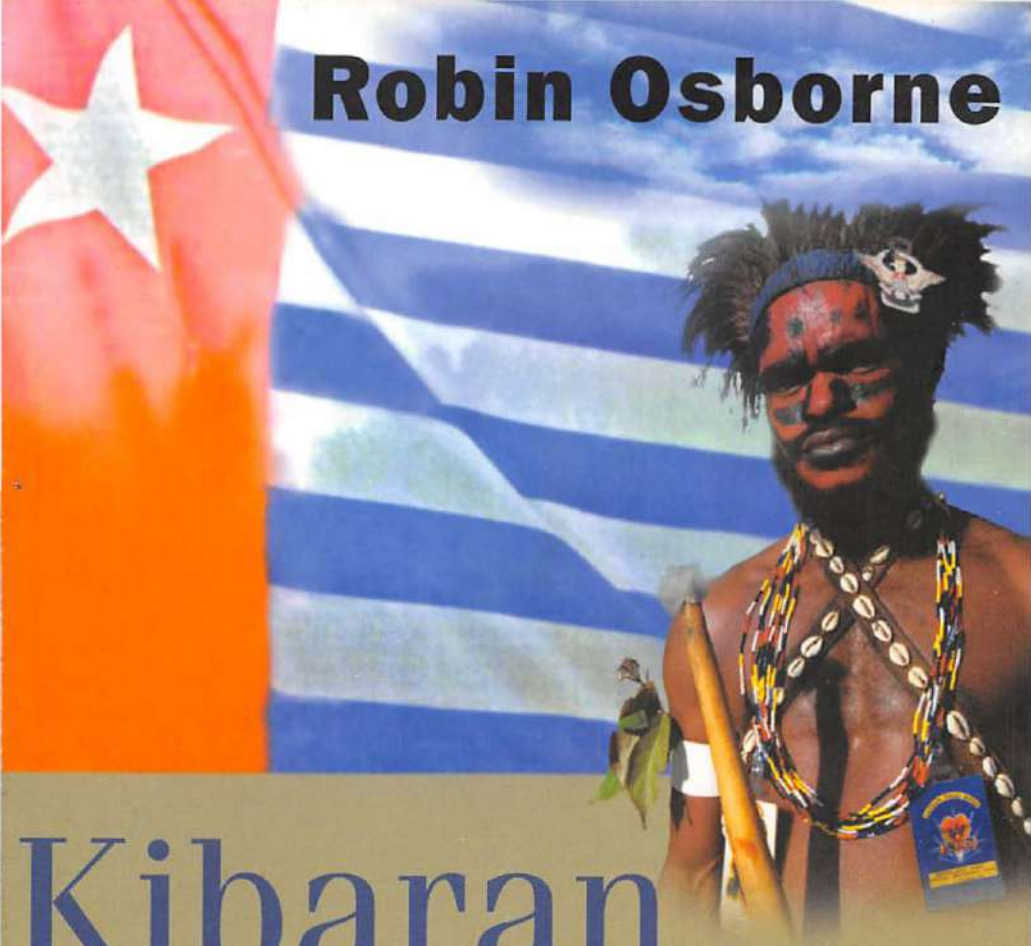

Kibaran Sampari

Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat

Kata Pengantar:
Ikrar Nusa Bhakti

ELSAM

Kibaran Sampari

Robin Osborne

Kibaran Sampari

Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat

KATA PENGANTAR:

IKRAR NUSA BHAKTI

ELSAM

Kibaran Sampari

Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat

Penulis:
Robin Osborne

Judul Asli
Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya

Penerjemah:
Tim Penerjemah ELSAM

Editor:
Amiruddin
Agung Yudhawiranata
Eddie Sius R. Laggut

Desain Cover:
Haetamy el Jaid

Tata Letak:
Dwi Agus

Cetakan Pertama, September 2001

Hak Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Pada ELSAM

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia', selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564 Facs. (021) 7919.2519
E-mail: elsam@nusa.or.id, advokasi@rad.net.id

ISBN: 979-8981-22-7

Pencetak dan Distributor
Pustaka Pelajar Yogyakarta

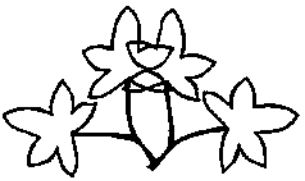

Dipersembahkan untuk Arnold C. Ap Jnr, yang lahir di kamp pengungsi Blackwater, West Sepik, Papua Nugini, 1984. Semoga ia tumbuh dewasa untuk bisa melihat apa yang telah diupayakan almarhum ayahnya.

Dan untuk anak saya, Max, yang lahir pada tahun yang sama.

Ucapan Terima Kasih

PENGHARGAAN yang setinggi-tingginya saya sampaikan pada Anne Schillmoller, yang telah banyak membantu saya dalam mengatasi masa-masa sulit dan sangat toleran terhadap penulis yang kekurangan fasilitas alat mengetik. Juga mereka yang telah banyak membantu: Tom McIndoe, Helen Jarvis, Doug Miles, Michael Van Langenberg, Greg Poulgrain, Hank di Suvero, Bob Burns, Denis Reinhardt, Geoff Heriot, Rob Walls dan Margaret Olah, serta yang berhubungan langsung dengan masalah ini, Peter Boyle, Lyn Fisher dan Gil Scrine.

Di PNG: Neville Togarewa dari *Times of PNG*, Alfred Sasako dari *Niugini Nius*, Chris Pash, Sean Dorney, dari *Post Courier* dan *the Office of the Public Solicitor.*

Carmel Budiardjo dan group *Tapol* di London yang telah begitu banyak membantu.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan untuk John Iremonger, penerbit, atas kepercaannya terhadap proyek ini, dan juga kepada pihak lain di

George Allen dan Unwin, Sydney.

Mata Uang

Dollar yang dimaksud dalam teks adalah Dollar Australia (A$), kecuali jika ada keterangannya.

Singkatan "K" artinya adalah Kina — mata uang Papua Nugini. Nilai tukar Kina pada bulan Januari 1985 adalah K1 = A$ 1,40.

Mata uang Indonesia, Rupiah (Rp), telah dikonversikan dalam Dollar untuk lebih memudahkan.•

Pengantar Penerbit

SEPANJANG tahun 2000 sampai memasuki tahun 2001 gerakan OPM di Papua kelihatan mulai aktif kembali. Hal itu terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai OPM di media lokal maupun nasional. Meskipun begitu *image* OPM sebagai gerombolan bersenjata di Papua tidak mengalami perubahan, alias tidak ada wacana baru yang disodorkan oleh berita mengenai OPM. Dari berbagai berita media itu OPM tetap saja diasosiasikan sebagai kekuatan gerombolan bersenjata yang suka menculik, menyerang pos tentara atau patroli polisi, menyerang perusahaan-perusahaan kayu untuk mendapatkan perbekalan. Lebih buruk lagi adalah hampir sebagian besar berita mengenai gejolak sosial di Papua selalu diasosiasikan sebagai bagian dari OPM. Akibatnya berbagai aktivitas rakyat Papua untuk menuntut keadilan dan perhatian yang lebih secara ekonomi-politik dan sosial-budaya dinyatakan sebagai kehendak OPM dengan sendirinya menjadi separatis.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa berita mengenai OPM selalu negatif. Hal itu bisa terjadi oleh tiga sebab. *Pertama,* mungkin ketidakpahaman banyak reporter media

mengenai Papua secara sosiologis dan historis sehingga berita yang ditulisnya lebih banyak mewartakan apa yang terjadi di permukaan saja, sehingga dasar dari riak di permukaan tak pernah disentuh. Sebab *kedua*, mungkin pemahaman itu ada namun ruang untuk mengungkapkannya terbatas akibat ketatnya pengawasan aparat keamanan atas hal-hal yang berbau OPM. Sebab *ketiga* adalah langkanya literatur mengenai Papua pada umumnya dan gerakan OPM pada khususnya dalam bahasa Indonesia.

Bagaimana pengaruh dari berita yang kurang akurat adalah sikap yang diambil oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid, pada bulan Maret 2001 yang, memerintahkan pembubaran organisasi OPM itu sekaligus dengan sayap militernya. Perintah Abdurrahman Wahid ini tentu aneh karena *pertama* OPM tidak pernah menjadi organisasi politika terbuka dan resmi di Papua; oleh karena itu langkah pembubarannya juga tidak mungkin bisa dilakukan. *Kedua*, kehadiran OPM tidak ditentukan oleh pengakuan resmi dari pemerintah melainkan oleh anggota-anggota dan pendukungnya sendiri yang tersebar dalam berbagai wilayah dan kelompok dengan segala keanekaragamannya dan dengan berbagai motivasi pula. Dengan demikian, OPM bukanlah barang yang padu melainkan sebuah organ perjuangan yang cair. Dalam istilah George J. Aditjondro, OPM adalah kawah candradimuka bagi banyak kalangan dalam menggodok nasionalisme Papua sekaligus menjadi alat dari tentara untuk naik pangkat.

Buku ini berisi mengenai pandangan, sikap dan motivasi serta seluruh seluk-beluk aktivitas OPM di Papua, baik dalam bertikai di antara sesama mereka maupun dalam

menyusun strategi dalam menyiasati kejaran patroli pasukan Indonesia. Lebih jauh, buku ini membongkar bagaimana pertarungan antara OPM dan tentara Indonesia dalam menguasai wilayah Papua. Meskipun pertarungan itu tidak seimbang namun perlawanan terus dilakukan oleh OPM dengan segala kendala dan kekurangannya. Selain itu, buku ini juga menguraikan bagaimana akal bulus pasukan Indonesia untuk menggunakan OPM sebagai alat tawar-menawar dengan Jakarta, untuk menguasai wilyah demi mendapat kenaikan pangkat atau jatah ekonomi yang lebih luas. Persoalan serius lain yang dibahas lebih dalam adalah konsekuensi dari pertarungan itu, yaitu masalah perbatasan dengan PNG.

Rezim militeris-korup Orba melarang edisi bahasa Inggris buku ini beredar di Indonesia di masa lalu. Tujuan dari pelarangan itu tentu agar rakyat Indonesia dan para intelektual Indonesia tidak miliki akses informasi yang cukup mengenai sepak terjang militer dan aparat pemerintah lainnya dalam menangani Papua. Dengan demikian OPM menjadi hantu yang ditakuti dan sekaligus dijauhi. Dengan hadirnya edisi bahasa Indonesia ini pemahaman mengenai OPM dan sepak terjang militer dan kebijakan Indonesia mengenai propinsi tertimur ini bisa dikoreksi.

ELSAM dalam menerbitkan buku ini tentu bukan dalam rangka membenarkan salah satu posisi melainkan untuk memberikan gambaran yang lain mengenai Papua selama ini. Dengan hadirnya buku ini, ELSAM berharap adanya satu pemahaman baru mengenai permasalahan Papua. Sehingga, dari pemahaman baru itu hadir langkah-langkah saling pengertian untuk mencari jalan keluar dan segala

rahasia yang disembunyikan oleh pemerintah bisa disimak secara bersama.

Dengan demikian, segala gerak pembebasan dari penindasan yang kini terjadi di Papua tidak lagi dihadapi dengan perang rahasia oleh tentara Indonesia. Melainkan dengan pembicaraan-pembicaraan dalam negosiasi politik terbuka sehingga deretan korban tidak bertambah dan caci maki politik bisa dihentikan. Tentu itu adalah harapan. Sebuah harapan hanya akan berarti jika ada orang yang merawatnya. Buku ini adalah usaha untuk merawat harapan itu. Oleh karena itu, penting buku ini dibaca oleh siapa pun, baik yang mengaku Papua maupun yang menyatakan dirinya Indonesia. Terutama bagi para pengambil kebijakan baik yang berada di Papua maupun di Jakarta.

Selain itu, penerbitan buku ini juga bertujuan untuk menjawab kehendak umum yang kini mencuat di tanah Papua, yaitu usaha meluruskan sejarah. Satu usaha yang bertujuan mengungkap segala penderitaan masa lalu demi menyusun fondasi bagi masa depan. Karena dalam menuliskan dan memahami sejarah masa lalu itulah sebuah identitas bisa ditemukan padanannya dan setiap orang bisa belajar darinya. Dengan penerbitan buku ini, ELSAM berusaha untuk mendorong kehendak itu agar apa yang dirahasiakan di Papua bisa menjadi konsumsi orang banyak di mana pun ia berada.

Selamat membaca.•

Jakarta Agustus 2001

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Pengantar

IKRAR NUSA BHAKTI*

KETIKA saudara Amiruddin meminta saya untuk menulis Kata Pengantar bagi buku karya Robin Osborne ini, saya langsung menyanggupinya. Saya mengenal Robin sejak 1987, ketika kami bertemu untuk pertama kalinya di Melbourne saat menghadiri sebuah seminar mengenai Irian Jaya dalam kaitannya dengan hubungan segi tiga Indonesia, Papua New Guinea (selengkapnya disingkat PNG) dan Australia. Di saat itulah saya memperkenalkan diri pada Robin bahwa saya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menulis disertasi Doktor di Griffith University, Brisbane, Australia, mengenai hubungan Indonesia dan (PNG) dengan fokus kajian masalah perbatasan kedua negara. Satu hal

*Kabalitbang Internasional dan Wilayah dan Peneliti Senior pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta.

yang sangat mengesankan saya hingga kini, setelah perbincangan itu, seorang diplomat Indonesia, Atase Penerangan pada Kedutaan Besar RI di Canberra, Taufik Salim, menghampiri saya dan mengatakan, "Anda tahu tidak siapa orang yang baru Anda ajak bicara? Dia itu sangat anti-Indonesia." Saya jawab, "Saya tahu orang itu Robin Osborne, penulis buku *Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya*. Meski saya pegawai negeri, tetapi sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sedang menulis disertasi, saya perlu berhubungan dengan siapa pun, baik itu orang Australia, Indonesia, PNG maupun Belanda. Saya tak peduli apakah dia anti atau pro-Indonesia".

Pertemuan saya yang kedua dengan Robin berlangsung di Sydney, dalam sebuah seminar mengenai Peace Study, yang juga dihadiri oleh mas Dawam Rahardjo. Robin, seperti biasanya, berapi-api membawakan makalahnya soal konflik di Irian Jaya, termasuk latar belakang mengapa Indonesia ngotot untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, dan mengapa Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy mengubah politik luar negeri Amerika Serikat (AS) mengenai Irian Barat, dari "passive neutrality Policy" pada masa Presiden Eisenhower ke "active mediation Policy" pada saat Kennedy berkuasa. Dalam bahasa Osborne, satu kata kunci dari kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) adalah: kekayaan alam bumi Cenderawasih (hutan, tembaga, emas, dan minyak bumi).

Buku Osborne ini merupakan salah satu buku karya penulis Australia mengenai Irian Jaya yang saya "kunyah" selama saya mengerjakan tesis di negeri Kanguru itu dari

Februari 1986 sampai dengan Agustus 1991, dengan judul *The Dynamics of Indonesia-Papua New Guinea Relations: From Conflict to a Better Understanding*. Buku-buku yang juga sangat berharga antara lain ialah karya almarhum Peter Hastings, *New Guinea: Problems and Prospects;* R.J. May, (ed.,) *Between Two Nations. The Indonesia-Papua New Guinea Border and West Papua Nationalism; Nonny Sharp, The Rule of the Sword: the Story of West Irian.*

Apabila kita memilah-milah para penulis Australia ke dalam tiga kategori, yaitu tradisi Hobessian (aliran realis yang mengutamakan kepentingan nasional dan stabilitas politik nasional/regional/internasional), tradisi Grotian (yang mengutamakan aspek hukum dalam hubungan internasional) dan tradisi Kantian (yang mengutamakan fokus perhatian pada hak-hak asasi manusia), maka Robin Osborne dapat dikategorikan sebagai penulis beraliran tradisi Kantian. Ini tampak dari kritik-kritik tajamnya atas berbagai kebijakan — baik kebijakan AS, Belanda, Australia, Indonesia, maupun PNG — yang berkaitan dengan nasib orang Papua ataupun para pengungsi dari Irian Jaya ke PNG 1984-1985.

Sikap Osborne ini dapat dimaklumi, karena ia pernah aktif sebagai koresponden majalah *Tempo*, menjadi sekretaris pers mantan Perdana Menteri PNG, Sir Julius Chan, dan kemudian aktif menjadi salah seorang koordinator di *Australian Council for Overseas Aid* (Dewan Bantuan Luar Negeri Australia), sebuah LSM yang memberi bantuan kepada LSM-LSM Australia lainnya yang bergerak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Saat itu (1980 an) sebagian

besar dana bagi ACFOA (lebih kurang 80%) berasal dari *Australian Development Assistance Bureau* (ADAB), sebuah badan pengelola bantuan luar negeri yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. ADAB sendiri kemudian berganti nama menjadi AIDAB (*Australian International Development Assistance Bureau*) dan kemudian berganti lagi menjadi AUSAID (*Australian Assistance for International Development*). Sampai saat ini sikap Osborne tampaknya masih belum berubah, yaitu "sangat kritis terhadap Indonesia dan sangat pro pada kemerdekaan Papua Barat (Irian Jaya)".

Buku karya Osborne ini kaya akan data, termasuk berbagai data rahasia dari militer Indonesia dan surat-surat penting dari Presiden Soeharto dan pemerintah Indonesia yang dilayangkan ke kantor PM Sir Julius Chan. Tak heran bila Osborne pernah hampir diajukan ke pengadilan oleh pemerintah PNG gara-gara dituduh "mencuri" data dari kantor PM Sir Julius Chan. Ini mirip dengan nasib dua wartawan Australia, Brian Toohey dan William Pinwill, yang diajukan ke pengadilan oleh pemerintah federal Australia pada akhir 1980-an gara-gara menggunakan dokumen-dokumen rahasia badan intelijen Australia yang bergerak di luar negeri (ASIS) sebagai bahan utama bagi buku mereka yang berjudul *Oyster: The Story of the Australian Secret Intelligence Service*, William Heinemann: Port Melbourne, 1989.

Seperti diungkapkannya pada kata pengantar, ketertarikan Osborne pada isu Irian Jaya terjadi sejak 1981, ketika ia menjadi sekretaris pers PM Sir Julius Chan. Ia semakin bersemangat untuk menulis buku ini khususnya ketika ter-

jadi pengungsian (pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai "pelintas batas") besar-besaran (sekitar 10.000 orang) dari Irian Jaya ke PNG pada 1984-1985, ketika Brigjen Raja Kami Sembiring Meliala (kini anggota DPR dari F-PDIP) menjadi Pangdam XVII Cenderawasih. Peristiwa yang amat memilukan hati ini merupakan salah satu periode sejarah yang sangat penting bukan saja bagi rakyat Irian dan pemerintah Indonesia, tetapi juga dalam kaitan hubungan Jakarta — Port Moresby (ibu kota PNG).

Buku *Kibaran Sampari* ini diawali dengan periode sejarah masuknya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Bab yang berjudul "Dari Sabang Sampai ke Merauke" bukan saja berisi sejarah politik Belanda, Indonesia, AS dan Australia dalam persoalan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat saja, tetapi juga kisah-kisah mengenai Digul, suatu kamp tawanan bagi para pemberontak komunis 1926-1927 dan para pejuang Indonesia di Tanah Merah. Osborne bahkan secara manusiawi mengutip karya almarhumah Ketut Tantri, penulis wanita AS, yang berjudul *Revolt in Paradise* (Revolusi di Nusa Damai) yang salah satu bagiannya mengungkapkan kisah seorang anak laki-laki yang ayahnya dibuang Belanda ke "negeri yang letaknya bahkan lebih jauh dari bulan", yaitu PNG. Ketut Tantri yang karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Gunung Agung dan kemudian Gramedia, meninggal dunia dalam kesendiriannya di Sydney, Australia, akhir 1990-an.

Bab kedua buku ini mengulas mengapa pada masa transisi (1963-1969) muncul berbagai gagasan untuk mem-

bentuk satu negara-bangsa beretnis Papua dan berumpun Melanesia, dengan batas wilayah "Dari Sorong Sampai ke Numbay". Bab ini juga mendeskripsikan awal munculnya gerakan-gerakan awal Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk berbagai faksi-faksi OPM di bawah Seth Rumkorem (berasal dari Biak) dan Jacob Prai (dari Jayapura), dan faksi-faksi lainnya di luar negeri. Dari deskripsi pada bab 3 ini tentang Wajah Baru OPM dan juga Bab 4, tampak jelas betapa para tokoh nasionalis etnik Papua, sejak generasi pertama hingga saat ini (2001) masih terpecah-pecah ke dalam berbagai faksi, baik atas dasar asal daerah seperti Biak, Jayapura, Pegunungan Bintang, Merauke, daerah-daerah perbatasan dari Utara (Skow), Waris, Mindiptana, sampai ke Selatan (Sota), atas dasar ideologi, maupun atas dasar ketokohan mereka di luar negeri seperti di Senegal, Swedia, Papua Niugini, Vanuatu dan Australia.

Perpecahan dan persaingan di antara para tokoh OPM ini merupakan kelemahan utama dari OPM yang mendasari perjuangan gerilyanya atas dasar gerakan-gerakan sempalan yang sporadis. Namun dalam perbincangan saya dengan beberapa kelompok muda OPM di PNG saat melakukan penelitian di Port Moresby, Vanimo, dan Kiunga pada 1987, ada pula pandangan bahwa adanya faksi-faksi OPM merupakan kekuatan pula bagi OPM, karena militer Indonesia tidak akan mampu menumpas gerakan-gerakan mereka dengan hanya menumpas satu atau dua faksi saja. Dalam bahasa mereka, meminjam peribahasa Indonesia, "Esa Hilang, Dua Terbilang".

Jika kita mengamati gerakan-gerakan nasionalisme et-

nis Papua, pada awalnya sudah ada tokoh-tokoh intelektual Papua yang tidak ingin bersatu dengan Indonesia. Para tokoh ini kemudian menyeberang ke PNG atau ada pula yang ikut pergi ke negeri Belanda, dan bahkan ada yang ke Senegal. Selain tokoh intelektual, ada pula generasi pertama OPM yang dulu pro-Indonesia dan kemudian kecewa pada pemerintah Indonesia, baik karena kehilangan posisi yang telah didudukinya sebagai birokrat rendah, menengah dan tinggi pada masa kolonial Belanda, karena tidak naik pangkat di jajaran ABRI dan Polri, tidak mendapatkan insentif jabatan di Universitas Cendrawasih seperti persoalan perumahan dosen, maupun karena kecewa atas membubungnya harga-harga kebutuhan pokok pada periode transisi 1963-1969.

Bab 4 yang berjudul "Surga yang Hilang" menyoroti betapa daerah yang kaya raya ini belum memberikan kedamaian dan kemakmuran bagi penduduk beretnis Papua. Rakyat Papua bagaikan "Tak putus dirundung malang", diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pemerintah Indonesia. "Pendekatan keamanan" yang hanya memfokuskan aspek stabilitas telah banyak menyengsarakan rakyat dan menimbulkan trauma yang begitu mendalam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendekatan keamanan ini bertentangan dengan pendekatan "Keamanan Manusia" dalam konsepnya yang baru, yang memberi ruang gerak yang sangat besar bagi warga negara untuk hidup tenang, dapat berkreasi secara bebas, dapat mengembangkan budaya lokalnya di dalam kebhinekaan bangsa, dan berkehidupan agama yang bebas pula. Pendekatan keamanan yang

begitu ketat pada era Orde Baru menimbulkan kebencian dan terus membangkitkan perasaan ingin merdeka di kalangan etnis Papua. Apa yang terjadi pada masa lalu dan sekarang, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang amat berharga bagi pemerintah pusat, TNI dan Polri dalam mengatasi gerakan-gerakan pemerdekaan diri Papua.

Buku ini, meski tampak bias, juga memberikan deskripsi dan analisis bagaimana kita bisa memahami dan memilah-milah antara gerakan-gerakan OPM yang murni dan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan OPM tetapi hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok faksi-faksi OPM tertentu. Ia juga memberikan data yang amat berharga mengenai model-model gerakan sporadis OPM. Sebaliknya, kita juga dapat memilah-milah mana operasi-operasi militer yang benar-benar untuk menumpas OPM, dan mana operasi-operasi yang hanya menggunakan OPM sebagai objek bagi kenaikan pangkat, jabatan, latihan militer, atau bahkan tindakan-tindakan melanggar hukum militer dan hak-hak asasi manusia agar oknum-oknum militer itu dipindahkan dari "negeri yang lebih jauh dari bulan" ini. Kita jangan lupa, bahwa meskipun para anggota TNI, Polri atau pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja di bumi Indonesia ini, tetapi bagi sebagian dari aparat pemerintah itu, Irian Jaya dianggap sebagai daerah yang jauh dari keramaian dan sepi dari tempat-tempat hiburan, apalagi di daerah-daerah terpencil yang sulit komunikasi dan transportasinya, seperti di pedalaman, pegunungan Bintang, dan daerah-daerah perbatasan dengan PNG. Meski jalan lintas Irian sudah dibangun, namun jalan-jalan yang membelah

wilayah perbatasan dari Jayapura sampai Merauke itu masih banyak yang belum diaspal dan tanpa jembatan, bahkan ada yang belum bertemu satu ruas dengan ruas jalan lainnya. Kalau pun jalan itu sudah diaspal atau dikeraskan dengan batu-batu karang, di kala hujan dan malam hari amat gelap dan sepi. Khusus bagi kalangan militer dan polisi, musuh-musuh mereka bukan hanya OPM, tetapi juga nyamuk-nyamuk malaria yang jika terjangkit dapat menimbulkan kematian.

Bagian akhir buku Osborne ini, Bab 5 berjudul "Di Sisi Timur Perbatasan", mengulas persoalan perbatasan Indonesia — PNG. Periode 1984-1985 yang penuh dengan intrik, kritik dan caci maki antara pembuat kebijakan di dua negara, khususnya antar kalangan diplomat, merupakan hikmah tersembunyi bagi Indonesia dan PNG untuk membangun hubungan yang lebih kokoh antara kedua pemerintahan dan kalangan militer, lebih kokoh daripada hubungan Indonesia-Australia. Adanya pelintas batas yang berjumlah 10.000 orang dari Irian Jaya ke PNG, memberi dampak positif pula bagi perbaikan atau bahkan peningkatan hubungan kedua negara. Pada era itu masalah Perjanjian Perbatasan RI-PNG dibahas kembali. Selain itu, RI dan PNG atas bantuan Australia juga kembali membuat peta perbatasan kedua negara, membangun patok-patok baru perbatasan. Pada 1986, RI-PNG juga menandatangani Perjanjian untuk Saling Percaya, Persahabatan dan Kerja sama (*Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation*), dan di masa Perdana Menteri Paias Wingti berkuasa di PNG, kedua negara menandatangani *Status of Forces Agree-*

ment (SOFA) yang berisi antara lain dibolehkannya tentara Indonesia, dalam batas-batas tertentu, untuk melakukan *Hot Persuit* (pengejaran) terhadap OPM ke wilayah PNG dan boleh ditempatkannya Kopasus di Kedutaan Besar RI di Port Moresby untuk menjaga para diplomat dan gedung kedutaan.

Sejak dulu hingga kini, persoalan Irian Jaya bukan hanya persoalan antara Indonesia dan penduduk Papua, melainkan juga persoalan yang menyangkut internasional. Ia bukan hanya mengaitkan hubungan antar-masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah, tetapi juga antar-gereja. Meski banyak negara, termasuk PNG, Belanda, Australia dan Amerika Serikat tetap mendukung kedaulatan Indonesia atas Irian Jaya, namun belajar dari kasus Timor Timur, jika terjadi peristiwa seperti kasus Santa Cruz Desember 1991 (militer menembaki anak-anak muda tak berdosa di pekuburan Santa Cruz di Dili), maka bukan mustahil akan terjadi intervensi asing atas dasar "Humanitarian Intervention" untuk membantu kemerdekaan Papua.

Di akhir kata pengantar ini, saya ingin menyitir kata-kata dari tokoh elite Papua, Marcus Kaisiepo, yang mengatakan pada September 1945, "Sekarang adalah zaman kemerdekaan. Bangsa Papua dan bangsa Indonesia adalah saudara. Kita harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Bangsa Indonesia jangan memonopoli jabatan dan kekayaan. Jika persoalan-persoalan itu masih ada, maka persoalan antara bangsa Indonesia dan bangsa Papua masih akan tetap ada."•

Pengantar untuk Edisi Bahasa Indonesia

PADA tahun 1984-1985, saat saya menulis buku yang saya beri judul *"Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya"* (diterbitkan oleh Allen & Unwin, Sydney), pemerintah Republik Indonesia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Padahal, sementara situasi di Timor Timur tampaknya menjadi masalah utama selama masa rezim Orde Baru Soeharto yang telah memerintahkan aneksasi militer terhadap wilayah bekas koloni Portugis tersebut, pemerintahan Soeharto juga berhadapan dengan kelompok-kelompok dari beragam kondisi geografis, sosial, dan politik, yang berupaya memisahkan diri dari negara RI, atau paling tidak menuntut hak-hak asasi mereka lebih diperhatikan.

Timor Timur akhirnya menjadi negara merdeka (saat ini masih dibantu administrasinya oleh PBB) sebagai hasil sebuah referendum pertengahan tahun 1999, ketika itu wilayah ini masih jadi propinsi bagian dari negara Indonesia. Tidak mau menerima kalau orang-orang Timor Timur ter-

nyata memilih untuk berpisah dari Indonesia, pasukan TNI yang loyal pada Jendral Wiranto, dengan didukung oleh kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang dipersenjatai, menjalankan aksi bumi hangus di Timor Timur. Mereka membunuhi ratusan penduduk sipil dan menghancurkan ibu kota Dili, serta banyak kota lainnya. Sungguh sebuah musibah internasional. Tamparan keras bagi citra Indonesia, melengkapi terpuruknya kondisi ekonomi yang mulai terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Penghancuran Timor Timur merupakan sebuah aksi balas dendam. Sekaligus, seperti yang dituturkan oleh para petugas militer peninjau referendum, dirancang sebagai sebuah "peringatan" apa yang bakal terjadi di wilayah-wilayah seperti Papua Barat misalnya, jika mereka berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Bagaimanapun, yang paling terlihat oleh masyarakat Indonesia lainnya, juga seluruh dunia, adalah kebrutalan pasukan TNI yang terlatih. Suatu hal yang sebenarnya telah disadari oleh musuh-musuh rezim Soeharto, termasuk masyarakat Papua, sejak 1965.

Belakangan, tampak jelas tanda-tanda kalau kelompok-kelompok milisi sipil di Papua Barat, seperti halnya di Timor Timur, dipersenjatai, dilatih, dan didoktrinasi oleh elemen-elemen TNI, terutama mereka yang loyal pada Wiranto dan mantan Presiden Soeharto. Termasuk di antaranya adalah Satgas Merah Putih, yang didukung oleh sayap muda Golkar: Pemuda Pancasila (lewat wakil ketuanya yang orang Papua, Yorris Raweyai); serta Satgas Papua, kelompok beranggotakan sekitar 700 orang yang disusupi berbagai kelompok kepentingan. Ketegangan sipil pun tim-

bul di Papua, misalnya antara Satgas Merah Putih dengan para pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan kemerdekaan yang telah lama berdiri.

Wartawan Australia, Andrew Kilvert, yang beberapa kali mengunjungi Papua Barat tahun ini, menceritakan pada saya baru-baru ini: "Satgas Papua dibiarkan bertindak sesuka hati mereka oleh pihak yang berwenang. Polisi dan militer membiarkan pelanggaran hukum dan aturan. Banyak orang yakin ada agenda tersembunyi untuk membuat krisis baru seperti yang sekarang tengah terjadi di Maluku. Petugas militer dan kepolisian membiayai dan mensponsori milisi pro-Indonesia (Satgas Merah Putih) yang meskipun tertutup tapi sebenarnya organisasinya berkembang menjadi lebih besar."

Ia menambahkan bahwa pada akhir bulan Juli 2000, Laskar Jihad yang terlibat pertempuran di Maluku, terlihat melakukan latihan perang di Sorong, Papua Barat. "Menurut aktivis hak asasi manusia, John Rumbiak, tinggal menghitung hari sebelum pecah perang di Papua. Pihak militer akan berupaya semampu mereka untuk menciptakan konflik, bisa jadi ini bentuk pertentangan mereka dengan Presiden Gus Dur," kata Kilvert.

Dalam siaran pers Austalia (*Sydney Morning Herald*, 3 Juni 2000), Rumbiak yang memimpin lembaga ELSHAM di Papua, mengatakan "Kaum milisi dikondisikan untuk melakukan tindak kejahatan, agar militer punya alasan untuk melakukan penyerangan dan penghancuran perlawanan massa. Sungguh menakutkan. Sungguh berbahaya."

Selain di Papua Barat dan masalah Timor Timur, wila-

yah konflik sekarang ini terutama terjadi di Aceh, Kepulauan Maluku bagian Selatan, dan Kalimantan. Pada pertengahan Januari 2000, masyarakat dan para pelaku ekonomi Bali pun menuntut otonomi daerah lebih luas berdasarkan pada keistimewaan agama yang dianut di pulau itu serta status sebagai daerah tujuan wisata bagi para turis internasional. Lombok — yang biasanya tampak damai — tengah menghadapi ancaman kerusuhan yang serius, akibat peristiwa pembakaran gereja-gereja dan rumah-rumah para pemeluk agama Kristiani oleh kelompok-kelompok muslim, sehingga warga negara asing harus dievakuasi.

Sementara bermunculan perlawanan etnis yang terjadi dalam tiga dekade setelah 1965, pada saat rezim Soeharto berkuasa, terdapat konflik politik antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Meskipun didukung oleh pilar demokrasi dunia, khususnya Amerika Serikat, yang memandang pemerintahan Orde Baru sebagai anti komunis dan selanjutnya pro-Barat (baik secara strategis maupun komersial), rezim yang dipimpin Soeharto tidak pernah menjalankan pemilihan umum dalam arti yang sebenarnya. Rezim tersebut runtuh sesaat sebelum terlaksanakannya pemilu pertama yang demokratis di negara ini 34 tahun kemudian. Selama masa pemerintahannya, rezim Soeharto telah membatasi munculnya partai politik baru, termasuk penghapusan segala bentuk regionalisme, apalagi dalam bentuk pemisahan diri.

Tidak mengherankan jika ketiadaan ruang untuk mengorganisir diri secara politis ini telah secara "tidak langsung" membakar semangat aktivitas anti-pemerintah, keinginan

untuk merdeka khususnya pada daerah-daerah seperti Timor Timur, Papua Barat, Aceh dan Maluku. Gerilyawan bersenjata melakukan perlawanan di dalam negeri sementara para pelobi vokal yang berada di luar negeri tetap melakukan perlawanan terhadap agenda-agenda pemerintah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan militer (sekarang menjadi TNI, sebelumnya disebut ABRI) dan kekuatan keamanan lain, baik melalui media internasional maupun melalui lembaga-lembaga dunia termasuk PBB.

Dalam konteks ini, perlawanan-perlawanan tersebut sebenarnya tidaklah dapat dikatakan "rahasia" — tentu saja hal ini tidak berlaku untuk kaum protagonis. Bagaimanapun liputan media massa umumnya jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia, hal ini disebabkan oleh ketatnya kontrol rezim terhadap peliputan, intimidasi terhadap para wartawan, dan pencabutan izin terbit. Media asing, khususnya Australia, tetangga terdekat Indonesia, juga tak terkecuali, meskipun ada beberapa wartawannya berhasil meliput mengenai Indonesia dengan cerdas — *The Sydney Morning Herald* patut dipuji dalam hal ini. Walaupun demikian, banyak organisasi yang menunjukkan apatisme, ketidakpedulian atau bahkan bias — hal ini tampaknya dipicu oleh kepentingan diplomatik Australia — terhadap peristiswa yang berkembang di negara terbesar kelima di dunia ini. Tetapi ada kalanya media internasional tidak bisa tidak ambil peduli, salah satu contoh adalah peristiwa penembakan terhadap lebih dari 100 warga Timor Timur di pemakaman Santa Cruz, Dilli oleh ABRI pada tahun 1991. Bagaimanapun, dibutuhkan waktu yang sangat lama agar dunia luar bisa benar-benar

memahami kejadian-kejadian yang merupakan tonggak sejarah perjalanan penuh luka masyarakat Timor Timur menuju kemerdekaan.

Jika dibandingkan dengan situasi di Timor Timur, yang penggabungan dirinya ke Indonesia tidak pernah diakui oleh PBB, peristiwa di Papua Barat kurang menjadi perhatian dunia. Saya sendiri baru benar-benar menyadari kondisi ini pada saat meninggalkan Australia pada tahun 1981 untuk bekerja pada kantor Perdana Menteri Papua Nugini, Sir Julius Chan.

Papua Nugini meraih kemerdekaannya pada tahun 1975, hanya selisih tiga bulan sebelum invasi Indonesia ke Timor Timur. Terdapat keprihatinan yang mendalam pada level atas pemerintah Papua Nugini terhadap situasi di Timor Timur, tetapi karena adanya tekanan dari Canberra — dana bantuan dari Australia mencapai sepertiga dari seluruh anggaran pendapatan negara Papua Nugini — maka perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat tidak pernah diungkapkan.

Bahkan ketika kejadian dramatis terjadi di Papua Nugini yang tampaknya disebabkan oleh ABRI — misalnya ketika terjadi eksodus ribuan pengungsi dari Papua Barat ke Papua Nugini pada tahun 1982-1983 — tidak ada protes resmi dari pemerintah. Lebih jauh lagi, liputan media selain dari Australia sangat sedikit. Dalam kurun waktu lima belas tahun sejak buku ini pertama kali diterbitkan, pemberitaan media massa terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penggabungan Papua Barat ke Indonesia pada tahun 1969 sangatlah sedikit, khususnya terhadap peran PBB

dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) maupun mengenai konflik berkelanjutan antara ABRI dan gerakan pembebasan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan para pendukungnya baik di daerah maupun di perkotaan.

Pemerintah Indonesia telah secara kontinu menegaskan bahwa OPM adalah gerombolan teroris, yang beroperasi sebagai gerakan pengacau liar (GPL) yang jumlahnya tidak seberapa dan hanya didukung oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pernyataan serupa juga ditujukan terhadap gerakan Fretilin di Timor Timur, atau tentang AGAM di Aceh

Informasi yang berhasil diselundupkan ke dunia luar dan lalu lintas berita antara badan intelijen Indonesia, Australia dan kepada sejumlah kalangan di PNG, menceritakan kisah yang berbeda-beda. Dari tulisan tangan dan berita radio yang dikirim oleh para gerilyawan di hutan kepada para pendukungnya di daerah perkotaan Papua Barat, dan selanjutnya kepada dunia luas, didapat cerita lengkap mengenai pertempuran mereka dengan tentara Indonesia: Pemusnahan menggunakan pesawat-pesawat sumbangan AS oleh komando yang dilatih Australia; Penyiksaan dalam penjara polisi dan militer yang diingkari — dan pengingkaran ini diumumkan ke seluruh Indonesia — oleh pejabat berwenang.

Salah satu korban yang pernah tercatat adalah Thomas Wanggai, seorang pemimpin gerakan kemerdekaan yang pada tahun 1988 dijatuhi hukuman 25 tahun karena telah mengibarkan bendera "Bintang Kejora" di stadion Jayapura. Ia kemudian meninggal pada tahun 1996 di penjara,

diduga kuat dibunuh oleh tentara Indonesia.

Konfirmasi mengenai kondisi ini berasal dari dokumen resmi, yang beberapa di antaranya sampai ke tangan OPM atau media massa di Indonesia (yang tidak bisa menerbitkannya) atau ke wartawan asing, lembaga-lembaga bantuan serta para pekerja gereja dan akademisi. Hasilnya, saya jadi benar-benar tahu, setelah melakukan perjalanan secara luas di wilayah propinsi Papua Barat, bahwa perang Indonesia melawan pejuang gerakan kemerdekaan Papua Barat adalah "rahasia" yang sebenarnya.

Saya bukanlah satu-satunya peneliti yang menyimpulkan bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka di bawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional. Dalam Kongres Nasional Papua selama seminggu penuh pada awal Ju-ni 2000, sebuah rangkaian pertemuan yang diikuti oleh 3.000-an orang, diputuskan untuk mempertanyakan kembali isu ini pada PBB.

Menurut moderator kongres, Franzalbert Joku, yang kembali dari pengasingannya di Papua Nugini untuk menghadiri pertemuan ini, "Penentuan Pendapat Rakyat diselenggarakan di bawah ancaman intimidasi, pembunuhan sadis, represi militer, dan aksi-aksi amoral lainnya." (*SM Herald*, 5 Juni 2000)

Bahkan bukan hanya saya saja yang menyatakan bah-

wa sumber daya alam yang tak terbatas seperti emas, tembaga dan timah, yang ada di tanah penduduk asli tersebut dan secara adat merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, telah disalahgunakan untuk kepentingan pihak luar, termasuk di antaranya adalah perusahaan asing McMoran yang melalui PT Freeport Indonesia-nya telah menjalankan proyek penggalian tambang besar-besaran di Papua Barat; serta kepentingan keluarga Soeharto berserta kroninya, baik militer maupun sipil.

Sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Papua Barat, yang berhak khawatir akan menjadi minoritas di negeri sendiri, propinsi tersebut malah menjadi target utama program transmigrasi yang bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, dengan cara memindahkan sejumlah besar penduduk ke luar pulau. Proyek tersebut cukup lama didukung oleh *World Bank*; tetapi semenjak Wold Bank mundur, program transmigrasi ke Irian Jaya mempunyai tujuan lain. Tujuannya tidak lain, untuk menempatkan penduduk Indonesia yang dianggap "loyal" ke daerah di mana gerakan OPM disinyalir masih aktif. Sebagian besar "sukarelawan" ini khususnya yang menempati sekitar perbatasan dengan Papua Nugini, mendapat pengamanan permanen melalui keberadaan militer di sana, yang dapat diperbantukan untuk menghadapi OPM dalam seketika.

Akibat kombinasi kepentingan-kepentingan tersebutlah, pendudukan Indonesia atas Papua Barat yang kemudian dijadikan sebagai propinsi dengan nama Irian Jaya (sekarang Papua) menjadi semakin tidak populer di kalang-

an masyarakat adat, dibanding ketika wilayah ini masih diduduki oleh Belanda.

Keseluruhan isi buku ini selesai dan dipublikasikan pertama kali tahun 1985. Berdasarkan penerimaan orang terhadap buku ini, tema yang diangkat tampaknya cukup menarik bagi orang di luar Indonesia. Sebanyak dua edisi telah dicetak ulang dan dijual; sampai saat ini saya masih sering menerima permintaan dari kalangan peneliti yang berminat untuk membeli salinannya, atau sekadar ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari penulis. Tentu saja sekarang ini diperlukan buku baru yang kontemporer.

Sejak saat itu sejumlah kejadian penting telah terjadi di Papua Barat. Para pemimpin perlawanan telah ditangkap, dipenjara dan bahkan dibunuh. Bahkan setelah Kongres Nasional Papua bulan Juni, lima pemimpin masyarakat ditangkap polisi untuk ditanyai hal-hal tentang Kongres dan Kongres Pembuka tanggal 23-26 Februari. Pihak berwenang menyatakan bahwa Presiden Gus Dur (yang turut membantu sejumlah dana untuk pelaksanaan) menganggap kongres tidaktidak sah karena "gagal mewakili seluruh unsur masyarakat di Papua". Mereka yang ditangkap adalah Agustinus Alua, Herman Awom, Thaha Al-Hamid, Don Al Flassy, dan John Mambor.

Protes masyarakat, yang disertai dengan adanya pengerekan bendera Papua Barat, ditanggapi dengan kekerasan oleh ABRI (sekarang TNI). Di Biak, pada bulan Juli 1998, penduduk sipil Papua Barat diserang oleh tentara dengan korban yang meninggal berjumlah 26 orang — beberapa informasi bahkan menyatakan lebih dari 100 orang.

Jenasah mereka belakangan ditemukan mengambang di laut, tampaknya mereka dibuang dari sebuah kapal atas perintah militer. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah korban dari gelombang Tsunami yang baru saja melanda pantai utara negara tetangga, Papua Nugini. Insiden ini merupakan kejadian penting yang, secara historis, sebanding dengan peristiwa pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur.

Dua bulan sebelum kejadian tersebut, tiga gereja Kristen membuat laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Bela, Alama, Jila, dan Mapduma, daerah dataran tinggi dekat pertambangan Freeport. Laporan yang dinamai "Laporan 3 Gereja" tersebut disertai dengan foto-foto kejadian beserta detail peristiwa yang terjadi antara akhir tahun 1996 sampai dengan Oktober 1997, setelah peristiwa Mei 1996 di mana ABRI membebaskan para sandera, sebagian besar peneliti asing dari World Wildlife Fund, yang ditawan di daerah pegunungan Papua Barat oleh OPM.

Peristiwa lain yang cukup signifikan adalah disusunnya Dialog Nasional Mengenai Masa Depan Papua Barat oleh berbagai kalangan yang menamakan diri Forum untuk Rekonsiliasi Irian Jaya (FORERI), yang melibatkan organisasi non-pemerintah, kalangan gereja, mahasiswa dan kelompok perempuan. Hasil pertemuan itu selanjutnya dipresentasikan di depan presiden (saat itu) Habibie beserta para menteri, pada tanggal 26 Februari 1999. Tanggapan dari pemerintah tidak memuaskan: pada akhir bulan Juli pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan mengenai pembagian Pa-

pua Barat menjadi 3 propinsi (Barat, Tengah, dan Timur) yang ditindaklanjuti dengan pelantikan para gubernurnya pada tanggal 12 Oktober.

Tindakan administratif ini tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 1999, Presiden Gus Dur mengunjungi propinsi paling timur ini dan mengumumkan mengganti nama Irian Jaya menjadi "Papua" (bukan Papua Barat) dan ibu kotanya, Jayapura, kembali diberi nama Port Numbay. Pada bulan Agustus 2000 ia juga berencana mengumumkan pemberian status otonomi khusus bagi Papua (dan Aceh) sebelum berakhirnya tahun 2000. Langkah ini tidak berkenan di hati wakil presiden Megawati, yang ayahnya, mantan presiden Soekarno, memimpin kampanye "pembebasan" Irian Barat dari kekuasaan kolonial Belanda.

Yang juga penting untuk dicatat adalah munculnya para pemimpin nasionalis Papua Barat berbasis perkotaan, seperti Theys Eluay yang berasal dari Sentani-Jayapura dan menyebut dirinya sebagai "Pemimpin Besar Papua Barat", Phil Erari, Tom Beanal, kepala Dewan Adat Amungme yang sangat berperan dalam *class action* yang berhasil mengajukan Freeport ke pengadilan Amerika Serikat, Willy Mandowen, Benny Giai, Herman Awom, Octavianus Motte, Don Flassy, bahkan Yorrys Raweyai, mantan anggota kelompok pemuda yang pro-Soeharto, yang menurut kalangan media terlibat dalam provokasi kerusuhan Ambon pertengahan Januari 2000.

Kongres Nasional Papua mengangkat Theys Eluay sebagai Ketua Presidium Rakyat Papua, dan Tom Beanal sebagai wakilnya. Para wakil terpilih dari 14 daerah di Papua

Barat, termasuk juga dari perwakilan internasional. Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Republik Vanuatu di Pasifik, mendesakkan untuk memasukkan isu kemerdekaan Papua Barat dalam agenda PBB, sekaligus mencari dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya. Ia juga menawarkan pembentukan kantor perwakilan Papua Barat di negaranya. Sekadar catatan, Timor Timur juga segera membuka kantor perwakilannya di sana.

Sejak kejatuhan Soeharto, secara garis besar banyak perubahan monumental yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di Indonesia. Adanya krisis moneter dan protes-protes masyarakat yang akhirnya menjatuhkan penggantinya, B.J. Habibie, diikuti oleh peristiwa-peristiwa lain yang mendiskreditkan rezim Orde Baru.

Pemilihan umum yang demokratis pada pertengahan Mei 1999 diikuti negosiasi pembagian kekuasaan akhirnya menghasilkan terpilihnya presiden baru, yang dihormati oleh kalangan luas yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selama masa transisi dari Habibie ke Gus Dur, Timor Timur meraih kemerdekaannya — setelah berbagai berita mengenai penyerangan TNI dan milisi terhadap warga sipil yang mengejutkan dunia. Di tempat lain di Republik ini juga terjadi konflik besar-besaran seperti di Aceh dan Maluku, khususnya di Ambon, yang merenggut tidak sedikit korban nyawa dan harta benda. Sebagaimana pernah terjadi pada saat pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto, dan kemudian di bawah Habibie, banyak kritikan pedas ditujukan pada aksi TNI dan orang terkuat di tubuh organisasi tersebut yaitu Jenderal Wiranto, yang ditunjuk sebagai

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan oleh presiden Gus Dur.

Dari berbagai penjuru muncul tudingan bahwa TNI adalah biang keladi dari begitu banyak aksi kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di luar pulau Jawa tersebut. Tujuannya adalah sebagai pembenaran bahwa kekuatan mereka dibutuhkan dan kewenangan perlu diperluas untuk menjaga ketertiban umum.

Jelasnya, Papua Barat menjadi wilayah yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat di Jakarta. Masa depannya juga menjadi perhatian utama rakyat Papua sendiri. Menurut berbagai sumber, Pemimpin Besar Theys menyatakan kepada presiden bahwa penduduk setempat menginginkan pembentukan Papua baru, "sebagaimana A berkeinginan untuk membentuk Indonesia baru". Sebagai balasan, Gus Dur menyatakan: "Jika A ingin membentuk negara dalam negara, akan terjadi konfrontasi, dan saya akan menentangnya dengan seluruh kewenangan yang saya punyai."

Tapi bangsa Papua *toh* tak perlu mengalami kekerasan seperti yang dialami Timor Timur. Dalam ungkapan mantan politisi Golkar, Louis Kembuaya, "Kami bangsa Papua adalah bangsa yang merdeka, yang penting sekarang bagaimana kita melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, memanfaatkan sebaik mungkin kebersamaan dalam bahasa dan sejarah. Kami menghargai kewirausahaan Indonesia, dan sebaliknya masih banyak yang bisa mereka pelajari dari kami, jika saja kita bisa bekerja sama menuju masa depan. Sangat tidak perlu mengulang (yang terjadi pada) Timor

Timur di sini." (Perbincangan dengan wartawan Andrew Kilvert, Juni 2000)

Dari berbagai skenario yang mengarah pada pelepasan kendali Indonesia atas Papua Barat, paling tidak bisa dilihat dari yang disimbolkan oleh alternatif bendera nasional, yang berlambang Sampari, Bintang Kejora.

Tersebar kepercayaan di antara masyarakat luas bahwa menaikkan bendera tersebut dapat mengundang kekuatan supranatural yang diikuti merasuknya roh dalam figur Manseren, dewa yang banyak dipuja dalam mitologi masyarakat Papua.

Sampai sejauh ini, akibat dari aksi pengibaran bendera tersebut adalah penganiayaan bagi para pengikutnya, mulai dari mereka yang mengibarkan bendera sebagai perlawanan terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan banyak insiden yang terjadi akhir-akhir ini.

Wartawan Kilvert menggambarkan sebuah contoh. "Satgas Papua pun turun ke jalan-jalan di seluruh penjuru propinsi ini mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sebelumnya dilarang. Di Jayapura, aksi berlangsung damai. Di tempat lain, belum tentu. Nyatanya, pada 2 Desember (1999) di sebelah selatan kota tambang Timika, pusat pertambangan emas dan batubara Freeport, 55 orang ditembak oleh pasukan Brimob Jayapura".

Kilvert, yang berada di lokasi saat itu, menambahkan: "Hanya satu yang tewas seketika, tapi banyak sekali yang menderita cacat permanen. Menurut Kepala Polisi lokal, para demonstran tiba-tiba ketakutan melihat pihak berwenang, lalu terluka akibat menginjak kayu terbakar ketika

mereka melarikan diri."

Peristiwa serupa terjadi ketika pihak berwajib berusaha menurunkan bendera di bagian utara kota Nabire. Menurut Kilvert, bendera masih tetap berkibar sampai pertengahan tahun 2000. Sementara jasad tiga orang yang terbunuh saat mempertahankannya dikuburkan di bawah tiang bendera. "Mereka dihargai penduduk lokal sebagai martir, pahlawan," ungkapnya.

Ia mengamati, betapa "Bintang Kejora, yang sebelumnya dilarang, berkibar kokoh di seluruh pelosok propinsi. Saat ini bendera tersebut bahkan dikibarkan dari balkon Hamadi Jayapura, dan disematkan pada topi dan pakaian. Serta diproduksi dalam bentuk poster dan kartu."

Dalam waktu singkat, "jin" nasionalisme Papua Barat telah "keluar dari lampu ajaib"-nya. Dan tidaklah berlebihan untuk menyimpulkan bahwa "ia" tak akan mau masuk kembali.

Pertanyaan yang relevan adalah "kapankah" Papua dapat meraih kemerdekaannya? Meskipun jawabannya masih belum pasti, tapi kemajuan yang ada cukup pesat sejak saya mulai mempelajari perlawanan yang tragis namun mengagumkan ini, dua puluh tahun yang lalu.•

Robin Osborne

Lismore, NSW, Australia — Agustus 2000

Daftar Isi

Halaman Persembahan — *v*
Ucapan Terima Kasih — *vii*
Pengantar Penerbit — *ix*
Pengantar *Ikrar Nusa Bhakti* — *xiii*
Pengantar untuk Edisi Bahasa Indonesia — *xxiii*
Daftar Singkatan — *xli*
Daftar Istilah — *xlv*

1. **Dari Sabang Sampai Merauke** — *1*

2. **Dari Sorong Sampai ke Numbay** — *87*

3. **Wajah Baru OPM** — *161*

4. **Surga yang Hilang** — *241*
   — Kebijakan Ekonomi dan Administratif — *245*
   — Kebijakan Sosio-Kultural — *290*
   — Hukum dan Pemerintahan — *298*

5. Di Sisi Timur Perbatasan — *333*

Penutup — *405*
Catatan Kaki — *411*
Daftar Pustaka — *420*
Indeks — *425*
Daftar Foto — *431*
Profil Penulis — *448*
Profil ELSAM— *449*

Daftar Singkatan

AAP	:	Australian Associated Press Newsagency (Kantor Berita Australia)
ABC	:	Australian Broadcast Corporation (Badan Siaran Radio Australia)
ACFOA	:	Australian Council for Overseas Aid (Lembaga Australia untuk Bantuan Dana Luar Negeri)
AMA	:	Associated Mission Aviation. Asosiasi Penerbangan Milik Misionaris Katolik
CDC	:	Commonwealth Development Corporation Lembaga Bantuan yang Dibiayai Inggris
CSIS	:	Centre for Strategic and International Studies — Jakarta (Pusat Studi Strategi dan Studi Internasional)

GKI	:	Gereja Kristen Injili Gereja evangelis (Protestan) di Indonesia
GPL	:	Gerakan Pengacau Liar Julukan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap gerakan OPM
ICJ	:	International Commission of Jurits (Komisi Internasional Para Ahli Hukum)
IGGI	:	Inter-Governmental Group on Indonesia (Konsorsium negara-negara donor untuk Indonesia). Melibatkan enam negara, termasuk Australia dan tiga institusi.
JIO	:	Australian Joint Intelligence Organisation (Organisasi kerja sama badan intelijen Australia)
KOPASSANDHA	:	Komando Pasukan Sandi Yudha Unit komando baret merah Indonesia, pasukan tempur.
KOPKAMTIB	:	Komando Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban. Salah satu badan intelijen militer Indonesia.
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum, berkantor pusat di Jakarta dan bekerja menangani kasus-kasus hak asasi manu-

sia.

MAF : Missionary Aviation Fellowship (Badan penerbangan milik kaum protestan)

NAACP : National Association for the Advancement of Colored People (US). (Asosiasi untuk kemajuan kulit berwarna — Amerika Serikat)

NIO : National Intelligence Organisation of Papua New Guinea (Badan Intelijen Nasional Papua Nugini)

OAU : Organisation for African Unity (Organisasi untuk kesatuan Afrika)

OPM : Organisasi Papua Merdeka (gerakan kemerdekaan Papua). Pemerintahan *de facto* dibentuk oleh kelompok Pemka, Pemerintahan revolusioner sementara dibentuk oleh kelompok Victoria.

PAPENAL : Pasukan Pembebasan Nasional. Sayap militer dari faksi Pemka. Juga disebut sebagai TEPENAL

PEMKA : Pemulihan Keadilan. Salah satu kelompok utama OPM.

PKI : Partai Komunis Indonesia, sesudah 1965 dinyatakan terlarang.

PNG : Papua New Guinea (Papua Nugini)

PPP : Peoples Progress Party of Papua New

		Guinea, yang dipimpin oleh Sir Julius Chan.
RAAF	:	Royal Australian Air Force, sebuah badan penerbangan di Australia.
TAPOL	:	Akronim untuk para tahanan politik di Indonesia. Juga digunakan sebagai nama organisasi yang berbasis di London (Inggris) yang mengkampanyekan masalah hak asasi manusia di Indonesia.
TPN	:	Tentara Pembebasan Nasional, sayap militer dari faksi Victoria.
UNCEN	:	Universitas Cendrawasih, terletak di Abepura, dekat Jayapura.
UNGA	:	United Nations General Assembly (Majelis Umum PBB)
UNHCR	:	United Nations High Commissioner for Refugees (Komisi tinggi PBB untuk urusan pengungsi)
UPI	:	United Press International (Kantor berita Amerika Serikat)
WCIP	:	World Council of Indigenous People (Dewan masyarakat adat dunia).•

Daftar Istilah

Baliem (Balim)	:	Lembah di dataran tinggi Irian Barat
Biak	:	Pulau yang terletak di pantai utara Papua Barat, termasuk pulau di dekatnya, yaitu Numfor.
Bronco	:	pesawat jenis OV-10 yang disuplai ke Indonesia dan negara-negara lain, untuk mengatasi pemberontakan.
Hollandia	:	Nama yang diberikan Belanda untuk ibu kota Papua Barat. Setelah masuk wilayah Indonesia disebut Jayapura (sekarang Port Numbay).
Irian Jaya	:	Irian: akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands, sebuah slogan kampanye untuk merebut Papua Barat. Bisa juga dari kata Iryan — tanah beruap yang muncul dari dalam laut (bahasa Biak). Jaya: kejayaan/kemenangan (bahasa Indo-

nesia).

Kiap : Petugas patroli di PNG, khususnya sewaktu masih di bawah Australia.

Konor : Pemimpin gerakan kemerdekaan berbasis agama yang berpusat di Biak.

Koreri : Gerakan kaum religius masehi, yang menjanjikan kebebasan bagi para penganutnya setelah datangnya sang Penyelamat.

Ndani (Dani) : Julukan untuk semua penghuni wilayah lembah Baliem. Padahal sebetulnya nama salah satu suku saja.

Numbay : Julukan orang Papua untuk Jayapura, ibu kota Irian Jaya, kadang disebut Port Numbay.

Pangu Pati : Pimpinan partai politik di PNG. "Papua New Guinea Union.

Pepera : Penentuan Pendapat Rakyat. Akronim Indonesia untuk pemilihan bebas di Irian Jaya pada tahun 1969.

Repelita : Rencana Pembangunan Lima Tahun. Rencana program pembangunan berjangka lima tahunan yang dicanangkan pada tahun 1969.

Transmigrasi : Program pemindahan penduduk oleh pemerintah Indonesia, tujuannya untuk menekan angka kepadatan penduduk di pulau Jawa, dan meluas ke Bali, dengan memindahkan sejum-

lah besar petani ke luar pulau tersebut.

Victoria : Faksi OPM yang didirikan oleh Seth Rumkorem. Dari kata "for victory" (demi kemenangan).•

1.
Dari Sabang Sampai Merauke

SEKITAR 50.000 tahun lalu, di akhir zaman es, pendatang dari Asia daratan mulai berdatangan ke tempat yang sekarang kita kenal sebagai Nugini (New Guinea). Pendatang pertama mendarat secara tak sengaja di tempat tersebut, dan segera sesudahnya disusul pendatang-pendatang baru. Ada tiga ras utama dari para pendatang tersebut, yaitu Negrito, Papua, dan Melanesia.

Saat ini, istilah "Melanesia" digunakan untuk menggambarkan anak cucu dari para pendatang tersebut. Sebutan yang sama juga berlaku bagi para pendatang yang telah menetap di Pasifik Selatan. Melanesia adalah penduduk mayoritas Vanuatu dan kepulauan Solomon; penduduk asli yang minoritas di "Kanaky", bagian Kaledonia Baru yang jadi jajahan Prancis; dan di Fiji yang komunitas mereka jumlahnya sama dengan para imigran India. Australia juga mempunyai kelompok masyarakat Melanesia, yang terdiri

dari dua kelompok utama. Yang pertama adalah orang-orang *Torres Strait*, mereka berasal dari wilayah dataran Australia dan Nugini ketika masih bersatu. Kelompok kedua adalah orang-orang Melanesia yang dibawa dari kepulauan Pasifik untuk bekerja pada perkebunan tebu di *Queensland*.[1]

Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu mela, artinya "hitam" yang diciptakan oleh seorang navigator Prancis, Dumont d'Urville pada tahun 1832. Istilah tersebut dipakai oleh para penjelajah Eropa untuk menjuluki Nugini sebagai batas barat dari "kepulauan orang-orang kulit berwarna" yang membentuk gugusan kepulauan Melanesia. Sekarang ini bahkan masih ada pendatang asing, yang sebetulnya paham betul mengenai kondisi ini, menerima generalisasi ini sebagai sebuah bentuk penyederhanaan. Sesudah beberapa hari di Nugini, baik di bagian Timur atau Barat, kebanyakan mereka dapat melihat banyaknya perbedaan di antara penduduk wilayah tersebut, warna kulit mungkin hanya ada satu di antaranya. Yang unik dari penduduk Melanesia Pasifik adalah dengan populasi hanya 0.1 persen dari populasi penduduk dunia, tapi kekayaan bahasa mereka sekitar 25 persen dari seluruh bahasa yang ada di dunia.

Ketika timbul perdebatan tentang istilah tersebut yang dianggap kurang ilmiah, para antropolog justru menyatakan bahwa istilah "ras Melanesia" dapat dikatakan valid karena berbagai macam kemiripan karakteristik masyarakatnya. Beberapa dari kriteria tersebut, seperti komposisi kotoran telinga mereka, mungkin kedengaran aneh bagi orang awam.

Istilah "orang-orang Papua" juga digunakan untuk menggambarkan orang-orang Nugini. Kata tersebut juga berasal

dari bahasa asing, dan kemungkinan besar tidak berasal dari bahasa Melayu sebagaimana sering dikatakan selama ini. Bisa jadi kata tersebut berasal dari bahasa Maluku yang bermakna "tidak berbapak", yang menggambarkan bahwa penduduk Nugini tidak mempunyai pemimpin yang kuat, yang bisa melindungi mereka dari perbudakan.

Orang-orang Papua sendiri tidak begitu mempermasalahkan kemiripan rasial tersebut, tapi perhatian mereka lebih kepada banyaknya perbedaan yang ada pada setiap suku. Perbedaan yang paling menonjol, di antara tiga gelombang kelompok imigran tersebut, terdapat ribuan subkebudayaan yang berbeda-beda. Pengelompokan lebih banyak berdasarkan bahasa yang mereka gunakan, yang disebut *phylae*. Sering kali pengelompokan ini membentuk semacam konfederasi politis yang relatif cair. Bagaimanapun, perbedaan dialek sangatlah banyak. Dalam masyarakat Papua Nugini (PNG) yang populasinya berjumlah 3.5 juta orang terdapat lebih dari 600 bahasa yang sangat sukar dipahami. Di tahun 1963, pada saat Belanda menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, dari keseluruhan populasi yang diperkirakan berjumlah 700.000 orang, tercatat lebih dari 200 bahasa yang dipakai 500.000 orang. (sekarang ini populasi orang Melanesia di Irian Jaya diperkirakan sekitar satu juta orang, 80 persen di antaranya tinggal di pedalaman).

Setelah satu abad di Nugini, para imigran menyebar ke pedalaman maupun pantai pulau tersebut. Mereka berkelompok sesuai dengan kondisi ekologis, seperti sumber makanan, atau berdasarkan kriteria sosial seperti ikatan

perkawinan. Beberapa komunitas beranggotakan sampai ratusan orang, menjadikan mereka termasuk yang terbesar di antara "negara-negara mini" tersebut. Kebanyakan kelompok-kelompok itu hanya beranggotakan 50-an orang. Di luar masalah jumlah tersebut, setiap suku memandang orang yang berbeda kultur dan bahasanya sebagai orang asing, meskipun tempat tinggal mereka berada di lembah yang sama atau pulau yang berdekatan. Ada banyak alasan yang menyebabkan mereka bergabung untuk bekerja sama atau sebaliknya, bermusuhan. Termasuk di antaranya harta kekayaan mereka seperti ternak dan barang-barang yang dapat diperdagangkan, serta hukum adat dan masalah tabu. Tetapi kunci hubungan antara mereka adalah perilaku para suku terhadap — pada saat itu — tanah tradisional mereka. Bagi mereka, tanah berperan dalam memperkuat ikatan mereka dengan segala hal yang berada di permukaan bumi, karena:

> Tanah selain untuk bercocok tanam, tempat tinggal, dan melaksanakan upacara adat, serta non-pertanian seperti lahan berburu dan sumber pangan lainnya, juga jangan dilupakan fungsi tanah sebagai: pematang, jalanan, lokasi strategis perdagangan dan pertahanan, sumber air, tambang galian, sumber garam dan kandungan tanah liat dan batu berharga; lepas pantai, lereng karang, tempat burung bersarang, tempat tumbuh semua jenis pohon yang bisa diperdagangkan — kelapa, sagu, pinang, kacang jawa/tanah, pandan, sukun, dan sebagainya; dan juga keistimewaan alam seperti gua, batu-batuan yang ada di permukaan bumi, serta semak belukar ... bisa menjadi unsur penting bagi sejumlah kelompok sosial dengan alasan hubungan mitologis di antara mereka.[2]

Setelah ribuan tahun, mereka menciptakan hubungan dekat

dengan tanah yang akhirnya menjadi milik mereka, dan begitu pula sebaliknya. Simbiosis semacam ini terlihat jelas dari perbedaan sikap yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat lain yang sangat berbeda dengan mereka, khususnya masyarakat Anglo-Amerika. Dalam masyarakat non-Aborijin di Australia, misalnya, kepemilikan tanah berarti mempunyai bermacam-macam hak atas tanah tersebut; seperti hak untuk mengusir orang lain dari tanah tersebut, hak untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain yang menginginkannya, dan hak untuk mendapatkan pemasukan dari orang lain yang menggunakan tanah tersebut. Adat serupa berlaku pula di Jawa, Indonesia. Sebaliknya, masyarakat tradisional Nugini selain menerapkan hak untuk melarang orang lain menginjak tanah mereka, tetapi juga mempunyai pandangan yang berbeda terhadap dua hal yang lainnya:

> Sangatlah jarang ditemukan, seseorang atas kehendak sendiri, dapat mengalihkan hak atas tanah yang merupakan milik bersama atau kelompok. Dalam beberapa kasus, mereka lebih memilih cara untuk memindahkan diri mereka sendiri ketimbang tanah mereka — yaitu bergabung dengan kelompok sanak famili lain yang mempunyai tanah yang mereka inginkan. Dengan cara ini orang bisa mendapatkan hak terhadap tanah baru dan melepas atau mencabut hak-hak mereka terhadap tanah dari kelompok sebelumnya. Hasilnya, hak untuk mendapatkan pendapatan sendiri jelas tidak pernah ada; Tidak ada kelas pemilik tanah dalam kelompok masyarakat yang belum berhubungan dengan dunia luar tersebut. Kadang kala hadiah atau pembayaran dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai penghargaan yang sifatnya sementara, tetapi walaupun terhitung sebagai sebuah pendapatan, pembayaran

semacam itu, dalam terminologi ekonomi, tidak ada artinya.[3]

Ketika hak atas tanah sebuah suku dilanggar oleh orang luar, maka terjadilah "diplomasi internasional". Berlawanan dengan pandangan orang luar tentang orang-orang Nugini, perang bukanlah pilihan utama bagi mereka. Suku yang dirugikan akan menuntut kompensasi atas pelecehan terhadap hak-hak mereka, atau atas kerusakan harta benda mereka, dalam bentuk komoditas seperti hewan atau barang yang diperdagangkan seperti manik-manik. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok yang mempunyai potensi permusuhan mencoba berdamai melalui hubungan perkawinan antara mereka. Suku-suku Nugini merupakan kelompok masyarakat yang sejak dulu menerapkan falsafah lebih baik "angkat bicara" ketimbang "angkat senjata".

Tetapi bagaimanapun perselisihan tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Perseteruan antarsuku atau bahkan perang besar-besaran, semakin berkembang dan diperburuk oleh gagasan bahwa musuh mereka harus membayar seperti apa yang telah dilakukan terhadap suku mereka. Tetapi jumlah korban dalam kasus seperti ini relatif sedikit. Akibat dari usaha pembalasan tersebut, biasanya beberapa orang tewas atau sejumlah orang terluka serius. Mempertahankan harga diri suku merupakan hal yang tak kalah penting daripada mempertahankan wilayah, bahkan mungkin menjadi hal yang lebih penting karena keinginan untuk menguasai tanah sangat jarang menjadi tujuan mereka.

Salah satu kisah dari suku tersebut didokumentasikan dalam film *Dead Birds* yang dibuat tim dari Harvard Uni-

versity's Peabody Museum, mengenai akhir penjajahan Belanda di Nugini bagian barat. Pada saat para peneliti tersebut tiba di lembah Balim, suku-suku dari orang Ndani sedang terjebak dalam perang antar-kelompok yang berkepanjangan. Penduduk desa Ndani membangun sebuah menara pengintai yang tinggi agar mereka dapat melihat setiap musuh yang mendekat. Sebelum perang meletus, terlebih dahulu diatur sebuah wilayah netral diantara para suku tersebut, di tempat itulah perang dilakukan. Peperangan dapat ditunda dalam kondisi tertentu, termasuk bila korban sudah dianggap terlalu banyak atau bila malam hari tiba yang diyakini memiliki kekuatan supranatural.

Pada masa sekarang di PNG, persaingan antarsuku juga bisa berkembang ke arah peperangan, khususnya pada daerah-daerah dataran tinggi. Peperangan tersebut terus meningkat sehingga menyebabkan kerusakan, terutama terhadap perekonomian lokal. Ribuan pohon kopi dan tanaman pangan lainnya dirusak oleh para prajurit yang sedang mengamuk. Perang tersebut sangat sedikit diberitakan media massa, tetapi laporan mingguan kantor polisi lokal menunjukkan paling tidak terjadi hampir 10 kali peperangan. Keprihatinan pemerintah PNG diwujudkan melalui pengesahan *Inter-Group Fighting Act* (1978) — Undang-Undang Pertikaian Antar Kelompok — dan bermaksud melakukan penyelidikan terhadap fenomena tersebut. Sebelum kemerdekaan, banyak orang Australia yang pernah berkerja sebagai *kiaps* percaya bahwa pertikaian meningkat karena disebabkan oleh para petugas yang tidak cukup tegas dalam mengambil tindakan terhadap mereka yang berperang. Me-

nurut mereka adanya ancaman retribusi membuat suku-suku tersebut tetap berdamai. Para antropolog, sosiolog dan polisi senior PNG membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa orang-orang Australia itu tidak berbuat banyak dalam menghapus penyebab rasa permusuhan di antara para suku.

Sementara perdebatan kompleks mengenai hal itu terus berlanjut di PNG untuk beberapa waktu, di Papua Barat pertikaian antar-suku diselesaikan dengan cara yang keras oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari seorang polisi Indonesia dalam sebuah laporan pertanggung-jawabannya, mengenai peperangan antar-suku Ndani pada pertengahan tahun 1970;

> Tanggung jawab untuk menjaga keamanan terletak di tangan Angkatan Darat. Ratusan tentara diterjunkan di landasan darurat di Wamena (ibukota administratif daerah Balim) dan sepasukan lain diterjunkan dengan pesawat yang lebih kecil di tempat lain di lembah tersebut, termasuk pula beberapa operasi serupa di tempat lain. Sejumlah pasukan berparasut diterjunkan di sana. Pasukan tersebut melakukan gerakan pembersihan di sepanjang desa, mengancam bahkan terkadang disertai dengan pemukulan terhadap orang Ndani, tapi tidak membunuh. Sesudah itu para tentara mendaratkan helikopter sebagai langkah akhir dari strategi mereka. Sejumlah pemimpin desa ditangkap, dan dimasukkan dalam helikopter. Mereka tidak pernah naik pesawat sebelum itu dan sangat ketakutan. Hal yang lebih buruk terjadi. Helikopter-helikopter tersebut lepas landas dan terbang melintasi perbukitan terdekat. Di sana, di ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan tanah, para pemimpin suku tersebut didorong hingga menemui ajal mereka.[4]

Tidak mengherankan bila setelah itu orang-orang Ndani ter-

paksa menghentikan pertikaian di antara mereka. Tetapi setelah itu, suku-suku yang sedang berperang tersebut menyadari bahwa musuh baru yang harus mereka lawan adalah Pemerintah Indonesia dan mereka mulai bersatu untuk bersama-sama menghadapi bahaya yang mengancam. (Di PNG, juga terjadi peristiwa di mana suku-suku yang sedang bertikai bersatu dalam menghadapi polisi). Pada tahun 1977, banyak orang Ndani yang menjadi pendukung setia OPM, yang telah berdiri satu dekade di Irian Jaya. Pada tahun yang sama, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang menghadirkan lebih banyak pejabat pemerintah Indonesia di wilayah tersebut, sehingga semakin menjadikan Balim berada di bawah kepemimpinan asing. Budaya voting yang sebelumnya dianut suku Ndani dihapus dan komando dari atas dipaksakan kepada mereka. Pihak militer menindak secara keras setiap bentuk perlwanan masyarakat. Seorang wartawan Australia yang berusaha memasuki daerah tersebut diberitahu oleh seorang pegawai pemerintah bahwa 900 orang warga yang melawan telah dibunuh.[5] Sebagai perbandingan, untuk mencapai jumlah korban besar itu, diperlukan perang tradisional selama bertahun-tahun. *KOMPAS*, sebuah harian terkemuka di Jakarta, memberitakan bahwa sungai Balim dipenuhi oleh jasad manusia. Selama enam minggu, penduduk setempat yang tidak mau memakan ikan.[6]

Mengenai indikasi perlakuan buruk terhadap orang Ndani oleh pejabat pemerintah — yang mulai terjadi sejak akhir tahun 1960 — telah diamati secara ekstensif oleh seorang antropolog, Karl G. Heider. Salah satu metodenya

yang menarik adalah memberikan pertanyaan kepada 60 anak suku Ndani yang usia sekolah. Hasilnya dari pertanyaan yang sama, yaitu "Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?" didapat 50 jenis tanggapan yang berbeda. Tujuan Heider adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai cara mereka memandang dunianya. Salah satu jawaban yang sering dijumpai adalah "Mereka mengikat orang-orang dan menenggelamkan di laut". Orang-orang asing menanyakan apa artinya jawaban itu dan diberi informasi bahwa hal tersebut adalah "praktek yang dilakukan oleh polisi Indonesia" (*Journal of Anthropological Research*, 31, 1975). Dalam jurnal tersebut juga ditulis mengenai perilaku pegawai pemerintahan Australia — pada saat memerintah PNG, yang juga tidak dapat dikatakan tanpa cela. Dalam sejarah mengenai kiap, seorang petugas patroli kulit putih bernama James Sinclair, menceritakan mengenai beberapa kejadian yang sangat mengerikan, salah satunya adalah mengenai sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1949 ketika seorang petugas Kiap bernama Roy Edwards — yang bertugas berpatroli di pegunungan dekat Tapini — bermaksud untuk menghapus sejumlah penyidikan mengenai pembunuhan, dan cerita tersebut diakhiri dengan Edwards yang "bersenang-senang" dengan para pembantunya yang merupakan penduduk asli setempat, hal mana oleh Sinclair, yang juga mantan anggota Kiap, digambarkan sebagai "penyerangan, pemerkosaan, pembakaran rumah, bahkan hal yang lebih buruk dari itu". Edwards diadili dan dipenjara selama enam bulan, lebih dari 60 tuduhan juga tercatat telah ditujukan kepada petugas patroli lainnya.

Jika dilihat ke belakang, akar dari rasa permusuhan antara orang-orang Melanesia di Asia tersebut bermula pada sekitar abad ke tujuh, pada saat para pedagang dari Sriwijaya, kerajaan Budha terbesar di Sumatra Selatan, datang ke pantai Nugini dalam rangka mendapatkan hasil bumi. Setelah itu para pedagang lain mulai berdatangan, sebagian besar di antaranya adalah dari Melayu dan China, dan juga beberapa dari Arab. Sebagaimana disebutkan oleh C.D Rowley dalam The Nugini Villager, reaksi masyarakat Papua pada umumnya adalah berupa tindakan menaburkan bubuk limau ke arah para pendatang baru tersebut, dengan harapan memohon kekuatan magis yang akan mengusir kehadiran roh halus dan niat jahat. Pada saat itu yang terjadi adalah perdagangan secara damai, dan sebagian besar orang Asia hanya mengambil bulu burung cendrawasih, kayu cendana, dan bahan obat-obatan. Lebih jauh yang terjadi adalah penguasaan "komoditi" tanpa pembayaran sama sekali, yaitu perbudakan terhadap orang Papua. Mulai saat itu pun orang-orang dari kepulauan Indonesia sudah mulai percaya bahwa orang Papua yang berkulit hitam dan berambut kriting itu primitif, dan belum beradab, dan satu-satunya cara untuk membuat mereka "beradab" adalah dengan cara paksa.

Penguasaan terhadap tanah sebenarnya bukanlah tujuan dari para pedagang tersebut dan selama abad itu mereka tidak pernah secara bersungguh-sungguh berniat membangun tempat untuk mempertahankan kedudukan mereka. Tetapi bersamaan dengan proses perdagangan yang terjadi, para pedagang juga berusaha untuk memperkenalkan aga-

ma Islam. Usaha tersebut tidak mendapat tanggapan, hal ini disebabkan oleh penolakan penduduk lokal terhadap hukum yang menyatakan bahwa babi itu haram, karena binatang tersebut sangat identik dengan kehidupan masyarakat Nugini. Para muslim tersebut lalu mencoba taktik lain yang bersifat lebih memaksa. Pada tahun 1607, seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol, Luiz Vaes de Torres, menulis mengenai perjalanannya di sepanjang bagian barat pantai selatan Nugini;

> Pada akhir perjalanan di tanah itu, kami berjumpa dengan penganut ajaran Mahomet (Muhammad), yang dilengkapi dengan perlengkapan artileri, seperti jenis senjata falconet dan swivel serta arquebuses. Mereka bermaksud menguasai orang-orang yang mereka sebut sebagai orang Papua, dan berkotbah mengenai mazhab Mahomet (Muhammad) kepada mereka.[7]

Usaha yang bertujuan membuat orang Melanesia meninggalkan konsep agama tradisional mereka bisa dikatakan tidak begitu berhasil.

Nilai-nilai Asia masuk ke dalam masyarakat Papua setelah melakukan kontak berabad-abad. Yang paling menonjol adalah bahasa Melayu, yang sekarang ini menjadi bahasa pengantar dari Papua Barat; jadi ada gunanya bagi pendudukan Indonesia.

Ketika pecah pertikaian antara masyarakat pantai dan pedalaman Papua dengan pendatang Asia, hal tersebut lebih bisa dikatakankan sebagai usaha penolakkan daripada sebagai sebuah pernyataan perang. Sebenarnya tidak ada yang namanya pendudukan pada saat itu, meskipun diklaim bahwa pendudukan penuh terhadap Nugini terhitung dimu-

lai oleh sebuah kelompok Asia yang berasal dari suatu daerah yang sekarang menjadi bagian Indonesia. Klaim "historis" yang digunakan sebagai dasar pemerintah Indonesia untuk mengklaim paruh bagian barat dari pulau tersebut adalah pada tahun 1949 saat Belanda menyetujui untuk mundur dari Hindia Timur (Indonesia) tetapi tetap mempertahankan Papua Barat. Klaim yang sama diulangi lagi pada tahun 1980-an. Bukti lain yang diajukan adalah adanya dugaan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit (1293-1520) diperkirakan juga meliputi wilayah Nugini (Papua Barat dan Nugini). Pada tahun 1365 seorang pujangga Jawa bernama Prapantja menyebutkan bahwa bagian barat pulau Nugini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Tetapi seorang sejarawan, D.G.E. Hall menyatakan bahwa sampai sejauh ini, berdasarkan fakta-fakta yang diketahui, wilayah Majapahit hanyalah terbatas sampai ke Jawa Timur, Madura dan Bali. Klaim terhadap Nugini oleh Indonesia yang sudah maju juga didasarkan pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1660 antara Belanda dan Kesultanan Tidore, sebuah pulau kecil di Maluku tapi penting keberadaannya. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa semua wilayah, termasuk Nugini, berada di bawah kekuasaan Sultan Tidore sebagai wakil dari Belanda di wilayah tersebut. Pengaturan daerah tersebut ditegaskan kembali pada tahun 1797 oleh Gubernur Belanda untuk Maluku, dan dilanjutkan sesudah Belanda membuat klaim terhadap Nugini di abad berikutnya. Indikasi bahwa seorang sultan tidak sepenuhnya berkuasa termaktub dalam sebuah surat yang ditulis oleh Sultan Wahab Alam, pada tahun 1869,

berkenaan dengan kunjungan seorang peneliti alam dari Belanda, C.B.H von Rosenberg ke Nugini. Orang-orang sultan diperintahkan untuk melindungi peneliti alam tersebut, karena kalau tidak, maka pemerintah Belanda akan mempermasalahkannya.

Hubungan baik antara pemeluk Islam dari Tidore dengan orang-orang Papua terbentuk di Biak pada abad ke-16, ketika sejumlah pelaut Papua sering kali bekerja sebagai perompak, untuk kepentingan kesultanan Tidore.

Hubungan antara orang Papua dengan dunia luar mulai berubah pada saat kekuatan angkatan laut Eropa datang ke Nugini. "Penemuan" pulau tersebut boleh dikatakan kebetulan, hasil dari pencarian rempah-rempah di pusat perdagangannya yaitu kepulauan Maluku dan ke arah Barat kepulauan sekitarnya. Pada tahun 1545, seorang pelaut Spanyol bernama Ortiz Retez, dalam perjalanannya ke Panama, atas nama raja Spanyol mengklaim pulau tersebut dan juga kepulauan sekitarnya kemudian menamai wilayah itu dengan "Nueva Guinea" (*New Guinea*/Nugini) karena ia beranggapan bahwa populasi di pulau tersebut hampir sama dengan orang-orang Guinea di Afrika. Tetapi orang-orang Spanyol tidak pernah kembali ke Papua, dan nama modern yang mereka berikan pada tempat itu hanya menjadi legalisasi bagi mereka. Perdagangan rempah-rempah pada awalnya dimonopoli oleh Portugal, oleh sebab itu mereka menduduki Timor. Belakangan, Belanda datang untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah yang dilanjutkan dengan membangun kerajaan di wilayah itu; yaitu Hindia Belanda. Pada tahun 1605, seorang kapten Belanda

bernama Willem Janz, memerintahkan kapalnya untuk mendarat di Nugini — yang merupakan kapal pertama dari Belanda yang mendarat di situ. Para pendatang baru dari Belanda itu menunjukkan perilaku bahwa mereka datang ke Nugini bukan untuk satu tujuan melainkan banyak. Sembilan anak buah Janz dibunuh oleh orang-orang suku setempat pada saat mereka sedang mengambil air, dan dikabarkan dimakan oleh mereka. Nugini mendapat reputasi yang menakutkan. Orang-orang Papua dianggap oleh para penjelajah dari Barat lebih tidak ramah dibanding penduduk asli Australia, Aborigin. Seorang navigator Belanda lainnya bernama Jan Carstensz, telah bertemu dengan orang-orang dari Papua maupun Aborigin dan menyimpulkan bahwa mereka yang berada di ujung sebelah barat Nugini lebih licik, berani, dan kejam.

Tidak seperti para pedagang Asia, mereka yang berasal dari Eropa tidaklah menginginkan hasil bumi maupun budak terkuat serta perawan tercantik dari Nugini. Mereka mencari tempat permanen sebagai tempat berpijak, tempat di mana mereka dapat mengontrol jalur laut antara pulau-pulau penghasil tempah-rempah. Basis kerajaan Eropa pertama didirikan oleh orang-orang Inggris, pada tanggal 25 Oktober 1793, sebagai peringatan atas penobatan Raja George III. Di teluk Dore, dekat kota yang sekarang dikenal sebagai Manokwari, di sekitar wilayah kepala burung, Kapten John Hayes dari maskapai perdagangan Hindia Timur memproklamirkan wilayah tersebut sebagai "New Albion". Perkampungan tempat tinggal mereka, yang berupa benteng pertahanan terbuat dari batang kayu, dinamakan Fort

Coronation. Dua tahun kemudian, karena serangan wabah dan dipicu konflik dengan rival dari negara lain di Asia — kondisi ini diistilahkan sebagai "perang antar suku" oleh seorang penulis modern Papua Barat, Franzalbert Joku — Inggris meruntuhkan benteng pertahanannya dan mundur dari Nugini Barat.

Keuletan Belanda sebagai imperialis membuat mundur para kompetitor dari negara Eropa lainnya, dan pada tahun 1828 Belanda mengirimkan para penjelajahnya ke pantai wilayah tersebut dengan sebuah bendera. Lokasi benteng pertahanan terdepan mereka — yang disebut sebagai *Fort Dubus* — adalah tempat yang sekarang ini dikenal sebagai teluk Triton, yang terletak di pantai Selatan daerah leher kepala burung (dalam bahasa Belanda — *Vogelkop*). Tempat tersebut diserang baik dari laut maupun daratan oleh penduduk setempat, dan dipindahkan ke tempat lain pada tahun 1836. Selama tahun pertama pendudukan tersebut, Belanda memproklamirkan kedaulatan terhadap separuh wilayah dari Nugini bagian Barat sampai dengan posisi 141 derajat Bujur Timur dari Greenwich, kecuali wilayah yang letaknya paling dekat dengan Tidore, yang tetap akan berada di bawah kekuasaan kesultanan tersebut. Pada tahun 1848, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan dekrit yang mengatur perihal tersebut. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk meredam kesultanan Tidore, yang telah sering kali merepotkan pihak Belanda. Sebagaimana telah ditulis di atas bahwa pada kenyataannya kesultanan Tidore tidak sepenuhnya berkuasa atas wilayah tersebut (pada tahun 1901 Belanda mengubah hak-hak Tidore, sebagai kompen-

sasi pembayaran serta memasukkan keseluruhan wilayah Nugini Barat ke dalam keseluruhan Hindia Belanda).

"Belanda Nugini" menguasai 47 persen dari keseluruhan pulau tersebut. Pada tahun 1884, dalam selisih waktu sepuluh hari, Inggris dan Jerman masing-masing membuat klaim wilayah bagian mereka yaitu berturut-turut 26 persen dan 27 persen. Meskipun menjadi pihak pertama yang mencanangkan klaim, Belanda merupakan pihak yang paling lambat dalam menindaklanjuti kontrol administratifnya. Anggaran untuk para pegawai tidak ada sampai dengan tahun 1898 dan selama kurun waktu 30 tahun berikutnya sebagian aktivitas dilakukan oleh misionaris atau peneliti pertambangan. Pada tahun 1907, perusahaan pertambangan minyak Royal Dutch Shell telah dibentuk antara pemerintah Belanda dan Inggris, dengan tujuan untuk membuka lahan di wilayah yang diduga sangat kaya tersebut. Pada tahun 1935, 15 rembesan minyak telah ditemukan dan diduga itu adalah sumber minyak terbesar di dunia. Pada saat ini, usaha pertambangan bersama antara Belanda dan Amerika Serikat juga telah menemukan deposit mineral di wilayah pedalaman pulau tersebut. Yang paling menjanjikan adalah daerah singkapan pegunungan yang sekarang menjadi tempat beroperasinya penambangan tembaga berskala besar, *Freeport*. Penemuan penting lainnya terjadi pada tahun 1938 saat sebuah pesawat ekspedisi Archbold mendarat di lembah Baliem, yang menyebabkan penambahan daerah lembah besar tersebut dalam gambar peta serta terjalinnya kontak dengan orang-orang Ndani.

Selama 80 tahun pertama masa penjajahan Belanda,

peran Nugini terhadap wilayah Hindia Belanda lainnya sangatlah kecil. Tempat yang sepi dan tanpa fasilitas apa pun sehingga dianggap terbelakang oleh para pegawai pemerintah kolonial. Pusat dari kerajaan kolonial adalah di Jawa yang jauh jaraknya, yang pada tahun 1920-an kerajaan Belanda membutuhkan sebanyak mungkin pegawai yang trampil. Kebencian terhadap pemerintahan kolonial mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1926-1927, akibatnya timbul pemberontakan secara meluas, yang telah didahului oleh munculnya gelombang para nasionalis Indonesia. Sejumlah penganut komunisme juga muncul. Kerajaan Belanda memutuskan untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan tersebut, dan mengatasi mereka yang diperkirakan berpotensi membuat masalah di masa mendatang dengan sebuah kebijakan, yaitu pembuangan internal. Lokasi yang dipilih adalah Nugini, yaitu tempat yang dinamai Tanah Merah, yang letaknya sekitar 300 km di atas sungai Digul dari kota paling Selatan Merauke. Kamp terpidana tersebut merupakan sebuah pedalaman pulau yang kondisinya mengerikan. Para tahanan yang berhasil bertahan hidup dari kondisi tersebut menggambarkan bahwa tempat yang diketahui sebagai daerah malaria paling ganas di Nugini itu dikelilingi oleh hutan lebat dan suku-suku yang masih berburu kepala manusia. Dalam memoarnya mengenai periode para nasionalis Indonesia berjudul *Revolt in Paradise,* Ketut Tantri menggambarkan bertemu dengan seorang anak laki-laki Jawa yang ayahnya ditangkap oleh serdadu Belanda bertahun-tahun yang lalu. Anak tersebut mengatakan bahwa ayahnya dikirim ke Nugini untuk menemui ajalnya,

yaitu ke sebuah tempat yang dikenal sebagai "daerah yang letaknya bahkan lebih jauh dari bulan".

Kelompok terbesar yang dibuang ke Tanah Merah terdiri dari sekitar 800 orang, termasuk di antaranya wanita dan anak-anak, sehingga peristiwa ini menjadi inti masalah yang menimbulkan pemberontakan di Jawa. Karena letak penjara yang terisolasi, pemerintah kolonial Belanda tidak membangun dinding penjara. Tetapi mereka bisa menunjukkan dengan jelas bahwa melarikan diri sama dengan tindakan bunuh diri. Empat orang laki-laki pernah mencoba kabur dari tempat itu setelah masa penahanan selama tiga tahun. Dengan dipandu oleh tiga orang penduduk Papua, mereka menempuh jalan yang tidak diketahui oleh Belanda, tiga orang dari mereka berhasil mencapai pantai dekat Merauke. Setelah memulihkan kesehatan mereka diantar dengan kapal oleh orang-orang Papua yang mau berbaik hati menolong mereka, melewati bagian paling bawah pulau Nugini ke sebuah tempat yang termasuk dalam wilayah Australia yang diwarisi dari Inggris. Dengan bantuan orang Papua lainnya, para tahanan itu dibawa ke pulau *Thursday* — sebuah pulau yang letaknya di pelosok paling Utara Australia — dengan menggunakan kapal penangkap ikan. Malang bagi orang-orang Jawa tersebut karena Australia lebih berteman baik dengan Belanda daripada dengan suku yang masih suka berburu kepala tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang Australia yang lebih mendukung Republik Indonesia pada waktu itu, bahwa, "Pemerintahan partai buruh Scullin membawa mereka dalam sebuah kapal dan membawa mereka kembali ke sebuah kamp konsentrasi

Belanda".[8]

Meskipun pemerintah kolonial Belanda telah memenjarakan para pejuang tersebut ke berbagai wilayah di Indonesia, tetapi kamp yang terletak di atas sungai Digul tersebut menjadi simbol paling kuat tentang penindasan kolonial. Seorang veteran dan juga seorang komunis bernama Abdul Karim, berkeliling Sumatra dengan rombongan teater yang dinamakannya Diguliana. Pertunjukan yang menceritakan tentang kamp tetapi dikemas secara artistik tersebut tidak dilarang dengan tujuan agar bisa menjadi peringatan kepada mereka yang menginginkan kemerdekaan. Dampak yang ditimbulkan justru kebalikannya, dan kondisi buruk para tahanan Tanah Merah justru menjadi pembuktian yang mempermalukan Belanda di dunia Internasional. Hal ini diperburuk oleh penjajahan terhadap Nugini Barat. Jepang, yang memaksa Belanda menyerah pada tahun 1942, telah membangun kekuasaan di wilayah lain di Indonesia tersebut. Pada tahun 1943, setelah melihat gejala yang sama untuk Nugini, Belanda mengirim 500 orang Indonesia yang masih tersisa di Tanah Merah dengan kapal uap ke Australia. Dalam *Black Armada*, sebuah cerita klasik mengenai kemunduran masa-masa kolonialisme kerajaan Belanda, Rupert Lockwood menceritakan bahwa MV Both merupakan kapal pertama yang mendaratkan narapidana di wilayah paling timur Australia tersebut selama hampir satu abad. Di Australia, orang-orang Indonesia itu berusaha untuk mengkomunikasikan status mereka agar mendapatkan simpati dari serikat pekerja di sana, khususnya dari pihak pekerja, dan diharapkan serikat pekerja tersebut dapat mengadakan kam-

panye politis bagi mereka.

Pemerintah Australia, yang masih berharap agar kerajaan Belanda dapat mengambil kembali kekuasaannya setelah perang dunia II, memenjarakan sebagian besar orang-orang Indonesia tersebut di dua kamp, yaitu di New South Wales dan sisanya di daerah pinggiran kota Brisbane yang sekarang dijuluki sebagai "Tanah Merah".

Saat Belanda meninggalkan Nugini, mereka hanya meninggalkan 15 buah pos pemerintahan yang sebagian besar di antaranya berada di wilayah pantai. Tempat para misionaris, baik Katolik maupun Protestan malah lebih banyak jumlahnya. Fasilitas pendidikan maupun kesehatan yang diterima oleh penduduk setempat tampaknya lebih banyak berasal dari para misionaris ketimbang dari pemerintah.

Pada saat Jepang mengalihkan perhatian ke arah Selatan, yaitu ke wilayah Pasifik sebagai basis dan ladang minyak di Sorong, Jepang mempropagandakan tentang pembebasan wilayah tersebut dari imperialisme kulit putih. Mereka menghapus kalimat bahwa pergantian tersebut bukanlah penentuan nasib sendiri tetapi dalam dominasi Jepang. Dalam kenyataannya, Jepang menunjukkan sikap buru-buru mengkonsolidasikan kontrol dan melarang adanya perbedaan pendapat.

Bahkan pada saat Belanda berkuasa, protes keras terhadap kebijakan mereka telah ada, seperti kerja paksa. Protes-protes tersebut mulai muncul pada sekitar abad ke-19 dan berlanjut sampai tahun 1930-an. Kepulauan Schouten, di mana pulau Biak merupakan yang terbesar di antaranya, menjadi pusat sentimen anti-Belanda. Hal ini berkaitan de-

ngan munculnya gerakan kaum Messianic (Masehi) yang melakukannya berdasarkan kepercayaan tradisional mereka. Akar dari gerakan Koreri terletak pada legenda kuno yang memperkirakan bahwa Tuhan mereka, yang disebut sebagai Manseren Mangundi, suatu hari akan kembali untuk menyelamatkan umatnya.

Legenda tersebut dimulai saat seorang figur pahlawan bernama Manamakeri mengunjungi neraka tapi ditolak untuk tinggal di sana. Sekembalinya ke bumi, ia membuat anggur, yang suatu saat dicuri. Ia lalu menyusun rencana untuk menangkap si pencuri dan berhasil. Pencuri tersebut berubah wujud menjadi bintang kejora, yang dikenal sebagai Kumiseri atau Sampari. Sebagai ganti karena membebaskan Sampari, Manamakeri mendapatkan kekuatan magis. Salah satunya adalah ritual dibakar dengan api yang membuat ia berubah menjadi seorang pemuda yang dikenal sebagai Manseren, sang Dewa. Ia mengajarkan pada orang-orang Koreri mengenai hidup damai, tapi kemudian kecewa karena orang-orang tersebut tidak dapat memenuhi persyaratannya. Ia lalu meninggalkan pulau itu dan pergi ke arah barat. Bagian awal dari cerita tersebut tidak menceritakan secara detail mengenai kembalinya Manseren. Sesudah tahun 1860, muncul kepercayaan bahwa jika orang-orang tersebut mau mendukungnya dengan perilaku yang saleh, maka Manseren akan kembali dan menciptakan sebuah dunia surgawi.

Gerakan Koreri memunculkan sejumlah nabi, disebut sebagai konor, yang menyatakan diri sebagai anak-anak Messiah dan menjanjikan bahwa kedatangan kedua kalinya akan segera terjadi. Banyak konor yang memimpin para

pengikutnya untuk berperang melawan kolonial. Sebagai contoh, pada tahun 1884 pimpinan kelompok Mokmer, Biak, menyerang sebuah kapal Belanda dan membunuh kaptennya. Belakangan, elemen Kristiani dimasukkan, dengan kisah kedatangan Jesus yang dianalogikan dengan cerita Manseren. Gerakan Koreri semakin meningkat pada tahun 1939, hal ini disulut oleh kisah seorang wanita bernama Angganita Menufandu yang mengasingkan diri ke sebuah pulau kecil setelah kematian suami dan ketiga anaknya. Ia dijangkiti penyakit beri-beri dan terancam kematian. Setelah merasa dikunjungi Manseren, ia sembuh. Angganita, yang dijuluki sebagai "Perawan Judea" mulai menyebarkan ajaran Koreri.

Pada awalnya ia mengalihkan kemarahannya kepada para misionaris asing — misionaris pertama yang datang di tempat tersebut adalah dari kelompok masyarakat Utrecht, pada tahun 1862 — yang ia tuduh dengan tak berdasar, telah mencuri halaman terakhir Injil sebelum memberikannya kepada penduduk setempat, lalu membuangnya dan menggantinya dengan pengetahuan yang menguntungkan orang-orang Eropa sehingga mereka dapat meraih kekayaan material dan kekuasaan. Ketika cara damai yang ditempuhnya tidak mendapat tanggapan dari Belanda, ia melakukan tindak kekerasan. Pada bulan Mei 1942, Angganita dipenjarakan oleh Belanda. Kepemimpinan gerakan diserahkan kepada seseorang bernama Stephanus Simiopiaref, yang dituduh melakukan pembunuhan pada saat kedatangan Jepang pada bulan Juni. Angganita tetap berada di penjara.

Gerakan Koreri telah berkembang ke arah sikap nasionalisme. Sebagaimana dikutip oleh seorang sosiolog bernama

Bryan Wilson bahwa banyak pengamat — termasuk seorang administrator Belanda pada waktu itu, de Bruijn — yang mengatakan bahwa Koreri lebih menyerupai kesadaran kultural orang Papua terhadap nasionalisme ketimbang sebagai agama. Tetapi seorang gerejawan, F. C. Kamma, menulis bahwa para pengikut Koreri mewakili berbagai posisi yang berbeda-beda, baik interpretasi mereka terhadap legenda Manseren maupun tingkat perlawanan mereka secara aktif terhadap Jepang.

Salah satu anjuran Koreri adalah agar orang Papua mengibarkan bendera Belanda secara terbalik untuk menyimbolkan pembalikan peran penduduk setempat dengan penjajahnya. Lalu sebuah bendera khas Papua diciptakan, menggambarkan Bintang Kejora yang kekuatan magisnya dipercaya telah menolong Manseren dalam pencariannya akan Tuhan. Dipercaya bahwa pengibaran bendera bergambar bintang tersebut akan mengundang kekuatan magis yang membantu dalam perlawanan terhadap makhluk asing. Kepercayaan tersebut masih dipegang sampai saat ini, dengan pengibaran bendera yang dijadikan bentuk aksi perlawanan tanpa kekerasan terhadap pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa pada tanggal 9 Februari 1984, yang menjadi awal dari rentetan peristiwa yang menyebabkan 10.000 orang Papua meninggalkan Papua Barat untuk mencari perlindungan ke PNG. Sekarang ini, sang Bintang Kejora, yang dikenal oleh orang luar sebagai Venus, telah menjadi simbol bagi OPM. Makna supernaturalnya belum dilupakan orang. (Nama "Koreri" bahkan telah dipakai secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Di Ibu kota Indonesia,

sebuah wisma untuk masyarakat Papua menggunakan nama Wisma Koreri).

Bentuk gerakan Koreri lainnya adalah kampanye untuk terwujudnya sebuah jaringan federasi politik — militer bagi "Papua Barat" dengan Amerika Serikat, Inggris, Kerajaan Belanda dan China. Tetapi hambatan utama mereka adalah kehadiran Jepang. Menurut konor Stephanus sendiri, orang-orang Papua mempunyai takdir khusus, dan untuk kepercayaan itu ia mencontoh peristiwa serangan bom sekutu di pantai utara kota Manokwari, dalam kejadian itu banyak orang Jepang yang tewas, tapi orang Papua tidak. Didorong oleh rasa percaya akan kekebalannya, Stephanus melakukan pendekatan dengan pihak Jepang dengan sederet permintaan: melepaskan Angganita, pengakuan akan bendera Bintang Kejora, pengusiran orang-orang Indonesia yang datang pada masa Belanda, pembebasan Papua Barat berdasar adat lama mereka, dan kemajuan ekonomi untuk Papua. Stephanus ditangkap atas usahanya tersebut, dibawa ke Manokwari dan dieksekusi. Para pengikutnya kemudian menyerang sebuah kapal Jepang dan banyak di antaranya yang terbunuh pula. Di Mokmer, senjata api pasukan Jepang ditembakkan ke arah gerombolan pendukung saudara laki-laki konor Stephanus, yaitu Jan. Kelompok Koreri lainnya yang berada di Biak, di bawah pimpinan Korinus Boseren, mempunyai tongkat-tongkat yang mereka percaya akan diubah menjadi senapan oleh Manseren. Tapi kekebalan diri yang mereka percayai itu ternyata sama sekali tidak berdaya, saat berhadapan dengan senapan musuh. Kegeraman Jepang berakibat runtuhnya gerakan yang ber-

sifat mistik tersebut. Para pengikut Koreri pun kemudian mulai berubah sikap dan mempelajari pemakaian senjata secara layak yang sebagian besar adalah senjata tradisional, termasuk beberapa senjata api peninggalan musuh.

> Cara pemujaan penganut Koreri digambarkan diawali dengan digunakannya mitos penduduk setempat sebagai sebuah reaksi pasif dan anti-kekerasan terhadap kekuasaan administratif dan misionaris. Lalu diakhiri dengan pembentukan suatu badan atau organisasi yang teratur dan disiplin, yang menggunakan kekuatan senjata dalam usaha mengusir orang-orang asing dari Papua.[9]

Perkembangan ini bukan hanya terdapat di Nugini, tapi juga terjadi di daerah jajahan lain di mana

> penjajah sering kali cenderung menginterpretasikan aktivitas religius sebagai aktivitas politik ..... reaksi penjajah dalam merespon aktivitas religius yang mereka anggap sebagai aktivitas politik tersebut kadang kala akibat ketakutan terhadap perkiraan atau ramalan mereka sendiri. Pertemuan-pertemuan religius dilarang dan para pemimpin keagamaan dituduh sebagai pemberontak politik, dan karena kondisi itu akhirnya mereka jadi pemberontak betulan dan pikiran-pikiran religius mereka mengalami perubahan menjadi pembenaran ideologis untuk aktivitas revolusioner.[10]

Sementara itu Jepang tetap meneruskan pendekatan yang sama kerasnya terhadap wilayah lain di Nugini, dan ditanggapi dengan kemarahan yang sama pula. Tapi dari semua tempat tersebut tak ada oposisi yang terkoordinir sebaik mereka yang berada di wilayah yang condong pada Manseren. Pada tahun 1940-an, wilayah Schouten, khususnya

Biak, merupakan bagian dari Nugini yang paling banyak melakukan kontak dengan dunia luar. Pengaruh ini, ditambah dengan struktur sosial yang khas, menjadikan Biak sebagai daerah yang lebih maju ketimbang daerah Nugini lain secara umum, dan lebih bisa bersatu.

Kebijakan Jepang pada masa perang di Nugini, sama dengan yang mereka terapkan di wilayah Asia Tenggara, yaitu menekankan pada pentingnya pambatasan terhadap perbedaan pendapat serta pengumpulan tenaga kerja setempat, secara cepat. Karena usaha yang mereka tempuh menemui kegagalan, maka para pegawai Jepang tersebut diperintahkan untuk merelokasi seluruh desa dan dibarengi dengan penyiksaan serta pembunuhan terhadap banyak orang Papua serta pemaksaan kepada seluruh anggota keluarga untuk kerja paksa. Perilaku tersebut menimbulkan kebencian yang lebih dalam dibanding dengan apa yang telah dilakukan Belanda — yang dinyatakan secara resmi sebagai imperialis kulit putih — selama satu abad di wilayah tersebut. Ternyata semua itu tidak ada artinya karena pada bulan Februari 1944 kekuatan sekutu yang dipimpin Amerika mengambilalih ibu kota Hollandia. Pengambil-alihan Biak, yang dianggap penting oleh Jepang, membutuhkan usaha yang lebih keras, tetapi pada bulan Agustus, semua wilayah Nugini telah dimenangkan oleh sekutu. Sebagian pengikut Koreri percaya bahwa kedatangan kapal-kapal Amerika dan kargo berisi bahan bantuan dianggap sebagai kembalinya Messiah sebagaimana telah dijanjikan. Orang-orang asing tersebut mereka pandang sebagai pembebas, bahkan sampai hari ini pun kita masih bisa mendengar komentar

yang menyenangkan dari orang-orang Papua terhadap kehadiran tentara kulit hitam di antara kekuatan keamanan Amerika Serikat.

Dalam usahanya memperkuat hubungan dengan orang-orang Indonesia yang berpengaruh pada saat menguasai Jawa, Jepang telah mensponsori berdirinya sejumlah organisasi. Salah satunya adalah BPKI (Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sebagian besar tokoh-tokoh nasionalis adalah anggota BPKI. Termasuk di antaranya adalah presiden pertama, Soekarno, wakilnya, Mohammad Hatta, serta Mohammad Yamin. Pada bulan Juli 1945, sebulan sebelum pengeboman nuklir terhadap Jepang, dua pertemuan BPKI diadakan untuk membahas masalah perbatasan negara. Hasil dari voting tersebut adalah 39 suara untuk Indonesia yang terdiri dari bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk Nugini, Kalimantan Utara termasuk Sarawak, Brunei dan Sabah, Malaya, Timor Portugis serta pulau-pulau di sekelilingnya. Soekarno dan Yamin termasuk dalam kelompok yang mendukung batasan ini. Sebilan belas orang delegasi memilih hanya bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Nugini, sedangkan enam di antaranya memilih wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, tidak termasuk Nugini. Mohammad Hatta termasuk dalam kelompok minoritas, dan berpendapat bahwa mereka yang berseberangan dengan kelompoknya dapat dikategorikan sebagai ekspansionis dan imperialis. Ia menolak pernyataan tegas Prof. Yamin yang menyatakan bahwa orang Papua adalah orang Indonesia, ia berpendapat bahwa mereka adalah orang Melanesia. Calon wakil presiden di masa mendatang tersebut meminta

diadakannya penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat, serta menyatakan bahwa orang-orang Papua berhak atas kemerdekaannya. Hatta mencela permintaan BPKI terhadap Papua dan menyatakan:

> Bukan tidak mungkin kita belum puas dengan Papua saja, tetapi mungkin juga akan menginginkan kepulauan Solomon dan wilayah-wilayah lain sampai sejauh pertengahan samudra Pasifik.[11]

Pendapat mayoritas menang dalam voting tersebut dan penggabungan wilayah Nugini Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan yang tampaknya tidak jauh beda dengan Jepang yaitu menjanjikan untuk "menjadi bagian dari kemakmuran bersama kekaisaran Jepang", menjadi tujuan dari gerakan nasionalis.

Kembalinya Belanda yang semula bertahap, berubah menjadi secara total sesudah menyerahnya Jepang Agustus 1945 dan di akhir Perang Dunia II, sejarah Papua Barat justru menjadi lebih terjalin dengan Indonesia daripada masa sebelumnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua hari sesudah kekalahan Jepang dan diikuti dengan penyerahan secara resmi pada Sekutu di bulan September, para nasionalis Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Pemimpinnya yaitu Soekarno, pernah dipenjarakan selama bertahun-tahun oleh Belanda. Meskipun ia tidak pernah merasakan penderitaan di Tanah Merah, tetapi beberapa kawan seperjuangannya adalah mantan penghuni "kamp-neraka" di Nugini tersebut. Proklamasi tersebut memproklamirkan negara baru Indonesia dengan wilayah dari ujung barat pulau

Sumatera sampai dengan ujung paling timur kepulauan Ambon. Nugini tidak disebutkan, meskipun sebelumnya telah dinyatakan bahwa batas wilayah yang dimasukkan adalah bekas wilayah Hindia Belanda tetapi pencantuman Nugini tersebut diabaikan.

Sepanjang masa pergolakan selama empat tahun yaitu antara waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia dan saat Belanda melepaskan kekuasaannya, beberapa orang sempat membicarakan mengenai masa depan "pulau yang letaknya lebih jauh dari bulan" tersebut. Sementara itu pusat anti kolonial adalah di pulau Jawa, yang pada tanggal 8 September sebuah kekuatan dari Inggris — untuk komando wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Lord Mounbatten — mendarat di tempat itu dengan instruksi untuk mengamankan wilayah tersebut dan mengembalikannya ke tangan Belanda. Kemarahan terhadap kembalinya Belanda ke Indonesia justru membangkitkan semangat perlawanan yang melebihi semangat yang sama terhadap invasi Jepang. Bahkan selama 40 tahun sesudah masa itu, orang-orang Eropa merasa tidak nyaman bila berada di jalanan Ujung Pandang (Makassar) bila bertepatan dengan peringatan pembantaian massal yang diperintahkan oleh seorang kolonel Belanda yang terkenal keji, "Turk" Westerling. Sementara itu di pusat, yaitu pulau Jawa, angkatan udara Belanda yang dibantu oleh Inggris membombardir pusat-pusat kekuatan nasionalis, termasuk di antaranya pusat-pusat kota.

Pada bulan Juli 1946, semua pulau yang terletak di timur pulau Jawa telah diserahkan Sekutu kepada Belanda. Pada akhir bulan itu, pemimpin pemerintahan administratif

Belanda, Dr. H.J. van Mook, menyelenggarakan konferensi untuk para perwakilan dari wilayah timur kepulauan tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk semacam Negara Federasi Indonesia, yang terdiri dari empat daerah dengan otonomi penuh. Selama konferensi tersebut, van Mook berhadapan dengan kekuatan yang hendak membentuk negara Republik Indonesia. Tetapi pernyataan yang lebih tegas disuarakan oleh delegasi Nugini, Franz Kaisiepo, yang pada waktu itu hadir di konferensi yang diadakan di Malino, Sulawesi Selatan. Ia meminta diadakannya penentuan nasib sendiri bagi bangsanya. Dalam pernyataanya Kaisiepo jelas-jelas menyatakan, baik kepada Belanda maupun kepada Indonesia bahwa orang-orang Papua tidak punya kepentingan apa pun terhadap Republik Indonesia. Mereka tahu bahwa pada akhirnya Indonesia akan "memakan" mereka. Ia menyatakan bahwa kekuasaan Belanda terhadap Nugini Barat tidak berarti sama dengan kekuasaan Indonesia terhadap wilayah tersebut. Ia juga mengusulkan nama baru untuk wilayah tersebut, yaitu Iryan. Kata itu berasal dari bahasa Biak yang berarti "beruap". Hal ini dikaitkan dengan kemunculan daratan Nugini saat dilihat dari pantai, sebuah daratan yang panas dan beruap muncul dari dalam laut. Kata tersebut belakangan diadopsi oleh Indonesia dengan akronim IRIAN, kependekan dari "Ikut Republik Indonesia (dalam perjuangan) Anti Netherlands". Kooptasi istilah tersebut oleh para pelaku propaganda Indonesia membangkitkan kemarahan orang Papua Barat, yang merasa tidak suka dipanggil sebagai orang Irian.

Konferensi Malino, seperti halnya konferensi-konferensi

lain yang diadakan sebagai lanjutannya tidak menghasilkan kesepakatan. Sementara itu konflik senjata antara Indonesia dan Belanda terus berlanjut.

Pada tahun 1947, kerajaan Belanda menempatkan 150.000 tentaranya di kepulauan Indonesia, usaha tersebut merupakan penundaan terhadap kemerdekaan Indonesia yang dulu tidak mereka cegah. Pekik "merdeka" dari para pejuang kemerdekaan telah diikuti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia dan pada saat yang sama juga oleh seluruh masyarakat dunia. Amerika Serikat merupakan kunci penentu dalam hal ini. Ia sangat menentang kolonialisme oleh Eropa terhadap negara lain — khususnya bila pemerintah negara tersebut anti komunis — dan menekan Belanda untuk mundur. Inggris, yang tidak begitu mendukung pembebasan Indonesia karena ia sendiri sedang dilanda masalah kolonialisme, mencoba menyerahkan masalah kepada yang bersangkutan. Kondisi ini sangatlah sulit, dan sementara itu pasukan Sekutu tetap berada di wilayah Indonesia sampai akhir tahun 1947. Di lain pihak, Australia yang menganggap kepulauan tersebut sebagai wilayah perisai pertahanan tetap mengharapkan Belanda untuk tetap berkuasa, ketimbang diserahkan kepada sebuah rezim yang tampaknya menunjukkan tanda-tanda memasukkan unsur komunisme di dalamnya. Ini merupakan pandangan menteri luar negeri pada waktu itu, Dr H.V. Evatt. Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh perdana menteri dari partai buruh, Ben Chiefley, yang merasa bahwa persoalan tersebut sebenarnya adalah permasalahan antara Belanda dan rakyat Indonesia sendiri. Tetapi sebenarnya Chiefley juga cende-

rung kepada berkuasanya Belanda kembali, sepanjang mereka menjamin untuk menerapkan kebijakan yang lebih jelas. Seperti halnya Evatt, *concern* utamanya adalah untuk masa depan Australia.

> Australia, yang pihak keamanannya juga terlibat, sangat merasakan dampaknya secara langsung dari kondisi ini, Untuk mencapai kondisi aman di wilayah Pasifik, sangatlah penting bagi para penjajah tersebut untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan politik, ekonomi, dan sosial bagi penduduk asli.[12]

Kerajaan Belanda tidak begitu mengabaikan tekanan-tekanan yang timbul, ataupun terhadap usaha Australia untuk meng-internasional-kan persoalan tersebut. Hubungan kedua negara tersebut memburuk, ditambah lagi dengan larangan serikat pekerja Australia untuk mengirim kargo bagi Belanda ke Indonesia. Karena tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi embargo tersebut, pemerintahan ALP memerintahkan pasukan bersenjata Australia untuk membantu pemindahan personel dan peralatan militer Belanda ke wilayah Hindia, sebuah aksi yang mengundang kemarahan Soekarno dan juga kaum republiken lainnya.

Pada bulan Maret 1947, kerajaan Belanda membuat perjanjian dengan nasionalis Indonesia — di Cirebon dan dikenal sebagai perjanjian Linggarjati — yang menghasilkan sebuah formasi Negara Indonesia Serikat yang tetap akan menjadi bagian dari Belanda, paling tidak sampai tahun 1949. Sebagai hasilnya, kerajaan Belanda menangguhkan operasi militer terhadap para gerilyawan dan para pendukungnya. Tapi dalam beberapa bulan perjanjian tersebut

dilanggar dan pertempuran meletus kembali. Begitu pula dengan boikot serikat pekerja Australia terhadap pengiriman barang lewat laut untuk Belanda. Saat orang-orang dari partai republik meminta pemerintah Australia untuk menyerahkan persoalan kepada PBB, para pengambil kebijakan mengambil sikap tidak setuju: Evatt setuju terhadap pemindahan tersebut, sedang Chifley tidak. Secara kenegaraan, Australia berada di garis yang sama dengan Amerika Serikat yang tidak setuju dengan keterlibatan PBB. Keengganan kedua negara untuk menginternasionalkan masalah tersebut berubah secara total ketika sampai pada keputusan mengenai penentuan masa depan Nugini Barat pada atahun 1962. Dr. Evatt tidak puas terhadap keputusan tersebut, hal ini khususnya karena khawatir bahwa Australia akan kehilangan basis militer yang mereka harapkan di wilayah Hindia. Perhatian utamanya mengenai pertahanan adalah untuk mempertahankan Nugini Barat dan menanggapi pengambilalihan wilayah Nugini Barat, ia menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang terpisah dari Hindia.

> Evatt jugalah yang, bila kita melihat kembali ke belakang pada Januari 1947, bertanggung jawab atas terjadinya kondisi buruk yang berlarut-larut di pemerintahan Belanda Nugini, di mana sesudah tahun 1949 pemerintah Australia menyadarinya dan Australia sendiri pulalah yang pada akhirnya mundur dengan hormat.[13]

Pada saat Evatt menjabat, juga, terjadi kemarahan atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh Belanda meskipun begitu ia masih tetap mengambil posisi untuk mendamaikan ketika

nasib Indonesia akhirnya dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Sikap Amerika Serikat yang mendukung keputusan komite Internasional semakin mempercepat perkembangan. Kesepakatan yang ada pada perjanjian Renville yang dibuat pada bulan Januari 1948, diserahkan sepenuhnya pada kedua pihak yang terlibat. Tetapi sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian terdahulu, kenyataannya tidak ada yang sesuai. Amerika Serikat semakin mendesakkan kondisi politis yang mapan, saat mengetahui kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada bulan September. Dr. Evatt, yang pada saat itu berkedudukan sebagai pimpinan Majelis Umum PBB, menekankan pada pentingnya penyelesaian masalah tersebut. Tujuannya, sebagaimana ia katakan, adalah untuk menyelamatkan banyak nyawa dan untuk menjunjung tinggi otoritas PBB. Tapi Belanda justru semakin mempersulit keadaan. Operasi militer telah dimulai kembali dan usulan penundaan sebagaimana hasil pertimbangan Dewan Keamanan PBB tidak dihiraukan Belanda. Hal ini membuat Evatt (dan juga Chiefly) marah dan sangat menyalahkan Amerika Serikat, dan sebelumnya telah pula melayangkan protes secara tertulis kepada Dewan Keamanan mengenai sikap Amerika Serikat yang dianggap tidak dapat berlaku tegas terhadap Belanda. Amerika Serikat membenci tindakan Evatt tersebut.

Pada awal tahun 1949, Dewan Keamanan membentuk komisi PBB untuk Indonesia yang selanjutnya pada bulan Juni mulai mempersiapkan sebuah konferensi yang dinamakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemerintah Australia telah menyetujui pendapat Evatt mengenai Papua

Barat dan menyatakan bahwa wilayah tersebut seharusnya tidak dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Sebagai dukungan terhadap argumen Evatt — hal ini lebih dijadikan sebagai strategi — ditambahkan bahwa orang-orang Papua lebih mempunyai banyak kesamaan dengan mereka yang berada di wilayah Papua Nugini ketimbang dengan Indonesia, dan oleh karena itu masa depan mereka pada akhirnya terletak pada in-tegrasi dari keseluruhan pulau tersebut. Australia sampai pada tahap itu masih mendukung Belanda, dan menambahkan bahwa mereka akan bergabung dengan Belanda dalam mempertahankan pulau tersebut. Tetapi Australia tidak setuju terhadap status wilayah tersebut sebagai daerah jajahan untuk waktu yang lama. Solusi yang dianggap paling tepat untuk Papua Barat adalah berada di bawah perwalian PBB, sampai saat yang tepat — yang saat itu tidak ditentukan jangka waktunya — bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Para petinggi Belanda menghargai usaha tersebut, dan juga merasa jalan itu sebagai yang terbaik, tapi pada saat itu masalah Papua Barat masih merupakan hal yang diperdebatkan dengan rakyat Belanda sendiri. Pertimbangan antara tetap memiliki wilayah tersebut dan niat untuk menjaga nama baik, bermuara pada dua pertiga dari mayoritas anggota parlemen Belanda mengizinkan pemindahan sisa wilayah Hindia. Saat Konferensi Meja Bundar dimulai di *The Hague* pada tahun 1949, Belanda diharapkan untuk tidak menyerahkan kedaulatan Nugini, yang dipercaya oleh nasionalis Indonesia sebagai bagian integral dari republik tersebut di masa mendatang. Saat itu, Indonesia seharusnya berkompromi. Peri-

laku mereka digambarkan secara ringkas oleh seorang wartawan Australia, yang mengamati perkembangan revolusi di Indonesia:

> Para Republiken tersebut, yang telah mencapai banyak kemajuan dalam kurun empat tahun selama masa penuh persekongkolan yang memojokkan mereka ataupun yang dapat mereka hadapi, cenderung untuk menolak tawar-menawar terhadap hal-hal yang mereka anggap sepele, yang mereka yakini bisa mereka dapatkan kemudian jika mereka menghendakinya.[14]

Kembali pada niat mendapatkan kemerdekaan segera membuat delegasi Indonesia bersedia menerima klausul penundaan yang diajukan oleh seorang anggota komisi PBB yang berasal dari Australia, Mr. T.K (Tom) Critchley, yang belakangan hari bertugas sebagai dubes di Jakarta. Hasil dari konferensi tersebut adalah status quo wilayah Papua tetap dipertahankan, dan masa depan wilayah tersebut akan menjadi topik utama dalam negosiasi yang akan dilakukan dalam waktu setahun.

Seorang delegasi konferensi yang berasal dari Papua Barat, Johan Ariks, menyatakan sikap menentang dengan tegas segala bentuk pembicaraan yang mengarah pada penyerahan wilayahnya ke Indonesia. Ariks adalah tokoh yang muncul dari kancah peperangan — berasal dari suku Arfak, di wilayah Manokwari. Selama masa Perang Dunia II, anak laki-lakinya telah dieksekusi oleh Jepang setelah tertangkap bersama sekelompok gerilyawan Papua dan Belanda lainnya. Ariks sendiri telah lama aktif dalam kelompok perlawanan. Ia adalah seorang yang berpendidikan, mengenyam bangku sekolah di sebuah seminari di Jawa yang di-

kelola Belanda. Ia menguasai bahasa Belanda dan Melayu, dan cita-citanya tentang masa depan Papua, sebagaimana dilakukan oleh Franz Kaisiepo sebelumnya, sangat mengejutkan delegasi Indonesia. Hampir dua puluh tahun sesudahnya, laki-laki yang sudah berumur itu memimpin sebuah pemberontakan yang disebutnya sebagai pemberontakan massa Arfaks dan akhirnya ia meninggal saat dipenjara Indonesia.

Pendapat seperti yang dikemukakan Ariks adalah hal yang umum ditemui di antara para pemimpin Papua Barat, tapi sementara itu ada pula yang berpendapat beda. Pada bulan Oktober 1949, tiga orang yang berasal dari Biak, Lukas Rumkorem, Corinus Kery dan Julianus Tarumaselly membentuk sebuah Partai Kemerdekaan Indonesia di Bosnik, tujuannya adalah agar Nugini yang berada di bawah kekuasaan Belanda untuk bergabung dengan Indonesia. Ketiganya ditangkap oleh intelijen Belanda dan partai tersebut dinyatakan ilegal. Saat Rumkorem membuat gerakan bawah tanah dengan membentuk Tentara cadangan cendrawasih, beberapa penduduk desa bergabung dengannya. Pada tahun 1958, Rumkorem dan para pengikutnya ditangkap dan dikirim ke kamp penjara kuno di Tanah Merah. Pada tahun 1963 ia mendapat penghargaan atas perjuangannya dan diangkat menjadi staf Angkatan Laut Indonesia.

Di beberapa kota pantai lain sebenarnya terdapat kelompok yang secara diam-diam mendukung Indonesia, sebagian besar di antaranya adalah para imigran dari pulau-pulau non-Melanesia ke arah wilayah barat. Orang-orang Papua pada waktu itu banyak yang berubah pikiran untuk

mendukung Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pengambilalihan tersebut memang merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, dan bermaksud mendukung pihak yang menang. Ketika strategi ini ternyata keliru, maka timbul kekecewaan yang mendalam bagi mereka. Saat ini beberapa pemimpin OPM adalah mantan pendukung kolaborasi dengan Indonesia.

Dalam kurun waktu satu tahun setelah Konferensi Meja Bundar, ternyata kedua belah pihak telah saling melanggar kesepakatan. Indonesia telah mengubah struktur negara republik yang semula berbentuk federal ke bentuk kesatuan. Sedangkan Belanda telah memulai program darurat untuk mereorganisasi administrasi Papua. Perubahan yang pertama adalah dengan membagi wilayah tersebut menjadi 4 distrik. Pemerintahan Soekarno mencela tindakan Belanda dan mendeklarasikan bahwa wilayah kekuasaan Indonesia diperluas menjadi seluruh wilayah yang pernah menjadi jajahan Belanda. Dua konferensi antarmenteri selanjutnya diadakan untuk membahas masa depan Papua Barat, tapi keduanya gagal mencapai kesepakatan. Setelah itu tidak ada lagi usaha untuk melanjutkan negosiasi.

Di tahun 1950, pemerintahan Australia telah berpindah tangan, yaitu dengan naiknya Robert Menzies, dari partai konservatif, ke tampuk kekuasaan. Platform kebijakan luar negeri mereka tampak dari statemen yang dibuat oleh Menteri Percy Spender. Intinya adalah anti-komunisme, meskipun Spender tidak menyatakannya secara langsung, kesuksesan politik PKI di Indonesia menimbulkan kekhawatiran Australia. Pada pemilu tahun 1955, PKI memenangkan

6 juta suara, yang merupakan 16 persen dari total penduduk, serta menjadi partai terbesar keempat. Pada pemilu lokal dua tahun kemudian, partai tersebut telah menjadi partai terkuat kedua di Jakarta, terkuat di Jawa Tengah, serta urutan kedua di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1963, keanggotaan partai tersebut telah mencapai jumlah 6,5 juta orang, yang menjadikannya partai komunis terbesar di dunia selain di Uni Soviet.

Karena alasan ini, dan juga karena alasan perbedaan kultural, Australia tidak menginginkan Indonesia menguasai Papua Barat. Baik Dr. Evatt maupun ALP, keduanya sepakat menyetujui pendapat bahwa komunisme Indonesia adalah suatu ancaman, dan orang-orang Melanesia tidak boleh dikuasai oleh orang-orang Indonesia. Pendapat ini secara tidak langsung mendukung Belanda. Kerajaan Belanda mempercayai dukungan Australia dengan catatan sepanjang Belanda akan mengusahakan agar wilayah tersebut tidak tertinggal dari wilayah timur perbatasan tersebut. Pada prakteknya, Belanda mendahului apa yang telah dilakukan Australia, dengan mencanangkan program yang bervariasi yang intinya membantu meningkatkan tingkat kemajuan penduduk, ekonomi dan politik di Papua Barat. Kerajaan Belanda mengakui bahwa kondisi wilayah serta masyarakat yang masih terbelakang akan mempersulit keberhasilan program tersebut. Tetapi ia berjanji bahwa dalam kurun satu dekade sudah akan ada orang Papua yang terdidik dan terlatih yang dilibatkan dalam pemerintahan.

Sekolah-sekolah dan akademi didirikan untuk melatih staf militer dan kepolisian, para pekerja kesehatan, serta

sejumlah pejabat pemerintahan. Tetapi tidak ada universitas, sementara lapangan pekerjaan di luar bidang pemerintahan sangat terbatas. Pada akhir dari "program 10 tahun" tersebut, tercatat jumlah tenaga kerja yang merupakan penduduk asli hanyalah 19.000 orang dari keseluruhan jumlah populasi yang tercatat yaitu 717.055, dan lebih dari separuh tenaga kerja tersebut hanya pegawai rendahan. Pada tahun yang sama, 1961, populasi para imigran tercatat terdiri dari 15.500 orang Eropa dan 16.600 orang Asia, yang sebagian besar adalah orang-orang Indonesia yang telah dibawa Belanda ke Papua untuk mengisi posisi menengah di pemerintahan kolonial; jadi bisa dibilang orang Papua yang sudah terdidik tidaklah ada. Bagi penduduk setempat, berhubungan dengan pemerintah berarti akan berhubungan dengan orang-orang Indonesia, yang sebagian besar di antaranya merasa superior dibanding orang kulit hitam yang masih primitif itu. Lapis menengah masyarakat tersebut tidak pernah benar-benar berusaha menutupi perasaan mereka dan interaksi antara kedua ras tersebut sering diwarnai ketegangan. Lebih lanjut, kerajaan Belanda tidak pernah sungguh-sungguh berusaha membuka wilayah pedalaman wilayah itu, di mana separuh lebih masyarakatnya tinggal. Bahkan usahanya dalam memajukan perdagangan setempat juga hanya terbatas pada kota-kota pinggir pantai. Investasi hanya dimungkinkan untuk usaha kecil seperti restoran dan pengoperasian angkutan umum, sedang masyarakat kebanyakan tidak terbantu. Sementara itu ketidakpastian politik menghalangi investasi dari sektor swasta.

Bagi kerajaan Belanda, biaya untuk memodernkan Pa-

pua secara ekonomis dapat dikatakan jauh dari menguntungkan. Pada tahun 1950, defisit wilayah tersebut mencapai $4.4 juta, sekitar separuh dari total pengeluaran. Sepuluh tahun kemudian mereka telah mengeluarkan sekitar $43.7 juta, dengan defisit sebesar $35.6 juta. Bahkan, seperti ditulis oleh ekonom bernama Ross Garnaut, jumlah tersebut bisa disamakan dengan subsidi sebuah metropolitan bila dilihat bahwa hampir separuh penghasilan yang diterima merupakan hasil dari transaksi administratif internal. Itupun masih ditambah dengan sejumlah angka substansial yang berasal dari pengeluaran secara langsung yang dilakukan oleh departemen-departeman pemerintah termasuk di antaranya dinas militer Belanda.[15]

Meskipun usaha Belanda yang sebenarnya sudah terlambat tersebut dapat dikatakan tidak merata, tetapi paling tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Indonesia selama tahun 1950-an. Kondisi perekonomian negara republik tersebut memburuk; terjadi kekurangan pangan, kurangnya bahan pangan pokok, dan puncak dari semua itu adalah korupsi yang juga meningkat. Dilihat pula secara politis, perbedaan yang mencolok antara kedua wilayah tersebut juga semakin kentara. Bila di Indonesia terjadi pemberontakan-pemberontakan daerah yang mengancam keutuhan Republik, maka masyarakat Nugini yang sudah lama terbelakang justru sedang bergerak maju, walaupun dengan pelan, ke arah keterpaduan. Menyadari bahwa semakin lama semakin tidak menguntungkan, kerajaan Belanda, mulai tahun 1944, menyokong terwujudnya kelompok elite masyarakat Papua yang dapat membangun sebuah

pemerintahan yang terdiri dari penduduk asli secepatnya, untuk menghalangi tekanan pengambilalihan wilayah oleh Indonesia. Orang-orang Papua Barat yang telah dilatih di institusi-institusi yang disponsori Belanda seperti sekolah administrasi, lembaga pendidikan kepolisian dan batalion menjadi figur pemimpin gerakan untuk meraih kemerdekaan, atau bila tidak menjadi pemimpin gerakan nasionalis. Orang-orang ini berasal dari berbagai daerah di wilayah Nugini, dan selama beberapa tahun segala bentuk persaingan regional dikesampingkan untuk kepentingan perkembangan wilayah itu sendiri. Belakangan hari, pada masa-masa gencarnya kemunculan nasionalisme tersebut, terjadi perpecahan antara mereka yang berasal dari pulau Biak dengan yang dari daerah pedalaman, khususnya mereka yang berada di daerah Hollandia. Perpecahan tersebut sebetulnya bersifat taktis, di mana kelompok Biak yang percaya bahwa Indonesia yang anti kolonial akan lebih bisa menjadi rekan dalam meraih kemerdekaan ketimbang Belanda, tentu saja dengan disertai kepentingan pribadi di dalamnya. Belakangan mereka berencana untuk berpaling dari Indonesia. Sedang kelompok pedalaman terus menaruh harapan pada Belanda. Tokoh-tokoh terkemuka dalam elite Papua adalah Nicolass Jouwe, Franz dan Markus Kaisiepo, Martin Indey, Amos Indey, Lukas Rumkorem, Silas Papare, Herman Wayoi, Johan Ariks, Eliezer Bonay, Herman Womsiwor dan Mandatjan bersaudara.

Pada tahun 1957, Kerajaan Belanda telah membuat rekor yang lebih baik dalam hal lokalisasi daerah koloninya ketimbang Australia. Sekitar 30 persen pos pemerintahan telah ditangani oleh orang Papua dan 95 persen tujuan yang

akan mereka raih pada tahun 1970, tampaknya bisa dicapai. Meski masih ada banyak celah untuk kritik — contohnya adalah penduduk asli Papua masih jarang yang menduduki posisi yang lebih tinggi — tetapi Belanda jelas-jelas telah berusaha keras. Lebih lanjut, beberapa perencanaan telah diumumkan kepada anggota parlemen setempat yang dibentuk pada tahun 1961.

Indonesia merasa prihatin. Papua tampaknya akan lepas dari genggaman dalam waktu singkat, khususnya dengan adanya janji Australia untuk mengkoordinasikan pembangunan dari kedua bagian pulau tersebut. Sementara itu menteri dalam negeri Indonesia waktu itu, Ide Anak Agung, menyatakan bahwa kepentingan untuk "membawa Irian Barat ke dalam Republik" sudah menjadi "falsafah" bagi para pemimpin negara baru tersebut. Pelepasan "Irian" dari Indonesia memberikan kesempatan bagi presiden Soekarno untuk kembali mengobarkan rasa nasionalisme rakyatnya dan lebih lanjut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian mereka dari kondisi perekonomian yang memburuk. Pemimpin yang karismatik tersebut meminjam sebuah slogan yang pernah dipakai Belanda untuk menggambarkan kepulauan yang letaknya berpencar-pencar tersebut. Slogan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan dicanangkan dalam sebuah kampanye yang menjanjikan bahwa Indonesia suatu hari nanti akan terhampar "dari Sabang sampai Merauke". Sabang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian utara pulau Sumatra, sedang Merauke terletak di ujung tenggara Papua jajahan Belanda. Selama bertahun-tahun hal ini menjadi "alat untuk menarik simpati" bagi

Soekarno, melalui pidato-pidato yang kerap kali dihadiri jutaan orang. Untuk lebih mempertegas klaimnya kepada dunia luar, Soekarno mengutus wakilnya ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang baru bangkit dari kolonialisme. Mereka membuat brosur-brosur berisi latar belakang historis yang mendukung klaim yang dilontarkan Indonesia. Salah satunya adalah, "*West Irian — An Essential Part of Indonesia*" dicetak di kedutaan Indonesia di Canberra untuk disebarluaskan di Australia. Brosur tersebut meyakinkan para pembacanya bahwa Indonesia tidak membuat klaim apa pun terhadap wilayah-wilayah seperti Kalimantan Utara — tentu saja ini adalah pemutar balikan fakta — ataupun wilayah Timor Timur, yang tidak pernah menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Tetapi Papua Barat adalah hal yang berbeda. Bukan saja karena daerah tersebut pernah menjadi jajahan Belanda, tetapi juga karena wilayah tersebut pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Dan yang terpenting, wilayah tersebut pernah berada di bawah kekuasaan Sultan Tidore sejak 1660.

Sebagaimana dicatat oleh Ali Sastroamidjoyo dalam memoarnya, bahwa Indonesia telah memenangkan dukungan konferensi Perdana Menteri yang diadakan di Colombo dan Bogor (1954), serta konferensi Asia Afrika di Bandung (1955). Pada tahun 1957, menteri luar negeri Indonesia, Dr. Subandrio melontarkan sebuah pidato yang melodramatik di hadapan komite politik PBB, sebagai berikut:

> "Penentuan nasib sendiri" baru-baru ini telah diterapkan dan diperkenalkan dalam masalah Irian Barat ..... Penerapan konsep penentuan nasib sendiri dari Belanda berkaitan dengan

> Irian Barat ini akan berarti bahwa kami juga harus menerima konsep tersebut diterapkan di pulau-pulau atau wilayah-wilayah lain dan konsekuensinya adalah disintegrasi negara nasional Indonesia.

Subandrio melanjutkannya dengan membanggakan kemerdekaan yang diraih Indonesia dan memberi alasan-alasan mengapa mereka berkeinginan untuk memperluas kekuasaan sampai Papua. Salah satu alasan tersebut adalah kekhawatiran akan kedatangan lebih banyak pendatang kulit putih di Papua yang bisa mengancam keberadaan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Dalam pidatonya sama sekali tidak disebutkan keprihatinan mereka akan masa depan masyarakat Papua. Pidato menteri tersebut diakhiri dengan janji bahwa penyelesaian masalah Papua Barat tidak saja akan menormalisasikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda tetapi juga menjadi kepentingan bersama masyarakat internasional, "termasuk, tentu saja, negara tetangga kami, Australia".

Di Nugini sendiri, Australia adalah tetangga bagi kerajaan Belanda. Pada bulan November 1957, keduanya menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka dengan didasarkan pada kesamaan etnis dan geografis. Kesepakatan tersebut menjanjikan bahwa proses tersebut akan terus berlanjut tanpa adanya campur tangan "sampai penduduk asli setempat siap untuk menentukan masa depan mereka sendiri".

Beberapa orang di Australia dipersiapkan untuk mem-

bantu pelaksanaan lebih lanjut, dalam kaitannya dengan persamaan tersebut. J.R (belakangan disebut Sir John) Kerr, dalam paper yang dipresentasikannya di sebuah seminar pada awal tahun 1958, mengusulkan sebuah Federasi Melanesia yang menyatukan kedua bagian wilayah di pulau Nugini sebagaimana halnya di negara-negara lain. Seorang pengamat menyatakan bahwa peserta seminar di Canberra tersebut memandang usulan Kerr sebagai "sesuatu yang radikal". Tetapi Belanda mendukung usulan tersebut karena bentuk federasi semacam itu akan semakin menjauhkan Nugini dari jangkauan Indonesia. Menanggapi usulan tersebut — bisa dikatakan mewakili jalur konservatif — Arthur Calwell, seorang pimpinan ALP, lebih memilih untuk tetap mempertahankan status quo wilayah tersebut. Seorang Deputinya yang bernama Gough Whitlam, mendukung ide di bawah pengawasan PBB, sebagaimana yang terjadi di Nugini Timur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Australia sebaiknya "membeli" bagian barat dari Kerajaan Belanda. Yang jelas, pemerintah Australia masih menyatakan dukungan terhadap kehadiran Belanda.

Semua posisi ini berlawanan dengan posisi Indonesia, yang telah mendapat perhatian masyarakat internasional meskipun pada saat itu prinsip "penentuan nasib sendiri" telah diabadikan dalam piagam PBB. Yang tampak berlawanan dalam hal ini adalah dukungan kuat terhadap hak-hak penduduk asli yang dinyatakan oleh konferensi Asia Afrika, diselenggarakan di Indonesia dua tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya dunia belum sepenuhnya percaya pada Indonesia dalam hal ini. Majelis Umum PBB telah tiga kali

mendebat masalah "Irian Barat" dan Soekarno gagal untuk mendapatkan dua pertiga suara mayoritas untuk mendukung klaim yang dilontarkannya.

Saat Indonesia menolak desakan untuk membawa perselisihan tersebut ke Majelis Umum, maka jelaslah bahwa negosiasi damai sedang mendekati kegagalan. "lonceng kematian" telah berbunyi saat Soekarno mengambil alih investasi Belanda yang masih ada di Indonesia.

Perang mulai berkobar, tetapi segera tampak bahwa sekutu terdekat Belanda yaitu Australia akan menghindari konflik dengan Indonesia disebabkan sekutunya yang lain tidak menginginkannya terlibat. Pemerintahan Menzies tahu bahwa baik Amerika Serikat maupun Inggris tidak ada yang mau berperang dengan Soekarno. Walaupun mereka tidak menyukai jalur politik Soekarno, mereka mulai mundur dari posisi mereka semula. ALP melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut, dalam sidang parlemen pada tahun 1959, meski nampaknya tak mungkin bila pemerintahan partai buruh akan bersikap sangat berbeda dengan Menzies.

Sementara itu Belanda tetap melanjutkan laju pembangunan yang dibilang terlambat tersebut. Hasil pembangunan tersebut dipuji oleh seorang pegawai pemerintah Australia yang telah berkunjung ke wilayah tersebut. Untuk mendapatkan laporan berkala, Australia menempatkan seorang *liaison officer* (petugas penghubung) bernama Patrick Mollison di wilayah jajahan Belanda tersebut. Laporannya, yang juga menguntungkan pihak Belanda tersebut, diberikan kepada PM Menzies dan R.G (belakangan disebut Lord) Casey, menteri luar negeri, sebagai upaya untuk menarik perhatian

mereka. Tetapi rupanya Australia telah berubah pikiran dan pandangan baru tersebut mereka lontarkan pada saat kunjungan Dr. Subandrio. Dari sebuah kesepakatan bersama terlihat bahwa Australia tidak akan menghalangi terjadinya pemindahan kekuasaan sepanjang dilakukan melalui proses damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional. Sementara itu Dr. Evatt, dari ALP, menyatakan protes keras. Pada saat menteri untuk wilayah Nugini, Paul Hasluck, bertemu dengan petinggi Belanda di Belanda pada tahun berikutnya, ia diberi tahu bahwa mereka dapat memahami Australia yang memang harus mempertimbangkan masa depan hubungannya dengan Indonesia. Mereka menyatakan bahwa kerajaan Belanda tidak ingin berperang dengan Indonesia, khususnya tanpa adanya dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Hasluck, Belanda:

> Lebih cenderung — secara tidak disadari — untuk bisa memperkenalkan bentuk pemerintahan sendiri lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan, dengan harapan bahwa opini dunia akan menentang segala bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Papua Barat sebagai negara merdeka dengan pemerintahan sendiri.[16]

Presiden Soekarno menyadari strategi kerajaan Belanda tersebut dan memutuskan untuk mendahuluinya. Penetapan hari kemerdekaan wilayah itu pada bulan Agustus 1960 oleh Soekarno memperlihatkan untuk pertama kalinya keinginannya untuk menggunakan kekuatan. "Ini adalah perintah", katanya pada kerumunan massa yang bergemuruh menyambutnya, "bahwa kabinet yang sekarang ini mengemban tugas untuk membebaskan Irian Barat dengan cara

serevolusioner mungkin dalam konteks Revolusi Nasional Indonesia."

Indonesia mulai membeli senjata. Sesudah ditolak mentah-mentah oleh Eisenhower di Amerika Serikat, maka menteri pertahanan Indonesia, Jenderal Nasution berpaling pada Uni Soviet. Di Moscow, menurut salah seorang kolega Nasution yaitu Menteri Dalam Negeri Ide, para utusan tersebut mendapat sambutan secara khusus dengan "karpet merah terhampar". Pernyataan yang dilontarkan oleh 'masyarakat dan pemerintah" Uni Soviet menunjukkan simpati dan dukungan mendalam terhadap 'keinginan sepihak" masyarakat Indonesia untuk reunifikasi Irian Barat, yang digambarkan sebagai bagian dari "wilayah asli" Indonesia. (Belakangan, Republik Rakyat China juga memberikan dukungan serupa). Sesuai dengan pernyataan yang telah dilontarkan, sejumlah US$ 450 juta bantuan lunak diberikan untuk dibelanjakan dalam bentuk berbagai jenis peralatan perang modern, termasuk di antara kapal selam, kapal pemburu, pesawat tempur dan pesawat pembom berukuran sedang. Disusul kemudian dengan jenis bantuan lain. Seperti ditulis oleh Dr. Leifer dalam bukunya yang berjudul *Indonesia's Foreign Policy*, bahwa beberapa diantaranya peralatan perang itu berasal dari sekutu Soviet seperti Polandia dan Cekoslovakia. Dengan maksud untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet, Amerika Serikat juga memberikan bantuan. Dalam waktu dua tahun, Indonesia telah mengeluarkan lebih dari $2 miliar untuk memperkuat militernya. Jumlah tersebut merupakan setengah dari keseluruhan anggaran negara. Sebagian besar peralatan yang dibeli tersebut sudah siap

dan ditujukan untuk pengoperasian di Papua.

Dalam pidatonya, Soekarno melanjutkan desakannya terhadap perluasan wilayah Indonesia sepenuhnya dari Sabang ke Merauke, dan menjanjikan bahwa hal itu akan segera dapat direalisasikan. Ia memberi tekanan pada istilah barunya, Trikora, kependekan dari Tri (Tiga) Komando Rakyat. Ini merupakan sebuah kebulatan tekad untuk mencegah adanya Papua buatan Belanda yang isinya Kibarkan Sang Merah Putih di Papua Barat; Gagalkan pembentukan Negara Boneka di Papua Barat; dan Persiapan memobilisasi, bilamana diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara.

Saat berkunjung ke Australia, Jenderal Nasution meyakinkan bahwa cara kekerasan tidak akan dipakai. Sementara itu, saat ditanya apa yang akan dilakukan Belanda bila diserang, dua pegawai senior Belanda yaitu Toxopeus dan Bot mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankannya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Mereka merasa yakin bahwa kekuatan keamanan Belanda akan dapat menghadapi infiltrasi tersebut, tetapi tidak untuk penyerangan yang berskala besar. Selanjutnya, kata mereka, PBB pasti akan terlibat, dan diharapkan kekuatan Pasifik seperti Amerika Serikat dan Australia akan terlibat pula.

Di Papua, pemerintah kolonial Belanda saat itu sedang mengabaikan masalah persenjataan dan lebih menekankan pada perencanaan demokratisasi daerah koloninya. Program itu dimulai setelah perang, dengan membentuk dewan perwakilan yang dipusatkan di Biak. Selanjutnya, perwakilan daerah dibentuk di kota-kota pedalaman. Hasil dari pro-

ses tersebut adalah diadakannya pemilihan untuk pembentukan dewan perwakilan Papua Barat (*Volksraad*) di Hollandia. Pemilihan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara dengan pemberian hak suara kepada siapa saja yang telah berumur 21 tahun ke atas dan yang telah tinggal di Papua selama tiga tahun atau lebih. Berdasar peraturan perundangan mengenai pemilihan, setiap 50 orang dapat memilih satu orang perwakilan. Mereka nantinya akan memilih seorang anggota dewan. Dari jumlah keseluruhan 28 orang, 16 anggota dewan tersebut dipilih, sedang 12 sisanya ditunjuk oleh Gubernur. Dua kursi akan disisakan untuk kaum minoritas yang tidak terwakili suaranya.

Kaum terdidik di perkotaan membentuk partai-partai politik, di mana sebagian di antaranya pro-Indonesia, seperti: Komite Indonesia Merdeka (KIM), dan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII). Wilayah utama yang pro-Indonesia adalah Fak-Fak yang telah menjadi benteng pemeluk agama Islam. Sebuah organisasi pemuda Indonesia berbasis kader revolusioner Islam telah dibubarkan secara paksa oleh kolonial Belanda.

Sebagian besar dukungan untuk partai-partai tersebut berasal dari pendatang dari Indonesia — mereka yang berada dalam strata masyarakat antara dijajah dengan yang menjajah — dengan dukungan orang-orang Papua.

Marthin Indey, Lucas Rumkorem dan Silas Papare — yang telah diberi salib perunggu oleh sekutu karena pengabdian mereka selama masa perang — merupakan sebagian dari kaum intelektual yang mengabsahkan sentimen Soekarno mengenai pembebasan Papua dari kolonialisme. Ko-

mitmen mereka selanjutnya adalah memperluas lapisan di elite Papua, dan telah mulai mereka lakukan sebelum pecah PD II. Sekali lagi, cenderung terdapat batas antara mereka yang berada di Biak dengan wilayah pedalaman. Meskipun beberapa aktivis non-Biak, seperti Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe, telah memberikan dukungan terhadap Indonesia, mereka segera secara berangsur-angsur berpaling terhadap kolonial Belanda.

Mayoritas partai-partai baru yang mendukung Belanda diikuti oleh kelompok masyarakat yang menuntut penentuan nasib sendiri. Termasuk dalam kelompok ini adalah Partai Kesatuan Nugini yang dibentuk oleh John Ariks, yang telah menghina Indonesia di *The Hague* pada tahun 1949, dan Partai Persatuan, yang dibentuk oleh tokoh lainnya, Lodewijk Mandatjan, yang pernah melontarkan permintaan kemerdekaan Papua tidak melewati dari tahun 1975 — secara kebetulan Papua Nugini meraih kemerdekaannya pada tahun itu. Yang juga penting untuk dicatat adalah Partai Nasional (PARNA), yang memperjuangkan lokalisasi, peningkatan pembangunan sosial dan peningkatan kesempatan dalam perdagangan. Para pimpinan PARNA sebagian besar berasal dari satu-satunya wilayah di mana terdapat serikat perdagangan, Serikat Pekerja Kristen Nugini, yang keanggotaannya semula didominasi oleh orang-orang Belanda dan Eropa lain, pada tahun 1960 bergeser menjadi orang-orang Papua.[17]

Respons masyarakat terhadap voting, yang dilaksanakan selama lebih dari seminggu pada bulan Februari, bervariasi. Jumlah terbanyak yaitu 80 persen, berasal dari dua

daerah utama: Hollandia dan Manokwari, dan 50 persen dari daerah yang banyak didukung oleh pendatang dari Indonesia. Serui mencatat 53 persen pemilih yang hadir. Fak-Fak dan Sorong 55 persen. Jadi keseluruhan tercatat hanya 100.000 orang yang memberikan hak suara.

Sebanyak 22 dari 28 kursi dimenangkan oleh kelompok masyarakat Papua, dan perasaan yang mendominasi anggota dewan adalah anti Indonesia. Dewan tersebut diresmikan pada bulan April 1961 di sebuah bekas gedung sekolah Belanda yang telah dibangun kembali. Delegasi parlementer dari Belanda, Australia dan PNG hadir dalam acara tersebut, tetapi Amerika Serikat tidak hadir secara terang-terangan. Masa kerja anggota Dewan tersebut adalah 10 tahun, di mana kemerdekaan dapat mereka deklarasikan jika dikehendaki oleh masyarakat. Sementara itu, dewan tersebut akan mempunyai hak penuh untuk melakukan kontrol terhadap perencanaan daerah, juga terhadap bantuan dana dari Belanda.

Perkembangan ini sangat membuat marah Soekarno, dan ia mulai meningkatkan perang pernyataan dan slogan. Dengan maksud untuk menghalangi Soekarno menteri luar negeri Belanda, Dr. Joseph Luns, pada akhir tahun 1961 melakukan lobi terhadap PBB dengan tujuan agar PBB segera melakukan tindakan *"Luns Plan"*. Tujuannya adalah administrasi sementara di bawah pengawasan internasional dan lebih mempercepat transfer kekuasaan kepada Papua. Belanda akan melanjutkan bantuannya dalam hal finansial. Walau ada beberapa dukungan terhadapnya, khususnya dari negara-negara di Afrika, proposal tersebut ditolak. Kem-

bali ke negara Belanda, opini publik mulai berubah mengarah kepada adanya penyelesaian ketimbang konflik. Perubahan pandangan dari Gereja aliran baru Belanda juga besar pengaruhnya.

Di Papua sendiri, keberadaan *Luns Plan* tersebut mendorong para anggota kelompok elite pro kemerdekaan untuk bertindak. Anggota dewan merancang manifesto, membentuk komite nasional serta mengadakan pertemuan sekitar 70 orang tokoh Papua. Pertemuan tersebut menyepakati nama Papua Barat untuk bangsa mereka dan mendukung pemilihan bendera berlambang Bintang Kejora, serta lagu kebangsaan berjudul "Tanahku Papua". Segera sesudahnya, sebuah pertemuan khusus dari anggota dewan diadakan untuk memberi dukungan resmi terhadap tindakan tersebut, dan Belanda memberikan restunya. Mereka tampaknya yakin bahwa dekolonisasi politik semacam itu akan bisa membuktikan bahwa klaim Indonesia adalah tanpa dasar dan akan membuka jalan bagi sebuah transisi damai terhadap dominasi neokolonial.[18] Walau sejauh ini biaya untuk wilayah tersebut telah memberatkan Belanda, tetapi dipercaya bahwa suatu saat sumber daya alam yang tersedia akan menjadi sumber perekonomian yang tak ada habisnya. Dan meskipun beberapa tahun setelah itu perkiraan tersebut tidak kunjung terjadi, tetapi Belanda ternyata benar, dan bila dilihat dari kepentingan komersial maka pihak Belanda telah menderita kerugian banyak sekali. Saat ini, didorong oleh kebutuhan modal untuk pembangunan di Indonesia, perusahaan-perusahaan asinglah yang justru mendapat banyak keuntungan dari sumber alam di Papua Barat.

Aktivitas komite nasional telah dipublikasikan secara luas. *Leaflet* yang mempromosikan bendera dan lagu kebangsaan disebarluaskan dan para pegawai pemerintahan kolonial Belanda telah memberikan dukungan terhadap "bangsa baru" tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora dikibarkan di sebelah bendera Tri Warna Belanda. Perayaan besar-besaran diadakan, meskipun tampak jelas bahwa dewan tersebut kurang efektif dalam menjalin hubungan dengan massa di Papua Barat. Gap yang ada di antara kelompok elite — dengan pendidikan Belanda — dengan mayoritas masyarakat pedesaan besar sekali. Dan bisa dikatakan, realitas yang ada sangat jauh berbeda. Delapan bulan kemudian, Bintang Kejora harus diturunkan lagi, menjadikannya sebagai lambang dengan umur paling singkat dalam sejarah di wilayah kolonisasi di Asia.[19]

Usaha untuk mencegah terbentuknya negara Papua Barat diwujudkan dengan pembentukan panitia pengurus wajib militer oleh Soekarno. Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) telah menyusun rencana militer melawan Belanda. Kolonel Soeharto — di kemudian hari menjadi presiden Indonesia — dipromosikan menjadi Jenderal dan ditunjuk sebagai panglima Mandala untuk pembebasan Irian Barat, yang disebut sebagai operasi Mandala. Kantor pusat komando operasi adalah di Makassar, Sulawesi. Dalam biografi yang ditulis Roeder, *The Smiling General*, Soeharto menyatakan bahwa mengkoordinasi seluruh kekuatan yang ada di tubuh angkatan bersenjata (ABRI) merupakan hal yang sangat sulit. Rencana mereka adalah menyusup ke wilayah Papua Barat, untuk menghancurkan dan mengusir

paksa kekuatan musuh, setelah itu digabung dalam satu kekuatan bersama untuk operasi yang lebih besar.

Di bulan Januari 1962, sebelum rencana penyerbuan oleh pasukan parasut, tiga kapal patroli Indonesia berlayar dari kepulauan Aru menuju Papua, tetapi mereka dihadang oleh angkatan laut Belanda. Berhadapan dengan kapal fregat yang lebih canggih, membuat mereka menderita kekalahan total. Dalam sebuah kejadian yang disebut sebagai "insiden teluk Aru", kapal yang dinamai Matjan Tutul tenggelam, menewaskan komodor Jos Sudarso, orang terkuat kedua di dalam angkatan laut Indonesia. Kedua kapal lainnya dipaksa untuk kembali. Serangan laut berikutnya juga berhasil dihalangi oleh pilot pesawat Belanda, Karel Doorman, serta dua kapal pemburu digiring keluar wilayah itu. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda tersebut menjadi keprihatinan dunia, khususnya Amerika Serikat dan Australia. Keduanya menghimbau Soekarno untuk dapat menahan diri dan Belanda untuk bersikap lebih fleksibel. Saudara laki-laki presiden John F. Kennedy, Robert, berkunjung ke Jakarta dan membina hubungan yang "aneh" dengan Soekarno. Di *The Hague*, Kennedy membujuk Belanda untuk bersedia melakukan negosiasi rahasia, tapi hal ini tidak segera direalisasikan selama berbulan-bulan dan sudah terlalu terlambat untuk mencegah pertumpahan darah berikutnya.

JFK menjamu Soekarno di Washington sebanyak dua kali, dan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tinggi hati, yang lebih menitik beratkan pada "sikap dan kegemaran pribadi" ketimbang kesejahteraan bangsanya. Tetapi pertimbangan Kennedy bukan kepada Soekarno-

nya, tapi lebih kepada negara Indonesia yang kaya akan minyak, timah dan karet, di mana nantinya bisa menjadi nilai strategis bagi Amerika. Sewaktu bertemu dengan Belanda, Kennedy menyatakan terang-terangan bahwa Papua bukanlah bagian penting dari dunia sehingga kekuatan-kekuatan besar harus dilibatkan.[20]

Dua puluh tahun setelah pertemuan dengan Kennedy, mantan duta besar Belanda untuk Amerika Serikat, Dr. Van Roijen, menyatakan pada *Haagse Post* (21 Maret 1981) bahwa Kennedy memberi penekanan pada kewajiban moral Belanda terhadap Papua. Ia menjawab, apakah hal ini bisa dikomparasikan dengan perasaan Amerika terhadap rakyat Berlin Barat, kemudian presiden JFK menjawab, "Hal itu merupakan masalah yang jelas-jelas berbeda... Ada 2¼ juta penduduk yang tinggal di sana (Berlin Barat).... sedang orang-orang Papua hanya berjumlah 700.000 dan masih berada di zaman batu". Van Roijen menyatakan bahwa ia masih terlalu sopan untuk menanyakan kepada Kennedy apa pula kaitannya hal ini dengan "hitung-hitungan harga telur" (telur, baik berwarna apa pun, tetaplah telur dan seharusnya dihargai sama).

Pengabaian terhadap Papua tersebut dipicu oleh keputusan Amerika untuk menjauhkan Indonesia dari kubu Soviet. Dengan mendukung Soekarno maka berarti Amerika akan dapat meningkatkan pengaruhnya di Jakarta. Tetapi dua hambatan masih tetap ada; yaitu sekutu Amerika Serikat: Belanda dan Australia. Secara resmi, perilaku Amerika Serikat pada saat itu tampak dalam *National Times* tanggal 8 Februari 1985, saat seorang sejarawan Australia yang

berhasil mengutip dokumen yang diperoleh di bawah undang-undang kebebasan memperoleh informasi Amerika Serikat, menerbitkan beberapa memo yang ditulis oleh beberapa pejabat tinggi. Salah seorang staf gedung putih, Walt Rostow, mengatakan kepada presiden Kennedy bahwa Australia harus dipaksa untuk bisa melihat bahwa penyelesaian semacam ini adalah untuk kepentingan jangka panjang agar tidak terjadi "risiko Indonesia jatuh pada komunisme". Salah seorang staf lainnya, Robert Komer, pada bulan November 1961 menulis:

> Tidak dapat dielakkan bahwa cepat atau lambat Irian Barat akan beralih ke Indonesia. Satu-satunya pertanyaan yang muncul adalah: akankah kita terlibat dalam proses tersebut dan oleh karenanya kita akan mendapat keuntungan, atau akankah kita biarkan isu tersebut dimanfaatkan oleh blok lawan kita. Semua bantuan ekonomi dan militer yang dapat kita berikan pada Soekarno akan lebih memberikan keuntungan kepada kita ketimbang menguntungkan obsesinya yang menggebu. Jadi dengan kegagalan strategi kita melalui PBB, maka kita harus melepaskan cara itu dan mengubah pendirian dengan terang-terangan memihak Indonesia selagi masih ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara politis dari kasus ini. Kita, Belanda dan Australia, harus mau menghadapi kenyataan bahwa saat ini kita harus menerima hegemoni Indonesia terhadap Irian Barat, dan kalau perlu mendukungnya.

Sebuah memo lain memperlihatkan anjuran pemerintah mereka kepada Australia bahwa,

> Negara Indonesia yang nonblok, kalau tak bisa dibilang komunis, merupakan sebuah ancaman yang jauh lebih besar bagi mereka, dan kita, daripada sekadar kepemilikan Indonesia ter-

hadap ribuan hektar persegi tanah para kanibal.

Pemerintah Australia, yang kukuh anti komunis, tidaklah sulit untuk diyakinkan.

Usaha Australia untuk mendesak adanya penyelesaian damai dipelopori oleh menteri luar negeri mereka, Sir Garfield Barwick, yang sebelumnya telah direstui oleh perdana menteri mereka.

> Pada tahun 1962-63, saya masih menjadi taruna akademi angkatan laut. Bagian terbesar dari pemerintah kami belum merasakan konsekuensi dari hubungan sebelumnya, ataupun yang baru. Saya tidak pernah punya masalah dengan Sir Robert (Menzies) mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Lebih lagi, ini sungguh sangat mengherankan, dengan dukungan dari kabinet ... Menzies dan saya telah membina hubungan cukup lama dan ia bersedia menerima penilaian saya mengenai beberapa hal, termasuk masalah Irian Barat.[21]

Barwick merasa bahwa Belanda tidak akan "meningkatkan tindakannya secara militer" dan juga merasa bahwa Indonesia tidak akan mampu untuk mengerahkan pasukan, bahkan satu brigade pasukan pun untuk menyeberang jarak yang demikian jauh. Sebagai gantinya, ia dan juga Australia, percaya bahwa hari-hari Belanda akan segera berakhir. Ia menceritakan perihal tersebut kepada rekannya, Joseph Luns, yang sangat ia hormati. Barwick menyatakan:

> Sebagaimana telah diputuskan, kepulauan Indonesia sangatlah penting bagi Australia. Kami tidak bisa berbuat banyak terhadap rasa permusuhan Indonesia yang bisa menjadi sebuah ancaman bagi kami. Mereka mempunyai banyak sumber kekayaan alam dan juga sejumlah besar penduduknya

dibekali bakat alam. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak cakap. Dan konsekuensinya bagi saya bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk "memperbaiki pagar". Saya mengingatkan Anda bahwa Evatt pernah menghendaki kondisi semacam ini pada saat masih menjabat, tapi tidak dengan Spender ataupun Casey. Mereka menentukan pilihan lain, mereka telah menjadi Belanda-*oriented* dan Eropa-*oriented*.Saya merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk benar-benar mengubah front, dan itulah yang telah saya lakukan.
Saya rasa orang-orang dari partai buruh akan sependapat .... Mereka adalah "hama" dekolonisasi jika tidak memikirkan akibat yang mungkin terjadi. Saya tidak pernah merasa ada tentangan dari pihak oposisi tersebut. Mereka hanya perlu untuk diyakinkan di antara sesama mereka. Satu hal yang menguntungkan saya adalah bahwa Menzies dan saya berhubungan baik. Ia tidak pernah ikut campur.

Hasil kerja Sir Garfield dan para pendukung dekolonisasi asing lainnya tampaknya akan terlaksana pada bulan Maret pada saat perwakilan dari kedua belah pihak mulai mengadakan pembicaraan di Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, yang di kemudian hari menjadi duta besar untuk Moscow. Mediator pertemuan — ditunjuk oleh Sekjen PBB U. Thant — adalah seorang diplomat Amerika bernama Ellsworth Bunker. Untuk kesempatan tersebut, ia memilih tempat tinggalnya yang terletak di pedesaan, yaitu di Huntland, dekat Washington. Tetapi dalam waktu lima hari Soekarno memanggil pulang para stafnya. Belanda merespon dengan menyebarkan lebih banyak pasukan di Papua, jumlah keseluruhan menjadi 7.600 orang, termasuk di antaranya orang-orang Papua sendiri. Pada bulan April, Soekarno memerintahkan operasi Mandala untuk dimulai. Sekitar 130 orang pasukan penerjun diturunkan

di dekat pusat wilayah pantai barat. Menurut Indonesia, mereka adalah para sukarelawan muda dan Jenderal Nasution menyatakan bahwa mereka akan terus berdatangan dan akan digantikan pasukan biasa bilamana diperlukan. Sementara itu 75.000 orang tentara telah ditempatkan di pulau-pulau terdekat.

Komando pasukan Indonesia, yang sebenarnya adalah anggota tentara, menderita kekalahan telak, mereka terkecoh oleh pepohonan lebat di hutan yang menjebak serangan udara mereka dan di sektor darat, mereka mendapat hambatan dari penduduk yang bersikap memusuhi mereka. Mereka terkejut mendapati bahwa masyarakat tidak menyambut mereka sebagai pembebas. Banyak anggota pasukan mereka yang tewas dan lainnya menyerahkan diri kepada Belanda. Secara keseluruhan, sebagaimana ditulis oleh Hamish McDonald dalam *Soeharto's Indonesia*, diperkirakan 1.419 tentara didrop ke Papua. Sebanyak 216 di antaranya terbunuh atau tidak pernah ditemukan dan 296 tertangkap. Detail cerita mengenai apa yang telah diraih oleh operasi Mandala tidak disebutkan dalam biografi Soeharto, disebutkan bahwa ia hanya mengekspresikan keterkejutan karena orang-orangnya tidak diterima dengan hangat oleh masyarakat setempat.

Beberapa personel yang tergabung dalam Mandala, di kemudian hari menjadi orang-orang penting di tubuh militer Indonesia; Soeharto (presiden), Ali Murtopo (kepala intelijen dan menteri), Benny Moerdani (otak pengambilalihan Timor-Timur pada tahun 1975, dan Panglima ABRI), Sudomo (laksamana dan menteri), Dading Kalbuadi (Pangdam

untuk wilayah Indonesia Timur dan pimpinan aksi penyerangan di Balibo, Timor-Timur di mana 4 orang wartawan Australia ditembak atas perintahnya). Dalam pasukan tersebut juga ada seorang laki-laki bernama Untung, yang kemudian memimpin dewan revolusioner yang merupakan bagian dari peristiwa kup pada tahun 1965. Soeharto telah dari awal mengingatkan untuk berhati-hati terhadap Letkol Untung. Ia mengatakan Untung adalah "sosok dengan ideologi radikal kekiri-kirian".

PKI merupakan pihak yang paling mendukung pengambilalihan Papua. Wakil presiden Indonesia, Dr. Hatta, bahkan menyebutnya lebih bersikeras ketimbang presiden sendiri. Seorang menteri juga setuju untuk mengatakan bahwa PKI adalah "pihak yang paling *ribet* dalam segala urusan". PKI semakin memapankan posisinya setelah D.N. Aidit menjadi sekjen partai. Sebelumnya, PKI telah mengajukan status otonomi bagi daerah tersebut, sekalipun dalam negara mereka yang berbentuk republik.

Pada bulan Mei 1962, didorong oleh diterjunkannya gelombang kedua pasukan penyerbu, PM Belanda mengirimkan surat bernada prihatin kepada U. Thant mengenai aksi Indonesia tersebut.

> Pendekatan damai dan konstruktif dari pemerintah Belanda terhadap masalah Nugini telah ditunjukkan secara jelas melalui reaksi positif Belanda terhadap proposal Mr. Bunker, mediator yang telah bertindak atas itikad baik Anda — meskipun Indonesia telah menginterupsi pembicaraan tersebut — saat pemerintah Belanda menyatakan bersedia sepenuhnya untuk membicarakan semua aspek yang tercantum dalam proposal tersebut ...

> Saat Indonesia gigih dengan tetap melakukan tindakan agresif terhadap wilayah tersebut ... dan dengan sangat menyolok telah melanggar prinsip pertama dari keanggotannya di PBB .... perilaku Indonesia tersebut telah memperkecil kemungkinan tercapainya sebuah penyelesaian yang bermartabat bagi pembangunan masa depan masyarakat Papua sesuai peraturan melalui penentuan nasib sendiri.
> Terakhir, Belanda ...berharap agar...Anda, secara pribadi mau berupaya membantu dengan sepenuh tenaga dan bekerjasama secara positif ...demi penyelesaian yang jujur bagi wilayah dengan penduduk tanpa pemerintahan sendiri tersebut, berdasarkan pada Pasal 72, piagam PBB....[22]

Seminggu sesudahnya U. Thant memberi jawaban bahwa tidaklah tepat jika PBB menengahi masalah dengan Indonesia tersebut, atau jika harus mengirim pengamat ke wilayah tersebut tanpa persetujuan Soekarno. Menanggapi hal tersebut, Belanda semakin memperkuat pasukannya. Dalam waktu singkat jumlah pasukan mereka telah mencapai sekitar 12.000 orang, cukup untuk memukul mundur segala bentuk invasi Indonesia yang tampaknya bisa terus meningkat, atau paling tidak bisa bertahan cukup lama untuk dapat mempermalukan Soekarno di hadapan masyarakatnya dan dunia luar. Menurut seorang akademisi kelahiran Indonesia, Rudy de Iongh, para pimpinan militer merasa enggan untuk mengekspos pasukan elit dan peralatan perang yang baru mereka miliki karena bisa mengarah pada bahaya perang terbuka. Ada banyak masalah yang jelas-jelas mereka hadapi; kondisi wilayah, penduduk yang bersikap memusuhi, dan jalur suplai yang panjang, khususnya di area rawa-rawa. Sementara itu, walaupun pertempuran kecil-kecilan terus berlanjut di hutan, babak akhir dari kampanye

untuk Papua Barat juga diperjuangkan melalui konferensi di New York. Konferensi tersebut diadakan dengan dibarengi ancaman serangan dari Jakarta.

Negosiasi kembali diadakan pada bulan Juli dan selesai pada bulan Agustus. Belanda akhirnya menyerah, serta menyetujui untuk menyerahkan pemerintahan kepada penguasa darurat, UN Temporary Executie Authority (UNTEA) mulai tanggal 1 Oktober. Nugini Belanda berubah menjadi Irian Barat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Pada awal tahun 1962, presiden Soekarno menetapkan tahun tersebut sebagai "Tahun Kemenangan" dan menetapkan tanggal kemerdekaan wilayah tersebut pada tanggal 17 Agustus. Ia memberi penekanan pada tema tersebut saat merujuk pada keberhasilan negosiasi di Amerika. Ia menyangkal adanya keuntungan pribadi dari liberalisasi Irian Barat, sebuah tenggang waktu yang terlalu singkat untuk berubah menjadi rendah hati.

> Kemenangan yang telah kita raih bukanlah merupakan "kemenangan pribadi" siapa pun. Jangan salah memandang hal tersebut. Kemenangan ini merupakan kemenangan sejarah; setiap perjuangan melawan kolonialisme akan berakhir dengan kemenangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan, karena sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang berjuang untuk kemerdekaan akan menang. Dan sebaliknya, setiap perjuangan yang bertujuan untuk membela kolonialisme akan mengalami kekalahan karena itulah hukum sejarah. Kita telah bertindak sesuai dengan hukum sejarah, dan sebab itu kita menang. Belanda telah mengingkari jalannya sejarah, oleh karena itu mereka kalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan kemenangan kita ini.

Segera setelah ratifikasi penyerahan dokumen oleh Be-

landa tetapi sebelum kekuatan PBB tiba, pasukan Indonesia yang telah bosan menunggu di hutan muncul dari semak-semak dan mulai menegaskan kekuasaannya terhadap masyarakat pedesaan Papua. Sebagian besar "invasi" berskala kecil tersebut berlokasi di Papua bagian Selatan, dan pemimpin pasukan yang ditempatkan dekat pusat kota Merauke adalah Kapten Benny Moerdani. Dua puluh tahun kemudian, sebagai seorang jenderal penuh, ia diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata Indonesia dan dikenal secara luas sebagai pimpinan militer yang "tegas". Di daerah Merauke, sebagaimana ditulis oleh wartawan *Sydney Morning Herald,* Pat Burgess pada bulan September 1962, Murdani adalah sebuah nama yang identik dengan takut dan benci (*The Sun,* 24 Sept). Respon yang beredar saat itu adalah: "Mereka takut kepada saya karena belum mengenal saya. Jika mereka sudah mengenal saya, mereka tidak akan merasa takut". Burgess menyetujui pendapat ini.

Masalah penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua ditangguhkan sampai suatu saat "sebelum tahun 1969 berakhir". Untuk menyenangkan Soekarno, disepakati bahwa bendera Indonesia dapat dikibarkan di Papua Barat mulai tanggal 1 Januari 1963.

"Kesepakatan New York" ini juga disebut sebagai "Bunker Plan" sebagai penghargaan terhadap mediator dari PBB. Tetapi dalam biografi yang ditulis David Marr berjudul *Barwick,* disebutkan bahwa kesepakatan tersebut lebih tepat disebut sebagai "Barwick Plan", karena yang mempunyai ide itu adalah sang menteri dari Australia tersebut. Sir Garfield, yang menyatakan bahwa departemennya berperan

besar dalam hal itu, menyetujuinya.[23] Ia memberi penjelasan:

> Terdapat tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi sampai sejauh yang memungkinkan, dan kesepakatan tersebut telah melakukannya dengan hati-hati, atau relatif hati-hati, dan sementara itu saya merasa bahwa akan ada sebagian masyarakat Belanda yang merasa kecewa dengan hal itu — termasuk koloni-koloni masyarakat Indonesia di sana — indikator saya adalah Joe Luns sendiri. Saya tidak pernah kesulitan menyatakan pendapat pada beliau sebelumnya.

Seorang Australia lainnya yang termasuk "orang dalam", menyatakan bahwa menteri luar negeri Belanda, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk "mengantarkan" Papua Barat seperti yang diharapkannya, tampak sungguh-sungguh terpukul dengan semua kejadian itu. Dikatakan bahwa ia bahkan tidak sanggup untuk menyebut permasalahan itu. Seorang staf kedutaan Belanda di Amerika Serikat mengatakan kepada perwakilan Australia untuk PBB, bahwa di akhir negosiasi, Belanda menjadi kurang menitik beratkan pada kepentingan penentuan nasib sendiri dan dengan terang-terangan menyatakan rasa prihatin mengenai masalah kehormatan yang mesti dijaga.[24]

Secara pribadi, banyak pejabat pemerintah Belanda dan Australia yang menyatakan keprihatinan mendalam mengenai masa depan Papua Barat di bawah kekuasaan Indonesia. Barwick sendiri telah meramalkan akan terjadinya masalah karena masyarakat Jawa yang dominan sedang mengambil alih masyarakat Melanesia. Akan ada masalah yang tidak dapat dielakkan saat batas pemisahan di antara orang-orang tersebut dilihat dari asal mula etnisnya. Petugas

penghubung Australia di Hollandia, P.J. Mollison merasa bahwa masyarakat Papua akan "mengalami kemunduran di bawah Indonesia".[25]

Perasaan serupa, yang diutarakan dengan menggebu-gebu, disuarakan oleh negara tetangga, PNG. Para politisi, baik lokal maupun yang dari Australia, mencela penyerahan wilayah tersebut kepada Soekarno, sebagaimana halnya dengan masalah Irlandia Baru, masyarakat mengkritik Australia dan Amerika Serikat yang dinilai telah bersikap tidak tegas dan tidak bermoral dengan membiarkan Papua Barat jatuh pada sebuah masa depan yang tidak menentu. Seorang politisi terkemuka, John Guise (di kemudian hari menjadi Sir John, Gubernur Jenderal PNG) mengorganisir sebuah petisi kepada PBB, selanjutnya ia bahkan pergi ke New York atas nama "Saudara-saudara Melanesianya" setelah sebelumnya para pengungsi dari wilayah Barat mengkonfirmasikan ketakutan yang dirasakan masyarakat mereka.

Reaksi pertama kelompok terpelajar Papua Barat adalah mengadakan sebuah pertemuan komite nasional secara mendadak. Diorganisir oleh pimpinan partai PARNA, Herman Wayoi dan salah seorang anggota Dewan Nugini, Nicolaas Tanggahma, pertemuan itu menarik minat sekitar 90 orang pemimpin Papua Barat. Mereka setuju, dengan terpaksa, untuk menerima pemindahan kekuasaan terhadap tanah air mereka dan untuk bekerja sama dengan PBB serta pemerintah Indonesia. Tetapi mereka meminta kepada UNTEA untuk menghormati bendera dan lagu kebangsaan mereka serta menuntut plebisit yang telah dijanjikan untuk dilaksanakan pada tahun 1963. Setelah semuanya berakhir

maka tak satu pun permintaan mereka tersebut yang dilaksanakan. Periode UNTEA malah menjadi kontrol *de fakto* Indonesia sehingga semua bentuk pernyataan nasionalisme Papua Barat dianggap melangar hukum.

Pertemuan Komite Nasional tersebut merupakan pertama kalinya bagi kelompok elite Papua untuk semata-mata memikirkan rasa nasionalisme ketimbang memikirkan dukungan mereka baik terhadap Belanda maupun Indonesia. Para pemimpin tersebut merasa telah dikhianati oleh yang pertama dan merasa was-was terhadap yang terakhir, yang memandang tidak perlu diadakannya plebisit. Tanpa adanya pihak yang mereka percaya, mereka akhirnya memberikan kepercayaan kepada PBB. Belakangan mereka akan dikecewakan rasa percaya tersebut.[26]

Bahkan sebelum pasukan penjaga perdamaian PBB datang, sebuah eksodus telah dimulai, dengan dipimpin oleh Belanda, hanya 20 persen di antara mereka yang tetap tinggal selama periode di bawah UNTEA. Kekecewaan Belanda atas lepasnya Papua diekspresikan dengan pembakaran klub yacht di pelabuhan Hollandia. Sebuah aksi perpisahan yang lebih serius terjadi di Manokwari, saat Johan Ariks memutuskan untuk tetap mempertahankan perang gerilya dengan tujuan agar masalah Papua tetap menjadi perhatian dunia. Belanda meninggalkan lebih dari seribu persenjataan, termasuk bren dan senjata otomatis yang merupakan peninggalan Sekutu pada tahun 1945 kepada Ariks. Sebagian dari senjata tersebut — yang dibuang ke tempat sampah di Biak dan daerah pusat pantai utara — segera sampai ke tangan suku-suku setempat.

Bergabung dalam evakuasi Belanda tersebut adalah sejumlah tokoh kunci di Papua Barat, yang telah bekerja sekuat tenaga melawan Indonesia. Nicolaas Jouwe dan Markus Kaisiepo adalah dua di antara tokoh terkemuka yang melarikan diri ke Belanda. Herman Womsiwor dan Ben Tanggahma pergi menuju ke tempat yang tak terduga, yaitu Dakar, Senegal. "Kelompok Senegal" ini sejak saat itu membangun jaringan dengan masyarakat kulit hitam lain di dunia, termasuk yang berada di Amerika.

Mereka yang tetap tinggal dan memutuskan untuk memanfaatkan Indonesia, termasuk di antaranya adalah Ariks, Mandatjan dan Awom bersaudara, Eliezer Bonay, Franz Kaisiepo, dan Amos Indey. Bonay menjadi gubernur pertama sedang yang lainnya diberi tempat di Dewan Perwakilan Rakyat Irian atau di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

Para tokoh Papua Barat yang memutuskan untuk mengasingkan diri, sebagian besar ke Belanda, berjanji untuk melakukan lobi luar negeri secara aktif. Beberapa di antaranya tampil menonjol dalam koridor PBB. Lebih penting lagi, mereka juga mendirikan kelompok-kelompok politik. Jouwe membentuk Komite Kemerdekaan Papua Barat (KKPB) dan Dewan Pembebasan Nasional; Kaisiepo mendeklarasikan dirinya sebagai presiden di pembuangan dan membentuk majelis perwakilan. Meskipun kedua orang tersebut saling berselisih, tetapi mereka berusaha menciptakan persatuan dalam perlawanan di negeri mereka, melalui Front Nasional Papua (FPN). Pada akhirnya, mereka membangun jaringan dengan masyarakat Papua di rumah-rumah mela-

lui jaringan bawah tanah. Dua dekade setelah itu, jaringan yang sudah ada tersebut menempa pemimpin-pemimpin baru, yang tetap saling terbuka. Mereka digunakan untuk penyebaran informasi dan materi propaganda dari dua arah. Keberadaan kelompok nasionalis yang berbasis di Belanda tersebut menjadi penting pada akhir tahun 1984. Sebagai contoh adalah detail cerita penundaan pelepasan seorang pilot Swiss yang tertangkap oleh OPM, diungkapkan di sebuah harian Swiss, *Sonntags Blick*, oleh Nicolaas Jouwe sehari sebelum hal tersebut dikemukakan oleh pemerintah PNG.

Pada saat itu, rantai komunikasi dimulai dari sebuah unit militer OPM yang dikomandoi oleh James Nyaro, yang bersembunyi di hutan belantara yang merupakan batas wilayah PNG — Papua Barat. Rantai berikutnya adalah di ibukota propinsi Vanimo — PNG, tempat ke mana pesan-pesan dikirimkan melalui kurir. Hubungan telepon disambungkan ke Port Moresby, dan dari sana menuju ke Delft, Belanda, ke tempat Jouwe dan kelompoknya berada. Sedangkan Jouwe, yang sering disebut sebagai negarawan pertama Papua Barat, tidak mempunyai kekuasaan untuk memveto pelepasan pilot tersebut, ia hanya sekadar diberi informasi.

Kedatangan kekuatan keamanan UNTEA yang berjumlah 1537 orang sedikit mematahkan optimisme masyarakat Papua Barat. Sebagian besar anggota pasukan yang orang-orang Pakistan — yang merupakan pemeluk Islam — mengabaikan pandangan tradisional tentang pentingnya babi bagi masyarakat setempat. Kemudian bergabung keku-

atan itu 1.500 pasukan Indonesia di Papua Barat yang sebagian besar juga pemeluk agama Islam. Teorinya, mereka bertugas untuk mendampingi polisi setempat. Tetapi sebagaimana ditulis oleh seorang analis politik, Peter Savage, pasukan penerjun telah membunuh seorang polisi Papua, sebulan setelah kapal Belanda terakhir diberangkatkan ke Eropa. Mereka juga mulai melakukan cara-cara kasar untuk menghapus semangat nasionalisme. Beberapa insiden yang direncana terjadi di beberapa pusat kota dan digunakan sebagai dalih untuk melakukan pembalasan.

Militer dan birokrasi Indonesia mendorong masyarakat Papua untuk menyokong barisan pro-Jakarta. Alasannya adalah untuk mempertahankan negara Indonesia dan menyatakan bahwa plebisit untuk Papua tidaklah penting serta tidak memungkinkan untuk diadakan. Kelompok masyarakat atau individu yang menentang pendapat tersebut akan dihadapi dengan tindakan tegas. Kisah salah seorang pemimpin kelompok pembangkang, Permenas Joku, sangatlah tidak wajar. Joku, adalah anggota Dewan Hollandia dan ia dibawa ke Jakarta untuk diindoktrinasi. Tetapi seperti halnya rekan-rekannya yang lain, ia menolak untuk menandatangani "sumpah setia" kepada Indonesia. Sekembalinya ke tempat tinggalnya di Sentani, daerah dekat kota yang disebut sebagai Kota Baru, ia ditangkap oleh tentara pada tengah malam tanggal 19 Desember 1963. Kemudian, menurut salah seorang Tapol, Joku telah dibunuh.

Pegawai PBB melaporkan secara hati-hati bahwa penduduk setempat telah diperlakukan dengan semena-mena. Salah satu pengamat dari PBB, Jose Rolz-Bennet, mendapati

bahwa orang-orang Papua yang berusaha mendekatinya akan dipenjara dan bahkan kadangkala disiksa. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang melarikan diri ke PNG, — dan kemudian dikembalikan oleh Australia karena adanya jaminan dari UNTEA — mereka dipukuli. Tak terkecuali kelompok elite masyarakat setempat yang kebanyakan di antaranya adalah para guru dan pelajar.

Eliezer Bonay, yang menjabat Gubernur berpaling melawan Indonesia serta melarikan diri ke luar negeri, kemudian pada tahun 1981 menyatakan kebrutalan yang terjadi setelah masa pengambilalihan kekuasaan menjadi sangat meluas. "Di mana-mana penjara selalu penuh", katanya. Menjelaskan perannya sebagai gubernur, ia berkomentar bahwa ia tak lebih dari sekadar boneka pemerintahan Indonesia.

Lebih lanjut, perekonomian diperlakukan sebagai rampasan perang Indonesia. Seorang pengunjung asing menyatakan bahwa:

> Toko-toko dikosongkan dalam waktu semalaman. Semua komoditi yang ada, sepatu, pakaian, makanan, jam tangan, radio transistor dan bahkan alat-alat berkebun pun disikat sampai habis oleh penguasa baru tersebut. Tentara Indonesia telah mencuri hampir semua benda yang bisa dibawa, mulai dari lemari es yang ada di rumah-rumah sampai dengan perlengkapan AC yang ukurannya sangat besar yang terdapat di ruang operasi R.S Umum Hollandia, dan menjualnya di pasar gelap untuk ongkos kembali ke Jakarta, karena adanya inflasi rupiah.[27]

Hasil pembangunan juga akan lebih baik, bila sikap Soekarno tidak anti Barat. Belanda telah menyepakati untuk mem-

berikan hadiah perpisahan sebesar US$ 30 juta untuk pembangunan Papua dan uang tersebut diberikan dalam bentuk dana bantuan khusus PBB. Tapi draf *master plan* pertama dari Indonesia dinilai tidak bisa diterapkan oleh analis luar negeri, dan sebelum draft yang telah diperbaiki dapat diimplementasikan Soekarno telah menyatakan Indonesia mengundurkan diri dari PBB (sebagai sikap atas perselisihannya dengan Malaysia). Dana tersebut dibekukan. Hal ini semakin menambah ketetapan hati Soekarno; ia mengubah nama Kota Baru menjadi Soekarnopura — Kota Soekarno. Ia juga memerintahkan sebuah investigasi atas sejarah penjara Tanah Merah di mana telah ditemukan sebanyak 79 kuburan orang Indonesia yang telah meninggal di sana. Sebuah tugu pahlawan dibangun, untuk lebih menekankan akan pentingnya Papua terhadap sejarah Indonesia. Selanjutnya, tujuan sosial baru adalah mengorientasikan masyarakat Papua terhadap budaya Indonesia dengan sesegera mungkin. Bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib, dan pemusnahan masal terhadap buku-buku literatur berbahasa Belanda merupakan contoh instruksi yang ditujukan kepada sekolah-sekolah dasar yang baru bermunculan.

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang ekonom, Ross Garnaut, bahwa ada keterkaitan antara sangat memburuknya kondisi Papua dengan inflasi yang menggerogoti Jawa. Lalu salah satu bentuk lain dari hubungan antara kedua propinsi tersebut diumumkan. Pada sebuah pertemuan dengan massa petani dari Jawa, wakil Perdana Menteri Indonesia, Chairul Saleh, menyarankan satu program emigrasi dari pulau Jawa yang sudah penuh sesak ke pulau-pulau

lain di luar Jawa. Perencanaan dibentuk untuk penempatan sekitar 400.000 penduduk Jawa ke Papua Barat. Mereka disebut sebagai "transmigran".

Mundurnya UNTEA dari wilayah tersebut pada bulan Mei 1963, melengkapi proses "menyelamatkan muka" pengambilalihan kekuasaan. Konflik antara penguasa yang baru dengan penduduk setempat meningkat. Faktor penyebab utamanya adalah perselisihan tanah. Sawah-ladang, perumahan dan tanah milik suku-suku setempat sering kali dirampas oleh anggota ABRI atau dialokasikan sebagai wilayah penempatan penduduk yang datang dari Jawa. Kebijakan Indonesia tersebut didukung oleh 15.000 kekuatan pasukan tambahan yang tiba setelah PBB meninggalkan wilayah tersebut. Pada akhirnya, para pejuang yang berada di kelompok elite Papua Barat menyadari bahwa mereka tidak mempunyai sekutu kecuali masyarakat mereka sendiri:

> Sejarah perlawanan nasional untuk pembebasan Papua Barat, dilihat dalam skala yang lebih luas merupakan kisah mengenai ketidakberuntungan kalangan borjuis terdidik yang berpikiran dangkal, usaha mereka untuk terus-menerus menjalin jaringan dengan berbagai macam elemen dari luar negeri; kolonial Belanda, kelompok menengah penjajah Indonesia, dan pengasingan politik Nugini Belanda, UNTEA, serta orang-orang Indonesia sebelum masa pemerintahan tahun 1969... Pada akhirnya, karena tidak ada lagi tempat untuk berpaling, bagian dari kelompok borjuis tersebut berubah pikiran dan berusaha membentuk jaringan dengan kelompok petani dan perambah serta memilih jalan untuk mengorganisir perlawanan bersenjata.

Bendera perjuangan yang dikibarkan oleh gerakan perlawanan ini disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka atau

OPM; sebutan itu berasal dari FPN, front politik yang telah disuarakan oleh Jouwe dan Kaisiepo dari Belanda dan belakangan dibangun di Papua. Pada kenyataannya, para pendiri OPM adalah orang-orang dari Arfak, yang banyak di antaranya merupakan didikan Korps Sukarelawan Papua — bentukan Belanda. Pada tahun 1960, sebuah barak berukuran besar dibangun di Manokwari. Sebelum menyatakan menyokong proyek di atas, para pemimpin Arfak telah mendesak Belanda agar masalah calon sukarelawan Arfak menjadi urusan mereka. Sekembalinya ke desa, mereka memperoleh suplai persenjataan yang didrop dari udara oleh pasukan Amerika Serikat selama PD II. Persenjataan lainnya mereka peroleh dari sisa-sisa sekutu yang ditinggalkan Belanda.

Aksi pemberontakan pertama mereka diwujudkan dengan menggunakan busur dan panah serta senjata tradisional, dan bukan dengan persenjataan dari luar tersebut. Aksi tersebut sesuai dengan adat yang mereka anut yaitu kekerasan hanya dilakukan bila usaha untuk bernegosiasi mengalami kegagalan. Penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, 2 bulan sebelum kejatuhan Soekarno dan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Soeharto. Sebagaimana ditegaskan oleh John Ryan dalam *The Hot Land,*' beberapa anggota masyarakat Arfak telah mengajukan keluhan kepada penguasa setempat mengenai kurangnya pekerjaan yang juga berarti kurangnya persediaan makanan dan juga kebutuhan lainnya bagi mereka. Mereka ditangkap atas tindakan tersebut dan hanya akan dilepas bila "si orang besar" Ariks, membuat permohonan kepada Indonesia. Masyarakat

Arfak, yang menjadi semakin marah karena diminta untuk membuat pernyataan terbuka untuk menyatakan kesetiaan mereka pada Indonesia, menyusup ke bekas barak mereka di Manokwari, yang saat itu telah menjadi milik ABRI, dan membunuh tiga orang tentara. Perlawanan balasan dilakukan. Pada waktu itu, seolah-olah seluruh orang Arfak telah berubah pikiran, 20.000 orang pilihan yang juga merupakan gabungan dengan tetangga terdekat, orang-orang Rasinki, telah menanti pecahnya pertempuran ini. Beberapa gerilyawan mengatakan bahwa pertempuran itu layaknya seperti pertempuran antarsuku yang paling menakjubkan yang pernah tercatat. Johan Ariks, meskipun telah berusia 75 tahun, terjun langsung ke bukit-bukit dan mengorganisir aksi *hit-and-run* terhadap Indonesia. Ada lebih banyak lagi tentara yang terbunuh dan beberapa tahanan Arfak kabur dari penjara. Prajurit ABRI merasa enggan memasuki wilayah pegunungan, jadi saat pertempuran meluas, komando Indonesia meminta diadakannya serangan udara untuk daerah sekitar Manokwari. Bala bantuan tentara, yang berjumlah sampai beberapa ribu orang, diangkut dengan pesawat penumpang yang disewa dari perusahaan penerbangan Indonesia, Garuda. Sementara strategi lain yang dilakukan oleh kelompok militer tersebut adalah mencetak *leaflet* dengan menggunakan kutipan injil yang disertai himbauan untuk patuh kepada yang berwenang.

Pemberontakan Arfak terus berlanjut sampai dua tahun. Selanjutnya Ariks ditangkap dan beberapa letnan dalam pasukannya terbunuh. Dipenjara tanpa diadili, ia akhirnya meninggal dua tahun sesudah penangkapannya. Tetapi

pemberontakan tidaklah padam. Kepemimpinan diambil oleh Lodewijk Mandatjan, dengan dukungan dari bekas letnan Belanda bernama Perminas Awom, seorang pejuang yang masih muda dan penuh semangat yang kakaknya, Frits, adalah pendiri kelompok OPM di Biak.

Resistensi di Papua Barat juga datang dari masyarakat Papua yang tinggal di bagian lain Indonesia. Menurut Rex Rumakiek, yang berasal dari Biak dan sedang menempuh ilmu di Jawa pada saat itu, para pelajar Papua turun ke jalan dan mulai berkelahi dengan orang-orang Indonesia. Mereka akhirnya ditangkap. Rumakiek mengatakan bahwa sejak saat itu, banyak pelajar yang menghabiskan waktunya untuk berlatih tempur dengan OPM saat liburan. Kondisi orang-orang Papua yang berada di Jawa semakin memburuk selama masa pergolakan yang diikuti oleh terjadinya kudeta pada bulan September. Rumakiek, yang memimpin Gerakan Mahasiswa Kristen di Jogjakarta, mengatakan bahwa masyarakat Papua telah dilecehkan melalui tuduhan komunis, bahwa komunisme mempunyai akar dalam tubuh kristiani. Sebuah usaha pembunuhan dirinya gagal karena sekelompok tentara yang mengepung rumahnya memasuki pintu yang keliru. Orang yang berada di tempat tersebut, yaitu seorang pemimpin pelajar muslim, berjalan ke arah pintu tersebut dan mereka pun menusuk perutnya hingga tewas.

Kampanye Indonesia dalam memerangi para gerilyawan yang berbasis di gunung semakin meningkat saat serangan mereka semakin mendekati Manokwari. Salah satu kejadian adalah saat orang-orang Arfak membakar perse-

diaan bahan bakar aviasi dalam jumlah besar. Pemerintah marah kepada Gubernur Bonay yang menurut mereka tidak bersikap mendukung mereka. Pada tahun 1964, Bonay dicopot dari jabatannya dan dikirim ke Jakarta untuk reindoktrinasi. Ketika usaha ini gagal, ia dikembalikan ke Papua dan kemudian ditangkap. Ia digantikan oleh Franz Kaisiepo yang sejak awal sudah membuat peringatan kepada para pemberontak Arfak untuk menyerah atau mereka akan dihancurkan. Ketika hal itu ternyata tidak terjadi, kepala intelijen untuk daerah Irian Barat, Dr Soedjoko, mengeluarkan perintah kepada para komandan distrik dan memberi pengarahan agar mereka membuat daftar riwayat hidup orang-orang Papua yang diperkirakan sebagai anggota OPM. Jika bukti dianggap cukup, orang-orang tersebut harus ditembak. Menurut seorang penulis, John Ryan, banyak sekali orang Papua yang kemudian ditembak.

Pada awal tahun 1967, direktur jenderal untuk Papua Barat, Kolonel Marwoto menuduh Australia telah membiarkan orang-orang Papua yang anti Indonesia untuk menetap di PNG. Pada tahun 1984, komandan militer, Jenderal Sembiring, juga menuduh PNG yang saat itu sudah merdeka melakukan hal yang sama. Pada tahun 1967, ketika duta besar Indonesia di Canberra melakukan kunjungan ke Papua melalui PNG, ia disambut oleh para emigran Papua Barat yang membawa spanduk dan berteriak, "Beri kami kemerdekaan... tentara Anda telah membunuh saudara-saudara kami di Manokwari."

Sesudah mengunjungi Papua, ia kembali ke Port Moresby dan menyangkal adanya 2.000 orang Papua yang

mati. "Apakah Anda bisa membayangkan bahwa ada 2.000 jenazah yang ditumpuk?", katanya sembari mengakui memang ada beberapa orang yang jadi korban pembunuhan karena revolusi Indonesia telah sampai pula di Papua dan oleh karena itu ia meminta orang-orang Manokwari untuk patuh.

Pada saat yang bersamaan, seorang pemimpin Papua, Silas Papare, yang sebelumnya pro-Indonesia, pergi ke Jakarta dan melaporkan kepada parlemen bahwa 1.000 orang Arfak telah dibunuh oleh tentara serta adanya serangan udara. Kemudian ada dugaan keras sebanyak 3.500 orang telah terbunuh.

Pada tahun 1968, Indonesia menunjuk seorang komandan militer baru untuk wilayah Irian, yaitu Brigjend Sarwo Edhie. Tiga tahun sebelumnya, selama terjadinya aksi kekerasan yang diikuti oleh tumbangnya Soekarno, Edhie telah terkenal reputasinya sebagai orang yang keras. Tetapi pendekatan awal yang ia lakukan terhadap pemberontakan di Papua cenderung lebih akomodatif ketimbang para pendahulunya. Pada akhir tahun yang sama, ia berhasil membuat Mandatjan menyerahkan diri dan kemudian mengirimnya ke Jakarta sebagai "hadiah tahun baru" kepada pemerintah. Pemimpin gerilyawan tersebut dijanjikan amnesti dan kedudukan di militer Indonesia, tapi penunjukan tersebut hanya simbolik. Setelah itu ABRI tidak pernah lagi berusaha untuk menangkap Frits Awom yang telah mengambilalih kepemimpinan dengan sumpah untuk terus berperang melawan Indonesia sampai Indonesia berhasil menembak atau menggantungnya di sebuah tempat di Manokwari.

Tak lama setelah perlawanan Arfak muncul, media massa Indonesia memberitakan mengenai program transmigrasi ke Papua. Pada bulan Februari 1966, seratus kepala keluarga dari Jawa diberangkatkan dengan kapal, sebagai bagian dari program penempatan penduduk oleh pemerintah. Sebagian dari mereka akan ditempatkan dekat Soekarnopura, dan sisanya dekat Merauke bagian Selatan. Lahan bagi mereka dirampas dari pemilik tradisionalnya. Di sini tidak perlu disebutkan bagaimana prosedur penguasaan atas lahan tersebut.

Diilhami oleh pemberontakan orang Arfak, masyarakat Papua di tempat lain menyatakan dukungannya terhadap OPM. Pemberontakan-pemberontakan berskala kecil tapi cukup berarti terjadi di sekitar Soekarnopura, Fak-Fak, Kaimana, dan Sorong. Di lembah Balim, suku Ndani di daerah Bunggiak juga melakukan pemberontakan. Mereka tersinggung karena orang Indonesia berpikir bahwa mereka tidak beradab dikarenakan mereka tidak berbaju dan hanya mengenakan koteka, selain itu mereka juga takut Tuhan mereka akan marah bila mereka menyetujui penghilangan nama klan mereka dan menyebut diri mereka sendiri sebagai "orang Indonesia". Sebaliknya, mereka membuat marah ABRI yang berusaha memaksakan kehendaknya. Laporan mengenai masalah itu di media massa PNG disanggah oleh Indonesia sebagai "propaganda OPM". Di daerah itu pula, sesudah kedatangan Sarwo Edhie, pertempuran terus berlanjut.

Pada akhir tahun 1968, Merauke juga merupakan basis perlawanan anti-Indonesia. Kantor berita pemerintah,

Antara, menulis mengenai gerakan perlawanan di wilayah tersebut dan penduduk yang menyeberang ke perbatasan PNG-Australia. Dekat kota Sorong, kematian 14 tentara dalam sebuah pertempuran dengan OPM ditindaklanjuti dengan penembakan meriam dari laut. Jatuh banyak korban di dua desa bernama Sausapor dan Makbon. Setelah itu Angkatan Laut mendarat.

Pendekatan yang dilakukan Edhie terhadap pemberontakan di Manokwari pada awalnya tampak berhasil. Ia telah melepaskan sekitar separuh dari 152 orang tahanan politik dan mengklaim penyerahan diri sekitar 9.000 gerilyawan. Menurutnya, 2.000 pemberontak OPM masih tetap tinggal di bukit-bukit dan mereka hanya menguasai 200 senjata. Para wartawan yang jarang diberi akses ke Papua, diberi kesempatan untuk *guided-tour* di wilayah tersebut didampingi oleh Adam Malik. Mereka tampak terkesan, tapi segera sesudahnya sebuah kampanye baru untuk pembersihan terhadap pemberontak Arfak dilancarkan di Manokwari. Operasi tersebut melibatkan 6.000 tentara pilihan, tetapi tidak berhasil untuk mematahkan perjuangan maupun menembak Awom.

Dengan latar belakang tersebut, Presiden Soeharto mengumumkan pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1968, mengenai pelaksanaan plebisit di Papua yang dijanjikan pada tahun depan. Tetapi mantan komandan pasukan pembebasan "Mandala" tersebut menekankan bahwa, "Pelaksanaan pemilihan secara bebas tersebut tidak berarti bahwa kita harus mengorbankan seluruh masyarakat... Dan bahwa kita harus mengorban-

kan hasil perjuangan untuk pembebasan Irian Barat, di mana kita telah banyak berkorban. Tidak pula berarti bahwa kita harus mengabaikan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia".

Pengumuman oleh Soeharto tersebut tidak dipublikasikan secara luas di Papua. Ketika utusan khusus PBB untuk Papua, yaitu seorang diplomat Bolivia, Dr. Fernando Ortiz-Sanz, mengadakan kunjungan ke propinsi tersebut bulan berikutnya, ia terkejut karena hanya sedikit orang yang mengetahui soal plebisit tersebut. "Harus ada langkah khusus yang perlu segera diambil," katanya.

Dalam kurun waktu 12 bulan sampai waktu pelaksanaan tersebut, Ortiz-Sanz masih terkejut karena mendapati bahwa Indonesia tidak pernah berniat membicarakan masa depan Papua Barat. Tokoh yang berasal dari Bolivia tersebut sering kali dipandang negatif, paling parah dianggap sebagai orang yang tidak tegas, atau bahkan terkadang dianggap berkomplot dengan cara-cara yang dipakai Indonesia dalam melegitimasi pengambil alihan tersebut. Yang sebenarnya adalah bahwa ia hanyalah seorang birokrat yang ditugasi untuk mengawasi tahap akhir pengalihan kekuasaan dari PBB. Bahwa ia tidak menyukai tugasnya terlihat dari sikapnya yang selalu menghindar, terutama terhadap pers asing. Tetapi sikapnya terhadap pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 terlihat jelas dalam laporan yang dibuatnya untuk PBB, sebuah dokumen yang berisi kritikan terhadap praktek-praktek yang dilakukan Indonesia. Mereka yang telah membaca penyesalan Sanz mengenai "kerja sama yang tidak sepenuhnya" dari Indonesia dan

mengenai penduduk yang "memilih dengan ancaman/paksaan", semestinya menyadari bahwa ada ketidakberesan dalam pelaksanaan plebisit tersebut. Jika memang ada pihak yang harus disalahkan, maka Sanz bukanlah tertuduh utamanya.

Semasa kunjungan Sanz di Papua, Jenderal Edhie pergi ke PNG untuk menemui pemerintahan Australia di sana. Pada sebuah konferensi pers ia mengakui bahwa pertempuran semakin meningkat di wilayah Manokwari dan bahwa Indonesia akan membuat pembalasan yang setimpal. Dengan waktu pelaksanaan pemilihan bebas yang semakin dekat, maka keamanan menjadi hal yang terpenting. Langkah yang tegas sangat diperlukan dalam hal ini. Dan yang paling penting adalah pernyataan bahwa orang Arfak yang memulai menembak dahulu.

Pada kenyataan di lapangan, langkah tegas Indonesia justru menimbulkan dampak sebaliknya dari yang mereka inginkan. Langkah tersebut bukannya meredam OPM, tapi justru semakin meningkatkan aksi perlawanan mereka. Sampai sekarang banyak orang Papua Barat yang percaya bahwa musuh mereka adalah ras yang berasal dari kepulauan sekitar mereka. Sesudah 50.000 tahun di Nugini, orang-orang Melanesia telah berpindah dari kondisi kesukuan kepada kondisi di mana nasionalisme mulai timbul. Dalam menyesuaikan dengan adat tradisional, mereka mengadaptasi perjuangan bersenjata sebagai langkah bila cara damai yang mereka tempuh untuk menyelesaikan konflik dengan pihak luar dianggap gagal. Sementara itu pihak Indonesia menganggap bahwa mereka telah menyatukan ikatan seja-

rah bangsa mereka, dari Sabang sampai Merauke, walau terjadi friksi di wilayah pelosok paling Timur tersebut. (Sebagaimana mereka menghadapi masalah serupa dengan orang-orang di Aceh, Sumatra Utara, dan orang-orang keturunan Ambon di Sulawesi). Keyakinan kedua belah pihak, baik Papua Barat maupun Indonesia, masing-masing akan dibuktikan oleh penentuan pendapat rakyat.•

2.
Dari Sorong Sampai ke Numbay

PADA tanggal 1 April 1968, duta besar Bolivia untuk PBB, Fernando Ortiz-Sanz mengatakan bahwa meskipun ia telah siap berangkat menuju Papua Barat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara (selanjutnya disebut Penentuan Pendapat Rakyat — PEPERA), tetapi pemerintah Indonesia memintanya untuk menunda keberangkatan. Ia tidak menjelaskan secara rinci alasannya, dan hanya menyatakan karena ada pemberontakan masyarakat Arfak dan sekitarnya. Pengawas tersebut tetap berada di New York sampai bulan Agustus, ketika Jakarta memberitahunya bahwa perlawanan bersenjata tersebut telah berhasil dijinakkan. Saat ia tiba di Indonesia, sebuah pertemuan khusus anggota kabinet mengumumkan bahwa sekitar 3.500 penduduk Arfak telah menyerahkan diri, dan 162 orang tewas.

Sesuai dengan perjanjian 1962, tugas Ortiz-Sanz datang ke Indonesia "mengarahkan, mendampingi dan ber-

partisipasi" dalam pelaksanaan Pepera. Dalam perjanjian tersebut Indonesia sepakat untuk mengusahakan kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah:

1. Dilakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan yang terdapat di sembilan kabupaten, yang telah dibentuk pada saat pengambilalihan kekuasaan dari UNTEA.
2. Dewan ini akan memberi keputusan apakah Indonesia bisa meneruskan kekuasaannya atau tidak. Dewan akan mengadopsi proses yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai musyawarah untuk mufakat yang artinya keputusan diambil setelah adanya kesepakatan bersama.
3. Seluruh penduduk asli yang sudah memenuhi persyaratan dapat membuat permohonan yang diketahui oleh dewan perwakilan mereka. Prosedur ini mengacu dari peraturan pelaksanaan internasional.

Sebagai tambahan, penduduk Papua dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, bergerak dan berkumpul.

Sebenarnya anggota utusan Ortiz-Sanz terdiri dari 50 orang, tetapi ternyata dikurangi hingga 16 orang, termasuk anggota cadangan. Hal ini lebih disebabkan Indonesia meminta agar budget untuk keperluan tersebut dibuat seminim mungkin. Setelah dua bulan, sebagaimana didesak oleh Ortiz-Sanz, Indonesia membuat sebuah makalah yang menguraikan masalah pembangunan yang dilakukan selama itu. Sujarwo, pimpinan utusan Indonesia untuk masalah pelaksanaan Pepera tersebut, didesak untuk menjelaskan masalah

plebisit kepada kesembilan dewan di Papua. Detail pembicaraannya diterbitkan di koran terbitan Jayapura. Penerbitan itu telah dipandang cukup oleh Indonesia sebagai usaha untuk mempublikasikan pelaksanaan Pepera kepada 700.000 masyarakat Papua. Meskipun hanya sedikit orang yang menyuarakan secara terbuka ketakutannya terhadap Indonesia, orang-orang Papua Barat yang berada di luar negeri berusaha melakukan lobi. Salah satu kritik paling tajam datang dari Nicolaas Jouwe, yang mendesak Sekjen PBB, U. Thant, agar plebisit dilaksanakan dengan ketentuan satu orang-satu suara (*one person-one vote*). Sebagaimana pemimpin Papua Barat lainnya, Jouwe sadar bahwa cara ini adalah harapan terakhir bagi mereka. Tetapi U. Thant menolak, dan keputusan penolakan tersebut diumumkan dengan senang hati oleh Brigjend Ali Murtopo, penasihat khusus presiden Soeharto. Brian May menulis dalam *The Indonesian Tragedy*, bahwa presiden secara pribadi pernah memberikan peringatan, ketika kepada seorang wartawan dari *Reuter*, ia menyatakan bahwa setiap orang Papua yang mengingkari hak Indonesia atas Papua akan dianggap bersalah atau berkhianat. Walau alasannya berbeda-beda, pernyataan ini telah membuat kecewa orang Papua yang mendengarnya, juga para diplomat dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Mereka meminta penjelasan apakah terdapat kesalahan dalam menerjemahkan komentar Soeharto tersebut dalam bahasa Inggris. Wartawan *Reuter* tersebut diperingatkan untuk lebih berhati-hati.[1]

Empat bulan kemudian, pada bulan April 1969, keraguan tersebut terjawab melalui pernyataan Soeharto di de-

pan barisan pasukan penerjun bahwa keputusan untuk "mengembalikan Irian ke pangkuan ibu pertiwi" tidak dapat diubah. Resimen penerjun tersebut, menurut media massa di Jakarta, terdiri dari veteran perang Indonesia. Kenyataannya mereka akan berangkat ke Papua untuk memerangi pemberontakan yang baru saja muncul. May menulis bahwa pada bulan yang sama, utusan Indonesia untuk pelaksanaan Pepera bertemu dengan kesembilan dewan di Papua dan memberikan pengarahan mengenai apa yang dinamakan dengan Pepera. Tujuannya bukanlah untuk mempertanyakan kekuasaan Indonesia, tetapi lebih kepada usaha memenuhi permintaan penjajah terdahulu. Ditegaskan bahwa hak pilih yang sifatnya universal tersebut tidaklah memungkinkan untuk diterapkan di wilayah itu karena kondisi geografis yang sulit serta level pendidikan masyarakat yang masih rendah. Saran Ortiz-Sanz untuk satu orang-satu suara paling tidak diterapkan untuk daerah perkotaan seperti Manokwari dan Jayapura sebagaimana pernah diterapkan oleh Belanda pada saat pemilihan dewan Nugini, tidak disinggung sama sekali. Ketika berita mengenai dasar-dasar pelaksanaan Pepera oleh Indonesia tersebut sampai ke Belanda, muncul protes masyarakat yang kemudian meminta Soeharto untuk membatalkan kunjungannya ke *The Hague.* Pernyataan protes tersebut tidak berpengaruh apa pun terhadap Papua, di mana majelis tingkat propinsi telah menyetujui dibentuknya 8 majelis penasihat (dua di antara sembilan kabupaten yang ada digabung). Dewan ini terdiri dari tiga jenis perwakilan: regional, yang dipilih pada basis distrik; organisasional, yang dipilih oleh organisasi sosial,

budaya, dan keagamaan; dan tradisional, yang dipilih oleh dewan perwakilan kabupaten. Keseluruhan diwakili oleh 1.025 pimpinan masyarakat.

Lagi-lagi Ortiz-Sanz menekankan perlunya perwakilan secara langsung, tapi usaha ini gagal. Indonesia mengatakan padanya bahwa "sekelompok kecil orang" yang menentang ikatan kekuasaan dengan Republik Indonesia tidak diorganisir oleh kelompok politik legal dan oleh sebab itu tidak memenuhi persyaratan untuk duduk di dewan perwakilan.[2] Penolakan tegas tersebut ditanggapi oleh "pengawas" pelaksanaan Pepera ini dengan kekecewaan bahkan secara pribadi. Sementara itu masyarakat Papua meresponnya dengan kekerasan.

Wartawan Brian May, yang berada di Papua pada saat itu, mengungkapkan bahwa berlawanan dengan pernyataan juru bicara ABRI, aksi yang dilakukan OPM hanya menurun beberapa bulan belakangan, tapi tidak berhenti sama sekali. May dan beberapa wartawan lain juga menulis bahwa resistensi telah dimulai lagi, dengan perlawanan pertama terjadi di Enarotali, pusat kota dari daerah danau Wessel yang indah (sekarang danau Paniai) yang terletak di pusat pegunungan. Perlawanan lainnya terjadi di Waghete. Bentuk pemberontakan tersebut berupa pembelotan 85 polisi Indonesia asal Papua yang telah dipersenjatai lengkap ke OPM. Adanya aksi yang muncul dari dalam tubuh penguasa Indonesia sendiri tersebut mendorong penduduk desa setempat untuk membuat jebakan di landasan darurat pesawat terbang dan empat tempat lainnya, dengan cara menggali lubang di landasan untuk mencegah mendaratnya

pesawat. Pada tanggal 29 April, sebuah pesawat yang mengangkut komandan militer di Papua — Sarwo Edhie — ditembak, sehingga menewaskan seorang inspektur polisi yang saat itu sedang bersama sang Jenderal. Semangat juang penduduk setempat semakin meningkat dengan dilakukannya pengibaran bendera Bintang Kejora dan mereka menyatakan bahwa wilayah tersebut telah bebas dari kekuasaan Indonesia. Ketika penduduk Papua menguasai sebuah radio milik misionaris Katolik, mereka menyiarkan keberadaan mereka kepada markas militer di Nabire dan meminta Indonesia untuk menarik mundur pasukannya serta membiarkan masyarakat untuk menentukan masa depan sendiri. Menurut sebuah pernyataan pers yang dibuat oleh gubernur Irian, Franz Kaisiepo, pemberontakan tersebut didukung oleh para pemimpin masyarakat dengan sekirtar 30.000 orang di belakang mereka. Statemen itu dengan terang-terangan menyatakan bahwa suku-suku yang selama bertahun-tahun telah bermusuhan tersebut telah disatukan oleh rasa kebencian terhadap Indonesia. Brian May yang meliput peristiwa itu untuk *Agence France Presse,* membenarkan komentar tersebut.

Respons Indonesia terhadap pemberontakan Paniai tersebut adalah dengan memerintahkan penembakan dari udara. Paling tidak salah satu aksi pemberondongan itu dilakukan oleh satu pesawat jenis pembom B26 yang disuplai Amerika Serikat dan diterbangkan oleh Kapten Harsono. Penerjunan pasukan terus berlanjut, dan sekitar 14.000 orang Papua yang terdesak melarikan diri ke hutan. Mengetahui akan dituduh sebagai pemimpin pemberontak, kalang-

an terpelajar yang ada di antara penduduk yang melarikan diri tersebut menyamar dengan menggunakan cara berpakaian penduduk asli, yaitu dengan tanpa mengenakan baju. Target dari pasukan penerjun yang berjumlah ratusan tersebut lebih bersifat politis, yaitu anggota dan para simpatisan OPM. Tapi usaha itu tidak banyak berhasil. Penangkapan para penduduk yang tak bersalah, sering dilakukan. Sebaliknya, Indonesia menderita kerugian dengan adanya korban di pihaknya, baik oleh senjata yang telah dicuri para polisi yang membelot ataupun oleh senjata tradisional penduduk setempat. Lagi-lagi, Indonesia menyebarluaskan leaflet yang mengutip kitab Injil, yang isinya mengimbau para pembelot untuk kembali pada pemerintah. Lima belas tahun kemudian, di perbatasan wilayah PNG, militer juga akan menggunakan kitab Injil sebagai upaya untuk mempengaruhi anggota militer dan polisi Papua yang membelot, untuk kembali ke kesatuannya.

Pada kenyataannya, ABRI tidak begitu menghormati gereja, khususnya gereja-gereja yang tidak mau menyerahkan anggota OPM. Seorang misionaris Belanda, Father Tetro, telah ditampar oleh seorang perwira karena mengajukan protes atas aksi penggeledahan yang mereka lakukan. Salah seorang staf Tetro ditembak pada saat sedang menyelamatkan adik perempuannya dengan berdayung menyeberang danau.

Karena kekurangan bahan pangan di daerah pedesaan dan karena tekanan dari Indonesia, pemberontakan tersebut tidak berlangsung lama. Dalam beberapa minggu, sebagian besar penduduk kembali ke rumah masing-masing, meski-

pun hanya sebagian kecil di antaranya yang bersedia untuk mengikuti upacara penyerahan diri yang diadakan oleh penguasa setempat. Lebih lanjut, tekanan dari Ortiz-Sanz menghasilkan keputusan semacam amnesti untuk seluruh negeri itu. Lebih dari 300 tahanan politik dilepas. Sebaliknya, orang-orang OPM mengatakan kepada wartawan asing bahwa sejumlah pemimpin OPM yang menyerahkan diri telah dibunuh, termasuk Perminas Awom dari Arfak dan rekannya, Abner Asmuruf, yang pernah menjabat sebagai pimpinan OPM pada sekitar pertengahan tahun 1960-an.

Segera setelah itu, lagi-lagi segala aktivitas OPM ditanggapi dengan keganasan oleh aparat keamanan Indonesia. Brian May, yang bekerja untuk *Agence France Presse*, di Jayapura, melaporkan bahwa pasukan tersebut sedang mencari seseorang yang menyekap seorang anggota dewan yang mendukung Indonesia. Aksi itu telah menyebabkan seorang Papua tewas ditembak, penggeledahan rumah-rumah penduduk serta pembakaran harta milik mereka, termasuk pembakaran Injil. Sementara itu di wilayah pantai selatan, dekat Merauke, penduduk suku Muju menyerang sebuah kamp milik ABRI dan membunuh tiga orang serdadu dengan menggunakan pisau dan kapak. Mereka melakukan balas dendam atas kematian beberapa orang suku Bupul — kelompok masyarakat yang lebih tertutup terhadap orang asing — pada saat mencoba melarikan diri dari pelecehan oleh tentara.

Pulau Biak, yang telah lama menjadi pusat pemberontakan terhadap pihak asing, juga menjadi aktif kembali pada periode sebelum pelaksanaan Pepera. Di sini banyak

pula penduduk yang ditangkap dan diperlakukan dengan kasar. Salah satunya adalah seorang tahanan bernama Mathew Major (Mayer), yang baru berumur 17 tahun. Beberapa tahun kemudian Mayer melarikan diri ke PNG dan berlindung di sana; pada tahun 1984 ia melarikan diri lagi, tapi kali ini ke Australia. Ia membuat heboh dengan menceritakan kondisi para pengungsi. Ia menceritakan masa penahanannya oleh pemerintah Indonesia, dan menggambarkan bahwa ia telah ditahan di sebuah sel penjara berukuran 5x3 meter, yang menampung sekitar 50-60 orang Papua.

> Kami terpaksa tidur dalam posisi bertumpukan di atas orang lain karena tidak adanya tempat bagi kami untuk tidur di lantai. Mereka yang sudah tua atau sedang sakit akan tidur di lantai dan setiap pagi akan ada tiga atau empat orang yang mati di lantai penjara. Selama waktu penahanan, kami hanya diberi makan nasi satu sendok setiap hari. Makanan tersebut diberikan kepada kami pada malam hari sesudah bekerja seharian. Kami meminum air yang diberikan dari selang karet yang dilewatkan atap sel. Kami terus-menerus dipukul dan diteror oleh penjaga. Salah satu yang mereka lakukan adalah menarik picu senjata dan menempelkannya di tengkorak kami kemudian menembakannya sehingga pelurunya menggores kulit. Saya mempunyai bekas luka di dahi saya akibat perlakuan mereka itu.[3]

Sebelum pelaksanaan Pepera, gerilyawan OPM menyerbu penjara di Biak dan membebaskan banyak tahanan, termasuk Mayer, yang cenderung memilih untuk bersembunyi di hutan kemudian menyeberang ke PNG seperti para pejuang dari daerah lainnya. Sebagai tindakan pembalasan, kata Mayer, tentara mendatangi rumah keluarganya di Korido, Biak dan menembak mati ayahnya.

Di daerah danau Sentani, menurut Brian May, seorang pemuda bernama Julianus Joku, yang berasal dari suku ternama Joku, dihadang oleh tentara saat sedang berusaha melintas ke PNG-Australia. Joku, kurir OPM, melarikan diri ke sebuah pulau di tengah danau, dan segera sesudahnya ditembak dari jarak dekat. Para saksi mata mengatakan bahwa ia mati dengan posisi tangan di atas, meminta ampun.

Penduduk Papua yang berusaha untuk menyeberang perbatasan PNG bukan hanya anggota OPM seperti Joku. Ortiz-Sanz dalam laporannya menggambarkan gelombang penduduk tersebut dengan kalimat "memilih dengan menggunakan kaki mereka". Sementara itu banyak yang menduga bahwa kiap-kiap Australia telah memaksa mereka untuk kembali ke Papua Barat; di mana mereka justru menderita di tangan tentara Indonesia. Berita media massa di PNG menyebutkan paling tidak 28 pengungsi yang sedang berusaha kembali dibunuh oleh pasukan ABRI, dalam dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok pengungsi yang baru datang dari wilayah Barat perbatasan dan mereka mendirikan perkampungan untuk tinggal. Tetapi tentara menyerang perkampungan tersebut dan menuduh para penduduk sebagai gerilyawan OPM. Yang lainnya di wilayah utara perbatasan, yang dalam bentrokan antara ABRI dan petugas Australia.

Pemerintah Australia dikritik oleh para tokoh terkemuka Papua Nugini karena diduga tidak mempedulikan mereka yang mencari perlindungan. Salah satunya adalah Michael Somare, yang di kemudian hari menjadi perdana

menteri yang terpilih melalui pemilu 1982 di PNG, seorang pemimpin yang oleh Jakarta dianggap sebagai "kawan baik". Tapi pada tahun 1969, Somare menuduh Australia berusaha mempertahankan keberadaan "kamp konsentrasi" yang ada di sepanjang perbatasan. Somare mengatakan kepada Majelis Wilayah PNG, "Kita sering mendengar PBB mengutuk kolonialisme Eropa, tapi kita tidak pernah mendengar mereka mengutuk kolonialisme di Asia, dan inilah yang sekarang sedang terjadi di wilayah perbatasan kita, ini adalah kolonialisme di wilayah Indonesia".

Para pejuang Papua Barat, terutama mereka yang mencari perlindungan di Belanda, sering meminta bantuan kepada rekan-rekan mereka yang menempati posisi elite dalam politik PNG. Para anggota parlemen tersebut pernah dikejutkan oleh kehadiran Herman Womsiwor — yang ibunya berasal dari Aitape, di propinsi West Sepik.

Selain membunuh pejuang OPM dan pendukung mereka di pedesaan, aparat militer dari Jawa — sebagian besar beragama Islam — juga membasmi babi. Dalihnya "menyucikan" masyarakat padahal tujuannya sekaligus mengintimidasi mereka. Akibatnya di beberapa wilayah, penduduk menderita kekurangan protein.

Konsekuensi dari penekanan Indonesia pada faktor keamanan mengakibatkan tertundanya kelanjutan kampanye anti malaria. Hasilnya, ratusan orang Papua meninggal karena gigitan nyamuk anopheles, yang sama mematikannya dengan peluru ABRI.

Dalam tujuh tahun pertama kekuasaan Indonesia, OPM masih merupakan sebuah gerakan yang bisa diibaratkan

dengan seorang anak muda yang belum berpengalaman. Lebih disebabkan oleh tidak adanya pemimpin atau koordinator dari seluruh aktivitas anti-Indonesia tersebut. Tetapi bagaimanapun gerakan tersebut telah menjadi simbol perlawanan dan pemersatu antara pejuang-pejuang yang berada di berbagai wilayah Papua. Salah satu contoh adalah ketika terjadi pemberontakan di Enarotali yang dimotori oleh masyarakat pantai, maka kurir akan menyebarkan berita bahkan sampai ke lembah Baliem sekalipun. Orang-orang Papua tersebut juga membuat laporan situasi secara rutin yang dilengkapi dengan peta, yang menceritakan secara detail peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah tersebut. Laporan tertulis tersebut lalu diedarkan kepada para pimpinan OPM serta pengamat asing dan juga dikirim ke luar negeri terutama PBB.

Wartawan Brian May menyatakan bahwa ia telah diberi informasi oleh seorang anggota OPM di Jayapura bahwa gerakan tersebut mempunyai 20 pimpinan, yang bertempat di berbagai pusat daerah dan didukung oleh 5000 anggota penuh. Seorang pastor Papua bahkan mengatakan kepada May: "Kami semua adalah OPM".

Di pusat-pusat daerah, pemerintah telah berusaha keras untuk membuat kesan yang baik. Penduduk Papua diminta untuk mengibarkan bendera Indonesia dan untuk melihat bahwa toko-toko — yang dalam beberapa bulan sebelumnya hampir semuanya kosong — telah dipenuhi barang-barang kembali. *Crash program* tersebut dimaksudkan sebagai pembuktian kesejahteraan rakyat Papua kepada tim PBB, wartawan-wartawan asing serta elite politik dari

kota. Tetapi tak seorang pun yang percaya. Perekonomian masih kacau, walaupun sudah ada bantuan keuangan FUNDWI dari Belanda yang pada akhirnya dihentikan karena Indonesia bergabung kembali dengan PBB. Inflasi mencapai 2% per bulan; lapangan pekerjaan hanya sedikit, khususnya bagi orang-orang Papua yang tidak dianggap oleh para pengusaha maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Penduduk Papua banyak mendekati pihak asing untuk menyampaikan keluhannya bahwa Indonesia "bukan negara baik-baik" dan meminta mereka untuk mengatakan yang sebenarnya pada dunia. Ortiz-Sanz mencatat dalam report selanjutnya bahwa utusan PBB telah menerima 179 petisi dari masyarakat Papua, banyak diantaranya berisi permintaan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Mereka mengeluhkan tindakan represif tentara, pemenjaraan tahanan politik yang masih terus berlanjut serta pelecehan demokrasi. Salah satu petisi tersebut disampaikan kepada Ortiz-Sanz pada tanggal 11 April oleh sekitar 2.000 orang demonstran. Mereka dibubarkan oleh tentara Indonesia dengan menggunakan kendaraan lapis baja.

Di daerah pedesaan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, Indonesia bahkan lebih tidak disukai. Pada akhir bulan Mei, di daerah danau Sentani, seorang Mayor bernama Soewondo mengumpulkan dua ratus kepala desa dan mengancam akan menembak mati mereka, sekaligus pengikut mereka, bila tidak mendukung Indonesia dalam Pepera nanti. Ancaman tersebut diberitakan oleh sebuah koran di Jayapura yang diawasi secara ketat oleh pemerintah, *Cendrawasih*. Di antara waktu pemilihan dan musyawarah dari

1.025 pemimpin masyarakat, Jenderal Ali Murtopo juga mengeluarkan ancaman serupa, berjanji akan menembak di tempat mereka yang ingkar janji.

Pada akhir bulan Mei, Ortiz-Sanz menerima jadwal Pepera yang sebenarnya sudah ia minta sejak lama. Tetapi sebelum ia sempat menurunkan anggota timnya yang berjumlah sedikit itu, pemungutan suara telah selesai dilakukan untuk wilayah Merauke dan Fak-Fak, serta di beberapa tempat lain sedang dalam taraf pelaksanaan. Penyingkapan masalah ini di pers internasional dilengkapi dengan adanya laporan yang membenarkan adanya intimidasi, membuat Ortis-Sanz buru-buru meninggalkan Jakarta ke Jayapura, kutip seorang wartawan, tanpa berhenti untuk menginap di Biak sebagaimana biasa ia lakukan sebelumnya.

Pengawas dari PBB tersebut merasa jenuh dengan manuver di luar dugaan yang dilakukan oleh panitia Pepera Indonesia tersebut. Para utusan tersebut mendapat kesulitan pada awal keberangkatan karena tidak mempunyai pesawat sendiri dan harus bergantung pada kendaraan milik para misionari, itu pun bila ada. Mereka juga kekurangan tenaga penerjemah. Pemungutan suara pertama yang mereka saksikan adalah pada tanggal 4 Juni 1969, ketika sebagian besar pemungutan suara tersebut sudah selesai. Bahkan pada kerumunan orang di Jayapura, para utusan kesulitan membedakan mereka yang termasuk dalam delegasi pemberi suara. Utusan PBB tersebut mencatat bahwa hanya ada sembilan delegasi yang dinominasikan untuk memperebutkan sembilan bangku dewan perwakilan lokal. Mereka tidak terkejut ketika para pemimpin masyarakat Papua — yang

diawasi oleh tentara dan petugas Pepera — menjawab dengan suara bulat "tidak" sewaktu ditanya apakah mereka telah ditekan. Segera sesudahnya Ortiz-Sanz menyatakan keberatan atas pelaksanaan Pepera tersebut dan meminta diadakan pemilihan ulang di beberapa wilayah. Indonesia setuju untuk melakukannya untuk jumlah yang terbatas, tapi hasilnya tetap sama. Sebagaimana ditulis Ortiz-Sanz dalam lapprannya, utusan PBB hanya bertindak sebagai saksi atas 195 pemungutan suara dari keseluruhan 1025 untuk pemilihan anggota dewan. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah setempat "melakukan kontrol politik yang ketat terhadap masyarakat setiap saat". Hal ini digambarkan dengan lebih nyata oleh Bob Hawkins, redaktur *Pacific Islands Monthly*, yang menyaksikan pelaksanaan Pepera di wilayah lembah Balim. Contoh paling nyata adalah seorang petugas Indonesia yang menggunakan penggebuk rotan tebal untuk memecut orang-orang Ndani yang dikumpulkan di sebuah balai pertemuan di Wamena dengan tujuan agar mereka dengan suara bulat memilih Indonesia. Bahkan ketika penduduk lokal mengambil sikap lebih aktif, seperti 3.000 orang yang berdemonstrasi di Bosnik, Biak, yang menuntut hak pilih mereka, hasilnya tetaplah sama.

Sebagaimana disaksikan oleh Brian May, penggunaan kekerasan dan ketidakjujuran yang juga berarti pelanggaran terhadap perjanjian pemindahan kekuasaan, juga telah dirasakan oleh tim utusan PBB, sekali lagi secara pribadi. Tetapi para petugas tersebut merasa tidak mempunyai wewenang untuk bertindak lebih jauh.

Tidak lama sesudahnya, delapan majelis telah siap

untuk mengadakan "musyawarah". Pertemuan pertama diadakan di Merauke, pada tanggal 14 Juli. Acara tersebut dihadiri oleh duta besar Belanda dan duta besar Australia, Gordon Jockell, yang di kemudian hari menjabat kepala dinas intelijen JIO. Negara tetangga Asia diwakili oleh duta besar Thailand. Untuk menyambut acara itu, Merauke dipenuhi dengan hiasan dari rangkaian bunga. Slogan-slogan diteriakkan oleh petugas, lagu-lagu wajib dikumandangkan, makanan dan rokok diedarkan untuk menarik perhatian masyarakat agar berkumpul. Suasana penuh kegembiraan yang dibuat-buat tersebut hilang karena 175 anggota dewan ditempatkan di sebuah komplek yang dijaga dan hanya diijinkan keluar bila menghadiri acara yang diadakan pemerintah.

Selama pertemuan, 20 anggota dewan menyatakan dukungan agar Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Selanjutnya ke 175 anggota memberikan suara yang sama. Tahap pertama selesai dan para pengamat asing telah meninggalkan tempat. Mereka tidak mengetahui bahwa tak lama sesudah itu enam dari dua puluh orang di atas, yang telah menyatakan dukungan terhadap Indonesia dibunuh oleh pengikut mereka yang merasa marah.

Pada hari diadakannya pertemuan itu, *The Sydney Morning Herald* membuat sebuah tajuk rencana di bawah berita utama yang berani mengenai "Neo-kolonialisme" yang isinya:

> .... Altenatif bagi jajahan Indonesia tersebut adalah sebuah Papua Barat yang merdeka, yang dibantu oleh PBB, Belanda dan Australia, dan pada akhirnya mengadakan asosiasi poli-

tik dengan negara PNG yang merdeka. Dengan istilah yang lebih realistis, yaitu dengan mengabaikan fakta bahwa Nugini secara etnis dan geografis merupakan satu kesatuan, dan bahwa semua "musyawarah" di dunia tidak akan dapat mengubah orang Papua-Melanesia menjadi orang Indonesia, kami sedang berusaha membantu mempersiapkan landasan bagi sebuah gerakan masyarakat Papua dan menunda masalah genting bagi Nugini yang artinya juga masalah bagi diri kita sendiri, dengan menyimpannya. Siapakah di dunia ini yang bisa percaya ucapan bahwa seseorang terlalu primitif untuk merdeka?

Di sini, para pemimpin Papua "dipermalukan", dengan tidak bersediaannya Australia bertindak atau memberi pendapat yang bisa memojokkan penguasa di Indonesia.

Dalam waktu seminggu, pertemuan lainnya dijadwalkan diadakan di Nabire, ibukota administratif bagi daerah sekitar danau Paniai. Sebelum sidang berlangsung, sebuah pemberontakan terjadi di daerah Enarotali. Ribuan penduduk desa meninggalkan rumah mereka dan pergi ke hutan; kali ini tampaknya lebih permanen, karena para wanita telah membuat kebun di lereng-lereng gunung saat para lelaki sedang menyerang patroli Indonesia di berbagai front. John Ryan menulis dalam *The Hot Land*, busur dan panah adalah senjata yang umum bagi mereka, tetapi penduduk Papua telah berhasil menambah jumlah korban bagi pihak Indonesia. Bahaya lain yang menghadang para tentara tersebut adalah lubang jebakan yang dalam dan sulit terlihat serta dipasang banyak paku di dalamnya.

Pemberontakan penduduk Paniai yang terjadi kedua kalinya itu disangkal oleh pemerintah dan diabaikan oleh para pengamat asing. Dengan adanya pengamatan dari

pihak asing, Indonesia menunjuk orang luar untuk menduduki kursi dewan Paniai yang ditinggalkan oleh wakil dari daerah itu. Ia meninggalkan jabatannya karena lebih mendukung perlawanan bersenjata tersebut. Pertemuan ini mencapai hasil yang sama dengan yang di Merauke, dan selanjutnya rombongan asing dan petugas pemerintah melanjutkan ke tempat lain. Dengan dimulainya musyawarah tahap akhir yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus di Jayapura, Indonesia mengumumkan bahwa Papua sekarang sudah secara penuh menjadi bagian dari Republik, suara bulat dari mayoritas rakyat telah mengesahkan hal ini. Pertemuan di Jayapura menjadi sebuah acara yang lebih meriah ketimbang acara-acara sebelumnya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah telah menahan orang-orang yang diduga akan melakukan tindakan protes. Kelompok terpelajar merupakan target utama. Ke 110 anggota dewan juga mengalami perlakuan yang sama dengan sebelumnya, yaitu tidak diperbolehkan keluar dan diawasi secara ketat dalam beberapa hari sebelum pertemuan. Untuk memperlunak suasana, mereka diberi hadiah dan ditawari uang jika mereka memilih dengan benar. Ketika mereka telah melakukan sesuai yang diharapkan, yang berarti mengesahkan pengambilalihan oleh Indonesia, sekelompok orang Papua yang telah dilatih untuk tampak riuh rendah bergembira, mengangkat tinggi-tinggi para pejabat militer Indonesia di tengah-tengah mereka. Pahlawan utama dari Jawa tersebut adalah Sarwo Edhie, komandan militer; Sudjarwo, ketua pelaksana Pepera; dan Mayjen. Amir Mahmud, menteri dalam negeri.

Sekembalinya para pengamat asing ke Jakarta, termasuk tim utusan PBB, Jenderal Edhie mengumumkan bahwa Papua masih menghadapi permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan militer. Tetapi Indonesia jelas tampak tidak terburu-buru dalam melancarkan serangan balasan terhadap aktivitas perlawanan, di samping sudah secara resmi menguasai Papua juga karena situasi yang berpihak pada mereka. Sementara menunggu pengesahan akhir dari PBB terhadap proses pemindahan kekuasaan yang berlarut-larut tersebut, berbagai protes keras tetap berlanjut di negara tetangga PNG dan majelis negara tersebut telah menyatakan "kekecewaan yang mendalam" terhadap PBB dalam menangani pemungutan suara tersebut. Sementara itu sebuah demonstrasi digelar oleh kalangan pekerja, kaum gereja dan pelajar.

Laporan Sanz telah dikirim ke PBB pada bulan November 1969. Komentar kritis dalam laporan itu dimanfaatkan oleh para pelobi Papua Barat, yang diketuai oleh Nicolaas Jouwe. Para pengasingan tersebut yang jumlahnya lebih banyak daripada diplomat yang berasal dari Barat seperti Amerika Serikat, Australia, Prancis dan Belanda, kesemuanya melakukan kampanye secara aktif terhadap kelompok negara-negara dunia ketiga. Laporan tersebut disetujui oleh 84 anggota PBB, berkurang lima dari jumlah semula yang telah mengesahkan Perjanjian Pemindahan Kekuasaan tujuh tahun yang lalu. Ada 30 negara yang mengambil sikap abstain, dan hampir semuanya berasal dari negara-negara Afrika. Kelompok Afrika khawatir jika bentuk perundingan semacam itu diterima, maka akan dapat memperlemah po-

sisi PBB dalam menghadapi masalah rezim minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Rezim tersebut telah membuat pengesahan sendiri melalui referensi dewan perwakilan rakyat setempat yang merupakan bentukan rezim itu sendiri, dan tidak melalui pemilihan oleh rakyat.

Pada tanggal 19 November, pada akhir pembicaraan masalah pengambilalihan kekuasaan telah disahkan oleh komunitas internasional, muncul beberapa pernyataan dari pihak-pihak yang tidak sepakat, sebagai berikut:

> Delegasi kami sampai sejauh ini tidak bisa mengerti mengapa perwakilan Sekjen PBB di Irian Jaya bersedia menyetujui bentuk pemungutan suara berdasarkan asas perundingan musyawarah — dengan seribu tokoh terkemuka yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia — sesuatu yang jelas-jelas tidak dapat diterapkan menurut kesepakatan dalam perjanjian yang sebenarnya ..... (Zambia)
>
> Saya hendak mengingatkan di sini bahwa Majelis Umum dalam resolusinya nomor 1514 (XV) tahun 1960, menyatakan bahwa ketidakcakapan dalam hal politik, ekonomi, sosial dan kesiapan pendidikan tidak dapat dipakai sebagai dalih untuk menunda kemerdekaan negara mana pun. (Togo)
>
> Tidak ada suatu masyarakat yang begitu primitif dan kondisi geografis yang begitu sulit di zaman modern seperti sekarang ini, sampai-sampai penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang demokratis tidak diperkenankan bagi rakyat yang demikian ... (Sierra Leone)
>
> Kami tidak yakin dengan argumen bahwa prinsip musyawarah adalah satu-satunya cara yang dapat dimengerti oleh penduduk wilayah tersebut ..... kami diberitahu bahwa di bawah pemerintahan administrasi Belanda sebuah sistem demokratis yang dikenal sebagai "pemilihan tertutup" telah berhasil diterapkan. Lebih lanjut, di Nugini-Australia, yang mempunyai karakteristik geografis yang sama sulitnya dan

dihuni oleh kelompok masyarakat yang sama-sama disebut sebagai "belum maju", prinsip satu orang-satu suara telah pula berhasil diterapkan dan hal itu pulalah yang mendukung kebijaksaan yang diterapkan di sana, yang pada akhirnya membawa masyarakat pada kekuasaan sendiri. (Ghana)[4]

Ghana mencoba untuk mengamandemen resolusi tersebut dan mengusulkan adanya pemungutan suara secara bebas tahun 1975. Dalam proses, pernyataan ini menyerang Saudi Arabia — yang merupakan negara sahabat Indonesia — yang sebelumnya mengkritik kelompok Afrika karena dianggap berusaha menggagalkan usaha pengambilalihan kekuasaan itu. Amandemen tersebut ditentang oleh 60 suara, 15 suara yang setuju dan 39 abstain. Pada pemberian suara berikutnya, yaitu mengenai resolusi yang dianggap layak, tidak ada yang menentang dan jumlah abstain berkurang sembilan suara. Negara-negara non-Afrika yang menyatakan abstain adalah Venezuela, Brazil, Israel dan Barbados.

Di Australia, sejumlah pendukung dari kedua belah parlemen memprotes tindakan pimpinan partai buruh Charles Jones, di kemudian hari menjadi salah seorang menteri di kabinet Whitlam, dan menyesalkan bahwa "tampaknya tak seorang pun yang peduli bahwa yang seharusnya terjadi adalah kemerdekaan kelompok kulit berwarna dari kulit berwarna lainnya". Ia menyebut pemilihan di Papua itu sebagai *"gerry-mander"* (memberi kesempatan suatu parpol untuk berbuat curang) dan, seperti yang dilakukan oleh Jim Killen MP di tahun 1959, merasa berduka cita atas hilangnya kesempatan atas terbentuknya sebuah negara. ALP menyatakan kebijakan partainya bahwa pelaksanaan penen-

tuan nasib sendiri seharusnya diserahkan kepada rakyat Papua Barat. Kebijakan ini ditetapkan sebagai kebijakan partai yang berlaku sampai beberapa tahun, sampai kemudian diputuskan untuk diubah.

Harapan terakhir rakyat Papua Barat adalah PBB. Mereka percaya bahwa PBB bersandar pada hak asasi manusia dan keadilan sehingga bisa memberikan jaminan bagi mereka. Namun ternyata PBB mengingkarinya, seperti negara-negara yang pada awalnya mendukung kemerdekaan Papua. Meskipun hasilnya sudah diumumkan secara jelas selama beberapa waktu, tetap saja pengingkaran itu merupakan pukulan yang menyakitkan. Pemungutan suara yang dilangsungkan di New York itu kian memperkuat keinginan OPM yang berada di hutan dan yang sedang menyusun jaringan di kota-kota untuk mandiri.

Sejak saat itu OPM berhasil membentuk suatu jaringan gerakan massa secara regional, yang tujuannya adalah kemerdekaan Papua. Sebagaimana layaknya kelompok-kelompok revolusioner di negara-negara lain, komando gerakan tersebut didominasi oleh kelompok elite yang terlatih di masa kolonial sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan tinggal di luar negeri. Para pemimpin OPM hanya punya sedikit waktu untuk menanggapi pernyataan-pernyataan seperti misalnya yang dikemukakan oleh Gordon Freeth, bahwa akan sangat tidak bermoral bila pihak luar hanya menghasut rakyat Papua dalam konteks perlawanan tanpa memberi dukungan. Dengan semakin membengkaknya jumlah pejuang, aksi perlawanan menjadi satu-satunya pilihan, lepas dari pandangan orang luar mengenai kurangnya dukungan

terhadap mereka. Pada saat itu OPM belum mengenal teori perang gerilya walau serangan *hit and run* yang mereka lakukan cukup ampuh, tetapi hal itu sudah sangat biasa. Sementara itu, jumlah keseluruhan penduduk Papua yang dinyatakan tewas antara tahun 1963-1969 sangat bervariasi. Pada saat itu, wartawan Peter Hastings menyatakan antara 2.000 sampai 3.000; sementara Bonay, mantan gubernur, menyatakan dugaannya pada tahun 1981 bahwa 30.000 orang telah dibunuh oleh pihak Indonesia. Para pejuang menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan gencar serupa, yang sewaktu-waktu bisa dilancarkan Indonesia jika sudah berkuasa secara total. Yang menguntungkan bagi OPM adalah mereka lebih menguasai kondisi daerah setempat dan masyarakat yang simpati kepada mereka. Mereka juga percaya bahwa waktu akan memihak mereka; anggota mereka telah menyatakan sumpah untuk terus berperang sampai tanah air mereka merdeka. Sementara tujuan jangka pendek mereka adalah untuk dapat bertahan dalam hitungan hari dan jika mungkin tahun, dari kekuasaan Indonesia. Oleh karenanya, skala gerakan OPM menjadi menurun menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Mereka lebih memprioritaskan pada pengorganisasian ketimbang penyerangan dan provokasi balasan.

Ironisnya, kondisi tersebut terbantu dengan adanya amnesti umum oleh presiden Soeharto sesudah pelaksanaan pemungutan suara. Walaupun amnesti tersebut telah membuat beberapa pejuang potensial OPM tertarik untuk keluar dari hutan dan kembali ke desa mereka, yang jelas program tersebut telah memberi sedikit ruang bernafas untuk

dapat menyusun kembali inti gerakan.

Fokus mereka adalah hutan yang terbentang sepanjang 760 km di wilayah perbatasan dengan PNG, khususnya yang berada di paruh wilayah Selatan Jayapura. Dalam beberapa bulan, semua tampak tenang, meskipun lebih dari 10.000 orang anggota pasukan Indonesia yang didukung pasukan udara hadir di wilayah itu. Tampaknya kebijakan untuk menahan diri yang sebenarnya, telah dimulai. Tetapi pada bulan Mei 1970 ABRI, terutama pasukan dari divisi Udayana kembali bertindak brutal terhadap penduduk, kebanyakan wanita. Sebelum perlakuan buruk terhadap 80 orang wanita dan anak-anak itu terjadi, seorang wanita yang sedang hamil bernama Maria Bonsapia ditembak mati oleh tentara dan bayinya dikeluarkan dari perutnya dan dipotong. Saudara perempuan wanita itu diperkosa lalu dibunuh oleh sekelompok tentara. Rakyat Papua selanjutnya mendengar tentang adanya pembantaian 500 penduduk desa di daerah Lereh. (Insiden-insiden ini diceritakan oleh Seth Rumkorem pada seorang Tapol, pada tahun 1984). Tindakan tersebut mengundang kemarahan sejumlah pejuang politik yang telah memberikan "kesempatan" kepada pemerintah untuk menunjukkan niat baik mereka. Beberapa di antara mereka sudah terlatih secara militer pada masa kolonial Belanda dan Indonesia, dan saat bergabung dengan OPM di hutan, mereka memberikan kontribusi berharga. Salah satunya yang terkenal adalah Seth Jafeth Rumkorem, berumur 37 tahun, dan berasal dari desa Manduser yang terletak di sebelah Timur Biak. Ayahnya yang bernama Lucas dulunya adalah pendukung Indonesia. Seth masuk hutan

pada bulan Juni, kemudian membentuk dan memimpin kelompok gerilya selama 12 tahun sebelum ia diasingkan.

Seth Rumkorem memulai kariernya sebagai pemegang tata buku pada Royal Dutch Airline di Biak. Ia bergabung dengan KLM selama 9 tahun. Pada tahun 1962, seperti kebanyakan orang Biak lainnya, ia menyambut Indonesia dengan antusias. Ia diterima di Akademi Infantri Militer di Bandung, Jawa. Setelah dua tahun, ia lulus dengan pangkat letnan dua, dengan spesialisasi bidang intelijen, dan ditempatkan di divisi elite Diponegoro. Ia pindah ke Jakarta dengan istrinya Sylvania. Dua anak perempuan mereka, Yvonne dan Year, lahir di sana.

Tentara muda dari Papua tersebut kemudian mulai terlibat masalah. Pada akhir tahun 1964, Rumkorem ditahan oleh polisi militer karena secara diam-diam mencoba menggagalkan demonstrasi yang direkayasa pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pepera. Ia disekap selama tiga bulan dan selanjutnya dikenai tahanan rumah sampai November 1965, dua bulan sesudah jatuhnya Soekarno.

Dua tahun kemudian, ia ditangkap karena menuntut Indonesia membuat pernyataan yang jelas mengenai plebisit. Sepanjang tahun 1967, ia menghabiskan waktunya di penjara dan setelah itu dipulangkan ke Biak. Sejak bergabung dengan intelijen ABRI, ia telah menyadari adanya pelecehan hak asasi manusia oleh tentara dalam pelaksanaan tugasnya. Ia merasa terpukul ketika melihat situasi serupa di Jawa juga diulangi di tanah kelahirannya. Dalam sebuah wawancara dengan buletin *Tapol* di London, ia menggambarkan bahwa penduduk setempat sering kali datang kepa-

da ayahnya untuk memprotes perlakuan menyakitkan terhadap mereka. Mereka mengatakan telah disiksa dengan penggunaan alat-alat seperti setrika panas, ekor ikan pari, dan setruman listrik. Salah satu kasus yang dia tahu terjadi pada tahun 1969, melibatkan seorang kepala sekolah khusus perempuan di Serui yang bernama Esther Yanteo. Ia dituduh terlibat dalam gerakan OPM, dan selama masa interogasi ia ditelanjangi serta disundut rokok pada organ kemaluannya. Rumkorem mengatakan bahwa seorang saudaranya menceritakan padanya bahwa di Jemburwo, sebuah pulau lain, tentara memperkosa para wanita, menaruh pasir di kemaluan mereka dan memasukan para lelaki ke dalam karung yang kemudian diceburkan ke laut.

Jauh sebelum itu pun, Rumkorem telah punya banyak kesempatan menyaksikan praktek-praktek tindak kekerasan. Pada bulan Maret, ia ditangkap kembali oleh pasukan khusus angkatan laut karena membuat pernyataan bahwa Pepera dilakukan dengan penuh kecurangan.

> Saya banyak melihat tindakan penyiksaan sewaktu berada dalam penjara angkatan laut di Biak, khususnya terhadap pemimpin masyarakat setempat. Bp. Borai, sekretaris Bupati Biak, dipukul berulang kali sehingga banyak tulangnya yang patah, tetapi ia tidak diberi pertolongan medis. Kepala sekolah dan juga guru bahasa Inggris di SMA, Bp. Mayor, ditinggalkan semalaman di bak mandi, serta Utrecht Wompere yang hampir mati karena dipukuli dilempar begitu saja seperti binatang.[5]

Rumkorem berada dalam penjara selama berlangsungnya pelaksanaan Pepera, dan sesudahnya dikenai tahanan rumah. Ia lalu dikirim ke Jayapura. Dalam beberapa kesem-

patan, ia dituduh sebagai simpatisan OPM, sebuah kecurigaan yang akhirnya ia benarkan saat ia "pergi ke hutan".

Kelompok gerilyawan yang berada di wilayah perbatasan bentukan mantan staf intelijen tersebut dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional atau TPN. Markas besar mereka dinamai Victoria, yang berarti kemenangan. Ideologi TPN adalah Kristen, karena Rumkorem adalah seorang Protestan. Pembicaraan mereka kebanyakan mengenai Tuhan yang akan mendampingi para pejuang Papua, karena menurut mereka anggota pasukan penyerbu dari Indonesia pada tahun 1962 adalah komunis yang mendapat dukungan persenjataan dari Uni Soviet.

TPN tidak punya modal apa pun kecuali sejumlah anggota untuk memulai organisasi tersebut, bahkan persenjataan modern awalnya tak ada. Tes terakhir yang diterapkan untuk para anggota baru adalah bagaimana cara mereka mendapatkan senjata untuk diri sendiri. Dengan gabungan antara persenjataan tradisional dan modern, penguasaan kondisi alam, bantuan penduduk lokal, dan akses untuk bergerak ke PNG ketika ada tekanan dari ABRI, menjadikan mereka sebuah kekuatan dengan tingkat yang tidak seberapa tapi cukup melelahkan bagi para penguasa. Sebagai tambahan, mereka juga menjalin hubungan dekat dengan para pendukung mereka yang berada di perkotaan.

Salah satu *contact person* TPN di Jayapura adalah Celsius Wapai, seorang aktivis yang pernah menjadi sekretaris organisasi pemuda Pecinta Tanah Air, salah satu badan organisasi di bawah payung OPM. Wapai berperan sebagai penghubung dengan para gerilyawan di hutan dan mempu-

blikasikan maksud-maksud mereka. Leaflet dan materi propaganda lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan terhadap OPM, sesuai kapasitas masing-masing. Wapai, juga harus membayar atas keterlibatannya.

> Saya ditangkap dan dibawa ke sebuah penjara milik departemen angkatan laut di Hamadi (dekat Jayapura). Saya dipukuli dan disetrum pada saat interogasi, dan bibir saya disundut dengan rokok.

Pada saat-saat terakhir berada di penjara, ...

> ..... kepala saya ditendang dan dipukul berulang-ulang sehingga saya kehilangan kesadaran. Pada satu kesempatan, saya hampir saja dibunuh. Saya diperintahkan untuk masuk dalam sebuah kendaraan dengan mata ditutup kain. Setelah sampai tujuan, kami diperintahkan untuk keluar dan dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Kami berbaris dan mendengar rekan kami satu per satu ditembak, dan tubuh mereka jatuh ke lubang kubur .... saya berdoa, dan menangis sampai kain yang menutup mata saya basah kuyup. Doa saya tampaknya didengar karena tiba-tiba saya mendengar sebuah sepeda motor mendekat. Seorang petugas turun dan memerintahkan bahwa tahanan no. 41 (yaitu saya) harus kembali ke penjara.[6]

Figur gerilyawan lainnya pada saat itu adalah Jacob Prai, yang lahir pada tahun 1942 di pedesaan dekat wilayah perbatasan. Meskipun Prai sampai pada gerakan perlawanan dengan rute yang sangat jauh berbeda dengan Rumkorem, ia juga merupakan produk elite Papua. Seperti halnya para pemimpin Biak, ia telah mengunjungi Jakarta. Tetapi perbedaan yang menyolok adalah bahwa ia selalu berada dalam posisi menentang Indonesia. Walaupun pandangan

antara kedua tokoh itu sama, tetapi keterlibatan awal Rumkorem di militer membuat mereka tidak cocok, khususnya setelah keduanya berselisih mengenai beberapa hal lain pada tahun 1976. Sesudah itu, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah dokumen rahasia OPM, Prai menuduh Rumkorem sebagai "bekas pengkhianat terhadap Papua Barat".

Pada tahun 1962, sesudah UNTEA meninggalkan Papua, Jacob Prai memulai sebuah kelompok independen yang disebut Gerakan Pemuda Papua dan belakangan duduk sebagai ketuanya. Pada saat menjadi seorang mahasiswa fakultas hukum di Universitas Cendrawasih (UNCEN) di Abepura, dekat ibukota, Prai terus menjalin hubungan dengan pemuda-pemuda yang anti Indonesia. Selanjutnya, — sampai sekarang — di kampus UNCEN banyak ditempatkan mata-mata pemerintah yang juga sebagai mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia dan juga Papua. Hal ini membuat Prai ditangkap pada tahun 1968. Hari-harinya di universitas digambarkan oleh seorang anggota senat mahasiswa, Bob Kubia, yang tadinya berpikir bahwa Prai adalah seorang intelijen dan terlibat dalam politik.

> Kebanyakan mahasiswa merasa tidak setuju dengan Indonesia tetapi mereka sangat takut. Hasilnya, mereka tidak berani berbuat banyak. Tetapi Jacob adalah sosok yang berbeda. Ia bahkan sering berjuang untuk kelompok masyarakat lain, kadang-kadang mereka yang keturunan Cina, pergi ke ruangannya dan berdiskusi secara tertutup. Menjelang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, ia menjadi sangat aktif dalam mempublikasikan masalah pengambilalihan kekuasaan. Ini artinya ia banyak bepergian ke daerah perbatasan sehingga ia dapat memberi informasi kepada mereka yang berencana menye-

berang ke PNG. Ia juga sangat bersemangat membantu penduduk setempat untuk menjualkan hasil kerajinan mereka, misalnya kulit buaya. Ia adalah putra "orang besar" dari pedalaman dan oleh sebab itu ia sangat peduli dengan kesejahteraan orang-orang itu. Ia adalah pemuda pertama asal daerah perbatasan yang memasuki universitas. Saya rasa ia adalah orang yang tepat untuk memimpin gerakan tersebut.[7]

Aktivitas Prai mengundang perhatian pemerintah. Suatu hari, selepas kuliah, ia meninggalkan kampus, kebetulan sebelumnya seorang petugas bersenjata datang untuk bertanya-tanya padanya. Petugas tersebut tetap menunggu di luar ruang kuliahnya seharian. Sewaktu kembali pada sore harinya, Prai ditangkap dan dimasukkan penjara. Dalam waktu seminggu ia kabur dari penjara dan tidak memberi kesempatan kedua bagi Indonesia: ia bergabung dengan kelompok Rumkorem di hutan, dan menyumbangkan keahliannya, bukan dalam bidang militer seperti si pemimpin dari Biak, tetapi pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa politik bawah tanah di ibukota dan dukungan moral yang berharga bagi orang-orang di sukunya.

Kubia, teman kuliahnya, belakangan bergabung dengannya, tetapi segera memutuskan mencari perlindungan ke PNG. Kubia mendapat jaminan perlindungan untuk tinggal di sana, tapi ternyata ia susah melepaskan diri dari politik terlebih dengan situasi rakyat Papua yang semakin memburuk. Pada tahun 1982, karena diduga telah melanggar syarat tinggal di PNG, pemerintahan Chan mendeportasikannya ke Indonesia. Meskipun PNG mengklaim bahwa pemerintah Indonesia telah berjanji bahwa Kubia dan beberapa orang yang juga dipulangkan tidak akan dihukum,

tapi terbukti bahwa mereka harus menjalani wajib lapor harian kepada polisi.

Meskipun Prai telah bergabung dengan gerilyawan TPN, ia menyatakan keberatan kepada Rumkorem yang menyebut dirinya sebagai "Presiden Papua Barat". Hasilnya, kelompok Prai selalu berpindah-pindah kamp.

Menurut salah seorang anggota kader kepemimpinan, anggota inti gerilyawan pada saat itu hanya 19 orang. Pada tahun 1984, 15 orang di antara mereka masih menetap di hutan. Para calon gerilyawan yang datang ke kamp OPM berasal dari berbagai daerah di Papua. Mereka tinggal di sana selama beberapa minggu atau kadang berbulan-bulan sebelum kembali ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Latihan dilakukan dalam bentuk penggunaan senjata baik tradisional maupun modern yang ditinggalkan Belanda atau diambil dari Indonesia. Para gerilyawan tersebut selalu bergerak dalam jumlah sedikit, terhitung 4 sampai 12 pasukan OPM dapat mengatasi satu peleton (30) serdadu ABRI. Mereka berlatih teknik-teknik *survival* di hutan, seperti bertahan hidup tanpa makanan dan bahkan bertarung melawan buaya.

Mereka juga membuat penekanan pada hal-hal yang bersifat politis, contoh yang sangat jelas adalah dengan membuat penyadaran mengenai kecurangan yang terjadi pada Pepera. Kepala bidang politik adalah Rex Rumakiek, yang pernah jadi birokrat pada saat usianya masih sekitar dua-puluhan tahun dan telah mengalirkan informasi seputar pemerintahan kepada OPM. Ia terbukti telah bekerja keras antara tahun 1968-70 dengan menyebarluaskan berita

di wilayah pedesaan maupun perkotaan. "Tempat kami dikira sebagai markas besar karena berada jauh masuk ke pedalaman, dekat perbatasan PNG," katanya kepada *Sydney Morning Herald* pada akhir tahun 1984. "Tetapi kami mempunyai pusat-pusat mobilisasi di semua propinsi dan mereka mempunyai jaringan dengan massa yang merupakan penduduk desa. Kebijakan ganda kami adalah mencela pendudukan Indonesia dan meyakinkan rakyat bahwa perjuangan bersenjata merupakan satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan."

Pertemuan-pertemuan taktis mulai membahas paralelisme antara perjuangan rakyat Papua dengan front-front pembebasan yang ada di negara lain. Para gerilyawan tersebut melihat banyaknya kesamaan antara mereka dengan situasi di Vietnam Selatan dan berharap agar mereka yang ada di negara lain tersebut dapat diyakinkan bahwa OPM, seperti juga NLF, sedang memperjuangkan sebuah revolusi anti kolonial. Tetapi bagaimanapun OPM menentang ideologi komunis dan menyatakan bahwa dalam barisan mereka telah menerapkan struktur kolektif, yang mereka adopsi dari metode tradisional untuk pengambilan keputusan. Mereka percaya bahwa "sosialisme Melanesia" suatu hari dapat diterapkan di seluruh negeri itu. Celah dalam sikap kukuh anti komunis mereka justru adalah Rumkorem yang merasa kebutuhan akan persenjataan untuk membangun kekuatan TPN sangat mendesak. Hal yang hanya bisa didapatkan dari blok Timur. Prai, sebaliknya, lebih cenderung untuk tidak tergantung pada pihak lain, karena ia melihat bahwa masyarakat dunia telah berpaling dari Papua Barat,

sehingga akan sia-sia jika mengharapkan mereka. Rusia dan para pendukungnya misalnya, telah memberikan suara di PBB, yang mendukung pelaksanaan Pepera, walaupun diketahui bahwa Presiden Soeharto membenci komunisme. China sebelumnya tampak bisa dijadikan teman, tapi ternyata Peking tidak menunjukkan tanda-tanda membantu.

TPN sendiri mempunyai beberapa sikap yang berbeda terhadap para pejuang Papua Barat di luar negeri. Rumkorem menjalin hubungan baik dengan Herman Womsiwor, dan tidak begitu suka dengan pemimpin lain yang berada di Belanda seperti Nicolaas Jouwe dan Markus Kaisiepo. Ia berpikir bahwa Jouwe bersikap berlebihan melalui pernyataan-pernyataannya mengenai OPM dan yang paling tidak bisa ia terima adalah kesombongnya mengklaim mengendalikan kekuatan gerilya. Pernyataan Rumkorem yang dikeluarkannya pada tahun 1984 memperlihatkan bahwa pandangannya selama bertahun-tahun terhadap "negarawan pertama" OPM tersebut belum berubah;

> Jouwe sibuk dengan berbagai fantasi yang ia miliki, dan perilakunya sangat tidak stabil — kadang ke Barat, kadang ke Timur, kadang ke Utara, kadang ke Selatan. Hari ini ia membuat suatu rencana, lalu besoknya ia membatalkannya lalu membuat yang lain lagi. Akhir-akhir ini ia mengemukakan ide Papua Barat yang mendapatkan otonomi penuh dalam negara Republik Indonesia. Hal ini sangat tidak bisa kami terima. Ia belum belajar dari sejarah bahwa tidaklah mungkin untuk mempercayai Indonesia.[8]

Dari luar negeri, kelompok Victoria hanya bisa sekadar mendapatkan materi untuk propaganda. Jangan harap mendapatkan senjata. Perlengkapan militer yang mereka dapat-

kan paling-paling hanya berupa selempang pundak warna merah untuk dipasang di baju militer. Perlengkapan tersebut biasanya datang melalui PNG. Yang penting adalah, mereka dikirimi draf konstitusi untuk Papua Barat yang berisi detail pembentukan negara dan hal-hal di dalamnya yang bersifat administratif. Pembukaan dari ke-129 pasal tersebut mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan menekankan bahwa Republik Papua Barat akan didirikan berdasarkan asas persaudaraan. Diputuskan bahwa warga negara adalah mereka, penduduk asli Papua Barat, yang terlibat aktif dalam perjuangan meraih kemerdekaan dan orang asing yang telah dinaturalisasi sesuai dengan undang-undang. Bahasa persatuan adalah bahasa Melayu, kecuali jika pemerintahan mendatang menghendaki lain. Ketika disahkan kemudian, konstitusi tersebut dicetak dalam bentuk *booklet* dengan sampul biru, dicetak *embossed* warna emas dengan lambang negara berupa kepala burung merpati Goura yang sedang membawa bendera Bintang Kejora serta semboyan *"One People-One Soul"*. Dinyatakan bahwa semua itu mulai berlaku saat dideklarasikan proklamasi, yang tanggalnya masih dikosongkan dalam *draft* tersebut.

Tahun-tahun awal para gerilyawan berada di hutan, pertentangan antara kelompok yang berselisih tersebut semakin memuncak. Pada pertengahan tahun 1971, Rumkorem menerima sebuah surat dari Herman Womsiwor, yang menggunakan kode — seperti bentuk komunikasi OPM umumnya, memberitahukan bahwa kelompok Jouwe sedang merencanakan pembentukan pemerintahan sementara.

Womsiwor dan rekannya Philemon Yusuway, berharap untuk dapat mendahului gerakan tersebut dengan membuat deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada saat itu juga. Mereka berpendapat bahwa untuk meningkatkan kredibilitas, tindakan tersebut haruslah dilakukan dari dalam Papua Barat. Brigjen. Rumkorem diminta untuk segera mengambil tindakan. Hubungan selanjutnya memutuskan penentuan tanggal 1 Juli dan mengumumkan proklamasi tersebut di tanah air dan luar negeri secara serempak. Untuk tujuan tersebut, Womsiwor dan Yusuway kemudian terbang ke London, di mana mereka menunggu pernyataan yang akan dikeluarkan dari hutan Nugini. Karena kedatangan mereka terlambat berbulan-bulan, maka mereka melakukan upacara perayaan pertama kemerdekaan itu. Acara itu dihadiri para kelompok pendukung, termasuk organisasi kulit hitam Amerika, NAACP.

Kembali ke hutan, Rumkorem masih berkutat dengan rencana yang ia buat. Pada akhir bulan Juni, markas Victoria berada bergerak ke daerah Waris, sebuah pemukiman yang berada sekitar 100 km selatan Jayapura dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari perbatasan hanya dalam beberapa jam. Pada September tahun sebelumnya mereka melakukan penyerangan terhadap pos tersebut, tetapi gagal. Pada penyerangan tanggal 1 Juli kali ini TPN berhasil menguasai Waris tanpa adanya korban. Dengan menggunakan radio gelombang pendek di pos tersebut, mereka mengumumkan yang secara simbolik meningkatkan rasa nasionalisme mereka yang mendengarnya: pernyataan kemerdekaan negara mereka.

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbay* sampai Merauke, dari Sorong sampai Baliem (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada Anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (*de facto* dan *de jure*).

Semoga Tuhan bersama kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bahwa kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri, dengan ini telah terpenuhi.

Victoria, 1 Juli, 1971

Atas nama rakyat dan pemerintahan Papua Barat

Seth J. Rumkorem

(Brigadir Jenderal)

*Sebutan penduduk setempat untuk Jayapura

Begitu formalitas yang sebelumnya terabaikan itu selesai sudah, para gerilyawan kembali menghilang ke hutan, merasa lebih percaya diri dalam bertempur melawan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa sebelum merdeka yang sebenarnya, mereka harus mengkomunikasikan perkembangan terbaru yang terjadi ke daerah-daerah Papua lainnya. Rumkorem percaya bahwa pesannya telah sampai ke London dan selanjutnya perhatian akan ditujukan kepada propinsi yang enggan bergabung dengan Indonesia tersebut. Ia berharap bahwa kelompok pejuang bersenjata dari tempat lain di dunia akan membuat tekanan internasional ke Jakarta, dan tentu saja ia berharap ada pihak yang berpotensi menjadi sekutu mereka, yang mungkin selama ini menunggu isyarat dari pemberontak Papua, akan membantu

dalam hal persenjataan. Kurir telah menghubungi jaringan simpatisan OPM, dan dalam waktu singkat berita mengenai proklamasi tersebut telah menyebar secara luas ke berbagai daerah. Berita itu dipertegas dengan beredarnya salinan konstitusi yang dicetak apa adanya. Sementara para pemimpin yang berada di luar negeri merasa jengkel dengan tindakan sepihak Rumkorem, yang secara langsung maupun tak langsung juga melibatkan mereka. Walau perpecahan dalam tubuh gerakan semakin dalam tetapi mereka tetap mempertahankan konsensus bersama sampai beberapa tahun berikutnya. Nyatanya, sejak 1971, tidak ada pemimpin OPM yang membuat pernyataan mengingkari konstitusi tersebut, walaupun beberapa pihak pada saat itu merasa bahwa kekuasaan tetap berada pada Dewan Pembebasan Nasional (Bagian 3, pasal 124), yang diketuai oleh Nicolaas Jouwe.

Indonesia menganggap Proklamasi tersebut tidak berbahaya, apalagi ABRI telah mengantisipasi dengan mengacaukan pancaran sinyal siaran radio dari Rumkorem itu. Justru yang menarik perhatian pemerintah Indonesia adalah mulai terorganisirnya gerakan OPM, yang menunjukkan bahwa OPM adalah suatu kesatuan politik bukan sekadar gerombolan pengacau liar, atau GPL. Sebelumnya, Indonesia merasa bahwa keadaan memihak mereka, dengan dasar pemikiran tidak ada lagi orang-orang Papua yang berniat bergabung dengan para pemberontak. Tentara pun mengabaikan provokasi minor yang dilancarkan OPM dan hanya menekankan pada pembalasan dengan tindakan secukupnya. Tindakan pembalasan Indonesia terhadap provokasi

itu justru menjadi media perekrutan terbesar bagi gerakan perlawanan. Kondisi ini diperparah akibat meningkatnya keluhan terhadap proses "Indonesianisasi" sistem pendidikan, kurangnya kesempatan bagi penduduk Papua duduk dalam pemerintahan, serta program transmigrasi yang membuat kehadiran Indonesia semakin terasa menyesakkan. Pada awal program, keberadaan para transmigran telah membuat khawatir rakyat Papua. Sementara itu sebagian besar pendatang tersebut — yang dikatakan miskin dan tidak punya ladang oleh petugas pemerintah — banyak di antaranya yang berasal dari keluarga pensiunan militer. Skema program itu semakin menampakkan tujuan lain selain tujuan demografis, yaitu untuk keamanan. Masalah penguasaan tanah menjadi sebuah permasalahan yang serius. Para pemilik tradisional mempunyai kepercayaan bahwa hak atas tanah mereka tidak dapat dimiliki secara permanen oleh satu pihak, bukan disebabkan karena jumlah kompensasi yang ditawarkan yang relatif sedikit. Sampai saat ini pun, penduduk Papua masih membicarakan masalah perampasan tanah untuk dipergunakan sebagai area transmigran dengan cara yang licik atau bahkan mengusir pemiliknya dari tanah tersebut, terkadang dengan todongan senjata. Klaim bahwa tindakan itu dilakukan untuk "kepentingan nasional" gagal menarik simpati penduduk setempat. Sebagian besar tanah yang diincar adalah wilayah sepanjang perbatasan PNG, zona di mana para gerilyawan bergerak dan ABRI enggan untuk menginjaknya. Dengan kondisi seperti ini membuat banyak penduduk desa yang hak miliknya direbut bergabung dengan TPN. Tetapi Indonesia tetap

saja menerapkan kebijakan serupa dan tidak memperhitungkan posisi dan kondisi para kelompok perlawanan. Kondisi seperti ini terus berlanjut sampai tahun 1980-an.

Cara Indonesia dalam menangani perlawanan mulai beralih dari penggunaan kekuatan pasukan secara besar-besaran ke peningkatan peran aktif intelijen, khususnya KOPKAMTIB yang orang-orang di dalamnya adalah militer dan tidak begitu peduli dengan masalah undang-undang kepemilikan warga sipil atas tanah mereka. Bahkan di Jawa pun, lembaga tersebut sibuk bekerja penuh antusias, tempat-tempat penahanan dipenuhi oleh berbagai macam "pelanggar hukum", termasuk di antaranya pelajar, aktivis kelompok Islam, seniman dan penulis. Papua Barat, daerah tempat pemberontakan masih berlanjut menjadi salah satu fokus utama perhatian pemerintah. Dengan dukungan militer, yang jumlahnya sudah dikurangi separuh, KOPKAMTIB melakukan intimidasi terhadap elemen masyarakat Papua: akademisi, para birokrat yang diragukan kesetiaannya, kepala desa, para penganggur. Menurut para pemimpin OPM, banyak tokoh kunci yang dibunuh dengan racun — yang saat itu menjadi metode populer. Yang lainnya dihilangkan, dan di mana mereka berada tidak pernah ada yang tahu. Sebuah sumber OPM memperkirakan bahwa sekitar 20% penduduk Papua pernah menjalani penahanan selama beberapa waktu. Menjelaskan keadaan di atas, Rumkorem mengatakan bahwa kisah Martin Luther adalah salah satu contoh.

> Sesudah menandatangani dokumen pelepasannya, ia diizinkan untuk keluar dari penjara pada bulan Agustus 1972, Daan

dan Kalaopas (temannya) melihatnya ditawari tumpangan kendaraan non-militer oleh seorang petugas intelijen. Martin meninggalkan keduanya dan sejak itu tak ada seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi dengannya. Kendaraan itu bernomor DS 101, sebuah kendaraan yang dikenal berulang kali digunakan dalam kasus serupa di Jayapura. Ketika sanak keluarga Martin menanyakan keberadaannya, petugas penjara mengatakan ia tidak lagi berada di sana dan menunjukkan bukti pelepasan yang telah ditandatanganinya.[9]

Pendekatan dengan tindak kekerasan semacam itu mengundang antipati banyak orang, meskipun juga tidak mendorong banyak orang untuk "masuk hutan". Tetapi keadaan tersebut menimbulkan simpati lebih bagi OPM di kalangan mayoritas masyarakat yang hidup di bawah tekanan Indonesia. Jika pastor Papua, sebagaimana diceritakan sebelumnya, di tahun 1969 dianggap melebih-lebihkan saat mengatakan bahwa semua orang Papua adalah pendukung OPM, pendapat ini pada saat itu sepertinya mendekati kebenaran. Penduduk setempat semakin merasa marah ketika pada tahun 1973, Papua Barat diubah namanya menjadi "Irian Jaya", mirip dengan nama ibu kota mereka, yaitu Jayapura (kota yang jaya). Kejayaan yang tidak pernah menjadi milik rakyat Papua.

Sementara situasi di Papua Barat semakin tidak karuan, yang terjadi di bagian Timur, PNG, justru sebaliknya, semakin berkembang dalam waktu singkat. Negara bekas jajahan Australia tersebut diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri Desember 1973 dan kemerdekaan akan menyusul. Perekonomian semakin berkembang dan kesempatan bagi penduduk lokal semakin luas untuk

bekerja dalam bidang pelayanan umum. Bagi rakyat Papua Barat, keadaan tersebut menjadi contoh apa yang seharusnya juga terjadi pula bagi mereka, dan oleh karena itulah mereka sangat kecewa. Ditambah pula dengan kebijakan pemimpin baru PNG yang tidak mendukung saudara mereka yang kurang beruntung di Papua Barat. Kebijakan ini merupakan warisan dari Australia.

Dalam sebuah surat rahasia pada tahun 1974, menteri pertahanan, hubungan luar negeri dan perdagangan PNG, Sir Albert Maori Kiki menulis:

> Mempertegas kebijakan kami terhadap pelintasan batas oleh anggota TPN, pihak berwenang negara kami sekarang merasa khawatir bahwa TPN — khususnya mereka yang terkonsentrasi pada sebuah kamp rahasia yang dikenal sebagai Markas Victoria — menjadi putus asa, dan ada kekhawatiran petugas kami yang berada di perbatasan akan diserang. Tahun lalu, sekretaris (untuk urusan luar negeri) telah menjelaskan secara singkat kepada staf Anda (Komisi Tinggi Australia) .... Mengenai adanya indikasi TPN telah menyebarkan pengaruh mereka secara luas kepada penduduk desa di perbatasan yang termasuk dalam wilayah kami, sampai ke wilayah pedalaman dekat Vanimo, hal itu tidak kami duga sama sekali sebelumnya. Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa gerakan tersebut ditujukan tidak saja kepada pemerintah Indonesia tetapi juga pemerintah PNG.... Pada awal tahun ini, atas perintah saya, perlakuan lebih ketat telah diberlakukan terhadap para pelintas batas yang diketahui sebagai anggota dari organisasi yang menentang pemerintah.

Anda tahu bahwa sangatlah sulit bagi kami untuk dapat mengontrol transportasi dan gerakan setiap orang di area tersebut, serta simpang siurnya para pejalan kaki, selain itu

penggunaan aliran sungai sebagai jalur yang mereka tempuh serta faktor-faktor lain yang serupa, menjadikan sangat tidak mungkin bagi kami untuk dapat sepenuhnya memotong jalur pengiriman barang yang berharga bagi para disiden seperti makanan dan amunisi senapan. Tampaknya kami hanya bisa menghentikan pengiriman serupa yang dilakukan melalui pos tapi yang pasti tidak akan bisa mencegah pengiriman yang mereka lakukan dengan cara menyeberang perbatasan.

> Sebagai hasil pembicaraan saya dengan Perdana Menteri (Somare), kami memutuskan bahwa hal pertama yang dilakukan adalah melanjutkan ... rencana untuk menambah petugas di area tertentu di wilayah perbatasan, serta mengganti para petugas, termasuk polisi, yang diduga bersimpati terhadap gerakan perlawanan anti pemerintah tersebut.[10]

Sir Albert mengajukan permintaan agar satu peleton pasukan penjaga teritorial Australia, yang termasuk dalam Resimen Kepulauan Pasifik, ditempatkan di wilayah perbatasan selama beberapa bulan. Hal ini tentu saja menjadi penghalang bagi TPN dan menyenangkan pihak Indonesia. Ia mengesampingkan gagasan melakukan patroli gabungan yang melibatkan mereka dan Indonesia.

Kiki juga terlibat dalam serangkaian pertemuan rahasia dengan beberapa pimpinan OPM terpilih, tujuan dari pertemuan tersebut adalah mengeliminir friksi dengan kelompok gerilyawan bersenjata yang mungkin terjadi antara Indonesia dengan PNG. Perkembangan pembicaraan tersebut dilaporkan kepada pemerintah Indonesia sebagaimana halnya kepada pemerintah Australia, pada level tertinggi

— tetapi tidak kepada pihak Papua Barat. Tidak mengherankan bila pembicaraan terhenti ketika OPM diminta membubarkan perjuangan mereka. Pertemuan serupa diadakan pada pertengahan tahun 1974 di rumah kepala distrik Madang yang di kemudian hari menjadi dubes PNG untuk Indonesia, Benson Gegeyo. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kiki dan beberapa pejabat senior, termasuk satu orang Australia. Dari pihak OPM adalah Rumkorem, Prai dan sejumlah gerilyawan lain, termasuk bekas gubernur Irian Jaya, Ondey. Pertemuan itu berlangsung lancar, tetapi tidak mencapai kesepakatan apa pun. Salah seorang anggota tim dari PNG mengatakan:

> Pertemuan itu berlangsung dalam suasana akrab, dan tampaknya akan berkembang ke arah tercapainya kesepakatan damai, OPM akan mengimbau anak buah mereka untuk tidak memanfaatkan PNG sebagai tempat meminta perlindungan atau sebagai basis perjuangan mereka. Tetapi para pemimpin tersebut tidak dapat menjamin bahwa rekan-rekan mereka tidak akan melintas batas jika hidup mereka terancam oleh tentara Indonesia.[11]

Pertemuan-pertemuan berikutnya diadakan, dan para gerilyawan kembali ke kamp mereka di hutan setelah pertemuan selesai. Pada tahun 1975, Kiki bertemu dengan para "tetua" Papua Barat, yang datang dari persembunyian mereka di Belanda, sebanyak dua kali. Sang menteri mengatakan kepada Jouwe, Womsiwor, dan Yufuway bahwa PNG menolak mengakui pemerintahan mereka dan akan melakukan tindakan tegas kepada para anggota OPM yang memanfaatkan wilayah negara mereka. Pembicaraan itu gagal

dan tidak diteruskan.

Sementara usaha-usaha di atas menemui jalan buntu, PNG meraih kemerdekaannya tanggal 16 September 1975. Dua bulan kemudian, Indonesia melakukan invasi terhadap Timor Portugis (Timor Timur) dengan brutal yang membuat para pemimpin PNG waspada serta menimbulkan kemarahan banyak warga negara PNG. Para pelajar berkumpul di depan kedutaan besar dan membakar bendera Indonesia. Pengambilalihan Timor Timur membuat PNG semakin sulit memutuskan suatu kebijakan kerja sama dengan Indonesia dalam memerangi rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan.

Terjebak di antara sikap Indonesia yang semakin "tegas" dan PNG yang terpaksa mengambil posisi berseberangan, membuat TPN kian mengintensifkan usaha untuk konsolidasi. Mendapatkan persenjataan menjadi prioritas utama, dan untuk mendapatkannya berarti mereka harus keluar hutan. Pos-pos militer yang melindungi area transmigrasi adalah target utama mereka. Sejumlah kecil senjata ringan, termasuk senapan otomatis jenis M16 buatan Amerika, mereka dapatkan melalui aksi perampasan. Kerugian diderita oleh kedua belah pihak, tapi TPN lebih mendapat keuntungan dari kejadian itu. Tindakan balasan dari ABRI dilakukan dalam bentuk hukuman kolektif, di desa-desa yang warganya diduga mendukung kelompok gerilyawan diserang. Karena tidak menguasai kondisi daerah tersebut, ABRI menggunakan beberapa helikopter serbu yang memuntahkan peluru secara membabi buta. Dijelaskan kepada pejabat PNG dan media massa bahwa penembakan tersebut dilakukan

oleh penduduk desa yang melarikan diri.

Di luar semua ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya, PNG tidak pernah memerintahkan tentaranya untuk secara aktif memburu para pemberontak atau bahkan untuk mencegah mereka melintas batas. Semua itu memang tidak memungkinkan, sulit membagi pasukan dalam patroli-patroli kecil dalam jumlah yang terlalu banyak, sementara keadaan medan tidak mendukung para pasukan. PNG tidak mampu memenuhi kedua persyaratan di atas. Seluruh kekuatan pertahanan mereka berjumlah kurang dari 3.000 orang dan sepenuhnya memerlukan dukungan logistik dari pusat. Pasukan dapat bertahan di area tersebut selama beberapa hari sebelum datangnya pengiriman ransum. Ini bisa berarti bahwa pasukan harus ditarik selama beberapa waktu karena masalah perbekalan atau bekal rangsum mereka akan didrop dari udara, sehingga akan membuat siaga para gerilyawan yang berada beberapa mil di sekitar mereka. Kesulitan lainnya adalah bahwa di bawah konstitusi PNG, bukan tentara yang punya kekuasaan untuk melakukan penangkapan, tetapi polisi. Yang paling bisa dilakukan oleh tentara hanyalah membawa tertuduh ke kantor polisi, dan jarak antara satu dengan lainnya relatif berjauhan, sekitar satu hari berjalan kaki. Dilema tersebut telah menjadi bahan pertimbangan komandan pasukan, Brigjen. Ted Diro:

> Hukum telah menghambat kita untuk dapat melakukan hal yang sepele, seperti menahan seseorang yang ditemukan di sebuah desa dan terbukti bahwa ia bukanlah warga setempat.[12]

Situasi tersebut sangat membuat kesal Diro dan beberapa rekan seniornya yang lain, yang merasa bahwa para pemim-

pin politik mereka merasa takut dan khawatir sehingga menghindari adanya akses militer terhadap intelijen perbatasan. Ditambah lagi dengan adanya persaingan dalam pelaksanaan tugas antara mereka dengan angkatan kepolisian, yang memandang militer tidak efisien sebagaimana juga para politisi.

Pada tahun 1977, Diro dan rekan-rekannya menjadi yakin bahwa Indonesia akan melakukan operasi lintas batas secara besar-besaran jika PNG tidak dapat mengambil tindakan tegas terhadap OPM. Mereka percaya bahwa suatu saat Indonesia pasti akan melancarkan gerakan pembersihan di perbatasan secara menyeluruh, sehingga akan berakibat terbunuhnya warga negara PNG yang tidak bersalah. Dengan harapan bisa mendahului aksi tersebut, Diro dan para pembantunya merencanakan sebuah operasi sendiri yang mereka beri kode *"electric shock"* Operasi mereka dikenal sebagai "kudeta yang bukan kudeta". Target mereka bukanlah OPM tetapi para pemimpin PNG sendiri. Tujuan mereka adalah menduduki kantor pusat pemerintah di Waigani, pinggir kota Port Moresby dan menawan para pemimpin negara sampai mereka bersedia menyetujui untuk bertindak tegas terhadap OPM. Dua kali latihan kudeta dilakukan, melibatkan pasukan inti berjumlah 30 perwira dan 20 tamtama. Percobaan kudeta dilakukan dengan menggunakan jeep dan truk yang bergerak di ibu kota pada tengah malam. Diberitakan bahwa para isteri anggota komplotan tersebut bahkan tidak ada yang dikenai tuduhan, meskipun orang tidak bisa percaya bila mereka mengatakan tidak tahu mengenai apa yang telah suami mereka lakukan pada

malam yang sunyi di Port Moresby.

Jelasnya, rencana militer tersebut diungkapkan kepada duta besar Indonesia, Brigjen. Roedjito, yang menegaskan bahwa kehadiran OPM di PNG memang sangat tidak diharapkan.

Sebelum rencana operasi itu dilaksanakan, beritanya sudah sampai ke telinga pemerintah Somare. Polisi disiagakan selama 24 jam penuh, begitu pula dengan para pejabat penting, termasuk beberapa orang Australia yang bekerja di pemerintahan. Pimpinan kudeta mengetahui hal itu, tetapi mereka tidak bergeming dari rencana semula. Lagi pula, mereka sedang menunggu hasil pertemuan yang antara Ted Diro dengan para anggota kabinet. Para menteri marah karena Diro telah bertemu secara diam-diam dengan OPM kelompok Seth Rumkorem di barak Moem, Wewak. Menyadari bahwa mereka tidak punya bukti apa pun mengenai kudeta, mereka lantas memutuskan untuk menegurnya dengan dalih terlibat diplomasi tunggal dengan OPM. Sangat sulit untuk memecatnya, kecuali ada bukti dilakukannya kudeta. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bersimpati dengan kelompok Rumkorem, tetapi hanya berusaha mendapatkan informasi dari pihak pertama mengenai tindakan yang mungkin akan dilakukan Indonesia dalam waktu dekat.

Kemudian hari, orang-orang Diro juga membuat pernyataan serupa mengenai Dubes Roedjito. Jika Diro jadi dipecat, dan "kudeta" jadi dilancarkan, sang Jenderal sudah merencanakan terbang ke Jakarta — ia sudah punya tiket pesawat yang dipesan lewat Sidney — dan akan merekomendasikan bahwa kekacauan di Port Moresby akan menja-

di momen yang tepat bagi Indonesia untuk bergerak ke wilayah perbatasan.[13]

Ironisnya, Diro mengadakan pertemuan rahasia dengan orang yang salah, yaitu Rumkorem. Padahal orang yang paling berpengaruh dalam tubuh OPM saat itu adalah Jacob Prai. Ia telah memisahkan diri dari kelompok Victoria beberapa bulan sebelumnya dan mengorganisir kekuatan gerilya sendiri. Jika benar-benar ingin mendapatkan hasil seperti yang diharapkan — bisa dikatakan sulit dicapai dalam kondisi seperti itu — Diro seharusnya berbicara dengan Prai.

Menurut Prai, pada waktu itu kekuatan anggota yang masih loyal kepada Rumkorem hanya berjumlah tak lebih dari 50 orang, sedang pengikut Prai berjumlah ratusan. Perseteruan tajam yang berkembang di antara kedua pemimpin tersebut tidak membuat ragu Prai untuk menjelek-jelekan kekuatan Victoria. Bagaimanapun, setelah mundurnya Prai jumlah pengikut mereka turun drastis, meskipun tidak separah yang diharapkan oleh para penentang kelompok tersebut. Pada tahun 1977, duta besar Australia di Jakarta, Richard Woolcott, berkunjung singkat ke Papua dan menyatakan bahwa jumlah pemberontak yang tersisa hanya 20 orang. Karena ia berkunjung ke daerah yang bukan wilayah kekuasaan OPM dan tidak bertemu dengan pemimpin OPM, dapat dipastikan bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada informasi yang ia dapat dari petugas pemerintah.

Didorong oleh adanya perpecahan dalam tubuh OPM, Indonesia melancarkan serangan besar-besaran terhadap para gerilyawan di wilayah perbatasan, sebelah selatan Ja-

yapura. 10.000 pasukan diterjunkan, mereka mendarat segera sesudah wilayah tersebut dibombardir dari udara. Pertempuran berlangsung beberapa minggu. Pemerintah menyatakan bahwa jumlah korbannya tidak seberapa, sementara OPM memperkirakan jumlah korban sekitar 1.605 orang tewas yang terdiri dari gerilyawan dan pendukung mereka yang di desa-desa dan di pihak Indonesia 425 orang tentara meninggal dan lebih 800 orang terluka.

Pemimpin OPM yang berada di luar negeri menyatakan bahwa ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang gerilyawan yang masih tersisa. Sebaliknya, komando militer untuk Irian, Brigjen Munandar, mengatakan bahwa OPM telah berkurang dan yang tertinggal hanyalah "sisa-sisa anggota mereka yang tercerai berai" yang tidak perlu dianggap sebagai ancaman.

Konflik tersebut benar-benar merupakan sebuah langkah mundur bagi perjuangan OPM, tetapi tidak sampai pada target yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu menghancurkan OPM berkaitan dengan adanya pemilu pada pertengahan tahun 1977.

Pada awal tahun 1977, 30 mahasiswa UNCEN dikeluarkan setelah memboikot kelas mereka sebagai protes terhadap "Indonesianisasi" mata pelajaran mereka. Selanjutnya beberapa peristiwa kecil berupa insiden kekerasan terjadi hampir di seluruh propinsi tersebut, menandakan adanya sebuah rantai reaksi — penyerangan-penyerangan tersebut kemudian diikuti tindakan balasan yang lebih keras — yang akan terus berlanjut sampai tahun berikutnya.

OPM memandang pemilu 1977 sebagai tantangan po-

litik terbesar bagi mereka. Masyarakat Papua kecewa karena tidak diperbolehkan mendirikan partai politik. Rasa tidak suka dengan Golkar, membuat banyak penduduk Papua memutuskan untuk memboikot pemilu tersebut. OPM bahkan merencanakan lebih jauh, yaitu akan menggagalkan pemilu tersebut bila mungkin. Tetapi kesempatan itu hilang, ketika Seth Rumkorem dan kelima pengikutnya diserang oleh gerilyawan Papenal di wilayah perbatasan pada awal bulan Mei. Menurut laporan *Post-Courier*, perintahnya adalah "membersihkan" kelompok Roemkorem, bila mereka menolak untuk menyerah. Sementara itu anggota inti kelompok Victoria melarikan diri ke PNG, tempat mereka kemudian mendirikan basis. Tak lama sesudahnya, muncul isyarat pendekatan antarfaksi, ketika Rumkorem mengatakan bersedia untuk menjadi deputi Prai. Tapi sekali lagi, usaha tersebut tidak berhasil. Prai justru memperlebar jurang perpecahan dengan membentuk pemerintahan *de facto* dan menjalin hubungan dengan Nicolaas Jouwe di Belanda.

Perpecahan "kedua orang besar" OPM tersebut dimulai di desa Tapos akibat perbedaan pendapat mengenai adanya laporan tertulis yang berkaitan dengan Front Komando Pembebasan Papua Barat yang didirikan pada tahun 1969. Dasar percekcokan tersebut adalah mengenai cara mendapatkan suplai senjata, apakah harus didapat dari negara komunis atau tidak. Rumkorem juga menyalahkan Prai berkaitan dengan pihak asing yang bersedia membantu OPM tetapi tidak bisa dipercaya, khususnya dari Australia. Konflik itu kemudian diperparah dengan persoalan pribadi ketika Prai mengatakan bahwa Rumkorem adalah orang yang

ambisius, dan sebagai balasan, Rumkorem mengatakan Prai berkarakter lemah sehingga mudah dipengaruhi orang lain. Akibatnya Prai menarik diri dari markas Victoria dan kembali ke desanya, Ubrub. Di sana ia membentuk sebuah komando baru yang disingkat sebagai "Pemka" (Pemulihan Keadilan) dengan dukungan kekuatan bersenjata Pasukan Pembebasan Nasional, Papenal atau Tepenal.

Para pendukung Rumkorem kebanyakan berasal dari Biak, sebagaimana halnya Rumkorem sendiri, dan juga orang-orang dari Tanah Merah.

Beberapa bulan kemudian pertikaian itu kian memanas, ketika kelompok Prai dibawah pimpinan Yeret Wayoi menyerbu faksi Victoria di tempat pengumpulan sagu Suhampa, di perbatasan yang termasuk wilayah PNG. Sejumlah korban luka-luka, dan beberapa orang disandera. Rumkorem yang berada di markas permanen di Pantai Bonai ketika mendengar berita penyerangan tersebut mengatakan perseteruan tersebut harus segera diakhiri sebelum menjadi lebih buruk. Ia bermaksud untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Prai, tetapi tawaran tersebut ditolak. Pertikaian terus berlanjut dan diwarnai berbagai tindak kekerasan, sampai awal tahun 1984 ketika gerakan itu mulai membentuk kesatuan komando. Sejak saat itu Victoria dan Pemka saling menganggap masing-masing sebagai musuh, kecuali saat berhadapan dengan Indonesia. Komandan Papenal, Paniai dalam suratnya kepada markas besar Pemka menulis bahwa orang-orang Papua Barat yang bergabung dengan kelompok lain sebagai "musuh dalam selimut".

Setelah beberapa tahun perjuangan OPM mulai men-

dapatkan publikasi baik di dalam Papua sendiri — yang sebagian besar disebarkan dari mulut ke mulut — maupun di luar negeri. Walaupun para wartawan dilarang meliput di Papua dan orang asing yang tinggal di Papua tutup mulut atas peristiwa berdarah yang terjadi, pihak luar negeri tetap bisa mengetahui apa yang terjadi. Sementara, Indonesia melalui menteri luar negeri Adam Malik tetap menyatakan bahwa pertempuran yang terjadi tidaklah dimotivasi oleh alasan politis, melainkan hanyalah "pertikaian antarsuku".

Pertempuran di perbatasan adalah berita pertama yang muncul. Ketika gerilyawan Papua menyerang pos-pos ABRI dan tempat-tempat milik pemerintah lainnya di areal transmigrasi Arso, dekat Jayapura. Tindakan balasan dari ABRI atas penyerbuan itu membuat ratusan penduduk desa melarikan diri ke PNG, di sana mereka kemudian menceritakannya kepada pihak lain. Jumlah pengungsi semakin meningkat ketika pertempuran meluas ke desa-desa di Selatan.

Kelompok OPM yang berbasis di Senegal dalam *press release*-nya menyatakan presiden Indonesia telah memerintahkan ABRI merebut markas OPM. Untuk itu dari Ambon dikirim empat batalion pasukan penerjun dan dua batalion Angkatan Laut ke Papua. *Release* tersebut juga menduga bahwa PNG telah memindahkan pasukan dari wilayah pertahanan "yang berada di bawah Australia" ke zona perbatasan, sehingga membuktikan ancaman yang pernah dilontarkan menteri luar negeri, Kiki, terhadap Seth Rumkorem. Akibatnya terjadi pula pertempuran antara gerilyawan Papenal — yang telah mengevakuasi penduduk desa yang

terluka akibat serangan udara — dengan pasukan PNG. Ketika para gerilyawan tersebut mundur, tentara PNG menangkap 20 penduduk desa lalu menyerahkan mereka kepada pasukan Indonesia yang bermarkas dekat perbatasan di desa Wutung. Menurut statemen dari Dakar ke 20 orang itu kemudian dieksekusi. Di antara mereka terdapat 12 wanita dan 5 anak-anak. Perlakuan serupa juga dialami pemimpin mahasiswa Papua Barat, Jacob Kaffier dan Tomas Wanaha, yang dipulangkan ke Indonesia oleh PNG. Mengenai pertempuran yang telah berlangsung, laporan tersebut menyatakan bahwa pesawat milik Indonesia telah menjatuhkan bom jenis *napalm*. Pernyataan ini dicemooh oleh banyak pihak luar sebagai sensasi murahan. Padahal, beberapa orang staf angkatan udara Australia yang sedang melakukan survey pemetaan di Papua membenarkan pernyataan tersebut.

Bentrokan paling brutal terjadi di lembah besar Baliem, ketika sekitar 15.000 orang dari Ndani dan suku-suku yang mendukungnya bangkit untuk melawan kekuasaan orang luar. Awalnya, pada bulan April, pemberontakan itu dianggap tidak didalangi oleh OPM. Tetapi beberapa minggu sesudahnya, banyak orang Ndani yang menyatakan diri mereka sebagai anggota OPM, dan menentang beberapa tuduhan yang diarahkan kepada pemimpin OPM.

Telah bertahun-tahun masyarakat Ndani bermasalah dengan Indonesia. Mereka dianggap paling primitif di antara semua kelompok masyarakat Papua, karena mereka hampir tidak berpakaian sama sekali. Pemerintah memaksa mereka mengganti koteka dengan celana. Operasi koteka tersebut menimbulkan kemarahan, bukan saja karena alasan

budaya tetapi juga karena alasan kesehatan. Segera sesudah para lelaki tersebut mulai mengenakan celana — yang kebanyakan berupa celana pendek — mereka menderita penyakit kulit yang parah. Menurut laporan yang disampaikan kepada pos bantuan kesehatan milik misionaris, penyakit tersebut disebabkan karena penduduk tidak pernah mencuci celana mereka. Mereka tidak paham mengenai hal itu, karena bagi mereka koteka sudah cukup dan justru tidak menimbulkan masalah. Karena rasa simpati, para misionaris meminta pemerintah untuk menghentikan kampanye tersebut. Akan tetapi pemerintah menyatakan bahwa orang-orang Ndani tidak akan bisa menjadi beradab bila mereka terus saja telanjang.

Konflik yang lebih kentara di antara kedua etnis tersebut terekam pada awal tahun 1973, ketika seorang geolog dari Australia di Baliem mencatat dalam diarinya:

> Baru-baru saja, seorang Ndani ditembak saat sedang berjalan menyusuri sebuah jembatan. Orang Ndani tersebut menolak menuruti perintah dan berjalan dengan lagak seperti menghina. Seorang letnan tentara Indonesia menembak kakinya dengan senjata api ... Para dokter misionaris mencoba mengobati kakinya. Penembakan tersebut telah meningkatkan ketegangan antara orang-orang Indonesia dengan penduduk setempat. Penduduk menolak biaya pengobatan dari tentara agar tidak merasa berhutang budi kepada Indonesia.[14]

Setahun setelah kejadian itu, Robert Mitton menulis bahwa militer yang sedang bertugas

> ...telah memukuli orang-orang. Tampaknya, orang-orang itu telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, sehingga ia menyuruh sebanyak mungkin laki-laki berbaris

kemudian dipukul dengan pentung seperti memukul sapi. Setelah itu mendorong mereka — lengkap dengan pakaian terbagus yang mereka miliki — ke lumpur.

Mitton juga mengungkapkan mewabahnya cacing pita di lembah Baliem akibat kehadiran tentara Indonesia. Seorang perawat misionaris menyatakan situasi itu sebagai malapetaka. Sekitar 17 persen penduduk daerah Paniai, terkena wabah kista tersebut. Banyak babi di daerah setempat yang juga terinfeksi parasit cacing pita.

Kemarahan penduduk Baliem menjelang pelaksanaan Pemilu pada tahun 1977 tersebut diwujudkan dalam bentuk kekerasan, meskipun mereka kekurangan senjata modern. Seorang misionaris yang menyaksikan penyerangan mereka terhadap salah satu pos militer mengatakan bahwa orang-orang Ndani tersebut sangatlah berani.

Sekitar 30 atau 40 orang tentara dikepung penduduk asli yang hanya berbekal senjata tradisional. Orang-orang Ndani tersebut merangkak sepanjang parit terbuka, di bawah tembakan mortir dan senapan yang berbunyi terus-menerus. Herannya, tak ada satu pun di antara mereka yang terluka, sehingga membuat pihak militer Indonesia ketakutan dan terus menembak dengan membabi-buta. Ketika banyak tentara yang akan menyelamatkan diri, seorang perwira mengancam akan menembak mereka yang disertir. Setelah itu, orang-orang Ndani berhasil dipukul mundur. Dalam kejadian ini dari pihak Indonesia juga tidak terdapat korban.[15]

Peristiwa lainnya adalah jatuhnya pesawat jenis *twin-engine*, yang dicarter oleh ABRI, setelah ditembak senapan dari darat. Pesawat tersebut mendarat darurat di landasan Karabaga, dengan dua orang tentara tewas. Insiden lainnya

adalah patroli ABRI yang diserang oleh sekitar 200 orang yang meminta militer agar menjauhi tempat diadakannya pemilu.

Bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan petugas pemerintah tersebut, serta beberapa hal lain, diketahui dari sebuah laporan intelijen ABRI yang dibocorkan kepada organisasi Tapol. Dalam daftar tersebut tercatat 47 variasi perlawanan mulai dari deklarasi kemerdekaan Papua Barat sampai dengan berbagai peristiwa berdarah. Peristiwa paling besar terjadi pada tanggal 28 April, pukul 1.30 siang, ketika sekitar 4.000 orang berkumpul dan menyerang pos pemerintahan di Tiom, dengan menggunakan senjata api dan senjata tradisional. Sehari sesudah itu, orang-orang tersebut mundur karena datangnya helikopter bala bantuan yang memberondong mereka. Indonesia kemudian mendatangkan pasukan khusus ke daerah Baliem. Mereka didrop di beberapa landasan darurat berukuran kecil. Sedangkan tindakan balasan masyarakat Ndani yang terbilang berhasil adalah memasang jebakan-jebakan di landasan untuk mencegah mendaratnya pesawat. Karena sangat marah, Indonesia lalu melakukan pemboman melalui udara, tindakan yang menunjukkan tidak adanya niat dari pihak Indonesia untuk menyelesaikan masalah Baliem melalui negosiasi. Sementara itu ABRI melaksanakan misi tersebut tanpa mempedulikan keberadaan para pengamat asing, khususnya sebuah tim dari RAAF yang terlibat dalam operasi pemetaan, yang merupakan bagian dari bantuan militer Australia kepada Indonesia. Tim dengan dua helikopter jenis Iroquois tersebut telah bekerja di Papua sejak tanggal 7 Juli. Salah

seorang anggota tim tersebut menceritakan:

> Kami sedang duduk-duduk beristirahat di Wamena, ketika melihat beberapa pesawat Bronco mendarat, mengisi perlengkapan dan mengudara kembali menuju ke lembah, ke arah Barat Laut. Kami melihat mereka menjatuhkan *napalm* ke beberapa desa, yang kemudian diikuti oleh pemberondongan dari udara. Orang-orang Ndani di seluruh daerah tersebut merasa sangat marah. Lima orang Indonesia mereka cincang, dan sebagai gantinya, beberapa desa disapu bersih oleh Indonesia.

Seorang perwira RAAF lainnya menyatakan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap para misionaris di lembah Baliem, dan diberitahu bahwa hal serupa sudah sering terjadi. Para misionaris, yang kebanyakan beragama Protestan dari Australia dan Amerika, mengatakan bahwa mereka enggan untuk berbicara kepada publik luar karena mereka tahu bahwa bila hal itu terjadi, visa mereka akan dibatalkan dan misi mereka akan berakhir.

Sementara perwira RAAF ketiga, yang mempunyai kebiasaan membuat jurnal secara rinci, menulis bahwa kedatangan tim yang direncanakan pada tanggal 21 Juli, ditunda dengan alasan yang disebut Indonesia sebagai "keadaan yang tidak terduga". Ketika mereka tiba pada tanggal 28 Juli, ia mencatat telah melihat 3 Bronco yang sedang diisi bahan bakar dan persenjataan. Tentara sibuk di area tersebut. Mereka melarang orang-orang dari RAAF memotret. Pesawat yang digunakan untuk melawan pemberontakan tersebut kemudian terbang dan menyerang desa-desa terdekat. *Diari*-nya mencatat beberapa kejadian, di antaranya:

10 Juli. Banyak pasukan penerjun yang berada di daerah Oksibil. Kami diberitahu bahwa mereka sedang latihan.
2 Agustus. Di sebuah landasan terbang darurat yang disebut Tangma, di wilayah pegunungan, sebuah pesawat misi MAF jatuh, tampaknya karena masalah cuaca. Beberapa orang tewas.
3 Agustus. Karubaga, Barat Daya Wamena. Pesawat yang sedang bertugas mengalami kerusakan akibat jebakan yang ditanam penduduk asli yang marah. Pilot pesawat tersebut bermaksud untuk mendarat, dan baru melihat adanya tonggak tersebut setelah dekat. Pada hari keenam, pemberontak menyerang ABRI dan kami diminta untuk meninggalkan tempat itu segera.
7 Agustus. Masih mengenai ketegangan di daerah tersebut. Sebuah pesawat militer Indonesia terkena tembakan dari darat. Sementara landasan pesawat yang dipasangi jebakan di antaranya Hutuatas, Timur Laut Wamena, Bokondini dan Kelila, tempat rumah misionaris dibakar.[16]

Misi RAAF selama 6 minggu di Papua diwarnai berbagai peristiwa. Salah satu dari kedua helikopter Iroquois tersebut jatuh, dengan menelan korban jiwa. Kejadiannya, pada saat mereka berada pada ketinggian 9.000 kaki, tiba-tiba cuaca pegunungan memburuk. Pada awalnya mereka menduga bahwa OPM yang telah menembak jatuh pesawat mereka, dan sebagai reaksi atas kejadian tersebut, pasukan pilihan dari SAS Australia diterjunkan ke Wamena. Pasukan Australia tersebut dengan bergurau mengatakan bahwa tentara Indonesia merasa takut kepada mereka, karena SAS pernah mengalahkan para-komando ABRI di Kalimantan semasa kampanye "konfrontasi"-nya Soekarno.

Dua belas orang tim SAS dikerek turun ke helikopter yang jatuh tersebut, tapi kemudian ditarik kembali setelah melihat jelas bahwa Iroquois tersebut murni mengalami

kecelakaan.

Sebuah pesawat RAAF lain yang terlibat dalam pemotretan untuk pemetaan yang juga mengalami kejadian menyedihkan, seperti dikatakan oleh seorang anggota tim, adalah sejenis Pilatus. Ketika pesawat tersebut kembali ke Wamena, mendarat secara mendadak setelah mendapat tembakan tunggal dari darat. Lubang tembakan diketemukan di kotak besi tebal yang merupakan bagian dari *gear* kamera. Duduk di atas kotak tersebut adalah seorang anggota *crew* RAAF. Para penumpang pesawat tersebut kagum dengan keakuratan OPM — dengan dugaan yang melakukannya adalah para gerilyawan — dalam menembak pesawat yang sedang terbang, dan menduga bahwa itu adalah perbuatan seorang penembak berpengalaman. Setelah peristiwa itu, operasi pemetaaan ditunda sampai hampir setahun lamanya.

Pengamat dari Australia lainnya adalah seorang pilot sipil bernama Terry Doyle yang delapan tahun sebelumnya pernah menerbangkan F27 dari Darwin ke sebuah lapangan terbang kecil yang dibuat untuk kepentingan penambangan tembaga Freeport, sebelah Selatan lembah Baliem. Lokasi penambangan tersebut berada di dekat sebuah kota yang didirikan oleh perusahaan tambang tersebut, yaitu Tembagapura (kota tembaga) yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Doyle berpendapat bahwa daerah tersebut adalah salah satu tempat yang paling indah di dunia. Pada tanggal 22 Juli, saat tiba di lapangan terbang Timika, ia disambut oleh seorang karyawan berkebangsaan Amerika di Freeport.

Ia mengatakan kepada saya, "Anda tiba tepat pada waktunya untuk bisa melihat gerombolan rakun ditembaki pantatnya." Tampaknya yang ia maksud adalah dua pesawat Bronco OV-10s yang waktu itu masih berada di landasan dan sedang bersiap terbang untuk memberondong Akimuga, sebuah desa yang terletak 40 km dari tempat itu. S104 dan S114 adalah nomor pesawat tersebut. Kata "desa" tampaknya bukan istilah yang tepat, karena tempat itu lebih berupa serangkaian desa yang hampir berdekatan dan luasnya mencapai sekitar 5 mil. Dan saya rasa ada ribuan orang tinggal di sana.

Belakangan saya baru tahu bahwa sebelumnya, penduduk desa tersebut telah mengusir dua orang polisi dari desa mereka. Pesawat tersebut memberondong tempat itu sampai amunisi mereka habis. Setelah aksi itu selesai saya terbang di atas tempat itu dengan ketinggian 12.000 kaki. Dengan ketinggian sedemikian Anda masih bisa melihat asap dan debu yang mengangkasa, dari pondok-pondok yang terbakar. Penembakan tersebut dilakukan secara serampangan. Melalui radio saya mendengar pilot Indonesia sedang membicarakan hal itu. Saya sedikit mengerti bahasa Indonesia dan tahu bahwa mereka sangat puas.[17]

Menurut Doyle, penyerangan tersebutlah yang menjadi alasan penduduk desa melakukan sabotase terhadap saluran pipa Freeport yang mengalirkan tembaga dan campuran emas dari ketinggian 6000 meter ke laut. Kerugian yang ditanggung oleh perusahaan akibat perusakan tersebut diperkirakan mencapai US$ 11 juta.

Penduduk desa yang marah tidak sendirian dalam melakukan aksi, mereka didukung oleh gerilyawan Papenal yang datang ke tempat tersebut dengan berjalan kaki dari wilayah perbatasan. Deputi Prai, Otto Ondowame menyatakan bahwa ia yang memimpin dan merencanakan sabotase saluran pipa tersebut. Sebelumnya mereka mencuri ba-

han peledak dari lokasi pertambangan. Ondowame jelas mampu untuk melakukan aksi semacam itu. Ia bekas orang seminari, dan lihai dalam strategi militer, bahkan lebih baik daripada Prai sendiri. Seorang yang mengenal Ondowame dan sangat terkesan dengan reputasinya dengan melebih-lebihkan mengatakan: "Ia mirip Charles Atlas".

Doyle mengatakan bahwa selain kejadian di atas mereka juga menyerang saluran listrik, menghancurkan jembatan dan memblokade lapangan terbang darurat.

> Penyerangan terhadap saluran pipa terjadi pada malam itu juga. Kerusakan yang terjadi sangat parah. Mereka juga membakar instalasi bahan bakar. Sepanjang yang saya tahu mereka tidak mempunyai senjata modern, kecuali hanya beberapa buah senapan tua. Mereka pro-OPM karena menginginkan orang-orang Indonesia pergi dari tempat mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir beraliansi dengan Prai maupun Rumkorem, meskipun mereka tahu siapa orang-orang ini, bahkan menyimpan surat yang ditandatanganinya. Orientasi mereka adalah perjuangan dan tidak pernah mempermasalahkan persoalan faksional.
>
> Wilayah tersebut dilanda kepanikan selama beberapa hari, meskipun masyarakat Papua masih terkendali. Saat Doyle kembali lagi ke tempat itu, ABRI telah mengambil tindakan balasan, di mana pasukan mereka melakukan pembersihan di sepanjang desa tersebut dengan berjalan kaki.

Mereka jelas tampak frustasi dalam melaksanakan tugas. Saya menyaksikan banyak jasad bergelimpangan, dan mereka mengatakan akan mengubur 30 jenazah keesokan harinya. Mereka menembak seorang laki-laki — yang sebenarnya saya kenal — hanya karena ia berdiri di tepi jalan. Ia tidak bersenjata sama sekali. Mereka membawa lelaki itu

dengan truk ke lapangan terbang dan kemudian melempar tubuhnya ke tanah, dan semua prajurit Indonesia berfoto dengan posisi kaki mereka menginjak leher atau kepalanya. Seperti layaknya pemburu yang telah mendapat hasil buruan. Aksi kekerasan tersebut benar-benar brutal. Selain itu, yang terjadi adalah sejumlah peristiwa kecil oleh penduduk sipil yang dianggap mengganggu atau sejumlah kriminalitas pencurian biasa, tetapi dibalas dengan melibatkan seluruh masyarakat. Sebuah perbandingan yang tak sepadan. Sebenarnya sebagian besar penduduk desa membenci perilaku buruk Indonesia, tetapi mereka tidak terlibat secara mendalam dalam gerakan OPM.

> Menurut Doyle, sebagian besar kebun milik masyarakat telah dirusak sehingga banyak anak-anak yang menderita kekurangan gizi. Seorang warga Australia di kota mengumpulkan dana di antara warga asing yang tinggal di sana dan membawa susu kental serta makanan untuk dibagikan pada penduduk desa. Tentara menolak memberi izin, dan menyelewengkan bantuan makanan tersebut.

Seperti halnya para misionaris, para pekerja berkebangsaan Eropa di Freeport dan kontraktor konstruksi, Bechtel, memilih untuk menutup mata atas kekejaman itu. Mereka di antaranya berasal dari Amerika, ditambah beberapa dari Kanada dan Inggris. Doyle menggambarkan sebagian besar mereka "tidak punya perasaan", dan percaya bahwa kejadian-kejadian di atas tidak membuat prihatin pihak luar, khususnya karena mereka mendapat keuntungan yang besar dari tempat itu. Tetapi bagaimanapun tetap ada beberapa pengecualian, John Hansen misalnya, yang oleh teman-te-

man Amerikanya dijuluki sebagai "agen Indian". Doyle mengatakan bahwa:

> Ia ditunjuk oleh perusahaan sebagai petugas penghubung (*liaison officer*) dengan penduduk setempat. Ia menjalin kerjasama dengan penduduk desa dan menyarankan mereka untuk mulai menanam sayuran agar bisa dijual di kota tambang tersebut. Tetapi ia tidak disukai Indonesia karena menjalin hubungan dengan penduduk setempat. Indonesia beranggapan pihak asing bisa jadi akan memperkenalkan "pemikiran yang salah" mengenai kepemilikan tanah — karena penduduk tidak menerima ganti rugi atau menerima dalam jumlah yang sangat kecil.
>
> Mereka menghadapi Hansen dengan menembak di sekitar kakinya, seperti layaknya film *cowboy*. "Keluar dari kota ini atau kalau tidak kami akan mengusir dengan paksa." Ia kemudian digantikan oleh "Woody" Holtz, bekas kolonel dari perang Vietnam. Ia membantu penduduk dengan mengajarkan membuat batu bata dari bahan baku yang ada di tempat itu. Tugas Holtz yang lain adalah memonitor siapa saja yang meninggalkan area tersebut melalui lapangan terbang Timika. Ketika menemukan bahwa tentara dan polisi Indonesia mencuri sejumlah barang, ia menegurnya. Kemudian, mereka mendatanginya, menendangnya berkali-kali, dan seperti halnya kejadian sebelumnya: ditembak di seputar kakinya.

Pandangan dari masyarakat mengenai penyerangan di desa Akimuga bisa dilihat dari dokumen "Laporan lengkap mengenai situasi di Irian Jaya", yang dibuat oleh OPM segera sesudah terjadinya peristiwa itu. Menurut laporan tersebut, aksi pembersihan ABRI itu dinamai Operasi Tumpas. Beberapa kejadian digambarkan secara detail dengan sangat mengerikan:

> Tentara membakar rumah-rumah dan gereja di setiap desa

yang dilewatinya. Babi serta ayam ditembak tanpa perasaan, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah ditembak dan dibunuh .... Di kampung Dila, seorang kepala suku bernama Nalogoan Kibak digorok bagai kambing dan darahnya ditampung dalam sebuah ember. Setelah itu, Letkol Soekemi — komandan militer untuk wilayah Nabire — memaksa para pemuka suku, guru-guru dan pastor yang berada di tempat itu meminum darah tersebut di bawah todongan senjata seperti oleh perampok, tidak seperti layaknya prajurit yang tahu hukum perang.

Di desa Kuyuwagi, tentara di bawah komando Kapten Rudy mengepung dan membombardir serampangan.

Setelah dibunuh dengan bayonet, perut orang-orang tersebut dirobek dan isinya dikeluarkan, kemudian dibelitkan di tongkat kayu seperti tali. Sesudah itu, batu, kubis, dan daun-daun dimasukkan ke dalam tubuh mereka, kemudian jasad mereka ditinggalkan seperti layaknya binatang liar yang tak berjiwa. Para wanita yang sedang hamil dibayonet kemaluannya dan dirobek sampai bagian dada, dan bayi mereka dipotong menjadi dua bagian. Para lelaki yang telah ditembak, dipotong kemaluannya kemudian dimasukkan ke mulut para wanita, sedangkan di mulut para lelaki ditaruh kemaluan wanita dan anus.

Sebuah laporan OPM yang lain menyatakan bahwa beberapa di antara anggota pasukan Indonesia tersebut adalah orang Papua yang tergabung dalam Batalion 753/Sorong. Laporan yang diserahkan ke markas besar Pemka dekat perbatasan, menggambarkan para serdadu "menjilat pantat Indonesia" dengan membunuh bangsa mereka sendiri. Dikatakan dalam laporan itu bahwa mereka menembak mati anak-anak dan para orang tua. Pada tahun 1983, banyak

laporan mengenai kejadian serupa dikirimkan kepada Pengadilan Nasional PNG oleh seorang pengungsi, bernama Simon Allom, yang dituduh telah membunuh seorang pegawai pemerintah Indonesia di Port Moresby.

Menurut perhitungan OPM, beberapa ribu orang telah kehilangan nyawa selama masa penumpasan di daerah pedalaman itu. Sementara Indonesia menyatakan bahwa jumlah tersebut kurang dari 900, sebagaimana dikatakan oleh seorang petugas pemerintah kepada wartawan Australia Denis Reinhardt, yang waktu itu sedang mengadakan kunjungan singkat.

Gejolak di daerah pedalaman tersebut memaksa pemerintah untuk menunda pemilu, di beberapa tempat malah dibatalkan sama sekali. Di wilayah dekat perbatasan PNG tindakan serupa juga diberlakukan. Pesawat jenis Bronco dan helikopter penembak lagi-lagi menjadi senjata yang dipilih oleh ABRI dan selanjutnya teori yang sama diberlakukan: tindakan tegas bagi penduduk desa yang diduga sebagai pro OPM akan dapat membuat penduduk lainnya jera. Kenyataannya cara ini tidak berhasil memisahkan gerilyawan dari penduduk tetapi malah semakin menjauhkan rakyat Papua dari Indonesia. Ketika ditanya oleh pihak luar, pemerintah Indonesia mengingkari adanya korban. Komandan militer terakhir di wilayah itu, Kolonel Santosa, mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan bom plastik yang dijatuhkan di daerah sasaran, dan bom jenis ini memang menimbulkan suara keras tetapi tidak begitu menimbulkan kerusakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak lebih dari 100 orang. Ia tidak mau mengakui bahwa ada

lebih dari 1.500 orang Papua yang melarikan diri ke PNG sebagai pengungsi, separuh dari jumlah tersebut mengungsi antara 20-25 Juni, 1978. Duta besar Indonesia untuk PNG mengatakan bahwa ada 1.800 orang anggota pasukan Indonesia berada di hutan, dengan 3.000 lagi siaga di Jayapura. Ia tidak mau mengomentari adanya pasukan pendukung berupa kekuatan angkatan udara, yang menurut OPM terdiri dari 5 buah Bronco dan 6 helikopter.

Setelah wilayah Baliem dan sekitar perbatasan berhasil ditenangkan pada awal tahun 1978, Indonesia berhasil menarik beberapa tokoh rakyat Papua ke pihaknya. Hal itu tampak jelas ketika pada bulan Mei, seorang pemimpin OPM bernama Marthin Tabu membocorkan rencana penyergapan di hutan kepada para pejabat Indonesia. Sebelum itu, pada bulan Januari, Tabu memimpin sejumlah pengikutnya untuk menyerahkan diri kepada pemerintah. Salah satu *contact person*-nya adalah Kolonel Ismail, komandan operasi divisi Cendrawasih ke-17, yang bertanggung jawab atas keamanan di Irian Jaya. Pada tanggal 16 Mei, sebuah helikopter ABRI yang membawa Ismail, kepala divisi intelijen; Letkol Atang, juru bicara majelis tingkat propinsi; dan empat orang staff militer lainnya terbang menuju sebuah desa perbatasan bernama Sawayames, atas permintaan Tabu. Tabu, yang sebelumnya berperang melawan Indonesia, sekarang dipandang sebagai sekutu berharga bagi pemerintah. Ia menjanjikan akan mengajak lebih banyak lagi orang Papua dari suku-suku yang mendukungnya. Tetapi setelah pesawat mendarat, helikopter tersebut dikepung oleh penduduk desa yang merasa marah dan kemudian diserang. Kedua pilotnya

dibunuh dan mesin pesawat dirusak. Sementara itu para penumpang yang diculik diperlakukan dengan buruk, dan baru dilepas beberapa bulan kemudian setelah sejumlah tebusan diberikan kepada OPM. Hasil dari penyergapan itu dipotret oleh OPM. Foto tersebut, yang belakangan diberikan kepada asosiasi media masa dan dikirim keluar negeri, tidak begitu jelas, tetapi menunjukkan kedua orang yang tewas serta helikopter yang sudah rusak dikelilingi oleh orang-orang Papua yang membawa busur-anak panah dan beberapa senapan.

Lagi-lagi ABRI membalas melalui serangan udara dengan pesawat Bronco, serta membom desa-desa yang berada di kedua sisi perbatasan, sehingga menambah jumlah pengungsi ke PNG. Tindakan balasan tersebut menjadi lebih sengit, setelah adanya penculikan kedua yang melibatkan petugas yang masih junior. Intelijen PNG terus mencari informasi dengan menanyai para pelintas batas.

Ketika usaha pencarian yang dikomandoi militer gagal menemukan markas OPM, atau menangkap pimpinan OPM yang berpengaruh, Indonesia mulai mempertanyakan keampuhan taktik yang mereka gunakan. Seorang Jenderal baru bernama Mohd. Yusuf, yang telah dilantik sebagai Menteri Pertahanan mengatakan bahwa militer tidak seharusnya mencoba memodernisasikan Irian Jaya melalui kekerasan dengan cara mengejar gerilyawan OPM. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya hanya melakukan reaksi terhadap provokasi yang disengaja. Pendekatan yang diusulkan Yusuf tersebut dijuluki sebagai "kebijakan yang ramah". Tetapi kebijakan itu tidak dipercaya oleh sebagian besar

rakyat Papua, dan hanya disambut secara optimis oleh sebagian kecil orang. Tokoh terkemuka yang menyatakan dukungan adalah Marthin Tabu, yang sudah kembali menyerah dengan mengatakan bahwa para pengikutnya yang tidak bisa ia kendalikan yang telah melakukan penyerangan terhadap helikopter dan melakukan penculikan tersebut. Berlawanan dengan cerita burung mengenai Tabu: bahwa ia telah terbunuh di penjara, atau dipenjara selama 30 tahun, Tabu ternyata sudah bebas. Pada tahun 1981 ia muncul untuk diperkenalkan kepada John Kolia, seorang akademisi yang saat itu berkunjung ke sana. Dr. Kolia diberitahu bahwa baik Tabu maupun seorang bekas gerilyawan lainnya, Yeret Wayoi — dulu pernah memimpin Pemka dalam sebuah penyerangan terhadap kelompok Rumkorem- pernah dijatuhi hukuman oleh Indonesia. Tetapi pada waktu itu ia melihat bahwa tampaknya Tabu mendapat pengawalan ketat dari penguasa. Menurut dugaan, hal ini dilakukan untuk melindunginya dari "tindakan balasan" oleh orang-orang Papua yang mungkin akan membalas kematian sanak famili mereka yang disebabkan oleh anak buah Tabu. Tamu tersebut juga mengamati bahwa Tabu seperti menjadi "piaraan istimewa" dari para pejabat dan menduga bahwa tampaknya ia juga menikmati kenyamanan menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, Kolia mengunjungi seorang anggota majelis tingkat propinsi yang menceritakan bahwa ia pernah dipaksa makan kotoran ketika tertawan oleh kelompok Tabu. Tapi orang tersebut mengatakan bahwa ia tidak menaruh dendam terhadap Tabu.

Pada pertengahan tahun 1984, pada usia 46 tahun,

Tabu muncul di depan publik di Jakarta dan ternyata ia bekerja sebagai seorang Satpam di sebuah *real-estate*. Dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo*, Tabu mengatakan bahwa seperti halnya ayahnya, ia adalah bekas 'orang besar' di daerah Yamas dekat perbatasan. Ia mengklaim bahwa sekitar 700 keluarga berada di bawah kekuasaannya dan mereka juga menguasai sejumlah besar tanah. Tabu menyamakan dirinya dengan seorang kepala suku terkenal dari lembah Baliem, Obahorok, yang pernah membuat gempar Indonesia karena terlibat dalam sebuah upacara pertalian keluarga dengan seorang wartawati Amerika bernama Wynn Sargent — mereka tidak menikah seperti diberitakan sebelumnya. Sargent diusir dari Indonesia atas kejadian itu. Setelah itu Obahorok menyatakan dukungannya terhadap pemerintah.

Dalam wawancara itu, Tabu mengatakan bahwa ia mulai bergabung dengan OPM pada tahun 1969, dengan alasan mengkhawatirkan harta benda serta ladangnya. Ia telah dipengaruhi oleh Rumkorem dan Prai, khususnya karena pembicaraan mereka mengenai rencana "Islamisasi" masyarakat oleh Indonesia dan pencurian sumber daya alam mereka. Meskipun ia seorang pendiri OPM, tetapi pengikutnya berjumlah tidak lebih dari 30 orang dan hanya memiliki satu senapan tua, jenis mauser, serta senjata tradisional seperti busur dan anak panah. Sesudah Prai, ia menjadi pimpinan gerakan, tetapi pada tahun 1980 ia sadar bahwa jalan yang ia ambil keliru dan ia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Kapten Zacky Anwar, yang pada waktu itu anggota unit komando baret merah, Kopas-

sandha. Menurut Tabu, selanjutnya ia mendapatkan amnesti dan diperbolehkan tinggal di barak militer. Ia menekankan bahwa ia tidak pernah ditahan, meskipun sebuah dokumen internal ABRI tertanggal Agustus 1980 mencatat bahwa "Brigjen" Tabu telah dibawa untuk "interogasi dan penindakan selanjutnya". Kemudian ia pindah ke Jakarta sekitar satu tahun. Sekembalinya ke Jayapura, ia dihadiahi sebuah rumah, tempat ia dengan istri dan kelima anaknya tinggal.

Ia menyatakan telah ditawari oleh seorang bekas komandan militer di Papua bernama Santosa, kemungkinan ada hal lain lagi yang bisa dibantu oleh pemerintah. Ketika ditanya apakah ia bersedia kembali ke desanya, Tabu mengatakan bahwa ia memilih untuk lebih mengenal Jakarta dalam setahun atau dua tahun, dan pada tahun 1981, ia kembali ke ibu kota.

Mengomentari mengenai ribuan rakyat Papua yang pada awal tahun 1984 melarikan diri ke PNG, Tabu mengatakan bahwa ia yakin mereka berkeinginan untuk kembali ke rumah mereka. Pembangunan telah berjalan baik di Papua. Ia juga mendengar bahwa desanya sekarang telah dijadikan area transmigrasi, tetapi ia tidak mengkhawatirkannya.

Marthin Tabu adalah tokoh pembelot OPM yang paling terkemuka dan pemerintah Indonesia jelas telah mendapat keuntungan politis yang besar darinya.

Pada akhir bulan Agustus 1978, sayap propaganda pemerintahan revolusioner sementara (PRG) pro-Victoria menerbitkan *press release*-nya yang ke 75 sejak berdirinya pemerintahan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Di-

kenal sebagai Layanan Berita Pasifik Selatan (*South Pasific News Service*-SPNS), kelompok tersebut mengatakan bahwa niat Indonesia untuk mengadakan pembicaraan damai hanya pura-pura. Dalam *release* dinyatakan bahwa tindakan ofensif yang terakhir dilakukan Indonesia dan melibatkan 5.000 tentara, telah berusaha untuk memusnahkan penduduk yang tinggal di perbatasan. Merampas tanah mereka untuk dijadikan area transmigrasi. Dinyatakan pula bahwa Indonesia akan melakukan apa saja untuk menghancurkan gerakan perlawanan. Siaran tersebut juga memuat kutipan sebuah pernyataan yang baru saja dikeluarkan di Eropa oleh sebuah kelompok tak dikenal yang menamakan dirinya Komite Solidaritas Internasional untuk Papua Barat, yang mengancam akan menggunakan taktik teroris terhadap utusan Indonesia di luar negeri. Berita ini dinyatakan sebagai sebuah *counter-inteligent* yang mendiskreditkan OPM.

SPNS juga menerbitkan selebaran mengenai pemerintahan de facto Nicolaas Jouwe, dan mengkritiknya karena pernyataan berkaitan dengan terorisme tersebut. Dalam *release* juga ditulis mengenai kebencian PRG terhadap Indonesia karena melibatkan pihak Kristen sebagai usaha untuk meredam masyarakat. Sebagaimana yang pernah terjadi selama masa pemberontakan rakyat Arfak — kemudian terulang kembali pada tahun 1984 — pemerintah telah menerbitkan *leaflet* yang menghimbau penduduk desa agar membebaskan tawanan Indonesia dan mematuhi hukum. Pernyataan pers tersebut dan yang terbit sebelumnya, menunjukkan bahwa PRG selain memang masih menganut Kristen, telah lebih mengarah pada pola pikir yang sosialis.

Sementara itu Indonesia tidak saja telah menjadi negara kolonial tetapi juga mengarah pada "golongan militer fasis" yang cenderung menindas kaum petani dalam masyarakatnya, seperti halnya yang mereka lakukan pada rakyat Papua Barat.

Di luar semua propaganda yang ada, yang pasti tindakan ofensif Indonesia telah menimbulkan banyak kerugian bagi pihak OPM. Hidup di hutan menjadi lebih berat bagi para gerilyawan, terutama yang telah berada di sana selama bertahun-tahun. Karena itu sejumlah pendukung mereka memilih bergabung dengan para pengungsi untuk melarikan diri ke PNG. Di antara mereka adalah Jacob Prai dan deputinya, Otto Ondowame. Meskipun baru berusia 34 tahun, Prai telah berada di hutan selama hampir 10 tahun dan kondisi kesehatannya sangatlah buruk. Ia melintasi perbatasan pada bulan September dengan tujuan mendapatkan perawatan kesehatan, dan untuk membicarakan masalah OPM dengan pemerintahan Somare. Ia tertangkap di dekat Vanimo setelah mencoba membuat kontak dengan kabinet Somare. Prai kemudian menyatakan bahwa ia telah dijebak agar pergi ke PNG.

Prai, Ondowame dan Nicolas Meset — seorang pilot Air Niugini yang ayahnya dulu adalah seorang pejabat senior di Papua — ditahan ketika sedang berada di rumah seorang warga negara Australia bernama Fred Eiserman — yang pada awal tahun itu telah diangkat sebagai "anggota istimewa" OPM dan diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pemka di luar negeri. Mereka meminta Eiserman membantu mencarikan senjata dan juga dalam publikasi di me-

dia masa luar negeri. Mereka dipenjarakan selama beberapa bulan. Sesudah negosiasi yang rumit dilakukan beberapa kali, Prai dan Ondowame berangkat ke Swedia yang telah memberikan suaka kepada mereka. Sementara itu Eiserman dideportasikan ke negaranya, Australia.

Menurut seorang koresponden untuk *The Age* — PNG, Mark Baker, pemerintah PNG pada awalnya merasa sangat gembira atas kepergian Prai, tetapi menjadi berubah saat intelijen PNG menerima laporan mengenai berkumpulnya kembali OPM, dan kepemimpinan mereka yang baru — yang diorganisir lebih berbasiskan kolektivitas — menunjukkan tanda-tanda mereka lebih radikal daripada saat dipimpin Prai. Jaringan mata-mata PNG di perbatasan, yang bekerja lebih efisien ketimbang Indonesia, mengungkapkan bahwa para gerilyawan tampaknya tidak akan tahan untuk menyembunyikan diri dalam kurun waktu lama sebagaimana dilakukan kelompok OPM terdahulu setelah menderita pukulan hebat. Selain itu, mereka sekarang bersedia menerima bantuan dari negara-negara komunis, jika ditawari. Indonesia rupanya juga mengetahui hal ini — informasi mengenai situasi ini mungkin mereka dapat melalui hubungan informal dengan para perwira Australia yang bertugas di intelijen PNG. Tak lama sesudah itu "kebijakan yang ramah" Jenderal Jusuf diam-diam tidak diterapkan lagi, diganti aksi militer dan KOPKAMTIB yang lebih keras dan oportunis.

Sementara itu jauh di dalam hutan — dengan sering kali memindahkan kamp untuk menghindari deteksi — pimpinan OPM yang baru telah merencanakan sebuah strategi

untuk menghadapi tantangan terbaru mereka. Seth Rumkorem dan para pengikutnya — walau bergerak di wilayah perbatasan yang sama — tidak diminta untuk bergabung dengan mereka. Memasuki tahun 1980-an, OPM menjelma menjadi sebuah gerakan yang terpisah-pisah, tapi tidak berarti mati.•

3.
Wajah Baru OPM

KOPKAMTIB Irian Jaya menerbitkan sebuah laporan rahasia tentang situasi keamanan di Papua bulan Agustus 1980. Dokumen ditandatangani Brigjen Santosa, yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Pangdam. Salinan laporan tersebut dikirim kepada pihak-pihak terkait.[1] Isinya gambaran ringkas tentang operasi yang telah direncanakan — diberi kode 01/KAMDA/VIII/1980 —, yang bertujuan untuk mengeliminasi pemberontak OPM di wilayah Jayapura, Merauke, dan Sorong. Dalam pendahuluannya KOPKAMTIB menyatakan bahwa masyarakat Papua Barat masih "benar-benar sangat terbelakang" dan komunikasi lisan dengan mereka masih sangat sulit. Pada level taktis, dinyatakan bahwa masih terdapat kesulitan untuk membedakan antara "kekuatan inti GPL" dan masyarakat yang hanya mendukung mereka. Penduduk Papua mempunyai kecenderungan melindungi aktivitas GPL, khususnya bila sanak famili mereka terlibat. Kondisi ini digunakan GPL sebagai strategi yang

dikenal dengan istilah "tirai massa", yang memungkinkan anggota mereka untuk melakukan penyergapan terhadap patroli-patroli kecil dan pos-pos ABRI, serta mengacau aktivitas pemerintah lainnya. Setelah penyerangan itu, para gerilyawan biasanya menyembunyikan senjata mereka dan menyusup ke dalam masyarakat. Daerah pedesaan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, merupakan tempat persembunyian terbaik. "Terus terang", laporan tersebut menyatakan, "GPL tidak pernah mempertahankan satu basis wilayah bila diserang oleh patroli ABRI. Mereka akan menghindari patroli dengan melarikan diri ke daerah yang aman". Sementara itu, kemampuan OPM dalam mencari perlindungan di PNG tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting.

Pandangan ini bertentangan dengan pernyataan Indonesia, baik kepada publik maupun secara pribadi kepada para petugas PNG dan Australia, bahwa jika perbatasan ditutup, maka OPM akan segera tereliminasi.

Dalam laporan itu dicantumkan daftar kelompok dan pemimpin OPM yang diketahui oleh Indonesia, berikut kekuatan persenjataan dan metode gerakan mereka. Kelompok yang berada di wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

Kelompok Alex Derey:

> "Brigjen" Derey menggantikan kepemimpinan Martin Tabu di jajaran Komando Papenal, wilayahnya sekitar Waris-Arso dan bergerak sampai ke Lereh. Tempat persembunyian di pegunungan Bewani di PNG. Kekuatan inti pasukan mereka sekitar 30 orang dengan dukungan masa sekitar 3000 orang yang tersebar di area sungai Mamberamo dan Tami. Persenjataan: 5 Mouser, 2 Garrand, 2 FN-45, 1 AK, 1 Thomson dan

lainnya. Saudara laki-laki Tabu, Mathias telah keluar dari hutan dan berada dalam penjagaan. Perannya sebagai deputi komandan diambil alih oleh Bas Mekawa. Tokoh penting lain dalam kelompok itu adalah Elkianus Bemey.

Kelompok Seth Rumkorem:

Wilayah mereka adalah di sekitar Wutung — kota perbatasan, dan Jayapura. Sejak terpecah dengan Prai, kelompok ini hanya beranggotakan 15 orang yang dipimpin oleh Rumkorem, Uri Yoweni (menteri pertahanan, tinggal di Belanda) dan Philemon Yarisetouw, pimpinan pasukan TPN. Persenjataan: diperkirakan 5 Mouser, 2 AK , dan 6 senjata lainnya.

Kelompok Tomy Geradus:

Sekitar Skopyo dan Arso, dengan kekuatan inti sekitar 20 orang dan pendukung dari penduduk setempat. Beberapa senjata.

Kelompok Lukas Too:

Sekitar Uburb, 20 orang dan massa pendukung penduduk setempat yang telah mereka hasut. Persenjataan mereka adalah campuran, senjata api dan senjata tadisional.

Laporan itu menyebutkan bahwa kelompok yang berada di wilayah utara perbatasan telah dilatih secara militer dan aktif dalam usaha menarik pendukung serta mengusahakan adanya persatuan di antara mereka sendiri. Mereka sedang "bersembunyi dan melakukan konsolidasi". Dikatakan bahwa setiap kelompok mempunyai "potensi yang cukup signifikan untuk sewaktu-waktu melakukan aktivitas yang menunjukkan eksistensi mereka." Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa KOPKAMTIB kurang mendapat informasi mengenai situasi "GPL" di Merauke dan Sorong.

Merauke:

Dari Sawaerma dan Agats, aktivitas mereka meluas sampai pedalaman dan Fak-Fak, dan sekitar perbatasan bagian Selatan. Kekuatan inti 10 orang, dengan pendukung dari penduduk setempat. Pemimpin: "Silas". Persenjataan: belum diketahui. Aksi: menghasut penduduk setempat; pengacauan keamanan dan penghuni area transmigrasi; memasang penghalang dan jebakan di jalan.

Sorong:

Aktivitas gerakan separatis GPL di sepanjang perbatasan telah meluas dan muncul kembali di daerah tersebut. Aktivitas mereka sangat samar. Area yang menjadi perhatian: pedalaman Ayamaru, pedalaman dari bagian Utara daerah Kepala Burung serta area penambangan dan industri tambang. Kekuatan: belum diketahui, tetapi karena fanatisme kesukuan dan ikatan tradisional, diperkirakan dalam waktu singkat mereka akan memperoleh simpati dari penduduk asli Irian Jaya. Keadaan ini akan diikuti oleh berkembangnya jaringan gerakan mereka. Persenjataan: belum diketahui. Karena Sorong adalah kota industri dan pertambangan, kecenderungan mereka adalah melakukan pencurian bahan peledak dari instalasi vital, tujuannya adalah untuk melakukan sabotase.

Di area yang telah disebutkan di atas, OPM diduga akan mengawali serangan, terutama merusak landasan terbang darurat untuk mencegah kemungkinan masuknya pasukan ke wilayah mereka. Setelah itu mereka akan menyerang pos-pos ABRI dan kemudian mundur ke dalam "tirai massa".

Laporan itu juga menyebutkan bahwa OPM sedang berusaha masuk ke daerah perkotaan dengan tujuan untuk membentuk "jaringan separatis" dalam masyarakat, pega-

wai pemerintah, dan anggota ABRI. Di dalam hutan, terhadap kader GPL diadakan latihan militer. Mereka terdiri dari para pemuda yang melarikan diri dan penduduk desa yang telah terhasut oleh pemikiran Papua merdeka yang disertai dengan janji-janji kosong.

Aktivitas intelijen para pemberontak dikatakan ada di "setiap area, baik kota maupun desa", dan sukar untuk dideteksi karena tidak terorganisir secara formal. Di sekitar daerah basis OPM terdapat pos-pos pengawasan dan pengupingan, sehingga gerilyawan dapat secara mudah mengamati area sekitarnya. Komunikasi antarbasis mereka dan area lainnya dilakukan oleh kurir yang diuntungkan oleh adanya perlindungan dari sekitarnya.

Dengan adanya briefing semacam ini, maka aparat keamanan semakin meningkatkan tindakan ofensif terhadap OPM. Pada tahun 1984, komandan militer untuk Irian, Brigjen Sembiring, membuat pernyataan publik dengan mengumumkan bahwa sejak tahun 1982, 593 anggota OPM (yang dia sebut sebagai "GPL") dan 5.886 simpatisannya, telah menyerahkan diri atau tertangkap. Ia menyatakan kepada *Kompas* (19 Oktober), bahwa "GPL" yang ada hanyalah sisa-sisa kekuatan masa lalu.

Kampanye militer yang dilakukan pada awal tahun 1980-an lebih cenderung menghasilkan kebencian yang lebih mendalam dari penduduk setempat, ketimbang adanya peningkatan situasi hukum dan kekuasaan serta dukungan dari masyarakat. Sekaligus meningkatkan jumlah OPM, ketimbang membasminya.

Ketika berita mengenai situasi di Papua dalam media

massa asing jarang ada, akibat dilarangnya para wartawan untuk mengunjungi Papua, majalah *Asiaweek* pada akhir tahun 1980 justru berhasil memuat laporan mengenai adanya "dentang lonceng peringatan", dari aktivitas para gerilyawan yang 18 bulan sebelumnya mereda, telah bergejolak kembali dengan dendam yang lebih mendalam. Laporan tersebut — edisi yang memuat laporan itu dilarang beredar di Indonesia — juga mengindikasikan adanya enam orang petugas sensus yang telah dibunuh dalam hutan, di daerah hulu sungai Mamberamo. Berita tersebut didasarkan pada informasi yang berhasil diselundupkan keluar Papua. Aksi itu dikatakan sebagai tindakan balasan atas tidak dilepaslepasnya Marthin Tabu yang ditahan di markas besar Jayapura, atau yang dikenal sebagai "Dok. 5"

Bahkan kekuatan militer yang terdiri lebih dari 3.000 orang dengan berbagai dukungan teknis dirasa masih terbatas, karena hambatan kondisi alam dan dukungan penduduk setempat terhadap OPM. Sebagaimana digambarkan oleh Seth Rumkorem:

> Kami memiliki keunggulan melebihi Indonesia, terutama dalam hal transport dan komunikasi. Bahkan untuk mengirim satu peleton pasukan pun akan sangat sulit bagi mereka. Hutan belantara, gunung dan rawa-rawa, menjadikan wilayah Papua Barat sangat sulit untuk dijelajah. Kami semua sudah terbiasa dengan keadaan ini, sedang prajurit Indonesia yang telah dilatih di kondisi alam Jawa yang lebih mudah tidak terbiasa dengan kondisi negeri kami. Jika mereka bermaksud menempuh perjalanan dengan jalan kaki, maka mereka harus memaksa penduduk desa untuk berperan sebagai pemandu dan porter, atau mereka membayar orang yang pekerjaannya seperti itu. Kami akan menembak orang-orang tersebut, membiarkan

tentara Indonesia tersesat sampai mereka kelaparan, dan setelah itu kami bisa dengan mudah menyerang mereka serta mengambil senjatanya. Inilah cara kami untuk menghindari konflik senjata secara terbuka dengan tentara Indonesia.[2]

Pada tahun 1980, Rumkorem menggerakkan kembali sebagian kekuatan Victoria menjauhi wilayah perbatasan menuju ke pedalaman. Menurutnya, ada dua alasannya. Cara ini akan menarik kekuatan keamanan Indonesia untuk menjauhi perbatasan, dan di sisi lain mereka bisa menjalin kontak dengan pendukung OPM di daerah lain di Papua Barat. Tetapi selain itu ada juga faktor penting lainnya — adanya "kebutuhan" untuk menjaga jarak antara Victoria dan kelompok saingannya, Pemka, untuk menghindari kemungkinan terjadinya pertikaian.

Periode tahun 1980-1983 menunjukkan peningkatan persaingan antarkelompok. Meluasnya pertikaian tersebut dihembuskan oleh tokoh-tokoh Papua Barat yang berada di Eropa dan PNG. Koresponden OPM dalam periode ini menyebutkan bahwa Jacob Prai, yang tinggal di Swedia dan merupakan tokoh yang paling *factional-minded* di antara semua pemimpin Papua, pernah menulis surat kepada komandan Pemka yang baru yaitu Elky Bemey, alias 'Ariel Sharon', yang isinya keluhan terhadap usaha Rumkorem untuk mendominasi gerakan perlawanan.[3] Ketika menyadari bahwa blok Rumkorem tidak bisa dianggap enteng begitu saja, Prai menulis sebuah surat rahasia kepada Nicolaas Jouwe, dengan tembusan kepada Bemey dan Fisor Yarisetouw (saudara lelakinya yang bernama Philemon, bergabung dengan Rumkorem), yang berisi:

> Kami mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa Rumkorem adalah seorang pengkhianat bangsa, karena ia telah mengkhianati dan menjual Papua Barat tanpa syarat kepada Indonesia, atau lebih tepat lagi karena niat jahat mereka telah menyebabkan Indonesia datang ke Papua Barat dan menjajahnya, memperkosa dan membunuh 190.000-an orang Papua Barat. Karena cita-cita perjuangannya tidak berhasil, Seth Rumkorem melarikan diri dari Indonesia dan menyatakan diri sebagai pejuang kemerdekaan Papua, dan tindakan tersebut bisa dilihat sebagai usaha untuk mencuci tangan atas kejahatan yang telah ia lakukan di masa lalu.[4]

Prai menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai rencana kelompok Victoria untuk mendirikan kantor informasi di Vanuatu, yang dikepalai oleh Rex Rumakiek, seorang bekas gerilyawan OPM dan telah belajar politik pada universitas PNG. Ia mendesak para penerima surat itu untuk berusaha sekuat tenaga mencegah berdirinya kantor tersebut. Mereka harus menyadari bahwa Papenal yang terdiri dari 25.000 orang anggota pasukan gerilya adalah yang paling dominan dan merupakan perwakilan tunggal dari rakyat. Dan mengatakan tentang Rumkorem:

> Sudah jelas bahwa tak ada seorang pun rakyat Papua Barat yang akan memberi dukungan atau mengenalnya. Kita juga tahu bahwa ia adalah seorang komunis tapi kita tidak bisa menggunakan ini untuk menghancurkannya, karena kita juga butuh suara mereka, khususnya dalam kampanye politik kita di luar negeri.

Meskipun permintaan Prai tersebut tidak sampai kepada penguasa di Vanuatu, atau dalam hal ini kepada pemerintah PNG, tetapi Rex Rumakiek tampaknya benar-benar meng-

hadapi masalah sebelum berangkat ke Port Vila. Dua bulan sesudah dikirimnya surat tersebut, pemerintah PNG meminta Rumakiek untuk menyerahkan surat-surat perjalanan, dan kemudian mencegah keberangkatannya. Mereka bahkan mengancam akan mendeportasikannya atau mengirimkannya ke sebuah kamp pengungsi di daerah terpencil di PNG. Indonesia, yang mengirimkan surat protes kepada PNG, menekankan hal senada, begitu pula halnya dengan Australia — yang menurut laporan UPI menyediakan 30% dari *budget* tahunan PNG yang keseluruhannya $700 juta — yang tidak menginginkan adanya ketegangan dengan Indonesia. Nasib Rumakiek terkatung-katung selama beberapa bulan sebelum diizinkan untuk meninggalkan negara tersebut. Seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, ia menjadi seorang propagandis aktif di pengasingan. Pada akhir tahun 1984, ia bahkan melakukan serangkaian tour pembicaraan di Australia.

Sebuah surat Prai yang lain, kali ini dikirimkan secara langsung kepada pimpinan dewan *de facto* di "daerah perjuangan", menunjukkan serangan yang lebih tajam seputar "masalah pribadi Rumkorem", pada saat mereka berdua masih berdampingan,

> Pada saat masih berkuasa, ia bertindak sewenang-wenang dan melakukan penganiayaan serta menyingkirkan para pejuang kemerdekaan, termasuk di antaranya adalah seluruh keluarga Ondoafi dari Arso, Benediktus Borotian, lalu menembak mati para pemuda Wamena, menelanjangi dan memperkosa gadis-gadis dan para wanita yang sudah menikah di sepanjang daerah perbatasan, ditambah lagi dengan sikap etno-sentris yang ekstrem dan sikap sombong yang berlebihan serta membi-

ngungkan. Terakhir, ia dan pasukannya membuat sebuah kandang kayu, tempat untuk menganiaya Prai, kedua istri dan anak-anaknya. Tetapi berkat keadilan dan kebenaran dari Tuhan yang mahakuasa, Prai dan keluarganya dapat meloloskan diri dari jebakan dan bahaya yang disiapkan Rumkorem dan pasukannya. Ia memisahkan diri dari Rumkorem pada awal tahun 1976 dan selanjutnya membuka babak baru dari perjuangan tersebut, yang bersih dari pengaruh negatif Rumkorem.[5]

Sebagaimana biasa, suratnya diawali dengan kutipan dari Injil, kali ini Amsal 3:5, dan dibumbui dengan kalimat-kalimat religius serta diakhiri dengan salam yang bunyinya, "Kawan seperjuangan yang sedang menderita di negara lain". Surat itu diketik di atas kertas dengan kop bertuliskan moto Papua Barat, *"One People, One Soul"* — ada sedikit ironi yang bertentangan dengan pesan yang disampaikannya — dan menyebut jabatannya: wakil panglima tertinggi/menteri koordinator, Republik Papua Barat. Prai juga menginformasikan kepada rekannya bahwa ia telah merencanakan untuk menyuplai *item* seperti kartu keanggotaan, bendera Bintang Kejora, emblem Mambruk (merpati goura), baret, dsb. Ia mendesak diadakannya sebuah dialog dengan seorang politisi PNG bernama Paul Langro, di Vanimo sehingga suplai item di atas yang sudah disiapkan di PNG dapat disampaikan kepada basis gerilyawan. *Item-item* tersebut mencakup juga kertas kop, mesin tik, kamera dan pakaian. Ia menyatakan bahwa seorang yang tinggal di Port Moresby, Henk Joku, telah pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Nicolaas Jouwe yang mengumpulkan 7.000 gulden Belanda dari para pendukung yang berada di Belanda. Kemudian, katanya, Joku bertemu dengan faksi Biak

(Victoria) yang bertujuan akan melepaskan kepemimpinan Jouwe dan Prai serta memutuskan hubungan dengan Pemka di lapangan. Ia mengingatkan rekannya untuk berhati-hati dengan manuver semacam ini.

Surat-surat Prai lainnya menceritakan pertemuan mereka di luar negeri dengan sejumlah perwakilan dari Front Pembebasan Nasional Aceh, yang memperjuangkan negara Islam di Utara Sumatra, Gerakan RMS dari Maluku Selatan dan Fretilin dari Timor Timur.

Faksionalisme menyita perhatian bukan saja dari kelompok Papua Barat yang berada di luar negeri. Sejumlah komunikasi lapangan OPM selama tahun 1980-1981, yang bocor ke PNG menunjukkan adanya kondisi yang mudah terpecah belah. Contohnya sebuah laporan yang dibuat oleh seorang mayor di Papenal yang ditujukan kepada markas besar mereka. Di dalamnya dibicarakan mengenai pertemuan yang diadakan di sebuah desa, daerah Tanah Merah. Mulai dari kepala desa sampai ke bawah, semua menyatakan pro-Victoria. Seperti dikemukakan oleh gerilyawan tersebut, bahwa wilayah itu berada dalam kekuasaan 'para pengikut dari musuh dalam selimut' dan bahkan sama sekali belum pernah mendengar tentang Pemka.

> Jadi, yang perlu lebih diwaspadai adalah permainan blok kiri, yang sampai saat ini masih berusaha keras untuk menggulingkan pemerintahan *de facto* nasional ... Pemerintah dan instrumennya Tepenal sekarang sedang berusaha untuk:
> 1. Menyelesaikan revolusi nasional rakyat Papua
> 2. Mengeliminasi blok kiri dari tanah Papua
> 3. Memupuk rasa persatuan bangsa.[6]

Tidak seperti surat-surat Jacob Prai dari luar negeri yang

menggunakan bahasa Indonesia secara lugas, pesan tersebut disampaikan dengan kode tertulis, seperti halnya sebagian besar bentuk komunikasi yang dilakukan OPM pada era 1980-an. Beberapa berita dibuat samar hanya untuk nama si penulis dan penerimanya, metode yang umum adalah dengan menggunakan alias, misalnya Elky Bemey yang menjuluki dirinya sendiri sebagai jenderal Israel, Ariel Sharon atau dikombinasikan dengan penggunaan kode yang menggantikan huruf alfabet. Mesin tik sudah umum digunakan, oleh sebab itu Prai berkeinginan untuk menyelundupkan lebih banyak mesin tersebut kepada mereka, selain itu pesan-pesan disampaikan dengan menggunakan kertas dengan kop Papua Barat. Seperti halnya koresponden di kantor-kantor, banyak surat mereka yang menggunakan nomor referensi. Kode yang digunakan seringkali diubah-ubah untuk menggagalkan intelijen Indonesia dan PNG. Meskipun masih berbentuk sederhana kode tersebut telah sukses digunakan, terkecuali bila kunci kode tersebut jatuh ke tangan musuh.

Salah satu pesan yang disampaikan dalam bentuk sandi dari daerah perbatasan yang dibuat pada tahun 1981, dan didapatkan PNG dari seorang kurir, berbunyi sebagai berikut:

> Conititagastitaenavonititaena zozenaimokilotitaenavoni, kilofifconiula wilo gasxivoconixisowilo jestitaconititawilo jestitazozlin Gastitazoz imofifconi Gasfifjezoz rigoxisorisoritaulaimotitawilo GasEnaVoni rigoxisojesulakikiloulaconititawilo rigotitaulaimotitawilo Jesulaconitita zoztitaena piptitaxisozozlin Gastitazozimofifconi Gasfifjeszoz Noniula piptitadis rigoulabiltitazoz Rigotitaimolin rigotitaena Disulai-mo-

tita linbilula, conixisowilotitazoz rigotitaena jesulaconixisorigoxisobilxi so kilotitaxisobil2 titagastita titarigotita gasfifconixisijesxiso rigo xisojestitaenatita, gasulavonititanonititaxiso gasuladidulaimoxisoenazoz titawilo rigoxisojestitaenatita, titagastitabiltitawilo disulaimoulabiliti.

Kodenya :

A menjadi ON, B - IN, C - OF
D - ME, E - WI dst, sampai
X - KY, Y - FI, Z - PZ

Kode ini kemudian hari diganti menjadi:

A menjadi TITA, B - KILO,
C - SENO, D - RIGO
E - ULA, dst. sampai
X - OXI, Y - PIP,
Z - QUZ

Kunci untuk kode kedua, juga tertangkap oleh PNG, yang contohnya setelah diterjemahkan menjadi seperti: TITAGORITITA (ada), JUSULALAENA-YANTITAZOZTITA (senjata), RIGOTITAAENE (dan), TITADISDIS-LINENAXISOJESXISO (amunisi). Huruf-huruf tersebut dapat dibuat secara terpisah-pisah, atau untuk membingungkan pihak luar, ditulis bergandengan. Sebuah contoh surat seperti di atas adalah surat Jacob Prai kepada Marthin Tabu pada tahun 1980 — saat Tabu masih menjabat sebagai presiden OPM — yang meminta Tabu untuk mempersiapkan sebuah serangan terhadap landasan pesawat terbang darurat di pedalaman.

Segera tunjuk seorang anggota khusus yang intelek dan mempunyai perkiraan yang bagus untuk memimpin dua peleton pasukan khusus, sekitar 43 orang, dengan tujuan memper-

siapkan serangan terhadap landasan pesawat terbang darurat. Anda boleh memilih sebuah pos patroli di wilayah Selatan PNG, dekat pos patroli Weam, di area antara Merauke dan Daru. Amati dan teliti apakah ada petugas polisi atau pegawai pemerintah di sana dan apakah mereka pro pada kemerdekaan Papua. Jika tidak ada, maka cobalah untuk mencari sebuah tempat antara Daru dan Merauke, dimana tidak terdapat petugas yang dapat menyulitkan anggota kita.

Untuk operasi di hutan, OPM mengembangkan sebuah sistem sandi yang menggunakan simbol atau tanda tradisional. Misalnya, rakyat Papua dapat diwakili oleh bentuk kapak batu, sedang Indonesia digambarkan dalam bentuk burung elang gereja. Kelabang artinya situasi yang menegangkan, daun kelapa atau sagu yang ditinggalkan di sisi jalan, dapat diartikan sebagai peringatan adanya musuh. Tanda-tanda seperti itu yang biasanya ditinggalkan oleh penduduk desa untuk mengingatkan para gerilyawan tentang keberadaan ABRI, tidak menarik perhatian pihak luar. Manik-manik berwarna juga sangat efektif digunakan sebagai metode.

Selain sangat penting sebagai strategi komunikasi, metode tersebut juga dimaksudkan untuk kepentingan faksional. Kadang-kadang, para gerilyawan sangat berusaha untuk menyamarkan isi pesan yang mereka sampaikan mengenai keluhan tentang "musuh dalam selimut" itu. Kecenderungan ini merupakan sinyal adanya perpecahan faksional yang dalam.

Kejadian dramatik berkaitan dengan perpecahan itu muncul pada bulan Juli 1981, saat anggota kelompok Pemka, yang pada saat itu dikomandoi oleh Elky Bemey menyerang kamp pendukung Victoria di dekat Wutung, di perba-

tasan. Perintah penyerangan tersebut berasal dari Prai di akhir tahun sebelumnya. Ia mendesak agar Rumkorem ditangkap atau bahkan dibunuh, tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Senjata otomatis digunakan. Cerita rinci mengenai kejadian itu tidak muncul selama 7 bulan, sampai kemudian 4 orang anggota Victoria tiba di PNG dan mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari "tahanan perang". Menurut mereka, dalam serangan itu 7 orang telah dikapak atau ditombak sampai tewas, sedang sandera yang dibawa ke markas Pemka dimasukkan ke kandang babi yang tingginya kurang dari satu meter. Pimpinan para anggota yang melarikan diri tersebut, yaitu Francis Mayor, mengatakan bahwa ia telah dipukul sampai jatuh dengan senapan dan ditusuk dengan sebuah tombak bermata besi. Oscar Wayoi mengatakan bahwa telinga kanannya telah dipotong separuh dengan bayonet dan kulit kepalanya diiris di dua tempat hingga berdarah. Kedua orang tersebut masing-masing telah menghabiskan waktu selama sepuluh dan duabelas tahun di hutan untuk berjuang melawan Indonesia, tetapi justru mendapat penderitaan akibat perlakuan buruk dari sesama orang Papua.

Serangan kedua dilakukan pada bulan April 1982, ketika 4 orang pengikut Rumkorem tertangkap. Meskipun pada saat itu ia berada di tempat, tetapi pimpinan Victoria tersebut dapat melarikan diri dengan aman.

Alasan penyerangan itu lebih dimotivasi oleh keinginan membalas dendam untuk luka masa lalu ketimbang alasan yang bersifat ideologis. Anehnya, Indonesia tidak pernah melakukan usaha serius untuk mengeksploitasi perseteruan

tersebut untuk menerapkan politik "memecah belah". Hasilnya, walau kelompok OPM cenderung saling bermusuhan tetapi tetap bersatu dalam melawan musuh mereka bersama. Sebagaimana diketahui dari surat menyurat bawah tanah yang bocor keluar, para pendukung sipil menyesali adanya persaingan antar kelompok, tetapi tetap mendukung mereka dalam kerangka sebagai pembawa obor dalam perjuangan kemerdekaan.

Meskipun OPM dan masa pendukungnya merasa sangat tidak senang kepada pemerintah, bukan berarti mereka selalu menyembunyikan perasaan tersebut terhadap penguasa. Pada bulan Juli 1980, enam wanita Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas kantor gubernur di Jayapura, dan mereka pun dipenjara tanpa diadili. Beberapa minggu sesudahnya, tiga wanita lain — dalam laporan situasi OPM dikatakan sebagai anggota kelompok intelijen bawah tanah perempuan Papua — berbuat hal yang sama dan mengalami nasib yang serupa pula. Tapol mengutip sebuah laporan militer yang mengatakan bahwa aksi itu mendapat sambutan antusias dari mereka yang menyaksikan kejadiannya.[7] Pada tahun 1981, seorang kapten Papenal bernama "Hengky S" mengirim laporan kepada markas besar Pemka mengenai aksi-aksi militer yang baru saja terjadi, termasuk di antaranya adalah pembunuhan terhadap enam anggota ABRI pada tanggal 28 Oktober, di Wamena:

> "Jenazah mereka diangkat dengan menggunakan hercules (jenis pesawat transportasi) dan dikuburkan di taman makam pahlawan di Jayapura". Laporan yang ditulis menggunakan sandi tersebut menyebutkan adanya pengibaran bendera di

UNCEN, Abepura dan di pantai Hamadi. Lagi-lagi mahasiswa terlibat dalam kejadian itu. Sebuah serangan lain berupa pelemparan granat ke dalam kompleks militer yang "untungnya tidak meledak". Para gerilyawan juga menulis bahwa 15 pejuang Papenal telah dibunuh, beberapa saat sebelum ia menulis laporan.[8] Deputi komandan Papenal di wilayah danau Paniai melaporkan bahwa kelompoknya telah menghancurkan sebuah helikopter ABRI dan menangkap dua agen intelijen. Nama mereka diketahui sebagai Letnan Thadius Demanggalu, yang berasal dari Sumatra dan Sersan Mayor Simon Sunardi, dari Solo, Jawa Tengah. Ia mengatakan mereka juga telah berusaha untuk membakar area perkantoran di Enarotali. Sementara itu, markas lokal Papenal dilaporkan berada di sebuah desa bernama Ekamonala, di mana markas tersebut telah berdiri sejak tahun 1978. Di wilayah militer keempat ini, Papenal mempunyai 250 pos-pos kecil — 1/7 dari jumlah keseluruhan yang mereka punya di Papua.

Sebuah catatan milik Indonesia mengenai insiden-insiden berskala kecil terlihat dalam sebuah telegram rahasia yang dikirim pada tanggal 6 Oktober 1981. *Copy* telegram tersebut jatuh ke tangan PNG beberapa minggu kemudian:

Dari : Komandan Unit Tugas Intelijen, pemerintah Indonesia

Kepada : Laksusda Irian Jaya

Sifat : Segera

Kategori : Rahasia

1. Pukul 17.30, tanggal 26-9-1981 sebuah kelompok terdiri sekitar 50 GPL (OPM) menginap di desa Yonsu Besar. Mereka diperkirakan datang dari arah Timur. Sebelum memasuki desa mereka menembak sebanyak enam kali. Pukul 06.00 mereka pergi ... sebelum meninggalkan desa mereka menembak sebanyak enam kali. Dari karakteristik mereka,

tampaknya mereka adalah orang-orang dari Wamena dan Waris.

2. Pukul 09.00, tanggal 5-10-1981 tiga pekerja penggergajian diserang di hutan Dosay ... diperkirakan pelaku kejahatan adalah GPL dari kelompok Alex (Donald) Derey dan Mecky Ovide, dan mereka dipersenjatai dengan 7 senjata api yang terdiri dari 1 AK, 1 pistol dan 5 Mauser. Dalam penyerangan tersebut, mereka mencuri: 1 tape recorder dan 6 kaset, nasi dan peralatan masak serta gergaji. Nasib kedua pekerja penggergajian belum diketahui, sedangkan yang seorang berhasil melarikan diri serta melaporkan kejadian itu ke Koramil Sentani.
3. Telegram ini merupakan laporan. Perkembangan lebih lanjut akan dilaporkan kemudian.

Michael Pramoto, Wakil Komandan
Kolonel Infantri, NRP 20457

OPM sendiri, pada saat itu sedang merencanakan sebuah konsep pemberontakan berskala besar, yang dikenal sebagai "Operasi Pembebasan". Rencana tersebut, yang dokumennya belakangan jatuh ke tangan PNG, tidak pernah direalisasikan. Tampaknya, rencana itu adalah suatu usaha untuk memparalelkan beberapa tujuan pemberontakan OPM yang berhasil digagalkan Indonesia di bulan Februari 1984. Perbedaan mendasar kedua rencana itu adalah Operasi Pembebasan disusun oleh kelompok Pemka, sedang pada tahun 1984 rencana pemberontakan sebagian besar muncul dari kelompok Victoria, atas anjuran Seth Rumkorem dari pengasingan.

Rencana pemberontakan itu dimulai dengan pengumpulan semua pasukan yang ada untuk di-briefing mengenai taktik, termasuk usaha untuk mendorong semangat juang

mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan senjata, perlengkapan medis serta perbekalan makanan. Termasuk dalam target utama adalah sejumlah sekolah, lembaga administrasi dan universitas Cendrawasih, kantor-kantor pemerintah, tangki air minum, jaringan telepon dan transmisi radio. Semuanya direncanakan akan dibakar dan diruntuhkan. Di bandara Sentani, hanggar dan pesawat serta tangki bahan bakar juga akan dihancurkan. Semua jalan utama akan diberi penghalang berupa pohon-pohon dan batu besar. Ketiga jenis gerilya — baik yang dari hutan, yang berada di kota dan para simpatisan — akan berusaha untuk melakukan usaha sabotase dan membuat kepanikan di setiap sudut negeri Papua Barat. Salah satu tujuan utama dari "Operasi Pembebasan" tersebut adalah untuk menguasai pusat bisnis asing, khususnya pusat perminyakan di Sorong, pertambangan tembaga Freeport, dan sebuah perusahaan timah besar bernama Holtekang. Meskipun kampanye tersebut tidak dilancarkan besar-besaran, tetapi penyerangan terhadap sasaran terakhir tersebut direncanakan akan dilakukan dalam waktu satu tahun, dan diharapkan akan menjadi berita utama di Indonesia dan luar negeri.

Hambatan para gerilyawan untuk dapat melakukan aksi semacam itu disadari oleh Jacob Prai pada tahun 1981 ketika ia menulis surat kepada "orang-orang di hutan yang masih menggunakan peralatan sederhana". Ia mengetahui bahwa masalah mereka terletak pada "peluru modern buatan Amerika Serikat" dan mengingatkan pasukan Papenal untuk setia pada Tuhan, yang menentukan nasib mereka. Ia mengutip surat Amsal 16:9 — "Manusia merencanakan

perjalanannya dengan menggunakan akalnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya". Kata-kata itu mengingatkan kepada kalimat yang pernah digunakan Soekarno untuk menjelaskan "kebenaran sejarah" Indonesia terhadap pengambilalihan wilayah tersebut, kemudian ia melanjutkan:

> Pencipta segala makhluk hidup di muka bumi akan memberi jawaban kepada kita apakah maksud Indonesia dan tentaranya terhadap rakyat Papua Barat adalah benar atau tidak, jika tidak benar artinya bahwa suatu hari Indonesia akan mendapatkan hukumannya, dan rakyat Papua Barat akan menerima kasih Tuhan dan mendapat kemenangan serta keseimbangan selamanya.[9]

Di samping dari agama Kristen, Prai dalam mengungkapkan pikirannya juga banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita cargo cults yang dipercayai masyarakat Melanesia.

Pada kesempatan lain, Prai membicarakan mengenai dukungan dari simpatisan mereka yang berada di luar negeri. Organisasi Pembebasan Papua, menurutnya, diibaratkan sebagai "jamur yang sedang tumbuh di musim hujan". Selain kelompoknya sendiri, yang merupakan pemerintahan nasional *de facto*, dan beberapa kasus, ia menyebutkan:

- Majelis Tinggi Perwakilan Rakyat Papua Barat, dipimpin oleh Markus Kaisiepo
- Dewan Pembebasan Nasional Papua Barat (Nicolaas Jouwe, Zachi Sawor, Henk Inggamer)
- Pemerintahan Revolusioner Sementara (Seth Rumkorem di hutan dan Ben Tanggahma di Senegal)
- Organisasi Papua Merdeka (Y.M Ireeuw)

- Komite Urusan Pengungsi (dipimpin oleh Decky Kereway)
- Badan Ketenagakerjaan Papua Barat (Y.Manusaway), penerbit media berbahasa Inggris *West Papuan Observer*
- Badan Informasi Melanesia (S.B Hindom)

Selama tahun 1981, Tuhan tampaknya belum berpihak pada para pemberontak, sementara para anggotanya yang melarikan diri ke luar negeri tidak bisa berbuat banyak. Selanjutnya OPM menggambarkan bahwa tahun 1981 adalah "tahun kemunduran" bagi mereka.

Masalah mulai muncul kembali pada bulan Juni ketika militer memulai sebuah operasi besar-besaran, yang dinamai "Operasi Sapu Bersih", yang bertujuan untuk menyapu bersih gerakan perlawanan. Pada bulan-bulan sebelumnya, Indonesia dibuat marah oleh aksi-aksi kecil OPM. Indonesia juga marah akibat adanya semacam pementasan "pengadilan hak asasi manusia" di Universitas PNG, Port Moresby. Selama acara tersebut, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh terkemuka Papua Nugini, para pengungsi Papua Barat memberikan kesaksian mengenai kekejaman yang mereka alami. Hal lain yang mengganggu adalah wakil PM PNG, Iambakey Okuk, dalam pemilihan umum di negaranya telah mengkampanyekan mengenai keberadaan Indonesia di Papua. Ia terutama mengkritik transmigrasi.

Dalam edisi mengenai Papua Barat, Tapol menyatakan bahwa "operasi sapu bersih" pada awalnya difokuskan pada wilayah perbatasan dengan slogan: "Biarkan tikus-tikus

masuk ke hutan agar ayam-ayam dapat berkembang biak di kandang". Menurut orang-orang Papua yang telah melarikan diri ke PNG, slogan tersebut dapat diartikan bahwa tanah-tanah yang sudah kosong dapat digunakan oleh para transmigran yang jumlahnya semakin meningkat. Tapol juga melaporkan adanya pembunuhan brutal di daerah Arso sampai Waris, dan menyatakan bahwa seluruh anggota keluarga telah dibayonet dan jasad mereka dibiarkan membusuk. Para pemimpin Papua memperkirakan jumlah keseluruhan yang tewas sekitar 1.000, sebagian kecil di antaranya adalah anggota inti pasukan gerilyawan. Selain itu penangkapan besar-besaran juga dilakukan.

Selanjutnya, aksi serupa diperluas sampai daerah pedalaman, khususnya area sekitar danau Paniai, dimana satu tim dari jaringan TV KKRO Belanda pernah memfilmkan ratusan laki-laki dan wanita yang sedang dilatih. Sebagian besar mereka membawa senjata tradisional dan meneriakkan slogan anti-Indonesia. Pada bulan Agustus, area tersebut dibom, diduga dari jenis napalm dan jenis yang memakai bahan kimia. Jumlah penduduk pedalaman yang tewas keseluruhan adalah antara 2.500 sampai 13.000. Kru TV Belanda, yang menerima berita tersebut memperkirakan jumlahnya lebih dari yang diperkirakan. Sementara itu pemerintah PNG cenderung mengatakan di bawah yang diperkirakan, sedang Indonesia tidak berkomentar sama sekali.

Pada bulan Oktober, para gerilyawan menyerang penjara Abepura, dekat universitas, Irian Jaya, dengan tujuan membebaskan para tahanan yang berada di tangan Kopkamtib. Karena tidak berhasil, mereka berencana melaksa-

nakan gerakan yang selama bertahun-tahun telah terabaikan: publikasi media di dalam negeri Indonesia. Jika ditilik kembali, serangan yang dilakukan di Abepura tersebut dapat dilihat sebagai awal dari meningkatnya perhatian media Indonesia yang berada jauh di propinsi lain, dan di satu sisi artinya Indonesia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah tersebut dari perhatian publik. Laporan utama mengenai serangan tersebut, yang dimuat di majalah *Tempo*, bahkan menggunakan istilah OPM. Laporan Tempo yang diberi judul *"Insiden 9 Oktober"*, menyatakan bahwa paling sedikit 100 orang Papua telah merayap menuju penjara dari bukit dekat tempat tersebut, pada pukul 4.30 pagi. Mereka bersenjatakan pistol, senapan Mauser dan senjata tradisional. Pertahanan ABRI telah diperkuat untuk mencegah serbuan OPM ke dalam barak. Satu jam kemudian, para gerilyawan mundur dari tempat tersebut, dan dalam perjalanan pulang mereka membakar sebuah sepeda motor dan merusak sebuah truk. Di puncak bukit mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora, menyanyikan lagu kebangsaan mereka, dan menggelar tari peperangan ala pedalaman Wamena. Mereka sudah membubarkan diri ketika tentara melakukan penembakan dengan mortir.

Cerita serupa juga didapat dari sebuah sumber lain: seorang wisatawan Australia menulis surat kepada seorang temannya di Port Moresby:

> Saya telah menyaksikan tembak-menambak yang terjadi antara para pemberontak dan tentara di Abepura .... Pukul 04.30 pagi, saya terbangun oleh suara tembakan senapan yang berasal dari bukit yang terletak di atas tempat saya menginap.

> Ketika hari sudah agak terang saya melihat sosok-sosok yang sedang berlarian melintas semak-semak, dan seseorang mengibarkan bendera tetapi bukan bendera Indonesia. Suara tembakan senapan yang berasal dari senjata otomatik terulang kembali setelah beberapa saat... dan (saya rasa) 3 atau 4 kali tembakan mortir. Para pemberontak tampaknya telah menembak membabi-buta ke arah pos militer selama sekitar 40 menit sebelum mereka mundur ke hutan. Respon militer tampaknya lambat. Saya rasa tak ada yang terluka. Tampaknya, kejadian seperti itu bukannya tidak terencana.[10]

Sementara dalam laporan Tempo tidak ditulis mengenai serangan OPM yang telah dilancarkan di Genyem, area transmigrasi yang luas — terletak di wilayah Utara — tetapi memuat referensi singkat mengenai serangan terhadap sebuah kamp penggergajian kayu bernama Holtekang, dekat Jayapura. Diceritakan mengenai kerusakan tempat tinggal para pekerja dan peralatan di tempat tersebut merupakan imbas dari bentrokan antara tentara dan OPM yang berakibat 20 orang gerilyawan tertembak mati dan 30 orang tertangkap, sekaligus disitanya senjata dalam jumlah yang sama. Di antara mereka, dilaporkan *Tempo*, terdapat sejumlah mahasiswa dan dosen dari universitas di ibu kota (propinsi). Cerita yang tidak diungkapkan adalah mengenai telah ditangkapnya 58 orang sandera oleh OPM.

Penyerangan OPM tersebut dikomandoi oleh A.B (Donald) Derey, seorang grilyawan yang berpengalaman dan pernah menjadi pimpinan faksi Pemka selama beberapa tahun. Sekarang ia adalah orang kedua setelah Elky Bemey, meskipun dulu ia pernah pula memimpin Papenal dan berhasil menjalin hubungan dekat kelompok Marthin Tabu.

Derey pernah menemani Tabu, ketika yang bersangkutan berbalik memihak Indonesia, bahkan pernah berada dalam satu helikopter milik tentara yang membawanya dari Wari ke Sentani. Penguasa kemudian mengembalikannya ke Waris dan membebaskannya. Derey kembali lagi ke hutan, dan memutuskan untuk tidak akan menyerah.

Serangan balasan ABRI berhasil melepaskan 36 sandera, tetapi 22 pekerja perkayuan sisanya telah digiring ke dalam hutan. Sebagian besar mereka adalah orang Indonesia, beberapa orang Melanesia dan seorang Cina-Malaysia. Tiga di antara mereka yang disandera adalah wanita yang sedang hamil. Itu adalah awal dari masa delapan bulan yang penuh dengan cobaan berat yang mengakibatkan kematian, kelaparan dan penyakit, serta perkawinan antara seorang perempuan yang disandera dengan seorang gerilyawan OPM.

Setelah beberapa minggu — selama itu para penculik dari Papenal melakukan komunikasi dengan markas besar mereka melalui kurir — pemimpin Pemka telah melakukan kontak dengan kantor PT Hanurata yang mengoperasikan Holtekang, di Jayapura. Mereka menuntut uang tebusan sebesar US$ 2 juta dan 100 senjata api yang di-drop melalui udara. Pada akhir bulan November, manager perusahaan tersebut, C.H Ling, membalas bahwa permintaan mereka telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ling menyertakan di dalam suratnya sebuah catatan dalam bahasa Cina, yang ditujukan kepada sandera asing agar ia meminta para gerilyawan untuk menyediakan makanan lebih banyak bila selama ini dirasa kurang. Surat

tersebut, yang ditulis dengan bahasa Indonesia menyatakan bahwa perusahaan tersebut adalah sebuah badan swasta yang tujuannya adalah membantu pembangunan di propinsi. Jauh dari aktivitas politik dan dijalankan oleh orang asing, serta selalu dalam pengawasan ketat pemerintah. Karena itu, katanya, PT Hanurata tidak mungkin bisa memenuhi permintaan OPM. Ia memohon pembebasan para sandera, yang waktu beserta tempatnya dapar diatur melalui seorang perantara. Pada akhir surat ia menulis: "Sekadar informasi bagi kalian, jika kalian tidak melepaskan karyawan kami pada tanggal 30/11/1981, ABRI berencana untuk melakukan sebuah operasi untuk menumpas kalian".

Pada kenyataannya ABRI memang melakukan manuver untuk mempercepat pelepasan para sandera. Target utama dari rencana tersebut, — menurut sebuah sumber intelijen di PNG — yaitu penangkapan terhadap ayah Elky Bemey dan penyiksaan terhadap dirinya kemudian menyebarkan berita keadaannya yang mengenaskan. Anggota keluarga lainnya mungkin juga akan ditahan. Dampaknya terhadap anak laki-lakinya, sang pemimpin Pemka, sangat hebat.

Lahir dan mendapatkan pendidikan di daerah Sentani, Bemey melanjutkan pendidikan di sebuah akademi pertanian di Manokwari. Pada tahun 1965, ia bergabung dengan pemberontak Papua yang diorganisir oleh Perminas Awom. Ia pernah ditangkap Indonesia dan dipenjarakan selama dua tahun. Oleh karena itu ia tahu kondisi para tahanan secara langsung, dan menyadari betul mengenai apa yang akan menimpa ayahnya. Tetapi reaksinya atas kejadian itu

sampai sekarang masih diselimuti misteri. Satu-satunya kepastian mengenainya adalah bahwa "Kolonel" Elky Bemey, sarjana pertanian berusia 36 tahun tersebut kembali menjadi gerilyawan, meninggal pada akhir bulan Desember, dibunuh oleh beberapa orang pengikutnya sendiri karena penyiksaan yang ia lakukan terhadap seorang wanita. Komando pasukan jatuh lagi ke tangan Alex Derey.

Reaksi Derey terhadap ancaman ABRI adalah memerintahkan para sandera untuk dibawa lebih jauh lagi ke dalam hutan yang semakin sulit untuk dideteksi.

Meskipun publikasi mengenai kasus penyanderaan tersebut sangat terbatas, tetapi tetap mengundang keterlibatan pemerintah negara lain. Malaysia mendesak Indonesia untuk mengintensifkan pencarian terhadap salah seorang warga negaranya yang hilang, Mr. Fu. Sebagai reaksi, Jakarta mengirim pasukan lebih banyak lagi ke daerah sasaran, tapi gagal menemukannya. PNG, yang menyatakan kemungkinan dibawanya para sandera ke wilayah Timur perbatasan, meminta keterangan detail mengenai penculikan tersebut. Tetapi pada sebuah pertemuan khusus para petugas penghubung perbatasan, wakil dari Indonesia mengingkari semua kejadian yang telah terjadi. Ia menyatakan bahwa persoalan tersebut adalah urusan dalam negeri Indonesia.

Tetapi Indonesia sendirilah yang akhirnya membuat masalah tersebut mengeksternal, ketika pada tanggal 14 Mei 1982, operasi pencarian tersebut dilakukan dengan melintas batas ke PNG dan lima orang tentara Indonesia memasuki desa Wainda, yang terletak 14 km dari pos patroli Imonda. Atas kejadian itu Departemen Luar Negeri PNG mengeluar-

kan pernyataan pers yang menyatakan:

> Mereka masuk ke desa tersebut dengan dipandu oleh dua orang penduduk sipil yang menggunakan topeng. Penduduk desa ditanya mengenai keberadaan para sandera yang dikatakan telah dibawa oleh anggota OPM .... Para serdadu tersebut hanya sebentar berada di tempat itu dan salah satu di antaranya menembakkan peluru ke udara sebelum meninggalkannya.
>
> Pagi harinya, tanggal 15 Mei, kelompok serdadu yang sama menyerang sebuah kamp OPM yang terletak 2 km Selatan Wainda dan melepaskan seorang Malaysia bernama Fu, salah seorang sandera pada saat serangan OPM di penggergajian kayu Holtekang, dekat Jayapura pada bulan Oktober tahun lalu. Laporan dari daerah itu mengindikasikan bahwa dalam serangan itu, satu orang serdadu Indonesia terluka terkena panah.[11]

Para serdadu Indonesia tersebut lalu mundur ke sebuah kamp dekat sungai Pau, sekitar 1 km masuk wilayah Papua Barat.

Meskipun berhasil membebaskan warga negara Malaysia, namun Indonesia harus membayar mahal. PNG menyatakan rasa sangat tidak senangnya melalui kedutaan besar Indonesia mengenai aksi pelintasan batas tersebut, termasuk pula sebelumnya: dua kali serangan milliter dari helikopter. Lebih lanjut, kelompok OPM menjadi enggan untuk bersikap kooperatif, ditambah lagi Indonesia tidak mengetahui posisi mereka. Mereka sebenarnya masih berada di wilayah perbatasan Papua Barat, tetapi karena antipati masyarakat setempat, Indonesia tidak bisa mendapatkan informasi. Pada akhirnya, drama penculikan tersebut diakhiri oleh seorang warga negara Papua Nugini.

Usaha penyelamatan para sandera dimulai pada bulan Februari 1982, ketika surat-surat OPM yang berhasil direbut PNG menyebutkan suatu wilayah tempat para sandera berada. Sebuah pertemuan yang direncanakan antara petugas dan Alex Derey membuktikan kebenaran mengenai hal itu, tetapi tidak berhasil membebaskan para sandera. Beberapa bulan kemudian, ketika istri, saudara perempuan dan ipar Derey membutuhkan perawatan medis, Port Moresby memerintahkan mereka untuk masuk wilayah PNG dan berobat ke R.S Vanimo. Diharapkan sebagai balasannya, OPM akan memperlakukan para sandera secara manusiawi. Kemudian, seorang misionaris Australia diminta oleh para pejabat untuk melakukan negosiasi dengan penghubung para gerilyawan di sebuah tempat dekat misi Katholik, Kamberatoro, yang jaraknya tiga jam berjalan kaki dari wilayah perbatasan. Pastor tersebut melaksanakan permintaan itu dan pada bulan Juni menginformasikan PNG bahwa para gerilyawan siap menyerahkan para sandera.

PNG meminta Indonesia untuk menangguhkan operasi militer di wilayah itu hingga seorang petugas mereka dapat masuk ke hutan dengan aman untuk bertemu dengan OPM. Tetapi, seperti kemudian dikatakan oleh Paulias Matane — sekretaris departemen luar negeri PNG, operasi ABRI justru meningkat, dan akibatnya petugas dari PNG itu hampir tidak bisa menghindar dari patroli. Petugas tersebut bernama Laurence Sapien, berumur 32 tahun dan berasal dari West Sepik, adalah kepala kantor cabang urusan luar negeri di Vanimo. Karena letaknya yang jauh dari kantor pusat pemerintah di Waigani, ia telah lama menyadari bahwa peker-

jaannya bukan merupakan pekerjaan yang "dihargai". Tetapi ia melakukannya dengan dedikasi dan antusiasme, walaupun ia juga sering mengeluh tentang "orang-orang penting" dalam birokrasi. Perjalanannya ke Indonesia merupakan tugas yang paling berbahaya sepanjang kariernya. Selama mengunjungi Papua Barat untuk melakukan "pertemuan perbatasan", ia mempelajari sikap orang Indonesia terhadap orang-orang Melanesia dan oleh karenanya menyadari mengapa tetangganya tidak pernah mau bersikap kooperatif dalam membuat kesepakatan dengan PNG.

Tetapi dengan rasa optimis, Sapien menceritakan, ia kembali ke Kamberatoro. Setelah menunggu beberapa hari, sebuah pesan datang dari OPM.

> Saya berjalan ke sebuah desa di perbatasan dan di sana menunggu lagi. Seorang anggota OPM datang dan mengatakan bahwa para sandera sama sekali tidak bisa dibebaskan karena para pemimpin belum memerintahkannya. Pada saat itu saya sudah merasa sedikit jemu, sehingga saya memberi ultimatum padanya: bawa saya ke tempat mereka berada atau saya akan mencarinya sendiri. Ketika ia mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin menemukan kamp mereka, saya membalas bahwa saya akan menemukannya bagaimanapun caranya. Ia lalu pergi, kemudian kembali lagi serta setuju untuk membawa saya.
>
> Kami berjalan selama tiga jam sampai pada suatu tempat. Tidak diragukan bahwa kami benar-benar berada di wilayah Indonesia. Bisa anda bayangkan, betapa saya merasa sangat senang ketika melihat para sandera. Ada sekitar 15 orang gerilyawan bersama mereka, yang sebagian besar membawa busur dan panah serta tombak. Tetapi saya harus mengadakan sedikit pembicaraan atau sedikit perdebatan dengan mereka. Saya menggunakan bahasa Pidgin, sebagian

di antara mereka memahaminya. Saya merasa frustasi dengan sikap keras kepala mereka. Mereka memperlakukan saya dengan berbelit-belit, yang awalnya setuju terhadap pembebasan tersebut tapi kemudian mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan izin dari "atasan". Tetapi akhirnya mereka setuju dan kami dilepaskan, kembali ke perbatasan. Sebagian besar sandera harus diusung karena lemah atau sakit. Ketika sampai di perbatasan para anggota OPM pergi meninggalkan kami dan kembali ke hutan, sedang penduduk setempat membantu kami membawa para sandera keluar tempat itu.[12]

Para sandera diterbangkan ke Vanimo dan dirawat di rumah sakit. Beberapa dari mereka menderita malaria, disentri dan kolera. Di luar itu semua, mereka justru menjadi terkenal di ibu kota propinsi yang tenang tersebut, dengan banyaknya permintaan berfoto di halaman rumah sakit. Mereka sangat berterima kasih kepada PNG dan bercerita panjang lebar mengenai penderitaan mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu selama delapan bulan dengan terus berpindah-pindah, dan walaupun tidak diancam oleh para penculik mereka, tetapi mereka mengetahui seluruh resiko yang mungkin terjadi. Sementara itu lima orang sandera meninggal, dan seperti dikatakan oleh juru bicara mereka yaitu Puyuang Hadi, seorang di antaranya menikah dengan gerilyawan.

Cobaan bagi mereka belum berakhir karena kedutaan besar Indonesia menolak untuk membayar biaya pemulangan mereka ke Jayapura, tampaknya hal ini disebabkan karena Indonesia merasa kehilangan muka atas kejadian tersebut. Akhirnya pihak perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $10.000.

PNG mempunyai pandangan suram mengenai kasus penculikan Holtekang dan mengeluarkan sebuah pernyataan keras yang mengatakan bahwa seharusnya semua kejadian tersebut dapat dihindari bila para pejabat Indonesia di Jayapura menceritakan hal yang sebenarnya mengenai serangan tersebut kepada pemerintah pusat mereka, dan begitu pula kepada pemerintah PNG. Tindakan ini sesuai dengan isi perjanjian mengenai perbatasan tahun 1979. Untuk meyakinkan bahwa cerita ringkas mengenai tindakan penyelamatan itu diterbitkan sesuai cerita sebenarnya, pemerintah PNG mengirim catatan kejadian tersebut kepada media masa di PNG dan Australia, bahkan dengan menyebutkan mengenai patroli Indonesia yang harus dihindari oleh duta mereka.

Sementara itu Indonesia mengeluarkan versi yang berbeda, dengan mengatakan kepada pers dan kedutaan-kedutaan asing di Jakarta bahwa para sandera telah dibawa menyeberang ke PNG pada masa penyanderaan mereka, dan akibatnya mereka tidak berhasil diselamatkan oleh pasukan ABRI. Tetapi ketika mereka telah dibawa kembali ke Papua, militer langsung bertindak dan melepaskan mereka. Versi ini diterima oleh paling tidak seorang pengamat asing, yaitu wakil dubes Australia, John Holloway, yang beberapa bulan setelah operasi penyelamatan itu menyatakan bahwa Indonesia dalam hal ini benar, dan lebih lanjut mengatakan bahwa PNG telah secara diam-diam memberikan bantuan kepada OPM melalui kejadian ini.[13]

Baik OPM maupun Indonesia sama-sama menderita kerugian atas peristiwa penculikan di Holtekang. Tetapi di

Papua, OPM dipandang sebagai pemenang. Mereka telah berhasil menghindari kekuatan ABRI dan dapat melakukannya dalam waktu yang sangat lama. Walau mengakibatkan kematian dan penderitaan sekelompok orang Indonesia, tetapi masyarakat Papua tidak mempedulikannya khususnya bagi mereka yang pernah tertangkap dalam 'operasi sapu bersih'. Sementara itu Seth Rumkorem, yang masih berada di hutan mengatakan bahwa pasukan ABRI telah menembak kepala mereka yang dituduh sebagai simpatisan OPM dan kemudian menunjukkannya kepada orang-orang yang ditahan di penjara milik tentara, angkatan laut dan polisi. Menurut seorang pengacara Amerika yang telah mengunjungi beberapa desa di perbatasan Papua Barat, perasaan semangat perlawanan militan terhadap Indonesia telah menyebar luas di antara masyarakat. Ia mengatakan bahwa bukannya rasa putus asa yang ia temukan, tetapi justru kemarahan dan keinginan akan terwujudnya kemerdekaan Melanesia di masa mendatang. Sejumlah masyarakat, kebanyakan di antaranya kaum elit yang berpendidikan mengatakan bahwa mereka hidup 'mendua' dan akan terus melakukannya.[14]

Setelah pembebasan para sandera, kehidupan kembali berjalan "normal" bagi ukuran daerah luar kota di Papua Barat: setiap aksi perlawanan akan ditanggapi dengan tindakan balasan militer secara tidak proporsional. Perangkat keamanan tetap aktif sebagaimana biasa. Sementara itu, aksi penahanan para tertuduh dari wilayah perbatasan difasilitasi dengan adanya penambahan sebuah penjara baru di ibukota pedalaman, Wamena. Sejumlah tahanan dan

mereka yang diduga sebagai pemberontak dipindahkan ke tempat itu, untuk sedikit mengosongkan penjara pusat di Jayapura.

Pada bulan Mei 1982, intelijen PNG menerima informasi bahwa pemimpin OPM — Victoria, Seth Rumkorem berencana mencari perlindungan politik. Kepergian Rumkorem tersebut diperkirakan tidak sekedar untuk memenuhi saran rekan-rekannya agar dapat menginternasionalkan perjuangan mereka, tetapi juga dengan harapan dapat memperoleh senjata. Ternyata PNG membuat kesalahan, melalui sekretaris Departemen Perdana Menteri, Fred Reiher, yang membuat pernyataan bahwa mereka 'tahu pasti kamp gerilyawan yang berada di wilayah perbatasan negara tetangga mereka'. Sebenarnya Rumkorem sendiri berada di PNG selama beberapa minggu. Tepatnya di daerah dekat East Sepik, ibukota Sewak, tempat PM yang baru Michael Somare tinggal. Rumkorem dan kesembilan pengikutnya memulai perjalanan melalui laut pada tanggal 30 Agustus, menggunakan sampan berukuran 12 meter dengan dua motor berkekuatan 40 hp. Sebenarnya usaha itu akan menjadi sebuah perjalanan yang fenomenal bila mereka dapat mencapai tempat tujuan, yaitu Vanuatu, Republik dari kelompok masyarakat Melanesia yang telah memberi izin tinggal kepada Rex Rumakiek — Ia mendirikan kantor OPM di sana. Sayangnya kapal tersebut ditangkap, secara tidak resmi, oleh polisi di luar kota Rabaul, PNG dan para penumpangnya ditahan. Setahun berada di PNG mereka dideportasikan ke tempat yang jauh, yaitu ke Yunani, meskipun sebenarnya Vanuatu telah mengindikasikan untuk menampung Rum-

korem jika yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatannya sebagai "presiden pemerintahan revolusioner sementara" dan bersedia bekerja sama dengan para pendukung OPM yang berbasis non-faksional. Rumkorem menolak tawaran tersebut dan kehilangan kesempatan untuk mendapat ijin tinggal di wilayah Pasifik. Dengan mengikuti rute yang sama dengan Prai sebelumnya, Rumkorem dikirim ke Eropa. UNHCR berpendapat bahwa jarak yang jauh antara kedua rival tersebut akan menghindarkan keduanya dari pertikaian. Secara verbal, sebenarnya keduanya tetap bermusuhan.

Mereka yang mengikuti Rumkorem di pengasingan, termasuk Fred Athaboe, yang lebih banyak menghabiskan waktu di penjara ketimbang dalam pekerjaannya sebagai pengacara, dan seorang guru bernama Luis Nussy. Dalam surat pengaduannya ke PBB ia membuat kesaksian atas peristiwa yang terjadi di sekolah tempat ia mengajar di mana ABRI tiba-tiba datang dan memukuli anak-anak tanpa alasan.

Runkorem mengatakan bahwa di belakangnya masih ada lagi tiga pemimpin, yaitu: Uri Yoweni, yang disebutnya sebagai menteri pertahanan, Philemon Yarisetouw, Komandan TPN, dan Simon Imbiri. Ia mengklaim bahwa jumlah gerilyawan mereka ada 300 orang.

Jelasnya, anggota Victoria berasal dari berbagai daerah di Irian. Yarisetouw misalnya, berasal dari Jayapura, sebuah wilayah yang semula dipandang lebih bersekutu dengan Pemka. Kenyataannya, saudara laki-laki Yarisetouw, pada saat itu merupakan pimpinan Pemka dan bersekutu dengan

senat Papua Barat. Percampuran tersebut juga berlaku di kepemimpinan Pemka dan pasukan Papenalnya. Menteri pertahanan dan komandan Pemka, Donald Derey, yang gemar menandatangani pernyataan pers yang ia buat dengan penutup dalam bahasa Inggris, "Yours faithfully", berasal dari wilayah pedalaman.

Segera sesudah pelaksanaan Pepera pada tahun 1969, Derey, dan beberapa rekannya memutuskan untuk meninggalkan Papua Barat dan meminta suaka di Australia, negara yang ia percaya akan menaruh simpati padanya. Mereka meninggalkan Indonesia dengan berjalan kaki ke PNG, dan dari pulau Daru yang terletak di pantai Selatan, mereka melakukan perjalanan lewat laut menuju benua tetangga tersebut. Sial bagi mereka, karena penerimaan Darwin terhadap mereka sama dengan perlakuan yang pernah diterima orang-orang Indonesia yang pernah melarikan diri dari Belanda ke wilayah itu pada awal tahun 1930-an. Menurut Derey, yang diwawancara oleh seorang pembuat film asal Australia, Bob Burns, pada bulan Januari 1985, mereka ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dikirim kembali ke Indonesia.

Sementara itu, presiden yang baru, yaitu "Jenderal" James Nyaro berasal dari daerah pantai. Seperti halnya pendahulunya, Elky Bemey, Nyaro adalah seorang sarjana pertanian, yang pernah menempuh pendidikan di Belanda. Seperti umumnya para pemimpin OPM, ia berasal dari kalangan elit berpendidikan. Ia sempat menikah dengan seorang wanita Jerman, yang pernah sama-sama dipenjara dengannya, beberapa tahun sebelumnya. Nyaro pernah bekerja

sebagai pegawai negeri Indonesia sebelum bergabung ke hutan pada pertengahan tahun 1982. Saat itu ia berusia 40 tahun.

Dari pengasingan, Seth Rumkorem menguraikan situasi yang terjadi di negeri asalnya, menurutnya di distrik Jayapura — yang disebut sebagai propinsi Mamta oleh OPM — 95 persen area tersebut berada dibawah kekuasaan OPM. Untuk daerah sekitar ibukota itu sendiri, 60 persen dikuasai oleh OPM. Sementara itu di Biak situasinya hampir sama, sedangkan di wilayah Manokwari hanya ada dua kota, yaitu pusat kota dan Ransiki yang berada dibawah kekuasaan Indonesia. Sebagian besar wilayah di Sorong merupakan "daerah bebas", sedang Wamena dan Merauke sebagian besar juga dikuasai oleh OPM. Ia menyatakan bahwa para gerilyawan pengikutnya sudah mulai mempraktekan strategi baru yang disebut sebagai taktik ofensif-defensif, yang tujuannya adalah untuk lebih bisa menyerang Indonesia ketimbang sebelumnya.

Di wilayah yang sudah dibebaskan, menurutnya, pelaku gerakan perlawanan telah mengimplementasikan sebuah "program memajukan desa", yang dipandang sebagai usaha meletakkan fondasi bagi kebijakan yang akan diterapkan setelah masa kemerdekaan. Bagian program tersebut di antaranya adalah latihan baca-tulis, pelatihan pertanian, dan pengadaan pendidikan yang bersifat kooperatif dan politis.

> Kami sedang menyiapkan hal-hal yang diperlukan rakyat Papua agar nantinya memiliki usaha ekonomi mandiri. Kami tidak akan melaksanakan 100 persen perdagangan bebas atau

100 persen sosialisme, sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara dunia ketiga, tetapi kami memilih sistem yang merupakan gabungan antara keduanya. Contohnya adalah usaha penggergajian kayu. Kami punya banyak kayu. Pemerintah hanya berperan dalam membuat kesepakatan dengan negara-negara yang berminat mengeksploitasi kayu Papua Barat, dan setelah kesepakatan tersebut tercapai, penduduk lokal dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan asing tersebut.

Revolusi kami harus, sebisa mungkin, mempertahankan identitas Melanesia, dan budaya yang beraneka ragam akan dijadikan dasar bagi lembaga sosial, politik dan ekonomi di masa mendatang. Kolektivitas masyarakat kami akan menekankan pada usaha kerjasama antar penduduk setempat, dan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kami berharap agar bisa menghindarkan terjadinya konflik kelas masyarakat yang selama ini menjadi masalah di dunia. Banyak negara mencari kemerdekaannya, tetapi modernisasi telah melenyapkan identitas mereka .... Ini merupakan issue utama yang harus kami pertimbangkan dengan saksama....., yang menjadi masalah adalah seberapa banyak dan seberapa cepat kami dapat memodernkan masyarakat kami.[15]

Rumkorem mencela strategi pembangunan yang diterapkan Indonesia di Papua Barat, khususnya program transmigrasi. Ia mengatakan bahwa rakyat Papua akan menjadi orang asing di tanah mereka sendiri, dan menjadi orang-orang miskin di tengah-tengah negeri yang berlimpah-ruah. Ia juga mengatakan bahwa gerakan pembebasan bertujuan untuk mendukung dipertahankannya cara hidup tradisional yang dibarengi oleh pemikiran-pemikiran baru. Sementara itu kader-kadernya justru berusaha mengecilkan arti pola pikir lama, misalnya cara memuja tradisional.[16] Menurut sang pemimpin Victoria, OPM telah mendapat dukungan

secara luas, dengan semakin meningkatnya jumlah pemuda yang bergabung dengan mereka. Pemuda Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jawa juga memberikan bantuan.

Mengenai kekuatan OPM, ia menyatakan bahwa markas besar Victoria mempunyai 500 orang gerilyawan, ditambah dengan anggota-anggota yang tersebar di berbagai tempat dan siap membantu jika mereka merencanakan penyerangan. Ia memperkirakan bahwa kekuatan Pemka sekitar 800 orang di wilayah Utara ditambah jumlah yang hampir sama di wilayah Selatan. Di sekitar Freeport dan Enarotali, terdapat sekitar 2.000 pejuang. Jadi secara keseluruhan, kekuatan Papua Barat berkisar antara 30.000 dan 50.000 orang. Karena keadaaan itu ditambah kondisi alam yang tidak menguntungkan, menyebabkan pasukan Indonesia terpaku mempertahankan daerah perkotaan. Sementara itu problem utama OPM adalah kurangnya persenjataan, meskipun ia merasa bahwa strategi ofensif dan defensif mampu menghasilkan lebih banyak suplai senjata daripada sebelumnya.

Seorang mantan anggota ABRI menyatakan bahwa ia telah mempelajari taktik anti-gerilya Indonesia, yang dikenal sebagai perang wilayah, yang pernah digunakan pada konflik Malaya dalam keadaan darurat dan perang Indochina. Strategi OPM adalah menjaga agar pemerintah tetap terisolasi dari rakyat Papua. Salah satu cara untuk meraih tujuan tersebut adalah dengan membentuk unit khusus TPN yang bertugas meng-*counter* propaganda yang dilancarkan Indonesia terhadap masyarakat. Taktik "pagar betis" yang

diterapkan ABRI, termasuk di dalamnya pembersihan terhadap para gerilyawan yang bersembunyi di antara penduduk sipil, tidak berhasil diterapkan di Papua sebagaimana di Timor-Timur karena terhalang oleh kondisi medan. Rumkorem bersumpah bahwa tujuan utama OPM adalah "perang untuk pembebasan bangsa".

Pada saat yang bersamaan, di hutan, pimpinan kelompok Pemka mengutarakan pandangannya mengenai perjuangan. James Nyaro mengklaim bahwa ia memimpin sampai 35.000 gerilyawan di seluruh negeri itu dan mereka semua telah menyatakan akan terus bertempur sampai kemerdekaan diraih. Persediaan makanan dan pakaian tidak menjadi masalah bagi mereka, tetapi mereka kekurangan persenjataan dan obat-obatan. Sebagian besar senjata yang mereka bawa adalah hasil rampasan dari orang Indonesia yang mereka serang di hutan. "Saudara Melanesia kami telah mengorbankan nyawa mereka demi senjata yang kami punya," katanya sedih.

Banyak pengikut Nyaro yang terserang penyakit, termasuk malaria *cerebral* serta diare, dan mereka tidak bisa lagi pergi ke Vanimo untuk mendapatkan perawatan karena departemen luar negeri PNG mencegah hal itu terjadi. Ketegangan tampaknya selalu menyertainya dalam perjalanan menuju kursi "presiden" Papua Barat. "Ia tampak lebih tua dari usianya yang 42 tahun," tulis seorang wartawan dari kepulauan Solomon, Alfred Sasako, di *Niugini Nius*. "Bercak-bercak abu-abu telah memenuhi jenggotnya. Matanya tampak lelah. Ada sebuah guratan di pipi sebelah kirinya, yang mungkin bekas luka yang sudah lama". Walau

begitu, ia memiliki air muka seorang lelaki yang merasa dirinya adalah sumber terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Nyaro digambarkan terkadang memakai *T-shirt*, atau di lain kesempatan mengenakan pakaian kebesarannya yang berwarna hijau, tanpa mengenakan tanda pangkat.

Seperti Rumkorem, Nyaro berharap bahwa OPM dapat mengangkat kasus mereka di pentas dunia. Ia menyebut PBB dan Forum Pasifik Selatan sebagai tempat yang cocok untuk menyelenggarakan pengadilan tersebut, dan berharap PNG akan mengizinkan para pemimpin OPM melintas ke negara tersebut. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, Pemka telah mengajukan kepada PNG untuk memberi izin pendirian sebuah kantor perwakilan kecil-kecilan. Yang kedua kalinya, delegasi Papenal yang terdiri dari 30 orang gerilyawan memasuki PNG dan sengaja berjalan kaki ke Wewak, dengan harapan dapat menemui PM Somare di kediamannya. Kedua belah pihak gagal bertemu.

Nyaro juga mengutuk program transmigrasi dan mengatakan bahwa banyak di antara transmigran yang mantan anggota militer. Tujuan yang akan dicapai melalui program tersebut di Papua Barat, menurutnya adalah untuk tujuan strategis. "Jenderal" Nyaro, sang pemimpin senior, mengutarakan pandangannya mengenai sebuah negara merdeka di masa depan:

> Negara kami adalah sebuah negara Kristen dan kami tidak ingin mengubahnya menjadi komunis. Negara ini akan tetap mempertahankan keberadaan tujuh distrik, yang masing-masing berada di bawah pejabat komando milliter. Pemerintahan militer akan diterapkan selama dua tahun sesudah Indonesia menjamin kemerdekaan kami, sehingga kami dapat memas-

tikan adanya situasi yang benar-benar aman dan efektif yang bebas dari segala bentuk operasi yang bersifat terselubung dari pihak Indonesia. Setelah melewati masa 24 bulan, pemilihan umum akan diselenggarakan untuk mendirikan suatu pemerintahan yang dipilih secara demokratik. Keputusan untuk menentukan jumlah propinsi, dan penentuan apakah presiden atau gubernur jenderal sebagai pemimpin negara diserahkan kepada parlemen nasional.

Semua itu akan diabadikan dalam konstitusi kami. Perjuangan yang masih terus berlanjut menunjukkan betapa kami ingin segera merdeka dari Indonesia.[17]

Nyaro mengutarakan bahwa pertikaian internal antara dua faksi besar OPM telah menimbulkan image yang buruk terhadap mereka di luar negeri, tetapi ia yakin bahwa itu semua akan segera berakhir. "Saya yakinkan kepada anda bahwa kami telah mencapai kesatuan nasional dan tujuan bersama kami sekarang ini adalah kesatuan yang akan mendorong ke arah tercapainya kemerdekaan," katanya.

Sepanjang tahun 1983, konflik dengan Indonesia masih terus berlanjut. Seperti halnya peristiwa penculikan di Holtekang, aksi OPM tidak seluruhnya mendapat publikasi dari dunia luar, walaupun sangat berdampak di dalam negeri. Salah satu contohnya adalah penangkapan terhadap sebuah tim yang terdiri dari 4 orang geolog, dan seorang warga negara Australia di lembah sungai Mamberamo. Tim Indonesia serta anggota pasukan keamanan tim tersebut dibunuh oleh para penyerangnya yang berjumlah sekitar 100 orang dan membawa senjata tradisional. Satu-satunya orang yang tidak terluka adalah Chris Pilgram, warga negara Australia. Para peneliti tersebut dilepas pada hari itu

juga.

Pada bulan Maret di Paniai, sebuah serangan yang dilakukan oleh Papenal mengakibatkan tewasnya dua orang pekerja pendatang dari Sulawesi dan empat penduduk desa setempat dari suku Ekari. Pada bulan September, di Inanwatan — daerah kepala burung, seorang pekerja Indonesia yang bekerja di Continental Co., milik Amerika Serikat, tewas dipanah oleh penduduk yang mempertahankan lahan sagu mereka. Pohon-pohon tersebut telah dirusak oleh para pekerja di perusahaan itu dengan tujuan mencari sumber minyak, dan kompensasi yang ditawarkan telah ditolak penduduk. Seorang pekerja asing juga terluka.

Di Kemtuik yang termasuk wilayah Gresi, seorang kepala suku bernama Derek Mebri dibunuh oleh pasukan Kopassanda, pasukan yang telah dinon-aktifkan dari tugas di Timor Timur dan dipindah ke Irian Jaya dengan harapan agar mereka dapat menumpas OPM yang ulet. Pembunuhan Mebri adalah sebuah kesalahan bila dilihat dari dua sisi. Pertama-tama, terlihat melalui sebuah laporan yang dikirim ke Kodam, bahwa kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Yang kedua, si korban mempunyai seorang putra bernama Alex yang sedang belajar di UNCEN, dan ia berteman dengan seorang antropolog Melanesia bernama Arnold Ap yang merupakan tokoh budaya terkenal di Papua Barat. Ap adalah seorang kurator di museum etnologi UNCEN, dan memimpin sebuah group pertunjukan yang bernama Mambesak (burung cendrawasih, dalam bahasa Biak) dan dipandang sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam tradisi masyarakat Papua Barat. Indonesia juga me-

nyadari posisi penting Ap tersebut dan berulang kali gagal memenjarakannya. Rombongan Mambesak sering diminta berpentas di depan tamu-tamu penting dari Jakarta yang sedang melakukan kunjungan. Dampak atas kematian ayah teman Ap terhadap diri Ap sendiri sangat bertentangan dengan usaha pemerintah. Kejadian tersebut justru mendorongnya untuk lebih sering berada di kamp OPM, sebuah tindakan yang dalam waktu kurang dari satu tahun telah menyebabkan kematiannya — juga dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan. Kejadian tersebut sekaligus justru membuat seluruh masyarakat Papua, sebagaimana halnya para pengamat luar negeri, semakin menentang pendekatan yang dipakai Indonesia di Papua Barat.

Pada akhir tahun 1983, peristiwa yang sudah biasa terjadi, yaitu aksi-aksi perlawanan berskala kecil yang ditindaklanjuti dengan serangan balasan besar-besaran, kembali terulang. Situasi tersebut muncul lebih dikarenakan oleh adanya kebijakan Indonesia untuk mengambil tindakan "preventif", yang difokuskan pada aksi penangkapan dan memperpanjang masa penahanan orang-orang yang dituduh tidak loyal. Seperti yang sudah sering terjadi selama ini, bila ada kejadian buruk yang menimpa elit perkotaan, maka akan menarik perhatian kalangan yang lebih luas. Sementara itu mereka yang berada di pedesaan, yang jauh dari pengamatan pihak gereja atau informan yang bisa menyampaikan berita ke lembaga bantuan hukum di Jakarta, diperlakukan dengan kasar dan bahkan secara brutal oleh tentara yang berhasil mendapatkan kontak OPM. Bahkan, para tokoh perlawanan terkemuka, termasuk Arnold Ap,

tetap saja mendapat perlakuan buruk selama masa penangkapan dan interogasi. Dalam hal ini, pelaku utama pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah pasukan baret merah, Kopassanda yang mempunyai fungsi sipil selain fungsinya sebagai militer dan KOPKAMTIB. Tindakan tegas yang diterapkan di Jayapura dan wilayah perbatasan, kemudian diperluas ke seluruh penjuru propinsi. Awalnya, tindakan tersebut membuat takut OPM, khususnya karena Kopassanda adalah pasukan yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, seperti yang telah terjadi di pulau Jawa. Selanjutnya, rasa takut tersebut berubah menjadi kemarahan, dan dalam kurun waktu beberapa bulan, justru menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan balasan secara keras. Rencana untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran telah disusun oleh Rumkorem, sebelum keberangkatannya ke pengasingan. Selanjutnya, dari Yunani disampaikan kepada para pendukung yang berada di berbagai tempat, khususnya yang berada di sepanjang pantai Utara. Pemimpin yang cerdik tersebut merencanakan sabotase terhadap lapangan terbang, fasilitas-fasilitas komunikasi dan lokasi strategis lainnya. Termasuk dalam jaringan kontaknya adalah pemimpin Pemka, James Nyaro, dan tokoh-tokoh kunci Papua yang bertugas dalam militer Indonesia.

Pada akhir Desember 1983, sebuah pertemuan dengan para serdadu yang membelot diadakan di Jayapura. Hadir dalam pertemuan itu Mayor Joel Awom, wakil komandan BRIMOB. Awom, meskipun saudara laki-lakinya yang bernama Permenas Awom adalah seorang tokoh gerilyawan terkenal dari Manokwari, telah dipercaya oleh Indonesia.

Orang-orang Melanesia tersebut, dalam pertemuan itu — yang kira-kira berjumlah sekitar 150 orang — memutuskan untuk bergabung dengan OPM untuk melakukan aksi pemberontakan.

Pasukan Awom tetap melanjutkan tugas mereka selama beberapa minggu dan mengirim pesan pada James Nyaro menginformasikan bahwa tanggal 13 Februari adalah tanggal pelaksanaan penyerangan. Rupanya intelijen Indonesia mendengar desas-desus mengenai rencana tersebut, yang diduga berasal dari seorang informan Papua yang berhubungan dekat dengan OPM, khususnya orang-orang di sekitar Arnold Ap. Selain itu, detail mengenai rencana pemberontakan tersebut juga didapat pihak Indonesia dari badan intelijen PNG, NIO, yang diketahui mempunyai penghubung yang bagus di wilayah perbatasan tersebut. Adanya keterkaitan tersebut dinyatakan dalam rapat parlemen PNG oleh menteri kehakiman, Tony Bais. Meskipun ia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa badan intelijen telah mendapatkan informasi tersebut dari seorang petugas Australia yang bekerja di NIO, tetapi hampir dapat dipastikan memang seperti itu kejadiannya. Beberapa dari mereka diketahui mempunyai jaringan dengan rekan seprofesi mereka di Indonesia. Dari kasus ini tampak bahwa kerjasama yang diberikan Australia telah berkembang jauh melebihi apa yang dipikirkan orang selama ini — yaitu sekadar melakukan diplomasi.

Reaksi Indonesia setelah mendapatkan petunjuk rahasia tersebut adalah melakukan penangkapan terhadap para simpatisan OPM. Mereka mengabaikan Mayor Awom dan

para pengikutnya. Sementara rencana OPM untuk melakukan revolusi telah digagalkan sebagian, pemberontakan tetap muncul dengan skala yang diperkecil. Peristiwa itu disulut oleh pembunuhan terhadap tiga penduduk Papua, ketiganya adalah nelayan dari Serui, di pasar Hamadi oleh pendatang dari Sulawesi. Pendatang baru tersebut melakukan pembalasan atas kematian seorang penjual ikan Sulawesi yan dibunuh oleh beberapa orang Papua, beberapa hari yang lalu. Orang-orang Serui telah kehilangan kekuasaan atas pasar Hamadi dengan adanya arus pendatang yang disebut sebagai "pendatang suka rela".

Pada tanggal 13 Pebruari, Elias Warsey, seorang kopral ABRI, mencoba mengibarkan bendera Bintang Kejora di tiang bendera yang ada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I, di pusat kota Jayapura. Ia langsung ditembak oleh seorang polisi yang sedang berpatroli, dan tewas. Seorang penjaga gedung yang juga orang Papua, dan tertarik untuk melihat kejadian itu juga tewas ditembak karena dianggap sebagai anggota OPM.

Pada saat itu, orang lain pasti mengira bahwa ia melakukan pengibaran tersebut karena rasa putus asa. Apa untungnya melakukan hal yang membawa petaka bagi diri sendiri tersebut? Tetapi kejadian tersebut mempunyai makna spiritual bagi pelakunya. Bila dikaitkan dengan kepercayaan tradisional, mereka percaya bahwa pengibaran simbol Sampari, legenda pahlawan mereka, yaitu Bintang Kejora, akan memunculkan kekuatan gaib yang diperlukan untuk perlawanan mereka. Dua tahun sebelumnya, kepercayaan koreri tersebut telah membangkitkan semangat para

intelektual di UNCEN, khususnya kelompok yang didominasi oleh orang-orang Biak, dan merupakan orang-orang sekeliling Arnold Ap. Konfirmasi mengenai fondasi budaya ini berasal dari sebuah surat yang dikirim seorang misionaris di Papua Barat kepada ayahnya di Australia. Ia menceritakan bahwa ia telah diberitahu oleh seorang pemuda yang terlibat dalam aksi pengibaran bendera bahwa ketika mereka menghadapi bahaya besar, mereka akan bertindak sesuai dengan perintah suci. Sebuah kejadian dengan kandungan spiritual yang sama, tetapi kali ini lebih ke arah Kristiani, disaksikan oleh seorang wartawan *Tempo*, pada pertengahan tahun 1984 di kamp pengungsi Blackwater. Sesudah mendengarkan khotbah gereja yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, Susanto Pujomartono menuliskan bahwa sang pendeta menanyakan kepada para jemaat, "Mengapa rencana kita pada tanggal 13 Februari menemui kegagalan? Mungkin karena Tuhan belum mengizinkannya. Mengapa? Karena iman kita masih kurang. Jadi marilah kita mempertebal keimanan kita."

Insiden bendera tersebut tidaklah sia-sia. Dipicu oleh adanya peristiwa tersebut, membuat Joel Awom dan seratus orang serdadu lainnya memutuskan untuk membelot dan menjarah gudang milik batalion 751 dalam perjalanan ke hutan untuk mendapatkan senjata dan amunisi. Termasuk dalam barang rampasan tersebut adalah senapan otomatis dan senjata api ringan. Beberapa minggu sesudah peristiwa itu, Awom menceritakan kisahnya kepada seorang wartawan bernama A. Sasako. Para pembelot tersebut melancarkan sejumlah serangan *hit and run* terhadap detasemen In-

donesia baik di dalam maupun di sekitar kota Jayapura. Sementara itu, serangan kecil-kecilan terjadi di beberapa kota lainnya. Diikuti oleh beberapa birokrat senior, staf dan mahasiswa UNCEN meninggalkan jabatan mereka untuk melarikan diri ke PNG. Para pengungsi gelombang pertama ini, berjumlah 1.000 orang yang mayoritas berasal dari Biak dan Serui.

Pembelotan dalam tubuh militer tersebut merupakan peringatan bagi Indonesia. Indonesia menjelaskan kejadian tersebut kepada para diplomat di Jakarta sebagai akibat telatnya pemberian gaji selama beberapa bulan. Cerita yang dikarang-karang tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah bahkan "tega" mencemarkan nama baik mereka sendiri untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.

Anggota ABRI yang loyal, yang sebagian besar non-Papua, diperintahkan untuk menemukan senjata yang telah dicuri itu. Mereka mulai melakukan pencarian dari rumah ke rumah di sekitar Jayapura dan daerah sekitarnya. Pendekatan yang mereka gunakan sangat kasar dan mengakibatkan ketakutan penduduk. Karena kejadian itu, lebih banyak lagi orang yang mencari perlindungan ke PNG. Ada yang dengan berjalan kaki maupun menggunakan sampan yang dipasangi mesin seperti umumnya digunakan di daerah tersebut. UNHCR menggambarkan kelompok terakhir sebagai kelompok "manusia perahu" baru. Sementara itu operasi militer yang diberi nama "Operasi Sate" — yang menganalogikan tujuan dari operasi tersebut: menusuk daging para tersangka — telah diperluas sampai ke wilayah pedesaan terdekat dan dalam beberapa bulan mendatang sudah akan

mencapai wilayah perbatasan. Sebagian senjata yang hilang sudah ditemukan, dan 70 serdadu yang membelot menyerahkan diri. Walaupun terdapat aksi-aksi penyerangan yang terjadi di Sorong, Manokwari dan Biak, tetapi fokus pemberontakan adalah wilayah perbatasan tempat markas besar Pemka berada, dan tempat bersembunyi banyak gerilyawan. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan serangan balasan, Indonesia memutuskan untuk memberi wewenang sepenuhnya kepada militer. Pesawat Bronco dan helikopter beserta beberapa jet tempur diturunkan untuk melawan pemberontakan. Selain itu mereka juga menyebarkan *leaflet* yang bersifat religious, ditanda-tangani oleh Brigjen Sembiring. Kadang-kadang ikut pula perwakilan masyarakat Biak dan Serui menandatanganinya. Kelompok OPM luar negeri menyatakan bahwa para penandatangan itu telah dipaksa menandatangani himbauan untuk menyerahkan diri yang dibuat oleh "sang Jenderal Kristen" tersebut. Menurut para pembelot yang mencari perlindungan di PNG, beberapa dari mereka yang memenuhi anjuran komandan tersebut justru dibunuh tanpa ampun. Seorang pembelot ABRI, Friet Sibuy, mengatakan bahwa 8 orang serdadu Papua telah ditembak mati.

Selama periode antara usaha pertama pengibaran bendera sampai Mei 1984, pemerintah PNG mengatakan bahwa sekitar 8.000 orang Papua telah melintas ke PNG untuk mencari perlindungan. Jumlah resmi dari eksodus pengungsi tersebut sangat bervariasi. Pada awal minggu, ketika sedikitnya 1.000 orang melarikan diri, Indonesia menyatakan

dengan tegas bahwa tak seorang pun yang meninggalkan Papua kecuali pelaku kejahatan. Ketika tidak bisa mengelak mengenai adanya arus pengungsi ke PNG, pemerintah menyatakan bahwa mereka adalah "penduduk desa" yang telah terpengaruh propaganda "gerombolan pangacau liar". Sementara itu baik menteri luar negeri PNG maupun Australia menyatakan bahwa para penduduk meninggalkan kediaman mereka demi menghindari baku tembak antara ABRI dan OPM. Belakangan, faktor yang disebabkan Indonesia dihilangkan dan penyebab utamanya dinyatakan adalah OPM yang menekan penduduk Papua Barat untuk meninggalkan tanah tradisional mereka. Rabbie Namaliu, menteri luar negeri PNG, mengatakan bahwa penduduk desa yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan mengistilahkan OPM sebagai "belalang yang sedang mencari mangsa di kebun mereka". Tetapi sejumlah pengungsi yang berada di tempat itu, termasuk para petugas UNHCR, mengaku tidak pernah mendengar keluhan semacam itu.

Dari wawancara yang dilakukan oleh petugas PNG, para pekerja gereja dan jaringan kerjasama intelijen Australia, terlihat bahwa banyak di antara penduduk desa tersebut yang mengalami pengalaman buruk dengan metode ABRI. Sebuah laporan yang dibuat oleh satu kelompok gereja menyebutkan:

> Ketakutan mereka sangat bisa dipahami. Kami mendengar cukup banyak cerita dari tangan pertama dan melihat cukup dokumentasi untuk bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan oleh militer Indonesia — khususnya pasukan baret merah yang

telah dipindahkan dari Timor Timur ke Irian Jaya. Jika kembali nanti, para pelintas batas tersebut minta dilindungi dari militer dan minta jaminan proteksi terhadap tanah milik mereka.[18]

Para pengungsi lainnya mengatakan bahwa mereka belum bertemu para serdadu, tapi hanya mendengar mengenai rencana kedatangan mereka. Telah meluasnya aksi ofensif ABRI dari titik konflik yang sebenarnya, yaitu Jayapura, tampak dari fakta bahwa hampir separuh pengungsi, yang berasal dari Selatan Papua, masuk ke propinsi di wilayah Barat PNG. Konflik tersebut, seperti batas wilayah yang tidak kelihatan, telah memisah-misahkan beberapa kelompok suku. Suku Dera yang terdiri dari 2.700 orang misalnya, telah terpecah jadi 1.500 orang di Papua Barat dan 1.200 orang di PNG. Dan akhirnya 850 orang anggota suku mereka yang tinggal di Papua melarikan diri menuju arah Timur.

Sebenarnya memang banyak pengungsi yang telah dipengaruhi oleh gerilyawan OPM untuk melarikan diri, dengan mengatakan bahwa akan berbahaya bagi penduduk bila tetap tinggal di wilayah yang dikatakan mereka sebagai zona perang. Para pemberontak tersebut melihat bahwa ABRI tidak membedakan antara gerilyawan dan penduduk sipil karena mereka memang tidak bisa. Sehingga, setiap orang akan menanggung resiko dan oleh sebab itu akan lebih baik bagi penduduk untuk pergi dari tempat itu. Hasilnya, kebanyakan pengungsi adalah wanita dan anak-anak yang umurnya berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Para lelaki, khususnya yang masih muda dan sehat, siap untuk ikut berperang. Sedang mereka yang sudah sangat berumur juga

tetap tinggal di rumah, karena tidak sanggup menempuh perjalanan yang berat, atau bersembunyi di hutan dan kekurangan makanan.

Seorang pengungsi, yang sehari-harinya seorang guru, mengatakan: "OPM sedang berusaha mengembalikan tanah kami. Mereka mengirim orang kemari dan mereka bertempur melawan Indonesia." OPM juga berpikir bahwa membawa masalah Papua ke fora internasional tidak akan merugikan mereka.

Bukti nyata yang menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan ABRI tidak mereda, adalah munculnya kembali eksodus dari 2.000 pengungsi yang terjadi antara bulan Mei dan Agustus. Walau PNG telah memutuskan untuk menghentikan 'sokongan' dengan tidak menyediakan makanan dan perawatan medis di perbatasan yang termasuk dalam wilayahnya, tetapi hal ini tidak menghalangi para pengungsi untuk tetap datang. Yang mereka cari adalah rasa aman dan mereka mendapatkannya di PNG, walaupun hanya untuk sementara. Perilaku para pengungsi tersebut digambarkan secara jelas oleh seorang juru bicara tidak resmi di kamp Komokpin, yang memberi tahu AAP bahwa meskipun beberapa orang telah meninggal selama berada di PNG, tetapi paling tidak PNG adalah sebuah negara yang merdeka dan hal inilah yang diinginkan para pengungsi bagi negara mereka.

Karena bermaksud menghindari tindakan yang menyinggung Indonesia, PNG cenderung memberi pernyataan bahwa para pengungsi tersebut adalah para pelintas batas "ilegal" dan "non-tradisional", walaupun sebenarnya me-

reka memenuhi kriteria internasional sebagai 'pengungsi'. Selama beberapa bulan PNG membatasi akses UNHCR terhadap para pengungsi, dengan tujuan untuk mencegah persoalan tersebut menjadi perhatian internasional. Gereja-gereja dan NGO diminta untuk menghentikan bantuan kemanusiaan terhadap para pendatang dari Papua Barat tersebut, kecuali yang berada di kamp Blackwater, dan sekelompok pengungsi lain sekitar 700 orang yang telah terlanjur sampai di tempat misi Katolik di Kamberatoro sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Ternyata kebijakan tersebut justru menjadi pukulan balik terhadap pemerintahan Somare dengan adanya pengungsi yang tewas karena kekurangan pangan dan serangan penyakit, di kamp yang ada di wilayah Selatan negara itu. Setelah peristiwa tersebut, UNHCR diizinkan untuk membantu secara aktif, sementara gereja-gereja dan lembaga bantuan dari PNG, Australia dan lainnya siap untuk membantu 10.000 pengungsi; 1% dari keseluruhan masyarakat Melanesia di Papua Barat, dan setengah dari seluruh penduduk yang tinggal di perbatasan. PNG berharap mereka akan segera kembali ke rumah masing-masing, dan untuk itu mereka mengadakan negosiasi mengenai rencana pengembalian mereka dengan pemerintah Indonesia. Tetapi pemerintah PNG berhadapan dengan tetangga mereka yang "kuat" dan bersikap tidak kooperatif, baik dalam hal jaminan keamanan maupun dalam mendisiplinkan aparat militer mereka. Para pengungsi mulai merencanakan untuk tinggal lebih lama di PNG. Badan bantuan untuk pengungsi, Austcare, pada bulan Agustus 1984 memperkirakan bahwa operasi untuk membantu para pengungsi

akan menelan biaya sebesar $200.000 per bulan, termasuk untuk biaya bahan bakar pesawat yang mendrop barang yang diperlukan ke daerah terpencil.

Kondisi alam di pedalaman PNG yang sukar ditaklukkan hampir sama dengan kondisi alam yang berada di sebelah barat perbatasan. Problem inilah yang memicu serangan OPM selanjutnya. Seperti halnya di PNG, landasan pesawat terbang darurat telah dibangun di beberapa lokasi, hanya datang beberapa kali kedatangan pesawat dalam seminggu. Pesawat militer dan pemerintah jarang mendarat di tempat-tempat yang sepi untuk menghindari kontak dengan OPM. Jadi penerbangan ke sana hanya dilayani oleh perusahan penerbangan milik para misionaris Protestan, MAF, dan misionaris Katolik, AMA, yang amat kecil kemungkinannya untuk diserang. Sementara itu aksi OPM-Pemka terhadap sebuah penerbangan AMA mempunyai dua motif. Serangan itu merupakan protes terhadap aksi pembersihan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Indonesia dan juga sebagai pembuktian bahwa mereka juga punya kemampuan sama dengan Victoria — kelompok di balik terjadinya "pemberontakan" yang akhir-akhir ini seringkali terjadi — dalam hal membuat kekacauan.

Werner Wyder, berumur 29 tahun dan lahir dekat Zurich, Swiss, memulai pekerjaannya sebagai pilot kontrak di AMA pada pertengahan tahun 1981. Karena mengira bahwa ia akan terlibat dengan misi yang ada hubungannya dengan gereja, maka ia menjadi terkejut dan juga merasa tidak senang ketika mengetahui bahwa sejumlah penumpang dalam pesawatnya adalah tentara Indonesia. AMA

melakukannya karena dicarter. Wyder menceritakan bahwa pada tahun 1982, saat itu Pemilu di Indonesia, ia menerbangkan kotak pemungutan suara yang dibawa dari daerah terpencil Papua menuju ke ibu kota. Dalam beberapa kesempatan ia memperhatikan bahwa semua kotak yang dibawa jelas-jelas bertanda lambang partai yang berkuasa, Golkar. Ketika ia menanyakan kepada petugas mengenai kotak suara partai-partai lainnya, mereka menjawab "tidak usah dipikirkan". Ia juga pernah menyaksikan pesawat tempur ABRI melakukan pemboman terhadap desa-desa, tetapi ia mengira bahwa bom tersebut lebih banyak dijatuhkan ke ladang-ladang daripada ke pemukiman penduduk.

Pada tahun 1984, kontrak Wyder tinggal 3 bulan. Ia memutuskan untuk tidak melayani penumpang lagi. Tanggal 26 Maret adalah hari yang tenang baginya, dan ia menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan di daerah Sentani, kota yang berada dekat bandara utama. Para pilot diberi izin terbang sebanyak 80 jam terbang dalam sebulan, dan Wyder telah mencapai 79 jam. Ia merencanakan untuk istirahat selama beberapa hari lagi. Tetapi pada sore hari itu ia didatangi oleh seorang *manager* sebuah bisnis konstruksi Indonesia yang sedang membangun sebuah sekolah di luar kota Yuruf, sekitar 1,5 jam dari Sentani dengan menggunakan pesawat. Orang itu berencana untuk mengirim beras kepada anak buahnya. Ketika si pilot Swiss tersebut setuju untuk mengantarnya, sang *manager* tersebut menanyakan apakah ia boleh membawa serta temannya yang seorang dokter. Menjelang lepas landas, seorang guru Melanesia bergabung dengan mereka. Ia hendak menumpang sampai

rumahnya yang berada dekat Yuruf.

Dalam penerbangan ke Yuruf, Wyder merasa aneh karena tidak melihat seorang pekerja pun di sekolah itu. Segera sesudah pesawat Cessna 185 tersebut mendarat, sejumlah 20 orang penduduk desa telah mengelilingi mereka. Dari tempatnya berdiri, mereka mengacungkan sejumlah senapan buru dan senjata tradisional. Mereka jelas-jelas anggota OPM. Hujan mulai turun dan kantong beras yang diturunkan dari pesawat dipindahkan ke tempat yang teduh. Tiba-tiba, orang-orang Papua tersebut menangkap kedua orang Indonesia dan memukuli mereka dengan tongkat rotan. Jumlah penduduk yang datang bertambah dan kata Wyder mereka berteriak-teriak. "Semua merasa gugup", katanya, "tampaknya karena mereka merasa terkejut ketika sadar bahwa penumpang tersebut bukanlah anggota ABRI biasa". Wyder, yang bisa berbahasa Indonesia, mendengar mereka membicarakan mengenai tebusan, dan menduga bahwa sebentar lagi akan dicapai suatu keputusan. Mereka berjalan menuju ke hutan. Setelah itu Wyder mendengar bunyi tembakan dari arah belakang. Ia melihat sekeliling dan mendapati kedua orang Indonesia tersebut telah dibunuh. Si bos konstruksi ditembak dalam jarak dekat dan ditembak lagi setelah terjatuh ke tanah. Si dokter langsung tewas dengan sekali tembak. Sesudahnya kedua sandera yang tersisa dibawa ke dalam hutan. Kemudian, para anggota OPM tersebut berfoto dengan mengarahkan panah dan tombak ke jasad korban. Foto tersebut belakangan dikirimkan ke media massa PNG.

Para penyerang tersebut adalah OPM kelompok Pemka

yang dipimpin oleh James Nyaro yang basisnya persis berada di area perbatasan yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Setelah beberapa jam mereka mencapai kamp Nyaro, ia mengatakan kepada kedua sandera itu bahwa mereka tidak berada dalam bahaya, tetapi harus menunggu hasil dari beberapa negosiasi. Beberapa hari telah berlalu, dan tampaknya tidak ada perkembangan yang berarti. Sementara itu, kelompok "persatuan" para emigran Papua Barat di PNG menuntut uang tebusan sebesar K 1,5 juta untuk pelepasan para sandera. Tetapi tuntutan tersebut segera diubah menjadi 4 poin tuntutan di mana di dalamnya Swiss diminta untuk membuat seruan secara langsung kepada pemerintah Indonesia mengenai masa depan Papua Barat, dan juga mengangkat permasalahan tersebut di PBB. Belakangan kelompok tersebut baru menyadari bahwa Swiss bukanlah anggota PBB.

Kelompok yang bersatu tersebut, yang menyebut dirinya hanya "OPM", dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Papuan Independent Organisation* (PIO), dipimpin oleh Alex Ruben (atau "Victor") Kambuaya. Ia mempunyai izin tinggal di Port Moresby dan berasal dari daerah Sorong, Irian Jaya. Organisasi yang dipimpinnya dipandang sebagai kelompok yang paling *action-minded* di antara para pejuang lain yang berbasis di PNG, dan paling berkeras dalam memperjuangkan solidaritas antar faksi. Indikasi ke arah itu diketahui dari sebuah seruan yang ditulis dengan panjang lebar tertanggal 5 Oktober dan 5 November 1983. Pada tanggal yang terakhir disebutkan, sebuah memo yang ditandatangani oleh 12 tokoh terkemuka Papua yang tinggal

di Port Moresby (dan dikirim melalui kotak surat di Universitas) dikirim kepada para pemimpin gerilya — baik Pemka dan Victoria — di hutan dekat perbatasan. Dengan bahasa Indonesia yang benar secara tertulis, tetapi kedengaran agak aneh maknanya, himbauan tersebut ditujukan kepada mereka semua agar "Berada dalam garis yang sama serta saling bekerja sama demi keberhasilan dalam perjuangan meraih kemerdekaan Papua Barat".

Juru bicara "PIO" untuk tuntutan tebusan di atas adalah Henk Joku, seorang intelektual yang berasal dari daerah Sentani dan merupakan orang Papua pertama yang menjadi pegawai di parlemen Nugini di bawah pemerintahan Belanda. Ia pernah menjadi pendukung Jacob Prai, dan kemudian membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Partai Sosialis Melanesia. Di usianya yang sekitar 50-an, Joku pernah mengalami sendiri masa Indonesia berkuasa di Papua dan secara terang-terangan mengritiknya. Ia melarikan diri pada tahun 1975. Tetapi beberapa orang, termasuk di antaranya para pemuka emigran Papua Barat, mengatakan bahwa ia pernah membuat kesepakatan dengan intelijen Indonesia. Sebagian lain mengatakan bahwa ia pernah membantu NIO — PNG, meskipun begitu tak seorang pun yang dapat menjelaskan mengapa NIO pada tahun 1981 memerintahkan penyerangan terhadap kediamannya yang berada di belakang gereja di pasar Koki, Port Moresby, yang kemudian dikenal sebagai "Persekongkolan dalam rumah Injil". Kali lain Joku menjadi berita utama di PNG ketika ia diculik dari rumah Injil oleh para pendukung Rumkorem dan dibawa dengan truk. Penculikan tersebut hanya berhasil menca-

pai jarak sekitar 3 mil ke arah bukit, karena teman-teman Joku yang melakukan pengejaran dengan kendaraan di belakangnya berhasil menangkap mereka. Baku hantam terjadi, dan Joku yang mengenakan kacamata berlensa tebal dan tampak "cocok" menjadi seorang korban penculikan, berhasil diselamatkan. Pada tahun 1984, ia mulai memberi dukungan kepada Kambuaya.

Sementara itu di hutan, tawanan Swiss, Wyder, diminta untuk menulis surat kepada penguasa Port Moresby, yang menyatakan bahwa ia dan si guru dalam kondisi aman, tapi masih ditawan. Suratnya yang diketik tertanggal 26 Maret 1984, dan beralamatkan "dari suatu tempat di dalam hutan", juga menceritakan mengenai peristiwa pengeboman beberapa desa oleh pesawat Indonesia serta tindakan diluar batas lain yang mereka lakukan. Tak diragukan, pemerintah PNG tidak mengharapkan akan mendengar hal semacam itu dari seorang warga asing yang melihat masalah itu secara objektif:

> Sekitar bulan Oktober 1981, sewaktu sedang terbang dari Nabire ke Enarotali, saya melihat 3 pesawat Bronco sedang menembaki desa Madi dan Pimida, yang berada di sebelah timur Enarotali, dan kedua desa tersebut dihancurkan. Saya tidak tahu berapa jumlah orang yang tewas ... Di Enarotali, seorang turis bermaksud membeli sebuah noken (tas tali) di sebuah pasar, tetapi seorang serdadu datang dan mengatakan bahwa harganya terlalu mahal, lalu langsung mengambil barang itu. Beberapa guru yang baru pulang dari sebuah pertemuan, ditahan oleh militer dengan alasan surat jalan mereka kotor; mereka menyita barang-barang milik para guru tersebut dan mengunci mereka di dalam sebuah WC. Saya diberitahu bahwa ketika para serdadu diterbangkan ke Enarotali dengan Merpati

(perusahaan penerbangan lokal), seorang laki-laki Papua yang menghitung jumlah mereka dengan jarinya dianggap telah melakukan provokasi. Beberapa serdadu lalu melepaskan tembakan yang membuatnya luka berat, kemudian membawanya ke danau untuk ditenggelamkan ... masyarakat di daerah Bilai mengeluh karena babi-babi mereka telah ditembak, dan para wanitanya diperkosa...

Namun demikian, tidak ada uang atau dukungan yang diberikan kepada OPM. Penculikan tersebut berakhir karena campur tangan seorang uskup Katolik di Vanimo yang berasal dari Australia, bernama John Etheridge. Pastor tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat, yang tinggal di kedua sisi wilayah perbatasan, selama masa pengabdiannya di wilayah tersebut. Ia membujuk para penculik dan mengatakan bahwa penyelesaian terbaik adalah dengan melepaskan tawanan. Tetapi bagaimanapun keberhasilan pastor tersebut tidak lepas dari keterlibatan konsulat kehormatan Swiss di PNG, para pegawai senior dari departemen luar negeri PNG dan sang penghubung, Henk Joku. Setelah beberapa intrik, akhirnya Wyder dilepaskan.

Di kemudian hari, Wyder menceritakan bahwa sebenarnya Nyaro bermaksud untuk melepaskan para sandera sejak awal, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena sejumlah orangnya tidak setuju dengan keputusan itu. Nyaro juga mengatakan bahwa ia harus mendapat persetujuan rekan-rekannya di luar negeri.

Mengenai Nyaro, Wyder mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berpendidikan, ramah dan yang paling penting adalah ia sangat taat beragama. Sebagai seorang Katolik, sang pemimpin selalu berdoa sebelum menyantap ma-

kanannya dan tampaknya ia mempunyai kepekaan yang kuat mengenai tanggung jawab moral. Ia mengatakan kepada Wyder:

> Anda (dan misi) telah melakukan hal yang baik. Banyak di antara kami yang beragama Katolik, dan kami mendukung anda. Tetapi anda tidak seharusnya membantu Indonesia mengangkut persenjataan, atau pasukan. Bila ini terjadi lagi, kami akan membakar setiap pesawat yang kami tangkap.

Ia mengundang orang Swiss tersebut untuk kembali suatu hari nanti dan membantu mengorganisir penerbangan bila Papua Barat sudah merdeka. Wyder diberi hadiah gelang dan hasil kerajinan tradisional.

James Nyaro segera muncul kembali, kali ini secara terang-terangan, dalam sebuah wawancara dengan sebuah program acara yang dinamakan "Four Corners" di TV-ABC. Dengan segmen pemirsa di negara PNG, acara itu menimbulkan kontroversi ketika PNG mencoba menekan Australia untuk melarang penyiarannya. Hal ini justru makin menarik perhatian orang sewaktu disiarkan. Dalam wawancara itu Nyaro menyatakan penyesalannya karena terpaksa memilih cara perjuangan dengan perlawanan bersenjata:

> Kami sebagai orang Kristen seharusnya tidak membunuh orang lain. Karena ini berarti kami telah melakukan dosa terhadap Tuhan. Tetapi dalam masa revolusi kami terpaksa membunuh mereka, melawan bangsa lain yang merugikan kami.[20]

Nyaro, yang menggambarkan para pengikutnya sebagai terpaksa menjadi gerilyawan, dicela oleh menteri luar negeri

PNG, Namaliu, dengan mengatakan bahwa foto ke-dua orang Indonesia yang tewas dan di-*release* ke media massa, sebagai perilaku yang menjijikkan dari para anggota gerakan. Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan dari Henk Joku, yang mengatakan bahwa pemerintah PNG hanya berkeinginan untuk mentolerir kekejaman, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Indonesia. OPM tidak berkeinginan untuk berperang, mereka hanya mempertahankan tanah air mereka dari Indonesia yang dianggap "orang asing". Joku juga menambahkan bahwa pembunuhan terhadap Indonesia dengan menggunakan busur dan anak panah — sebagaimana sering terjadi — tidaklah sekejam cara membunuh dengan memuntahkan sampai 50 peluru dari senapan otomatis ke tubuh orang Melanesia. Ia menyerukan kepada semua orang Kristen untuk mengutuk kekejaman Indonesia.

Pernyataan di atas sangat sulit untuk disangkal, dan PNG sendiri tidak mencoba menyangkalnya. PNG justru menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan meningkatnya pertempuran di wilayah perbatasan, setelah adanya laporan intelijen yang menyatakan OPM telah menerima kiriman senjata seberat 900 kg. Tidak ada berita kelanjutannya di media massa mengenai cerita tersebut. Jika benar, itu merupakan kesempatan pertama kali OPM menerima bantuan semacam itu dari luar negeri. Investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa ada beberapa senjata ringan yang kemungkinan besar dikirim oleh para pendukung mereka di PNG. Jadi bukan dari Jacob Prai, yang telah mengunjungi Moscow beberapa bulan sebelumnya, seperti yang dikira

selama ini. Tokoh yang sangat kukuh bersikap anti-komunis tersebut rupanya telah memutuskan bahwa bantuan harus mereka dapatkan dari semua pihak.

Pada bulan Oktober 1984, Australia menjadi tempat utama OPM untuk mendapatkan senjata. Polisi federal negara itu menangkap seorang bekas serdadu bernama Gary Scott — ia bertugas di Resimen Kepulauan Pasifik, dengan pangkat Letnan. Dari kediaman Scott di London, polisi menyita surat-surat yang berasal dari "kelompok persatuan" OPM, dan rincian biaya berkaitan dengan pembelian persenjataan. Scott, yang terkadang menjadi tentara bayaran di Afrika bagian Selatan, dikenai tuduhan telah melakukan tindak kejahatan (pengerahan bantuan dan penyerangan kepada pihak asing di negara lain) dengan mendukung aktivitas yang menimbulkan permusuhan, yaitu gerakan pembebasan Papua.

Sepanjang tahun 1984, keberadaan para pengungsi di PNG telah menjadi perhatian besar media massa negara setempat maupun asing. Beberapa wartawan mandatangi kamp-kamp pengungsi untuk melakukan wawancara dengan para pemimpin OPM. Wartawan *The Age,* Damien Murphy, berjalan kaki selama berjam-jam dengan ditemani oleh sejumlah pendukung OPM, sebelum mencapai kamp tempat tinggal Fisor Yarisetouw, 36 tahun, pimpinan 27 anggota senat Papua Barat (pro-Pemka). Murphy mengatakan bahwa ia mendapati para gerilyawan dalam kondisi miskin perlengkapan, tapi mempunyai semangat yang tinggi. Mereka menyatakan tidak bermaksud untuk mempermalukan pemerintah PNG dengan menggunakan wilayah me-

reka sebagai tempat berlindung, tetapi mereka berada dalam kondisi terjepit. Yarisetouw mencela Indonesia dengan mengatakan telah menjadi "negara komunis", dengan didasarkan pada dugaan bahwa PKI telah terlibat dalam kampanye pengambilalihan terhadap Papua. Fisor masih terlalu muda dalam hal kesadaran kekuatan politik, sementara ayahnya sendiri dituduh "komunis" oleh Indonesia.

Selama sebelas jam berada di kamp OPM, Murphy melihat tiga orang di antara mereka mempunyai senjata otomatis yang masih baru dan mengkilap. Ia mengira senjata tersebut asli buatan Jerman atau Italia. Senjata-senjata tersebut adalah jenis "Alpiner" BM76 buatan Italia yang kemungkinan baru saja mereka rebut dari Indonesia. Batalyon 751 yang sedang bertugas di Papua menggunakan senjata jenis itu. Sementara itu sekitar 20 atau lebih gerilya bersenjatakan busur, panah dan belati yang dibuat dari tulang kasuari. Murphy menanyakan berapa jumlah orang Indonesia yang telah terbunuh antara waktu pengibaran bendera pada bulan Februari sampai April. Gerilyawan tersebut berhenti sejenak untuk menghitung, dan mengatakan sekitar 140 orang tewas. Dan tokoh pejabat yang tewas ada 2 orang.

Kelompok Fisor ini mencela sebagian besar komunitas Papua Barat yang berada di PNG sebagai "prajurit yang hanya berada di belakang meja". Bahkan ia mengatakan bahwa para pelarian politik yang berharap menjadi menteri dalam pemerintahan setelah masa kemerdekaan akan kecewa. Ia juga mengatakan bahwa para pendukung yang berada di luar negeri telah disibukkan oleh persaingan antarfaksi sehingga melupakan tujuan utama mereka. Beberapa bu-

lan kemudian, pernyataan tersebut terbukti, ketika sebuah kelompok memboikot sebuah acara yang diadakan untuk mengenang kematian Arnold Ap, di Port Moresby — seorang tokoh yang telah bekerja keras untuk menempa solidaritas budaya di antara masyarakat Papua Barat.

Yarisetouw mengatakan bahwa markas berjalan Nyaro bisa ditempuh dengan dua hari berjalan kaki menuju ke arah Selatan, selain itu ada beberapa kamp lain yang berada di dekatnya.

Seorang wartawan lain yang bertemu dengan Yarisetouw adalah Neville Togarewa dari *The Times of PNG*. Ia melaporkan bahwa sang pemimpin tersebut tetap melakukan kontak secara teratur dengan Nyaro. Yarisetouw, yang telah berada di hutan selama 11 tahun, mengatakan:

> Jika kami mempunyai persenjataan yang cukup, maka pertempuran melawan Indonesia mungkin sudah berakhir sejak lama. Perjuangan ini akan berlanjut tanpa batas, barangkali sampai semua orang Melanesia, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak punah.[21]

Menteri pertahanan Pemka, Lawrence Doga, yang diwawancarai di kamp lain mengatakan:

> Tak seorang pun, baik yang berkulit hitam maupun putih, yang mempunyai hak untuk menghentikan saya untuk memperjuangkan kemerdekaan saya. Satu hal yang orang lain harus tahu. Kami tidak menuntut apa yang bukan hak kami, kami hanya menuntut apa yang sepenuhnya menjadi hak kami. Saya percaya bahwa suatu hari Papua Barat akan merdeka. Selama ras Melanesia masih ada di Papua Barat, maka perjuangan ini akan terus berlanjut.

Doga, yang digambarkan bersuara lembut ini — bertolak belakang dengan reputasinya yang mempunyai sikap keras terhadap faksionalisme — memohon kepada PNG dan negara-negara lain di wilayah Pasifik Selatan untuk mendesak Indonesia dan membawa permasalahan Papua Barat ke PBB dan Forum Pasifik Selatan. Dunia harus tahu bahwa Indonesia sedang mencoba "memusnahkan" orang-orang Melanesia dengan cara mengasimilasi mereka baik secara rasial maupun kultural. Ia mengatakan bahwa transmigrasi adalah sebuah ancaman khusus bagi mereka dan jalan raya trans-Papua yang sedang dibangun dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk memudahkan menangkapi para pejuang kemerdekaan.

Pandangan Doga yang memberi penekanan terhadap wilayah Pasifik merefleksikan pola pikir baru OPM bahwa wilayah tersebut dianggap lebih memungkinkan digunakan sebagai basis dukungan ketimbang negara-negara Eropa yang jauh. Sementara itu dalam kurun waktu terakhir, pelarian Papua Barat di Belanda telah meningkatkan usaha mereka dalam mengorganisir komunitas pelarian politik. Sebuah "pertemuan tingkat tinggi" yang diadakan di Oetgeest, Belanda pada tahun 1982 menghasilkan adanya kesepakatan untuk bersatu, meskipun pada tahun-tahun setelah itu tidak ada lagi pertemuan di antara mereka dan momentum tersebut menjadi melemah. Tetapi pada akhir tahun 1984, dipicu oleh adanya pemberitaan mengenai kondisi kritis yang menimpa para pengungsi di PNG, komunitas Papua yang berada di Belanda membentuk Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Papua Barat di Belanda. Organi-

sasi yang juga disebut sebagai Front Rakyat Papua Barat — OPM ini pada tanggal 24 September menulis surat kepada duta besar Australia di Den Hag untuk mendapatkan dukungan. Sebelumnya selama bertahun-tahun, tidak satu pun kelompok OPM yang pernah menulis surat pendekatan kepada Australia sampai sedetail itu. Hal ini mengindikasikan adanya semangat yang kembali berkobar di antara para pelarian politik yang berasal dari berbagai kelompok tersebut.

Negara di wilayah Pasifik Selatan yang dipandang paling bersedia bekerja sama dengan OPM adalah Vanuatu karena pemerintahan Fr. Walter Lini selama ini menunjukkan sikap simpati terhadap Papua Barat. Pada bulan Juli 1984 setelah adanya pidato David Joku, kongres ke-14 partai yang berkuasa di Vanuatu, Vanuaku Pati, secara resmi mengakui OPM. David Juko adalah salah seorang anggota faksi yang dipimpin oleh Victor Kambuaya. Pernyataan partai berkuasa tersebut, walaupun terdengar "janggal", jelas-jelas menyatakan dukungan terhadap OPM.

> Kongres ini, mencatat bahwa masalah Papua Barat merupakan sebuah fitnah politik yang dirancang untuk meraih kepentingan strategis superpower di wilayah tersebut, dengan mengabaikan kehendak rakyat yang terjajah dan tidak mengakui nilai-nilai serta identitas Melanesia, sehingga Vanuaaku Pati dalam hal ini mengakui OPM sebagai satu-satunya perwakilan resmi dari Rakyat Papua yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Papua Barat.[22]

Fr. Lini menghadiri kongres dan menyetujui mosi tersebut. Kemudian, ia muncul dalam sebuah wawancara dengan

Tony Jones dari radio ABC. Ia mengecam aksi Indonesia di Papua serta mengatakannya sama dengan penjajahan yang pernah dilakukan Belanda. Sikap terus-terang Lini tersebut sangat bertentangan dengan sikapnya yang berhati-hati di depan publik. Setahun yang lalu, ketika dalam pertemuan Forum Pasifik Selatan ke-14 di Canberra, ia mengelak dari berbagai pertanyaan yang gencar dilancarkan dalam konferensi pers mengenai permasalahan Papua. Misalnya, ketika ditanya mengapa forum sangat mempedulikan situasi di New Caledonia, di mana tidak ada pembunuhan yang terjadi di sana, sementara banyak orang yang sekarang ini sedang menghadapi kematian di Papua, Lini menjawab bahwa topik tersebut tidak termasuk dalam agenda pertemuan.

Sejak itu, Fr. Lini secara pribadi selalu menyatakan dukungan secara terbuka di depan publik. Pada tahun 1984, beberapa warga Papua Barat yang tengah melakukan perjalanan dari Belanda ke Port Vila melihat tanda-tanda bahwa beberapa pengungsi di kamp PNG yang terlibat secara aktif dalam politik, diizinkan tinggal di sana. Tampaknya mereka diberi dukungan untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan kecil milik warga Papua, dan diberi visa untuk melakukan usaha. Jadi tidak sekadar diberi jaminan status sebagai pengungsi. Fr Lini berpendapat bahwa semua orang Melanesia harus disambut baik di negara Melanesia lainnya, dan tidak seharusnya disebut dan diperlakukan sebagai "pengungsi".

Salah seorang pengunjung dari Eropa tersebut adalah Fred Korwa, asal Biak, yang singgah di Sydney dalam per-

jalanan kembali ke Belanda. Ia mengatakan bahwa Papua Barat adalah masalah Pasifik dan bukan Asia, oleh karenanya ia meminta pemerintah negara-negara yang termasuk dalam wilayah tersebut untuk saling membantu dalam penyelesaian masalah, demi tercapainya kedamaian. Korwa adalah anggota Pusat Komunitas Pasifik Vanuatu yang dipimpin oleh seorang bekas mahasiswa dan gerilyawan, Rex Rumakiek, yang beberapa tahun sebelumnya pernah mendapat kesulitan untuk meninggalkan PNG. Ia mendesak Australia, untuk memperlihatkan kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia. Ia mengatakan bahwa antara tahun 1963-1969, sekitar 30.000 orang Melanesia telah terbunuh. Dan sejak pelaksanaan Pepera, jumlah keseluruhan yang tewas mencapai paling tidak empat kalinya.

Korwa juga merupakan tokoh yang berperan penting dalam pindahnya grup musik "Black Brothers" asal Papua Barat ke Vanuatu. Di Indonesia, sepanjang tahun 1970-an, mereka dikenal sebagai grup musik *rock'n roll*. Tetapi kemudian mereka beralih menjadi Papua-oriented, setelah mereka di beri izin mengunjungi PNG.

Di sana, mereka menjadi bintang, baik dari sisi musik maupun politik, dan akibatnya mereka dilarang kembali ke Papua. Pada tahun 1979, supaya tidak mempermalukan Indonesia, maka pemerintah PNG membuang Black Brothers ke Belanda. Di negara Barat, group musik ini melihat pertunjukkan tradisional justru lebih mendapat penghargaan. Mereka mengambil nama "Papua", menyuarakan kebudayaan dan pengalaman mereka. Pada tahun 1984, karena kerinduan akan Pasifik, mereka memutuskan untuk pindah

ke Vanuatu, yang menyatakan kesediaan untuk menampung warga Papua Barat yang tidak berorientasi pada faksi tertentu. Karena tidak punya uang, anggota band tersebut dan anggota keluarga mereka bingung memikirkan bagaimana cara mendapatkan ongkos untuk pergi ke sana. Kemudian seseorang mempunyai ide cemerlang. Pemerintah Belanda pernah memberi uang kepada beberapa orang Maluku yang tinggal di Belanda agar bisa kembali ke Indonesia. Mungkin Black Brothers bisa mengajukan hal yang serupa. Rencana mereka berhasil dan biaya perjalanan ke Vanuatu didapatkan secara gratis. Saat singgah di Sydney pada bulan September, mereka menyatakan rasa percaya bahwa Pasifik akan menjadi pusat pendukung utama untuk Papua Barat. Mereka juga berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan oleh sebuah kelompok di Australia, yaitu "Friends of Papua".

Salah satu pengunjung Australia lainnya adalah Henk Joku, yang pada bulan Juni 1984 mewakili Papua Barat dalam pertemuan anggota *World Council of Indigenous People* (WCIP) di Canberra. Kunjungan Joku tersebut bersamaan dengan kedatangan Jose Ramos Horta, dari gerakan Fretilin, Timor-Timur, yang memang direncanakan untuk membuka konferensi nasional Partai Buruh Australia. Masalah Timor dan Papua akan masuk dalam agenda pertemuan itu. Akibatnya, keduanya menjadi perhatian media massa. Joku memperingatkan Australia dan New Zealand bahwa jika masalah Papua Barat tidak terselesaikan dengan baik, maka kedua negara harus bersiap untuk menerima gelombang pengungsi lebih banyak yang akan mendarat di pantai mereka. Ia mengatakan bahwa Australia yang merupakan ang-

gota komite dekolonisasi PBB, seharusnya dapat memunculkan isu Papua Barat di PBB. Dasar pemikirannya adalah dengan berada di bawah kekuasaan Indonesia, maka masalah Papua Barat akan menjadi sebuah ancaman bagi keamanan regional.

Dalam pertemuan WCIP, Joku mengajukan program yang terdiri dari 6 point:

- Masalah Papua Barat harus dibicarakan dalam Komite Dekolonisasi.
- Memperdebatkannya di Majelis Umum PBB;
- Pengamat dari negara-negara yang bersikap netral di PBB mengunjungi Papua Barat untuk mendapatkan masukan secara langsung mengenai keinginan penduduk dari yang bersangkutan.
- Palang Merah Internasional dan badan bantuan lain diizinkan memasuki wilayah tersebut;
- Para pengamat dari Forum Pasifik Selatan diizinkan masuk wilayah tersebut;
- Indonesia harus bersedia untuk mengadakan konferensi dengan OPM dengan tujuan untuk melimpahkan kembali kekuasaan kepada penduduk asli, dalam waktu dua bulan.

Pada hari terakhir pertemuan, WCIP mengesahkan resolusi mengenai Papua Barat yang isinya sebagai berikut:

> Mengingat bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara (Pepera) di Irian Jaya,
> Mengingat bahwa Indonesia telah terlibat dalam sebuah kebijakan yang secara terorganisir dan terus-menerus mengarah

ke *genocide* dan *ethnocide* di Papua Barat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini,
Mengingat bahwa rakyat Melanesia di Papua Barat telah tertinggal dibanding saudara mereka sesama Melanesia dalam pemerintahan Papua Nugini,
Menyatakan bahwa Pasifik mengutuk kolonisasi yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat, dan para pelaku *genocida* terhadap penduduk asli di negara tersebut.
Menyatakan bahwa wilayah Pasifik mendukung perjuangan penduduk asli Papua Barat meraih kemerdekaan dan mendesak diadakannya (kembali) plebisit secara benar untuk menentukan kehendak rakyat.
Meminta pemerintah Australia dan Selandia Baru, sebagai anggota Komite Dekolonisasi PBB, untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi yang disebabkan oleh invasi Indonesia.[23]

Kunjungan Joku tersebut sekaligus untuk menjalin hubungan dengan kelompok yang sebenarnya potensial tetapi selama ini terabaikan dalam rantai kerja sama dengan OPM, yaitu *Australian Aboriginal Community*. Sementara itu di Canberra, ia menemui kepala Departemen Urusan Penduduk Asli Aborigin (*Aboriginal Affairs Department*), Charles Perkins, dan mengatakan bahwa pembicaraan mereka berjalan lancar. Tak lama sesudahnya, anggota kelompok pendukung hak-hak atas tanah Aborigin (*Aboriginal Land Rights Support Group*) diminta mengisi kuisioner untuk mengetahui apakah gerakan mereka sebaiknya terlibat dalam masalah Papua Barat. Rata-rata mereka berminat, khususnya terhadap masalah hak-hak atas tanah yang mereka lihat ada kesamaannya antara di Australia dengan di Papua Barat.

Tiga bulan sesudah itu, Joku dicegah menghadiri kon-

ferensi dunia WCIP yang diselenggarakan di Panama. Sebagai seorang warga negara PNG, ia tidak bisa dihentikan oleh PNG. Jadi Australia membatalkan visa transit yang ia miliki untuk waktu cukup lama untuk memastikan bahwa ia tidak mendapat penerbangan ke Amerika. Joku tetap berada di PNG, ia akhirnya gagal mengangkat masalah OPM dalam sebuah forum penting.

Pada bulan Agustus, OPM kembali membuat kontak internasional ketika seorang pelarian politik Papua bernama Adolf Tombo, mewakili Seth Rumkorem, menghadiri kelompok kerja untuk penduduk asli (*Working Group on Indigenous Populations*) PBB di Jenewa. Rumkorem, yang seharusnya menghadiri pertemuan tersebut tertahan di bandara Athena karena alasan teknis birokratik dan dilarang meninggalkan Yunani. Rekannya mengatakan di depan peserta pertemuan itu bahwa Papua Barat tidak pernah mengakui klaim Indonesia terhadap wilayah mereka. Tombo mengatakan bahwa OPM telah melakukan investigasi untuk mengetahui jumlah orang yang tewas ataupun hilang semenjak terjadinya pengambilalihan kekuasaan, dan sejauh ini mencapai jumlah 110.000 orang. Ia juga mengklaim bahwa sejumlah orang yang berusaha melarikan diri ke PNG pada awal tahun 1984, hilang setelah tertangkap oleh pasukan keamanan Indonesia.

Forum lain yang menyatakan dukungan terhadap OPM adalah pertemuan regional pimpinan negara-negara persemakmuran (*Commonwealth Heads of Government Regional Meeting*) yang diselenggarakan pada bulan Agustus di Port Moresby. Walaupun dalam pertemuan resmi tersebut masa-

lah Papua tidak dibicarakan, tetapi sebuah pertemuan informal yang melibatkan negara-negara Melanesia — kecuali Fiji — diadakan sesudah acara tersebut. Fr Lini mengungkapkan dukungannya terhadap Papua Barat, dan sempat mengungkapkan "perbedaan" antara PM PNG, Somare, dengan menteri luar negerinya, Namaliu. Namaliu pernah menyatakan kekecewaannya terhadap Indonesia berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Indonesia atas wilayah udara PNG dan terhadap sikap tidak kooperatif para pemimpin di Jakarta. Hadir pula dalam pertemuan tersebut, pemimpin Kanak dari Kaledonia, Jean-Marie Tjibaou.

Pembicaraan serupa juga dilakukan pada jam-jam kosong selama pertemuan Forum Pasifik Selatan di Tuvalu, di mana Michael Somare bersikeras untuk tetap bersikap tidak mendukung OPM.

Dalam periode 1983-1984 OPM membuat kemajuan berarti dalam usaha untuk mempromosikan organisasi mereka sebagai kepemimpinan alternatif di wilayah Barat pulau Papua itu. Perjalanan belum berakhir, tetapi hasilnya telah dapat dirasakan yaitu hilangnya sentimen kesukuan yang kuno, dan lebih luas lagi, hilangnya pola pikir faksionalis yang telah mewabah dalam gerakan perlawanan mereka yang dikarenakan oleh perpecahan antara Rumkorem dan Prai. Generasi OPM selanjutnya, baik yang berada di Papua Barat dan luar negeri, telah menegaskan sebuah keputusan untuk menghindari terjadinya perseteruan internal antarkelompok, walau dengan cara itu diartikan bahwa mereka mengabaikan para pemimpin pendahulu mereka sekalipun.

Akibat adanya 10.000 orang pengungsi di PNG, Papua Barat tetap menjadi sumber pemberitaan. Sementara itu, program transmigrasi Indonesia tengah menghadapi kritik yang paling keras yang pernah mereka terima; dan para pemimpin PNG pun mulai merasa terganggu oleh Indonesia, begitu pula sebaliknya. Di pihak lain, faksi-faksi Papua Barat yang ada di Port Moresby masih terlibat dalam perseteruan melalui kolom-kolom di *Times of PNG*, sebuah terbitan yang editornya adalah Franzalbert Joku, yang lahir di Sentani, dan keluarganya termasuk pro-Pemka. Secara rutin kelompok lain mengirim *complain* ke *Times*, khususnya mereka yang berasal dari Biak, yang diwakili oleh Eli Marjen. Pada bulan Agustus 1984, Joku membuat marah pendukung OPM lainnya karena membuat klaim bahwa Mathew Mayer — yang kemudian diasingkan ke Australia — pergi ke wilayah Selatan mencari senjata. Pendapat tersebut, benar maupun salah, dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak bijaksana oleh banyak warga Papua Barat.

Beberapa orang bahkan berpikiran lebih jauh dengan mengatakan bahwa Joku, yang baru saja kembali ke Port Moresby setelah setahun belajar di Stanford University (disponsori oleh beasiswa *Reuter* untuk para wartawan), telah dipengaruhi sekutu utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat. Joku menanggapi itu semua dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menulis segala sesuatu yang belum diketahui oleh badan intelijen PNG, Australia dan bahkan mungkin Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa Joku hanya menghubungkan beberapa peristiwa yang saling terkait. Misalnya, se-

orang bekas anggota komunitas intelijen Australia (*Australian intelligence community*) yang menduga bahwa kepergian Mathew Mayer ke Australia bukanlah sebagai pengungsi ataupun pembeli senjata, tetapi karena perannya sebagai agen NIO-PNG atau JIO-Australia. Sumber tersebut mengatakan bahwa di Australia, Mayer diharapkan dapat membuat kontak dengan orang-orang Australia yang berpotensi menjadi pendukung OPM, atau bahkan menjadi pemasok senjata. Tujuan dari semua ini adalah agar dapat "mengobrak-abrik mereka". Tetapi ternyata Mayer lebih memilih untuk membelot. Pernyataan itu didasarkan pada tingkat pengetahuan mereka terhadap kasus tersebut, seperti halnya keprihatinan yang mendalam dari para pemimpin Australia, khususnya PM Bob Hawke dan Bill Hayden, terhadap perilaku Mayer.[24]

Akibat kasus Mayer tersebut adalah mundurnya salah seorang pejabat tinggi pemerintah Australia yang duduk sebagai pimpinan badan urusan pengungsi (*refugee policy body*), yang dikenal sebagai Komite penentuan status para pengungsi (*Determination of Refugee Status committee* — DORS). Pimpinan inter-departemen DORS tersebut, adalah seorang pengumpul dana dari Canberra, Bernard Collaery. Ia mengatakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena adanya tekanan politik dalam masalah pengungsi yang bisa dikatakan "sensitif" tersebut. Titik kulminasi dari semua itu adalah kasus Mathew Mayer yang oleh pemerintah setempat akan dikembalikan sesegera mungkin ke PNG, tempat di mana yang bersangkutan mempunyai izin tinggal. Desakan paling kuat muncul dari kementerian luar negeri, melalui menterinya, Mr. Hayden.

Sebenarnya, banyak hal yang memalukan atas dipublikasikannya kasus ini. Jika Mayer memang berperan sebagai mata-mata, maka mereka akan terjebak dalam perseteruan dalam persidangan mengenai status Mayer di Australia. Pembelaan penuh dilakukan oleh pengacara Mayer, dari pusat lembaga bantuan hukum di Brisbane. Hasilnya adalah putusan pengadilan federal menyatakan bahwa dokumen pemerintah mengenai kasus tersebut harus diserahkan padanya. Sampai di sini, pemerintah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan pemerintah setempat untuk menyingkirkan Mayer — yang telah mengatakan kepada media massa sebagai anggota OPM yang merasa hidupnya terancam di PNG — tidak tertolong oleh komentar Michael Somare bahwa ia akan dikembalikan ke Indonesia bila sudah tiba di PNG. Somare merasa marah oleh pernyataan Mayer bahwa ia berperan dalam wawancara kontroversial dengan pimpinan OPM James Nyaro, yang dilakukan oleh TV-ABC.

Sepanjang tahun 1984, OPM telah banyak melakukan usaha untuk mempromosikan perjuangan mereka, baik melalui perlawanan aktif terhadap Indonesia maupun melalui diplomasi di luar negeri, khususnya di wilayah Pasifik. Peran gerakan perlawanan tersebut diringkas oleh *West Papuan Observer*, sebuah jurnal kecil-kecilan yang diproduksi oleh para pelarian politik di Belanda. Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan melindungi orang-orang Papua di Irian Jaya, Wespo mengatakan:

> OPM, Organisasi Papua Merdeka, menyatu dengan mereka yang mendukung gerakan tersebut. OPM melihat bahwa kemer-

dekaan nasional sebagai satu-satunya penyelesaian nyata dan struktural bagi rakyat Papua. Hanya kemerdekaan nasional yang dapat mencegah rakyat Papua dari kehilangan tanah dan hak-hak mereka di atas tanah para leluhur mereka.[25]

4.
Surga yang Hilang

PAPUA, yang didiami oleh orang-orang Melanesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Mulai dari tanah dan air tempat mereka mendapatkan makanan, hutan yang menyediakan kayu untuk dibuat hunian, begitu pula dengan tanaman-tanaman lainnya seperti pisang, bambu dan rotan. Bahan obat-obatan tradisional juga disediakan oleh alam.

Masyarakat setempat mempunyai sistem perilaku ritual yang kompleks. Salah satu aspeknya adalah penciptaan simbol-simbol suci yang diambil dari makhluk hidup di sekitar wilayah kesukuan penduduk asli setempat. Lambang-lambang tersebut di antaranya buaya, kura-kura, ular, ikan atau yang paling sering adalah burung cendrawasih yang memang berasal dari Nugini — di kemudian hari burung-burung tersebut diburu secara besar-besaran, untuk dijadikan hiasan topi mewah para perempuan Eropa.

Upacara ritual, dan juga dalam kehidupan sehari-ha-

ri, diwarnai dengan menghias tubuh, dan alam menyediakan bahan-bahannya. Kulit kerang, bulu-bulu, bunga dan kulit kayu adalah contoh bahan yang digunakan. Lainnya adalah emas, yang bisa ditemukan di banyak tempat di pulau itu dan dijadikan ornamen. Pada abad ke 20, pandai emas tampaknya telah punah dari kebudayaan Nugini, tidak seperti di wilayah tetangga mereka, Kalimantan misalnya, yang nenek moyangnya juga mempunyai pengetahuan serupa. Tetapi pada akhir tahun 1867, seorang penjelajah Australia sekembalinya dari pulau tersebut, mencatat bahwa penduduk setempat telah memperlihatkan ornamen-ornamen yang terbuat dari emas. Menurut A.K Collins, kabar mengenai kekayaan Papua akan bahan tambang telah menyebar sampai wilayah Aborigin di bagian pantai Utara Australia. Jika ditanya mengenai emas, mereka akan menunjuk ke arah Papua dan mengatakan bahwa komoditas tersebut ditemukan dalam keadaan berlimpah ruah di sana. Collins menceritakan kisah seorang pelaut yang terdampar dan melakukan perjalanan ke daerah pedalaman pulau tersebut, di mana ia melihat bongkahan emas yang berserakan di tepi sungai "seperti kentang".

Singkat kata, tempat tersebut adalah "El Dorado" Pasifik, walaupun sangat susah dicapai. Tetapi kedatangan para pedagang Asia ke sana bukanlah untuk maksud di atas, melainkan untuk melakukan perdagangan dengan orang-orang Papua di daerah pantai. Orang-orang Eropa, yang bermaksud menguasai Papua Barat lebih tertarik untuk mencari tempat rempah-rempah ketimbang sekadar mencari kekayaan yang dikandung di wilayah tersebut. Sikap tidak

ramah penduduk Papua dan kondisi alam yang sulit ditaklukkan, menghalangi orang untuk melakukan eksplorasi sumber alam di pulau itu. Keadaan mulai berubah sejak tahun 1930, ketika seorang geolog memulai usaha untuk lebih menggali potensi kandungan mineral di wilayah Papua Barat. Pada tahun 1936, sebuah tim dari Belanda melakukan perjalanan ke daerah pedalaman dan menemukan sebuah gunung yang sangat kaya akan kandungan bijih tambang. Mereka menamai gunung tersebut Ertsberg. Lima tahun kemudian, daerah tersebut menjadi pusat pertambangan Freeport, salah satu pertambangan tembaga dan emas terbesar di dunia.

Sementara itu, selain mempelopori penemuan bijih tambang, Belanda juga berhasil menemukan ladang minyak di dekat Sorong dan memanfaatkan hasilnya pada masa sebelum pecahnya perang. Jepang juga mengincar ladang minyak tersebut, tetapi sayangnya belum mampu mengembangkannya. Sesudah masa perang, usaha perminyakan milik pemerintah kolonial Belanda dan Amerika Serikat memulai sebuah operasi intensif, di tahun 1954, sudah mempekerjakan lebih dari 5.000 orang, 441 di antaranya adalah orang Eropa. Pada masa itu, pemerintah kolonial juga mendorong dikembangkannya industri skala kecil misalnya penanaman biji-bijian, kulit buaya, penggergajian kayu dan tambak udang besar.

Di luar semua kegiatan ekonomi tersebut, Belanda telah mengeluarkan lebih banyak biaya untuk Papua dibanding dengan keuntungan finansial yang bisa diperolehnya. Pada tahun 1950, defisit anggaran yang dikeluarkan adalah

A$ 10 juta; sepuluh tahun kemudian jumlah tersebut melonjak menjadi $ 35.6 juta. Ketidakpastian politik pada saat itu membuat masalah menjadi semakin menumpuk. Kondisi tersebut berubah segera setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia, walaupun presiden Soekarno tidak suka pada kapitalis asing, dan begitu pula sebaliknya. Hanya dalam sekejap, Papua yang miskin telah berubah menjadi Papua Barat yang kaya.

Minimnya pembangunan yang dilakukan Belanda di Papua seringkali dipakai Indonesia sebagai alasan mengapa negeri itu tidak berkembang. Para menteri dan duta besar Indonesia mengeluh bahwa Papua adalah sebuah dilema yang mereka warisi dari Belanda, dan menyatakan bahwa tidak seharusnya wilayah tersebut dibandingkan dengan PNG, tempat Australia telah mengeluarkan banyak uangnya. Indonesia tidak bersedia menjelaskan kondisi politik yang sangat kontras antara PNG dan propinsi tersebut, karena dalam hal ini Belanda justru jauh lebih berhasil ketimbang Australia.

Untuk lebih memudahkan, kebijakan Indonesia di Papua Barat dapat dibagi menjadi tiga bidang utama: ekonomi dan administratif, sosio-kultural, serta penegakan hukum dan ketertiban. Jelasnya, ketiganya saling melengkapi. Program transmigrasi misalnya, mempunyai implikasi kepada ketiga bidang tersebut.

Singkatnya, sangatlah sulit untuk dapat membuat suatu kesimpulan mengenai Papua Barat, kecuali bahwa ia telah menjadi sebuah koloni internal di mana: sumber daya masyarakatnya telah dieksploitasi tanpa meminta pendapat

mereka atau tanpa adanya kompensasi, tradisi mereka dicemooh, tanah mereka dirampas dengan alasan untuk kepentingan nasional, hak-hak politik mereka diabaikan dengan alasan untuk kesatuan republik, hak asasi mereka diinjak-injak dengan alasan adanya aksi yang terorganisir. Sementara itu, dengan memakai tolok ukur yang sama, PNG telah menjadi sebuah koloni Australia yang mempunyai pemerintahan sendiri. Banyak orang Papua Barat, khususnya mereka yang tinggal di PNG, tidak puas dengan kondisi ini, tetapi berpendapat bahwa kondisi tersebut masih lebih baik daripada situasi di Papua Barat.

Kebijakan Indonesia melalui tiga bidang utama tadi telah meningkatkan perasaan benci penduduk Papua dan justru semakin menambah popularitas OPM.

Kebijakan Ekonomi dan Administratif

Ketika mundur dari wilayah Papua Barat, Belanda di satu sisi berusaha untuk menebus rasa bersalah dan di sisi lain memang benar-benar ingin membantu rakyat Papua, dengan memberi hadiah perpisahan sebesar US$ 30 juta melalui pendirian lembaga PBB untuk pembangunan Papua Barat (*United Nations for the Development of West Irian* — FUNDWI). Untuk ukuran sekarang, jumlah di atas relatif sedikit, tetapi jika didasarkan pada pendapatan per kapita, jumlah tersebut hampir mencapai dua kali lipat total bantuan luar negeri yang diterima India pada tahun 1950-67. Dana tersebut sebenarnya sudah tersedia pada tahun 1962; tetapi dibekukan sampai Indonesia bergabung kembali dengan PBB pada akhir tahun 1966.

Tahun berikutnya, Indonesia mengumumkan adanya perbaikan pada rencana pembangunan lima tahun untuk daerah Papua Barat, karena draf pertama perencanaan tersebut tidak dapat diterapkan akibat tingginya laju inflasi. 13 proyek utama direncanakan akan didanai melalui bantuan FUNDWI. Perencanaan itu ditekankan pada proyek-proyek yang justru amat kecil manfaat langsungnya terhadap mayoritas penduduk Papua. Penerbangan misalnya, direncanakan akan menghabiskan 1/3 dana dari Belanda tersebut. Item lain termasuk industri besar dan perdagangan eksport. Mereka mengabaikan sektor pertanian, hutan, kesehatan masyarakat dan industri berskala kecil. PBB menyatakan keberatan terhadap perencanaan tersebut dan hanya akan menggunakan proposal tersebut sebagai pedoman. Sebuah tim konsultan PBB, yang diketuai oleh Charles Wolf Jr. — dari *America's Rand Corporation*, berangkat ke Papua untuk bekerja sama dengan para pembuat rencana pembangunan di Indonesia. Anggota tim terkejut ketika melihat dan menyadari bahwa uang $ 30 juta itu hanya akan digunakan untuk membangun kembali aset Belanda yang telah hancur selama masa dekolonisasi. Jika program pembangunan yang layak akan dilaksanakan, paling tidak dana yang dibutuhkan akan mencapai dua kali lipat dari yang disediakan FUNDWI.

Indonesia tidak mungkin mampu melaksanakannya, selain itu komunitas dunia juga tidak ada yang tertarik. Tim PBB tersebut mengatakan bahwa dana dari Belanda tersebut hanya akan bertahan dalam waktu 3 atau 4 tahun saja, dan berharap bahwa paling tidak ada sesuatu yang dapat dica-

pai dalam kurun waktu tersebut. Sikap Indonesia tidak menyenangkan mereka. Pemerintah setempat memaksakan untuk lebih mengkonsentrasikan dana pembangunan tersebut di wilayah yang menunjukkan tingkat resistensi paling tinggi terhadap pemerintah. Manokwari dan Biak adalah dua daerah utama. Daerah-daerah pedalaman dari propinsi tersebut benar-benar diabaikan, padahal diperkirakan sekitar 320.000 orang tinggal di sana atau 30% dari keseluruhan populasi Melanesia. Kecenderungan lain dari Indonesia yang membuat para petugas asing tersebut tidak berkenan adalah pengabaian terhadap hak-hak penduduk setempat. Sebuah peringatan keras disuarakan oleh seorang antropolog Australia bernama Dr. Ron Crocombe, yang menyarankan para perencana pembangunan Indonesia untuk memastikan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan atas tindakan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki desa, seperti kayu dan perikanan laut. Jika hal itu diabaikan, ia mengingatkan, Indonesia akan menghadapi perlawanan para suku dan artinya dana FUNDWI akan menjadi sia-sia. Saran Crocomber tersebut dibuat berdasarkan pengalaman yang ia dapat di PNG.[1] Ternyata saran tersebut tidak diperhatikan.

Para konsultan tersebut akhirnya kompromi terhadap perencanaan rekannya dari Indonesia. Perencanaan tersebut meliputi alokasi untuk pengembangan sistem transport, begitu pula dengan pembangunan untuk pedesaan. Mereka membentuk *Irian Jaya Joint Development Foundation* yang bertujuan membantu pengembangan kegiatan pertanian di desa-desa Papua. Tidak seperti proyek-proyek lainnya, lem-

baga tersebut mempunyai tujuan jangka panjang. Pada tahun 1984, lembaga tersebut masih beroperasi, meskipun beberapa pengamat menulis bahwa desakan mereka akan kelangsungan hidup perekonomian dapat diartikan bahwa daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan justru akan terabaikan karena akan tersaingi oleh kelompok masyarakat yang lebih agresif dan lebih bisa mendapat hasil dari usaha tersebut.

Hasil awal dari pengoperasian dana FUNDWI bisa dilihat oleh para wartawan asing ketika Papua Barat terbuka untuk mereka, yaitu pada tahun 1969, selama masa pelaksanaan Pepera. Banyak di antara mereka yang melihat bahwa apa yang telah diraih selama ini sangatlah minim, dan merasa pesimis terhadap masa depan wilayah tersebut.

> Sebelumnya sudah bisa diduga bahwa sebagian besar dari $ 30 juta itu hanya akan terbuang percuma; pada tahap itu hasil dari keseluruhan dana FUNDWI, yang dimulai dari pelaksanaan survei pada tahun 1967, adalah 50 rumah yang dibangun sebagai tambahan terhadap 25 rumah yang sudah dibangun sebelumnya atas bantuan pemerintah. Fasilitas tersebut tergolong mewah untuk ukuran birokrat internasional, ini dapat dibandingkan dengan fasilitas yang didapat di perusahaan swasta besar.[2]

Peran serta Indonesia justru semakin menambah permasalahan. Korupsi dan inefisiensi yang melanda pegawai pemerintah sangat berdampak pada pembangunan propinsi baru tersebut. Papua dipandang sebagai "Siberia"-nya Indonesia dan para pejabat tinggi enggan ditempatkan di sana. Sementara itu, jantung kota republik ini — Jawa, yang penuh sesak — sedang disibukkan dengan perencanaan pemba-

ngunan yang dilakukan oleh pejabat terkait dengan dibantu penasehat-penasehat dari Barat. Hasilnya, orang-orang Indonesia yang memegang kedudukan di Papua adalah tentara, yang dikirim ke sana sekaligus untuk memberangus pemberontakan rakyat Papua.

Perekonomian lokal, seperti halnya daerah lain di Indonesia, sangat kacau balau dan pemerintah pusat tidak mampu untuk memulihkan keadaan tersebut sendirian. Berkaitan dengan paham pasar bebas yang dianutnya, pemerintah "Orde Baru" presiden Soeharto mengundang partisipasi pemodal swasta. Karena di Indonesia masih jarang terdapat para pemodal, pemerintah mengarahkan usahanya kepada pihak luar dengan iming-iming insentif yang menggiurkan. Termasuk di dalamnya adalah pajak atas konsesi dan hak untuk pengembalian modal. Keseluruhan strategi tersebut diformulasikan dalam rencana pembangunan lima tahun — Repelita — untuk tahun pelaksanaan 1969-74. Prospek penghasilan utama didapat dari usaha eksploitasi sumber daya alam Indonesia, yaitu kekayaan ladang minyak, kandungan mineral, cadangan kayu, pertanian dan hasil laut. Irian Jaya mempunyai hampir semua potensi tersebut. Meskipun produktivitas ladang minyak di Sorong telah menurun pada saat-saat terakhir penjajahan Belanda, tetapi ada harapan untuk bangkit kembali. Tim peneliti gabungan Indonesia-Amerika Serikat meluncurkan sebuah program baru dan segera menemukan sumber emas hitam dalam jumlah besar. Usaha perkayuan dan perikanan sudah mulai dirintis, dengan Jepang sebagai penyedia modal terbesar. Sementara itu hal yang paling menjanjikan di Papua Barat

adalah sumber mineral yang dikandungnya, yang telah diketahui oleh para leluhur penduduk Papua Barat, "ditemukan" oleh Belanda dan diincar oleh Amerika Serikat.

US Steel menaruh minat pada kandungan nikel yang terdapat di pegunungan raksasa dekat Jayapura, sementara *French Atomic Energy Agency* melakukan negosiasi terhadap tambang uranium di daerah Vogelkop. Konglomerat pertama yang masuk adalah *Freeport Sulphur Company*, yang sahamnya dimiliki oleh orang-orang Amerika Serikat.

Fokus perhatian Freeport adalah gunung setinggi 4.758 meter, yang dilihat oleh seorang navigator Belanda, Janz Cartensz dari kapalnya di laut Arafura pada tahun 1623. Tinggi puncak tersebut kira-kira berada di antara Himalaya dan Andes. Puncak gunung yang disebut sebagai "puncak Cartensz" oleh Belanda tersebut mengundang minat seorang geolog muda bernama J. J. Dozy, yang pada tahun 1936 menghabiskan waktu selama 57 hari untuk melakukan perjalanan melalui hutan belantara dan pegunungan untuk dapat mencapai dinding gunung sebelah Utara. Sesudah 6 hari, Dozy dan rekannya dari Shell Oil, A. J. Colijn menemukan sebuah sumber tembaga raksasa yang muncul di permukaan bumi dan mereka menamainya "Ertsberg", istilah Belanda untuk gunung tembaga. Karena tempatnya yang sangat terpencil dan karena Belanda berhasil dikuasai oleh tentara Jerman, akibatnya laporan Dozy tersebut sempat terkesampingkan. Daerah tersebut ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1959, setelah itu kandungan mineral yang ditemukan dikirim kepada Freeport Sulphur — yang memastikan bahwa yang terdapat dalam sumber raksasa tersebut adalah tembaga.

Pada tahun 1963, Freeport melakukan negosiasi untuk mendapat konsesi terhadap ladang tembaga tersebut, dan pada tahun 1969 — tahun dilaksanakannya Pepera — tanpa sengaja diketahui bahwa biji tambang tersebut tercampur dengan kandungan emas sebesar 2.5%, sebagaimana umumnya sering terdapat selama ini. Awal pengoperasian pertambangan besar ini hanya mendapat pemberitaan sedikit di *Wall Street Journal* tanggal 12 Agustus 1969, dikatakan bahwa Freeport telah mencapai kesepakatan dengan sebuah perusahaan peleburan Jepang yang bersedia membeli sebagian besar tembaga yang dihasilkan, dalam bentuk padat. Perusahaan lokalnya bernama Freeport Indonesia Inc. Karena berminat untuk mendapatkan pasokan logam secara rutin, Jepang bersedia menyepakati bantuan untuk perusahaan pertambangan itu sebesar US$ 20 juta, sebagaimana tercantum dalam *Letter of Intent* yang mereka tandatangani bersama.

Fase tiga tahun pembangunan Freeport dimulai pada tahun berikutnya dan menelan biaya sebesar $ 160 juta. Pusat penambangan tersebut, terletak pada ketinggian 3.713 meter, dibangun untuk jangka 30-40 tahun. Untuk mendukung konstruksi pertambangan, dibangun sebuah kota yang dinamakan Tembagapura (kota tembaga), untuk menampung para pekerjanya. Tenaga ahli untuk teknisi biasanya dipegang oleh orang Amerika, para pekerja konstruksi terlatih didatangkan dari Filipina dan Korea Selatan. Meskipun pada awalnya ada beberapa ratus penduduk lokal bekerja di sana sebagai tenaga kasar, tapi jumlah tersebut turun menjadi hanya 40 orang pada tahap akhir konstruksi. Upah

yang diterima oleh sebagian besar orang Papua tersebut adalah sekitar US$ 10 cent per jam, mereka dibayar ala kadarnya sebagaimana permintaan pemerintah.

Upacara peresmian Freeport dihadiri oleh presiden Soeharto, yang pada kesempatan itu menyatakan kegembiraannya karena Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai kepentingan dari luar (Indonesia memperoleh 15% dari keuntungan perusahaan tersebut). Pengoperasian penambangan tersebut dimulai, dengan fasilitas *tax holiday* atau masa bebas pajak selama tiga tahun yang di kemudian hari diperkirakan telah meringankan beban Freeport sebesar antara $ 15 juta dan $ 20 juta. Sebagai tambahan, Freeport tidak diminta untuk membayar sewa tanah atau royalti kepada penduduk setempat, serta tidak mempunyai kewajiban khusus untuk membangun daerah setempat khususnya dan propinsi tersebut pada umumnya.

Berapa jumlah pendapatan Freeport Indonesia tidak pernah diungkap, mungkin karena proyek pertambangan tersebut telah mengundang banyak kritik. Bagaimanapun, jumlah *gross sales* yang dicapai dalam masa tiga kali triwulan pertama di tahun 1980 menunjukkan angka US$ 122.973.000,- dengan pajak penghasilan bagi pemerintah Indonesia sebesar US$ 22 juta. Pada tahun 1983 kandungan biji besi gunung Ertsberg mulai menipis dan pengoperasian dipindahkan ke gunung Biji Timur yang letaknya berdekatan dengan Ertsberg. Dari sana, total yang diperoleh dari tembaga sebesar US$ 125 juta, emas $ 27 juta dan perak $ 11 juta. Memasuki tahun 1980-an, aktivitas perusahaan tersebut dapat dikatakan masih tergolong tinggi, dengan karyawan yang

bervariasi mulai dari Eropa, Asia dan Indonesia, serta beberapa Melanesia. Presiden Direktur perusahaan tersebut adalah Ali Budiardjo, seorang pensiunan ABRI.

Sejumlah warga asing yang terlibat dengan Freeport melontarkan kritik terhadap proyek tersebut. Salah satunya adalah Robert Mitton, seorang geolog Australia yang telah menghabiskan waktu selama tujuh tahun di Papua Barat. Sebenarnya yang dikritik Mitton bukanlah pertambangan itu sendiri. Dalam salah satu *diary* yang diterbitkan setelah kematiannya, ia mencatat bahwa "secara intelektual" keliru bila dari sudut tertentu kita mengatakan bahwa perusahaan pertambangan adalah suatu tindak kejahatan. Tetapi jika sebuah negara seperti Indonesia berkeinginan agar perekonomiannya tetap hidup maka ia harus memungut penghasilan dari pertambangan itu. Bagaimanapun ia merasa marah dengan apa yang telah terjadi di Freeport, dan mengungkapkan perasaan tersebut dalam sebuah seminar tingkat tinggi mengenai pembangunan di wilayah tetangga, PNG:

> Hubungan sosial dan ekonomi Freeport dengan Irian Jaya menunjukkan catatan yang buruk. Motif untuk mendapatkan keuntungan semata, dan kebijakan pemerintah yang serba dari pusat menghasilkan sebuah situasi klasik dari eksploitasi kolonial. ... satu-satunya pihak luar yang memahami bahasa dan budaya Damal (penduduk setempat) secara detail adalah para misionaris protestan. Karena sejak awal tidak ada kerjasama, Freeport cenderung mengabaikan mereka. Penduduk sendiri tidak mempunyai juru bicara. Para pemimpin di Irian yang terpilih untuk mewakili daerah tertentu melalui Pepera pada tahun 1969, tidak mempunyai pengaruh atau kekuatan politik apa pun bahkan untuk mewakili protes masyarakat: peran dan pernyataan politik yang mereka lakukan tidak ada artinya

jika di luar fungsi, yaitu untuk memberikan pembenaran atas masuknya Irian Jaya secara permanen ke dalam republik Indonesia. Meskipun kepemilikan terhadap tanah tradisional diatur dalam hukum adat Indonesia, tetapi hak terhadap sumber alam yang lebih luas, yang merupakan hal pokok dalam masyarakat berburu dan bertani, tidak diatur di dalamnya. Akibatnya, ketika pertanyaan mengenai pembayaran atas tanah muncul, penyelesaian yang diambil adalah hanya dari sisi kerusakan yang ditimbulkan terhadap sawah ladang. Desa Waa, yang berada dekat area di mana kota tersebut dibangun, adalah contoh kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi hanya memperoleh kompensasi yang sangat minim.

Freeport mengabaikan nilai moral dari tindakan pemerintah dan menganggap semua itu sebagai kekuasaan penuh untuk kepentingan pembangunan. Karena jauh dari kritik, mereka bisa melaksanakan proyek itu tanpa adanya studi dampak lingkungan dan pembangunan sosial ... Kurangnya perhatian Freeport terhadap kebijakan yang menyangkut penduduk lokal kurang lebihnya dapat diibaratkan dengan istilah "jika kita mengabaikan mereka, maka mereka akan pergi menjauh". Bagaimanapun penduduk Waa dan Tsinga tidak mempunyai keinginan untuk pindah dari tempat itu, dan keberadaan pertambangan tersebut secara tidak langsung mengundang minat penduduk dari daerah pedalaman lainnya. Kehadiran perusahaan yang awalnya disambut dengan antusias, akhirnya berubah menjadi ketidaksenangan ...[3]

Mitton mengatakan bahwa reaksi Indonesia terhadap situasi itu adalah memperkuat pos-pos militer dan polisi di wilayah tersebut. Jarak pos-pos itu tidak jauh dari tempat terjadinya sabotase yang dilakukan penduduk Papua terhadap saluran pipa yang menyalurkan sejumlah besar biji tambang ke pantai. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, aksi tersebut melibatkan seorang perencana aksi OPM yang ulung, Otto

Ondowame.

Seorang pilot, Terry Doyle, yang karyawan Freeport melihat bahwa para pemilik tanah tradisional telah dibohongi. Tapi ia lebih mempersalahkan pihak penguasa, yang bahkan turut mendikte kebijakan terhadap pegawai di perusahaan itu.

> Meski karyawannya telah mencapai jumlah 3.000-an orang, Freeport masih diharuskan untuk mempekerjakan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, 300 orang dari Menado, 300 dari Ujung Pandang, dan 2.899 dari Jawa .... Penduduk asli setempat yang miskin tidak mendapat perhatian sama sekali, dan situasi yang dibuat tidak menyenangkan bagi mereka, menyebabkan mereka tidak betah bekerja di sana. Sepanjang yang saya tahu, orang-orang Melanesia membenci semua yang terjadi di sana dan berharap semua akan segera berakhir.[4]

Bahwa perasaan kebencian tersebut tetap tidak berubah sampai pada tahun 1983, disadari oleh seorang eksekutif perusahaan pertambangan Australia yang berkunjung ke area tersebut, yang pada saat kunjungannya melihat tentara bersenjata sedang duduk di mesin milik Freeport.

Metode pendirian dan pengoperasian Freeport dapat dibandingkan dengan dua proyek pertambangan sejenis di PNG. Deposit tembaga dan emas yang berjumlah banyak di pulau Bougainville dan di pegunungan Star, yang terletak di dekat perbatasan, terbentuk oleh lengkungan piring tektonik yang sama dengan yang membentuk gunung Ertzberg. Lapisan pembentuk tersebut mempunyai kandungan dan kuantitas yang sama. Tanah di mana lokasi pertambangan tersebut berada juga sama-sama berada dalam kepemilikan

tradisional penduduk desa Melanesia.

Dalam kasus Bougainville, pemerintah PNG-Australia dan perusahaan bernama BCL memutuskan untuk mengambil tanah penduduk setempat, tetapi mereka membayar kompensasi kepada penduduk desa dan menjamin keikutsertaan mereka dalam pembangunan wilayah setempat. Tetapi, "pembagian keuntungan" kepada Solomon Utara dipandang oleh penduduk wilayah Bougainville, yang banyak di antara mereka berpendidikan tinggi dan mempunyai kesadaran politik, sebagai kesepakatan yang tidak menguntungkan. Pada bulan September 1975, sesaat sebelum kemerdekaan PNG, mereka mencoba untuk memisahkan diri. Mereka menyatakan bahwa mereka dapat mandiri secara ekonomi. Pada tahun sebelumnya, penghasilan pemerintah dari pertambangan tersebut mencapai K 90 juta: proyeksi rata-rata pendapatan per tahun adalah K 60 juta. Perselisihan tersebut berakhir pada tahun berikutnya. Hasilnya adalah alokasi yang lebih besar untuk pembangunan daerah setempat, termasuk pendirian sebuah usaha khusus pada tingkat propinsi. Aspek lain yang terdapat dalam pengoperasian pertambangan ini adalah terbentuknya serikat buruh yang kuat, satu hal yang bahkan tidak pernah terpikir dalam proyek Freeport. Selain itu mereka juga menerbitkan saham yang bisa dimiliki publik.

Contoh lainnya di PNG adalah proyek Ok Tedi — sebuah gunung yang tembaga dan emasnya diketemukan secara tak sengaja oleh seorang petugas Kiap, yang tersandung batu berharga tersebut saat berpatroli. Kisah rumit mengenai area gunung Fubilan yang akhirnya menjadi sebuah pertam-

bangan dengan investasi sebesar US$ 1.000 juta, diceritakan dengan lengkap oleh Richard Jackson dalam bukunya yang berjudul *Ok Tedi: The Pot of Gold.* Ada perbedaan yang sangat tajam antara proyek ini dengan Freeport. Yang pertama adalah bahwa pemerintah PNG segera meminta 20% pembagian keuntungan dari proyek tersebut, dan selanjutnya setelah berbagai pertimbangan mencari pinjaman ke pasar uang internasional. Sepanjang pengoperasian pertambangan itu, penerimaan yang berasal dari deviden saham dan pajak mencapai US$ 4 miliar. Dari sini, sejumlah US$ 120 juta dialokasikan untuk pembangunan propinsi wilayah Barat yang miskin. Walaupun para politisi di wilayah Barat tersebut mengritik bahwa pembagian yang ada tidak cukup, toh masih jauh lebih baik dibanding situasi di Freeport.

Dalam proyek ini tidak ada usaha penyitaan tanah untuk kepentingan pertambangan. Para pemilik tanah tradisional di Ok Tedi dan daerah sekitarnya didekati oleh pemerintah dan diminta untuk bekerja sama. Walaupun tidak memungkinkan bagi penduduk untuk menghentikan proyek tersebut — karena penemuan tersebut dianggap sebagai jawaban atas doa yang dipanjatkan rakyat PNG selama ini — tetapi pemerintah melakukan pendekatan dengan sopan dan menjelaskan mengenai proyek tersebut dengan semestinya. Perlengkapan video dibawa ke tempat itu sehingga mereka dapat membayangkan seperti apa nantinya pengoperasian proyek tambang tersebut. Tak seorang pun berharap penduduk akan lari ketakutan ketika pertama kali mereka melihat raungan buldozer. Selain itu pemerintah juga melengkapi diri dengan studi dampak lingkungan,

yang menekankan pada bermacam-macam segi dari alam yang akan dilindungi. Hal ini juga dijelaskan kepada para pemimpin dari Min, Ningerum, Awin, Yonggom dan Suki yang total masyarakatnya berjumlah 9.000 orang.

Pada akhir tahun 1981, sebuah perjanjian mengenai kompensasi yang terdiri dari lima elemen disepakati antara *Ok Tedi Mining Limited* dan penduduk desa setempat. Dengan didasarkan pada level pembayaran tanah per hektar per tahun yang bervariasi, sesuai dengan penggunaan tanahnya dan setoran ke dalam dana perwalian yang menggunakan pendekatan serupa, perjanjian tersebut menjamin jumlah minimum yang akan diterima sebesar K 320.000,- per tahun, tidak termasuk royalti. Ini terjadi pada pertengahan tahun 1980-an. Selanjutnya, pembayaran tersebut akan disesuaikan dengan laju inflasi. Muncul beberapa protes terhadap rencana tersebut, khususnya mereka yang tinggal tepat di area pertambangan di Kiunga/Telefomin. Mereka merasa berhak untuk mendapat perlakuan khusus: apabila mereka bisa mempunyai kemampuan yang sama dengan karyawan lain, maka merekalah yang lebih diprioritaskan. Karena sebagian dari mereka mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja di bidang konstruksi dan pertambangan, maka permintaan tersebut tampaknya masuk akal. Pada awal tahun 1983, pada saat proyek tersebut mencapai tahap konstruksi dan *Bechtel company* — yang juga merancang konstruksi untuk Freeport- sedang melakukan pelatihan mempekerjakan sejumlah penduduk setempat, penduduk desa melakukan protes dengan meletakkan semacam jala di landasan terbang darurat Kiu-

nga. Mereka memblokade landasan tersebut dengan drum-drum bahan bakar dan menolak segala cara damai untuk bisa membubarkan mereka. Yang mereka minta hanyalah pekerjaan, tetapi seperti sudah dikatakan oleh menteri pertambangan PNG kepada penulis, bahwa tidak ada pekerjaan bagi mereka. Sementara itu Bechtel telah mengalami penundaan, yang di antaranya disebabkan oleh mereka sendiri, dan tidak bersedia untuk mendukung program pelatihan yang tidak ada dalam kontrak. Sebenarnya, pemerintah memang telah merencanakan untuk menyelesaikan krisis tersebut sebelumnya, jadi bukan dikarenakan oleh ancaman para pemimpin lokal yang akan meminta bantuan gerilyawan OPM.

Setelah itu Ok Tedi menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan terutama limbah toksik yang berbahaya. Beberapa orang mengatakan jika hubungan antara PNG dan Indonesia memburuk maka Jakarta bisa saja membatasi arus lalu lintas kapal yang mengangkut biji tambang dari Ok Tedi di sepanjang sungai Terbang — yang merupakan batas internasional.

Sementara itu di Indonesia, dalam kurun pelaksanaan Pelita pertama, pemerintah telah meluncurkan proyek-proyek pertambangan lainnya. Sejumlah pihak yang berkepentingan dari luar negeri telah berhasil mendapatkan lokasi tambang tembaga dan emas, timah, nikel, kobalt, perak, minyak bumi dan sekarang gas alam, dalam jumlah yang menjanjikan keuntungan. Tahun 1980, ketika Repelita-3 telah dimulai, Departemen Keuangan Indonesia mengestimasikan penghasilan negara sejumlah US$ 1.938 juta dari keuntung-

an usaha pertambangan di Papua Barat. Jumlah ini sama dengan 25 kali lipat angaran belanja daerah Papua.

Penduduk setempat memprotesnya. Tapi, berbagai petisi dan surat protes yang dikirim penduduk tidak pernah digubris oleh para penguasa. Pada bulan Mei 1980, penduduk desa di sekitar Freeport mengirim daftar keluhan mereka kepada gubernur Papua untuk meminta bantuannya.[5] Tidak ada tindakan yang diambil. Empat bulan kemudian majalah Tempo memberitakan mengenai pengusiran secara paksa para penduduk dari pondok yang mereka bangun di pinggiran kota "Tembagapura". Mereka dipindahkan ke dataran rendah Timika. Tempo menulis bahwa penduduk merasa sakit hati dan tidak senang dengan pemindahan itu. Sementara itu, laporan resmi dari pihak berwenang menyebutkan bahwa berbagai penyakit, khususnya malaria, telah menyebar di perkampungan baru itu. Dari sumber lokal, *Tempo* menyatakan bahwa wabah tersebut telah menelan korban 216 anak-anak tewas, yang artinya lebih dari 20% jumlah anak-anak secara keseluruhan. Tetapi keadaan tidak juga berubah. Di tempat itu, Freeport terus melanjutkan bisnisnya yang sangat menguntungkan, dan setiap bulan memberikan jutaan dolar kepada pemerintah.

OPM seringkali mengeluhkan eksploitasi terhadap kekayaan alam Papua, baik di depan publik maupun melalui surat-menyurat internal mereka. Dalam konteks ini, aksi menentang bisnis yang dimiliki pihak asing bisa dimaklumi. Pada bulan November 1981, selama masa penculikan para sandera dari perusahaan perkayuan Holtekang — yang dijalankan oleh pengusaha Malaysia — para pemimpin OPM

mengkritik presiden Soeharto karena mengijinkan pihak asing mengeksploitasi sumber daya alam Papua. Mereka berpendapat bahwa aksi kekerasan adalah satu-satunya pilihan bagi mereka. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu surat mereka, "Tujuan kami adalah mengusir semua pengusaha asing dari negeri kami, termasuk dari Indonesia".

Contoh yang paling jelas adalah eksploitasi kayu "yang keterlaluan" yang terjadi di area berawa-rawa di wilayah Asmat, di pantai Selatan. Di sinilah Michael Rockfeller menghabiskan sebagian besar waktunya di Papua, untuk mengoleksi ukiran kayu penduduk Asmat yang sangat indah, dan pada akhirnya meninggal karena mengabaikan nasihat dari para pendayung perahu setempat. Pedalaman Asmat kaya akan berbagai jenis kayu, khususnya kayu besi yang harganya sangat mahal dan sangat cocok untuk kayu rel kereta api dan dermaga. Sejak awal tahun 1970-an, petugas militer Indonesia mengorganisir penduduk setempat dalam sebuah tim *logging*. Berawal dari hulu, mereka menebang pohon dengan menggunakan cara tradisional, lalu mengangkutnya ke hilir, lalu batang-batang kayu yang berat tersebut diikat di antara sampan-sampan. Pekerjaan berat tersebut dikatakan oleh para mandor pekerjaan itu sebagai "kerja bakti", sebuah istilah yang menyatakan bahwa penduduk desa melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela, jadi tidak mengharapkan bayaran yang semestinya. Ketidaksukaan orang Asmat terhadap sistem tersebut dipublikasikan secara rinci di harian *Kompas* pada tahun 1982. Kritik lainnya dilontarkan oleh seorang uskup Katolik asal Amerika dari daerah itu, dan seorang editor sebuah jurnal di Jayapura, *Tifa Irian*.

Editor tersebut pernah pergi ke Asmat dan menemukan penduduk sedang dicambuk dan dipukuli oleh tentara serta diintimidasi dengan senjata api.[6]

Dr. Malcolm Walker, seorang antropolog Australia yang menghabiskan waktu dua tahun di Papua untuk sebuah proyek UNESCO menggambarkan keterlibatan tentara dan polisi dalam bisnis kayu besi Asmat sebagai "eksploitasi yang sebenarnya". Ia mengatakan bahwa pekerjaan tersebut termasuk berat dan berbahaya, sementara pembayaran yang mereka terima berupa barang tidak berharga: para petugas dari Indonesia memberi ember plastik, sarung, tembakau, buku dan pensil sebagai pembayaran untuk kayu gelondongan. Kadang-kadang pekerjaan tersebut dinegosiasikan melalui pedagang keturunan Cina setempat. Walker menyatakan bahwa metode seperti itu tidak hanya terjadi di wilayah pantai Selatan, tetapi juga di tempat lain. Pada tahun 1975, sebagian besar pohon di hutan sekitar lembah Baliem ditebang untuk keperluan proyek pembangunan pemerintah di ibu kota Wamena. Ia menambahkan bahwa penebangan tersebut adalah "pekerjaan polisi" dan bertentangan dengan keinginan masyarakat Ndani (*Pasific Islands Monthly*, Januari 1975).

Beberapa pengamat lain juga prihatin terhadap kondisi lingkungan hidup. Papua Barat, yang 75% wilayahnya adalah hutan belantara, tampaknya tidak bisa menghindar dari kebijakan pemerintah Indonesia yang mengeksploitasi hasil hutan di luar Jawa secara besar-besaran, dan perusakan lingkungan itu justru dinyatakan sebagai sarana melakukan perubahan sosial. Kebijakan tersebut mencakup rencana

membuka hutan dengan alat-alat berat, kemudian ditanami kembali dengan pohon-pohon hutan tropis yang bisa tumbuh cepat. Pemilihan jenis ini dimaksudkan agar rotasi produksi selulosa dapat dipercepat. Cara ini dimaksudkan oleh para perencana pembangunan sebagai sebuah usaha untuk memanfaatkan tanah yang tidak produktif agar menjadi bernilai ekonomis (paper berjudul *Destructive Policy*, oleh R. and V. Routley). Khusus untuk Papua, pola ini dapat memberikan keuntungan lain. Pembabatan juga dapat dilakukan untuk hutan tempat berlindung para gerilyawan OPM atau para pendukung mereka. Meskipun demikian, hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni, di Papua disambut dengan sangat antusias oleh lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, industri perkayuan tidak bisa menyediakan lapangan kerja secara luas kepada penduduk sekitarnya. Kamp-kamp tempat pemrosesan kayu yang ada biasanya diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Papua. Sebagian besar kayu tersebut diekspor dalam bentuk lembaran atau kayu mentah.

Penduduk setempat juga tidak senang dengan cara pengelolaan sumber-sumber perikanan. Baik pantai Utara, maupun Selatan di wilayah itu kaya akan sumber daya kelautan. Perairan dalam yang terletak di antara Jayapura dan Sorong kaya akan ikan jenis tuna, sementara laut dangkal Arafura merupakan habitat sejenis udang besar. Beberapa analis menyebut teluk tersebut sebagai habitat udang terbesar di dunia. Sementara, pihak asing yang mengelola perairan di wilayah itu hanya memberikan kompensasi yang

sangat minim.

Sebagian besar modal asing berasal dari Jepang, walaupun begitu kritik paling tajam juga berasal dari sana. Pada tahun 1984, sekelompok peneliti dari Jepang membuat laporan rinci mengenai dampak industri perikanan para pengusaha dari negara mereka terhadap wilayah Asia Pasifik. Mereka menggarisbawahi bahwa:

> Kehadiran perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri (khususnya Jepang), yang bermodal besar dan berteknologi modern, terbukti telah memperberat beban kehidupan para nelayan tradisional yang sebelumnya sudah terasa sulit. Penangkapan ikan dalam jumlah besar dengan menggunakan pukat yang dilakukan oleh pihak tertentu, untuk kemudian dijadikan sektor industri di darat adalah penyebab munculnya masalah itu .... Sebagaimana dikatakan oleh seorang manager dari CEJAMP — Jepang (*Sumitomo Shoji's Joint Venture in Indonesia*), "Jika udang sudah tidak ada lagi, maka artinya usaha ini akan berhenti, karena kami tidak bisa hidup tanpa makan udang". Perkataan tersebut terus terngiang di telinga kami.[7]

Perusahaan terbesar dari Jepang yang mengelola usaha perikanan di propinsi tersebut adalah PT West Irian Fishing Industries (WIFI), dengan investasi sebesar US$ 6.5 juta. Meskipun WIFI telah berusaha untuk meningkatkan jumlah kepemilikan Indonesia di perusahaan tersebut, dari 10% menjadi 44% pada tahun 1978, tetapi diduga bahwa saham tersebut atas dasar hutang kepada Jepang, yang lebih merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik. Pada tahun 1978, penjualan WIFI mencapai jumlah tertinggi yaitu US$ 6 juta, diperoleh dari hasil ekspor udang beku ke Jepang

yang dikirim dengan kapal pendingin, baik milik perusahaan itu sendiri ataupun carteran. Sementara itu rakyat Papua diabaikan dalam hal pembagian keuntungan.

Seperti halnya dalam industri perkayuan, industri ini pun tidak banyak menyerap tenaga kerja penduduk setempat, padahal seharusnya sangat memungkinkan untuk itu. Beberapa perusahaan Jepang yang menjalankan usaha perikanan tuna sebenarnya bisa melakukan pelatihan mengenai teknik-teknik usaha perikanan tersebut kepada penduduk setempat, dengan harapan mereka dapat membuka usaha sendiri di masa mendatang. Tetapi tidak ada yang melakukannya. Sejumlah kecil orang Papua hanya dipekerjakan pada bidang yang tidak membutuhkan keterampilan. Kondisi seperti ini juga berlaku untuk bidang industri lain, termasuk dalam industri yang paling menguntungkan, yaitu perminyakan.

Situasi yang selama ini berjalan di Papua telah mengejutkan beberapa pengamat. Pada tahun 1974, ekonom Ross Garnaut memperkirakan bahwa:

> Dalam kurun waktu sepuluh tahun, Irian Jaya telah memberikan kontribusi penghasilan yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Tetapi penduduk asli setempat hanya memperoleh sejumlah kecil keuntungan dari hasil pembangunan ... Industri-industri baru yang menggunakan bahan baku dari alam akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar ... tetapi sebagian besar kesempatan itu diambil oleh para pendatang dari wilayah lain di Indonesia.[8]

Rakyat Papua khususnya mengharapkan agar pendapatan yang berasal dari propinsi mereka digunakan untuk hal-

hal penting seperti pelayanan kesehatan masyarakat. Pada akhir tahun 1984, sebagaimana diberitakan oleh media massa Indonesia, kelaparan melanda daerah itu. Antara bulan Agustus sampai November 1984, sekitar 500 orang meninggal di Kurima akibat penyakit busung lapar. Wabah penyakit lainnya seperti typhoid, cholera dan malaria juga melanda daerah itu. Sebenarnya bisa saja wabah itu bisa ditekan bila ada dana yang cukup.

Hal yang paling kontroversial dari semua permasalahan di atas adalah menyangkut soal tanah. Pengambilalihan tanah-tanah ulayat suku-suku setempat yang digunakan untuk berbagai proyek telah menimbulkan kemarahan; seperti halnya kemarahan terhadap program transmigrasi.

Sebenarnya ide mengenai "transmigrasi" muncul pada akhir abad 20, pada masa penjajahan Belanda. Karena kekhawatiran akan tingginya tingkat populasi di Jawa — yang tentu saja sangat kecil dibanding dengan jumlah sekarang — pemerintah kolonial mengirim sejumlah petani ke daerah yang masih jarang penduduknya, yaitu Sumatera. Pada tahun 1936, didorong adanya kekhawatiran terhadap infiltrasi Indonesia, mereka mengirim rombongan transmigran pertama ke Papua. Sebagian besar adalah para buruh dari Jawa yang akan dipekerjakan di perkebunan kopra dekat Merauke. Para pendatang lainnya termasuk orang-orang Indo-Eropa yang masih loyal terhadap pemerintahan kolonial, dan mereka menetap di daerah pertanian di sekitar Fak-Fak dan Merauke.

Di era pemerintahan Indonesia yang sudah maju, program tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Li-

ma Tahun (REPELITA), yang dicanangkan pada tahun 1969. Perlu dicatat bahwa di Jawa pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata lebih dari 2% per tahun. Akibatnya sektor pertanian dan industri untuk dapat menyerap tenaga kerja semakin terbatas. Pada saat itu, program keluarga berencana diperkenalkan dengan tujuan jangka panjang menekan pertumbuhan penduduk. Sementara itu program jangka pendek untuk mengatasi masalah itu adalah dengan "mentransmigrasikan" sebagian besar penduduk miskin dari Jawa, agar tersedia lebih banyak ruang bernapas. Dua keuntungan lain yang bisa diraih dari program ini adalah memperbaiki tingkat kehidupan para petani dan membantu meningkatkan pembangunan di luar Jawa. Transmigran dari Jawa tersebut dibekali ketrampilan yang lebih — jadi bukan hanya berbeda — dibanding orang-orang Melanesia. Sebelumnya, 18 dari 26 jumlah propinsi di Indonesia direncanakan sebagai daerah penerima transmigran (pada tahun 1985, Timor Timur yang merupakan propinsi ke-27 juga dimasukkan di dalamnya). Investasi pemerintah dalam proyek transmigrasi di 11 propinsi merupakan anggaran pembangunan yang terbesar. Untuk daerah Papua, pada tahun 1978/79, biaya untuk program sosial melebihi anggaran sampai sekitar 2000%.

Target pada Repelita 1 adalah penempatan 181.700 orang; dan 60 %-nya dikirim ke Sumatera, yang selanjutnya terus digunakan sebagai daerah tujuan dalam dua kali Repelita berikutnya, walaupun targetnya meningkat dalam jumlah besar. Dari tahun 1979-84, Indonesia berharap dapat memindahkan lebih dari 2 juta penduduk. Pada awalnya, Papua Barat di-

abaikan, meskipun selanjutnya pada Repelita ketiga persentasenya menjadi 7%. Selanjutnya, pada Repelita-4, 1984-1989, Papua ditetapkan menerima 20% dari jumlah yang dicanangkan sebagai target nasional, yaitu 5 juta orang.

Kebijakan keluarga berencana dan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia disambut baik oleh lembaga-lembaga internasional dan lembaga dana dari luar negeri. Kebanyakan mereka memandang dari sisi permasalahan populasi yang sudah mencapai "krisis". World Bank muncul sebagai pendukung utama program transmigrasi dan menjadi penyokong dana terbesar. Sementara itu, banyak ahli pembangunan yang berpendapat bahwa program tersebut didasarkan pada "alasan yang mengada-ada". Mereka membantah dengan mengatakan bahwa Jawa, seperti juga banyak bagian dunia lain yang "kelebihan penduduk", sebenarnya tidak mendapat masalah dari keadaan "terlalu banyak penduduk" dan "terlalu sedikit lahan pertanian", karena

> Hubungan antara keinginan memiliki tanah, tidak ada kaitannya dengan kuantitas; Keinginan ini sangat sedikit kaitannya dengan jumlah tanah, tetapi lebih terkait dengan siapa yang berkuasa atas tanah tersebut. Siapa yang berkuasa atas tanah akan menentukan bagaimana tanah tersebut digunakan, dan juga siapa yang akan mengambil hasil dari tanah tersebut ... Jadi sebenarnya, bukan luas tanah ataupun tingkat pertumbuhan penduduk di negara itu yang menyebabkan kelaparan. Rasa lapar maupun pertumbuhan penduduk yang cepat adalah gejala dari penyakit yang sama, yaitu rasa tidak aman dan kemiskinan yang diakibatkan oleh monopoli terhadap sumber produktifitas nasional oleh sebagian kecil orang.[9]

Secara implisit argumen di atas menyatakan bahwa yang

diperlukan sebenarnya adalah perubahan politik. Tidak mengherankan bila pendapat itu diabaikan oleh pengambil kebijakan dalam pemerintahan orde baru. Bila usul tersebut direalisasikan, berarti akan ada restrukturisasi secara radikal dalam masyarakat Indonesia, sebuah kebijakan yang tidak saja akan mempengaruhi kepentingan kelompok mereka, tetapi dalam banyak hal juga akan mempengaruhi keuntungan pribadi mereka. Validitas program transmigrasi tidak saja dipertanyakan oleh para pengamat asing, tetapi juga oleh seorang ekolog terkenal dari Indonesia, yaitu Prof. Otto Soemarwoto. Ia memprediksikan bahwa program tersebut akan tetap menjadi proyek yang "tidak ada gunanya" kecuali mengurangi densitas populasi di Jawa. Ia menambahkan bahwa segala usaha untuk meningkatkan jumlah penduduk yang akan ditransmigrasikan justru akan membebani pemerintah yang tidak mampu dalam hal penyediaan anggaran, bantuan logistik dan juga persyaratan infrastruktur lainnya.

Tetapi tetap saja transmigrasi dipaksakan untuk dijalankan. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan program tersebut adalah cara mendorong orang Jawa agar mau meninggalkan tempat kelahiran mereka, selain faktor kemiskinan mereka serta janji-janji utopis oleh pemerintah. Ada sebuah peribahasa berlaku bagi orang Jawa, "Biar hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri". Pada tahun-tahun awal dilaksanakannya program ini, masih terdapat banyak kekurangsiapan pemerintah. Kelompok masyarakat yang dijadikan target untuk ditransmigrasikan terkadang dipaksa dengan ancaman senjata agar bersedia meninggalkan tempat mereka. Ma-

jalah *Time* menulis bahwa para transmigran telah dikirim secara paksa, ditempatkan di lokasi yang terpencil atau bahkan di hutan yang banyak nyamuk malarianya dengan hanya dibekali kapak, serta dibebani oleh desakan pemerintah agar mereka menanam padi. Sebagian besar perjalanan mereka ditempuh dengan kapal yang sangat lambat, panas dan sesak. Pada saat tiba di tempat yang baru, banyak di antaranya yang sudah kehilangan semangat untuk memperbaharui hidupnya. Mereka membelot, kembali ke Jawa dan pergi ke kota-kota besar, khususnya Jakarta, dan menjadi gelandangan di perkotaan.

Departemen Transmigrasi Indonesia mulai mendata permasalahan terparah yang ada dalam program tersebut dan mencari lebih banyak dana bantuan dari luar negeri. Selanjutnya, para transmigran mulai dikirim ke daerah tujuan dengan menggunakan angkutan udara. Jenis angkutan udara yang digunakan adalah pesawat Hercules, milik perusahaan Lockheed. Sesuai dengan slogan promosi perusahaan itu, "alat pengangkut besar untuk transmigrasi terbesar di bumi". Ditambahkan bahwa perjalanan berat selama seminggu sekarang bisa ditempuh dalam waktu dua jam dengan Hercules ber-AC. Karena Hercules, rakyat Indonesia dapat segera menempati rumah mereka yang baru pada hari yang sama dengan saat meninggalkan Jawa. ("Skandal Lockheed" ini menjadi pembicaraan dalam acara dengar pendapat senat Amerika Serikat karena campur tangan presiden Soeharto secara pribadi yang meminta supaya Lockheed Agency di Indonesia dapat dikelola oleh perusahaan milik sanak keluarganya.)

Sementara itu pemerintah terpaku pada segala usaha untuk dapat memindahkan penduduk dengan cara lebih nyaman, dan cenderung kurang menaruh perhatian terhadap kondisi di tempat pemukiman yang baru. Kondisi area transmigrasi merupakan masalah yang utama, karena banyak desa transmigran yang mudah terserang kemarau panjang atau banjir. Tetapi hal terburuk yang selama ini tidak terpikirkan adalah "perasaan tidak suka" dari penduduk setempat. Sejak tahun 1970-an, kasus pertama yang muncul berkaitan rasa tidak suka penduduk asli tempat dilaksanakannya program itu terjadi. Misalnya saja di Lampung, Sumatera Selatan. Penduduk setempat melakukan protes ke Jakarta berkaitan dengan besarnya arus transmigran ke daerah mereka. Karena protes yang dilancarkan cukup keras, maka pemerintah sepakat untuk mengurangi quota secara drastis. Nampaknya perasaan yang muncul dari sesama bangsa Asia lebih diperhatikan, sementara keberatan serupa yang muncul dari orang Melanesia — daerah yang dipilih untuk menampung "surplus penduduk" yang tidak diinginkan — tetap diabaikan sampai tahun 1984, ketika pemerintah mulai menyadari bahwa program transmigrasi telah menimbulkan kemarahan orang Papua dan justru meningkatkan jumlah pendukung OPM.

Walaupun mengusahakan adanya pengurangan, tetapi pemerintah tetap saja mengulangi komitmen mereka terhadap transmigrasi, dengan alasan bahwa pembangunan di Jawa tidak memberi pilihan lain. Pada tahun 1980, menteri pertanian Sudarsono mengumumkan bahwa dalam tiga tahun jumlah petani yang tidak mempunyai sawah ladang

meningkat sebanyak 500.000 orang, padahal sampai tahun tersebut telah mencapai 8 juta. Selanjutnya, 11 juta petani hanya mempunyai tanah garapan seluas kurang dari 3 ha. Jadi secara keseluruhan, 43% keluarga petani di Jawa mengerjakan 0.8 ha, atau bahkan kurang dari itu. Para pejabat terkait melihat bahwa pulau-pulau seperti Jawa, Madura dan Bali, di mana lebih dari 90% populasi Indonesia tinggal, mempunyai kelebihan penduduk sebanyak lebih dari 23 juta, dibanding luas tanahnya. Di Jawa, terdapat 690 orang per kilometer persegi, sementara di pulau-pulau lain jumlahnya terpaut sangat jauh dari itu. Misalnya, Kalimantan 12 atau Papua Barat 3. Sekali lagi, beberapa ahli pembangunan menyatakan bahwa jumlah tersebut hanya merupakan gejala dari adanya sebuah masalah, jadi bukan sebab dari masalah itu sendiri. Meskipun ada perundangan yang mengatur pembatasan kepemilikan individu atas tanah, tetapi hukum tersebut tidak pernah dihiraukan. Jumlah kepemilikan tanah oleh penduduk yang bukan berasal dari daerah setempat semakin meningkat; sisa lahan yang ada menjadi semakin terbagi-bagi; para petani semakin tidak mampu membayar hutang yang mereka gunakan untuk membeli pupuk dan pestisida yang berharga mahal — mereka membutuhkannya untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Karena keadaan itu, banyak buruh tani yang pergi ke luar pulau Jawa, sedang para petani sewa harus mengikuti sistem mrapat, di mana pemilik tanah menyediakan semua kebutuhan kecuali tenaga kerja dan kemudian mengambil ¾ hasil panen.

Target transmigrasi periode tahun 1979-1984 untuk

daerah Papua Barat adalah sekitar 150.000 orang, jumlah yang sama dengan 1/8 populasi Melanesia. Untuk kepentingan tersebut, Indonesia membuat pemetaan propinsi tersebut secara rinci yang menunjukkan area yang dikehendaki. Dan para transmigran tersebut sebagian besar dikonsentrasikan di sepanjang wilayah perbatasan, tersebar mulai sebelah Selatan Jayapura sampai Utara Merauke, dengan gap di tengah-tengah kedua wilayah tersebut yang merupakan daerah pegunungan yang tidak memungkinkan untuk dijadikan pemukiman penduduk.

Seorang mantan wartawan, Peter Hastings, adalah salah satu pengamat yang menyatakan bahwa tanah subur yang terdapat di daerah dekat Merauke cocok untuk penanaman padi, dan di sisi lain pembangunan pemukiman di sepanjang perbatasan juga dimaksudkan untuk lebih membuka jalan masuk ke wilayah di mana OPM masih aktif (*Sydney Morning Herald*, 18 April 1984). Sementara itu, rencana pembangunan jalan raya Trans Irian, yang menuju ke kamp-kamp transmigrasi diduga dilatarbelakangi oleh kepentingan militer. Pemerintah menyangkal dugaan bahwa tujuan lain dari pembangunan jalan tersebut adalah untuk membatasi gerak OPM di daerah sepanjang perbatasan. Dikatakan bahwa tujuannya tidaklah berbeda dengan yang di daerah pantai.

Para transmigran di daerah Papua menerima fasilitas yang sama dengan di daerah lain. Masing-masing keluarga akan mendapat 3.5 ha tanah, jumlah yang dianggap cukup untuk menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan hasil bumi yang bisa dijual.

Pembagiannya berupa 1 ha untuk sawah ladang, 0.25 ha untuk rumah, dan sisanya untuk mendapatkan penghasilan. Aktivitas ekonomi tampaknya lebih berkembang di pemukiman daerah pantai, ini cenderung membuktikan bahwa area perbatasan memang bukan tempat yang tepat untuk pemukiman.

Untuk daerah yang lebih subur, para petani Jawa diorganisir dalam usaha yang disebut sebagai perkebunan inti rakyat, dengan menanam karet, kelapa sawit, coklat dan tanaman menghasilkan lainnya. Sementara itu, World Bank telah menjanjikan untuk menyediakan bantuan selanjutnya. Kemudian *Britain's Commonwealth Development Corporation* (CDC), salah satu penyokong lainnya, memulai sebuah usaha yang menunjukkan arah mengapa mereka bersedia memberikan bantuan tersebut. Para petani Jawa berpengalaman, yang bermukim dekat Rasinki, di pantai Utara, dianjurkan untuk menanam coklat di tanah seluas 4000 ha untuk menyuplai sebuah pabrik coklat, PT. Coklat Ransiki, yang didirikan atas bantuan CDC. Indonesia menganggap ini adalah contoh bagus yang menunjukkan peran transmigran dalam membantu jalannya pembangunan di luar Jawa.

Pada awal penempatan, para transmigran mendapat suplai makanan secara gratis selama satu tahun, selain itu masih ditambah dengan minyak tanah, bibit tanaman serta alat-alat pertanian. Setelah itu mereka diharapkan untuk bisa mandiri. Perumahan bagi mereka telah disediakan dan ditata secara rapi seperti pedesaan, ditambah dengan suplai air. Tetapi kenyataannya persediaan air sering menjadi permasalahan, terutama masalah keamanan. Karena banyak

di antara area tersebut yang sering dikunjungi OPM, maka sebagian besar kamp-kamp tersebut selalu berada dalam penjagaan militer. Biaya yang dikeluarkan untuk program transmigrasi sangat tinggi, yaitu sekitar US$ 15.000 untuk setiap keluarga, belum termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya atau pembiayaan militer. Tetapi dukungan dari luar negeri sangat banyak. Pada Repelita III, World Bank menyetujui diberikannya bantuan lunak sebesar US$ 130 juta, jumlah yang sama dengan bantuan pada Repelita sebelumnya. Pada tahun 1982, the World Food Programme, UNDP dan FAO menjanjikan untuk menyediakan dana bagi pembangunan pemukiman dan penyediaan pangan sebesar US$ 27 juta; US$ 1,2 juta untuk membayar instruktur pelatihan para transmigran dan pengeluaran birokrasi, US$ 400.000 dengan alasan untuk memonitor bagaimana uang tersebut digunakan. Pada tahun 1985, dengan adanya program terpadu dari lembaga-lembaga bantuan serupa dan bantuan dari negara-negara tertentu, dana sebesar US$ 600 juta mengalir ke Jakarta.

Pada tahun 1984, program tersebut hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Populasi transmigran di Papua sekitar 70.000. Sementara para pendatang lain yang datang atas kehendak sendiri berjumlah 160.000. Pada saat itu jumlah penduduk Melanesia adalah 1,2 juta orang.

Secara nasional, transmigrasi telah menyerap kurang dari 1/5 pertambahan penduduk di Jawa. Salah satu badan PBB, ILO, mengatakan bahwa program tersebut justru berdampak minimal terhadap Jawa, karena jumlah pendatang dari luar pulau malah melampaui jumlah mereka yang diki-

rim ke luar pulau, yakni sebesar 250%. Sementara itu dampak program transmigrasi terhadap Papua sangatlah terasa, itu terlihat dari meningkatnya masalah pertanahan. Pada awal-awal tahun dilaksanakannya program transmigrasi, pada saat target untuk Papua masih sedikit, pemerintah masih memakai cara-cara lunak dalam usaha mendapatkan tanah. Saat itu pilihannya terbatas; karena hanya 0.5% dari tanah di Papua yang bisa dikembangkan menjadi daerah pertanian, ditambah 2.5% lagi dari hutan yang dibabat. Walaupun para pejabat terkait mengetahui bahwa penduduk setempat tergantung pada hutan untuk berburu dan mendapatkan bahan pangan, tetapi mereka tetap saja menolak untuk memberi kompensasi pada tanah yang masih liar. Mereka menolak kepercayaan masyarakat Melanesia mengenai tanah yang tidak bisa dimiliki. Pemerintah juga memandang bahwa ide mengenai "sewa tanah" untuk transmigrasi, tidak bisa diterapkan dalam program ini. Pemerintah merasa bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan sekolah cukup bisa dijadikan kompensasi atas semua itu. Menurut pemimpin OPM, Seth Rumkorem, masalah di atas mulai muncul pada tahun 1974, karena pada saat itu rakyat Papua merasa sudah tidak dapat lagi melakukan negosiasi mengenai permasalahan pertanahan dengan pemerintah. Selanjutnya, seiring dengan ditambahnya quota untuk Papua, maka petugas terkait menjadi semakin tidak bisa mengendalikan diri. Penipuan, ancaman dan bahkan intimidasi secara terang-terangan, dilakukan oleh militer. Contoh tindakan tersebut terlihat dalam sebuah transkrip wawancara rahasia antara seorang petugas KOPKAMTIB

dan seorang lelaki yang mengaku telah ditipu dalam kasus tanah miliknya.

Orang yang sedang mengadukan keluhannya itu bukanlah orang Melanesia, melainkan seorang Jawa, muslim dan mantan tentara. Laki-laki tersebut bernama Suwarno, yang mendapatkan tanahnya dari seorang pemilik tradisional bernama Yacobus Dene. Orang Papua itu menjual tanah tersebut kepadanya ketika masih berupa hutan belantara. Tanah adat tersebut seharusnya tidak bisa dijual ataupun dipinjamkan, apapun alasannya.

Suwarno mengatakan kepada si petugas intelijen bahwa ia adalah seorang veteran perang kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1964, menjadi sukarelawan dalam tim perintis untuk pembangunan di Papua Barat. Pada tahun 1973, atas instruksi komandan militer tingkat propinsi, Brigjen Sutrisno, ia berhasil 'menemukan' 10.000 ha tanah yang bisa dijadikan pemukiman transmigrasi ABRI (dikenal sebagai TRANSAD). Setelah itu ia diberi hadiah tanah. Ia memutuskan untuk pensiun dari militer dan menggarap tanah tersebut. Masalah yang dihadapinya berawal pada tahun 1980, ketika gubernur Papua pada waktu itu, yang bukan orang Papua, mengadakan inspeksi ke desanya, di Sabron, dekat perbatasan.

> Saya ingat, ketika itu sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Saya sedang membuat tempe di ujung jalan dekat sungai ..... Gubernur itu minta berhenti untuk menikmati tempe, kelapa hijau dan teh. Lalu Gubernur tersebut bertanya kepada saya, "Apa Bapak bisa mengembangkan usaha ini?" Saya jawab: "Pak, saya bisa jika ada modal." Beliau lalu meminta saya untuk datang ke rumahnya pada hari Rabu dan menjanjikan

akan memberi modal pada saya.

Suwarno menghadap sang Gubernur dan mendapat uang tunai sebesar Rp. 250.000,- Petugas KOPKAMTIB yang mewawancarainya menanyakan kepada Suwarno apakah sang gubernur mengajukan persyaratan terhadap uang itu. Suwarno mengatakan bahwa ia hanya diminta untuk mengirim tempe kepadanya.

Dua bulan kemudian, Suwarno diminta untuk menghadap Kapten Imam Subekti, dari unit intelijen, KOREM 172. Di sana ia ditanya apakah ia mempunyai hutang kepada Gubernur. Suwarno mengatakan bahwa ia diberi bantuan, tetapi bila bantuan tersebut dianggap sebagai hutang, maka ia bersedia menganggapnya sebagai hutang. Ia lalu diminta untuk membuat janji tertulis bahwa ia bersedia mengembalikan uang tersebut dalam waktu 6 bulan atau jika tidak ia harus menyerahkan tanah miliknya seluas 0.5 ha. Di kemudian hari Suwarno menemui sang Gubernur, yang menyangkal bahwa hutang tersebut harus dikembalikan.

Segera sesudah itu, Kapten Subekti dengan ditemani Sersan Mayor Wiro mendatangi Suwarno dan mengatakan bahwa luas tanah yang telah dijanjikan sebagai jaminan menjadi bertambah, termasuk tanah yang ada tanaman kelapa, kopi dan buah-buahan. Perdebatan memanas, dan salah seorang tentara tersebut mengacungkan pistolnya. Suwarno ditinggali surat pernyataan serah-terima untuk ditandatangani, dan tentu saja kemudian ia mau menandatanganinya, tetapi itu dilakukannya setelah sebelumnya Serma Wiro mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepa-

danya yang berbunyi, "Kamu tahu tidak kalau saya, Wiro, jika kepingin menembak, ya langsung menembak."

Suwarno lantas menerima sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Kapten Subekti telah membeli tanahnya seharga Rp. 750.000,- beserta sebuah amplop berisi uang tunai Rp. 20.000,-, yang tampaknya dianggap sebagai pembayarannya. Suwarno lalu memutuskan untuk meminjam uang sejumlah hutangnya, Rp. 250.000,- dan bermaksud mengembalikannya kepada gubernur. Tetapi pejabat tertinggi di propinsi tersebut menolak, dan mengatakan, "Saya memberi uang itu sebagai bantuan." Setelah itu Suwarno memutuskan untuk menyampaikan protes melalui KOPKAMTIB, dan mengatakan:

> Mengapa saya melakukan ini semua, adalah karena tanah tersebut benar-benar milik saya, dan saya menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, dan berharap tanah tersebut akan dikembalikan kepada saya. Tanah di mana saya bertani dan bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga saya.

Orang yang malang itu tidak pernah mendapatkan tanahnya kembali karena seperti dikatakan oleh KOPKAMTIB, ia telah menandatangani surat yang menyatakan serah-terima, walaupun yang bersangkutan menyatakan bahwa ia melakukannya karena diancam.[10]

Meskipun ini merupakan contoh kasus penipuan secara pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan perampasan tanah oleh negara, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa cara-cara seperti itu memang sudah umum terjadi di Papua. Pada tahun 1984, Seth Rumkorem menyatakan: "Sekarang

ini tidak ada lagi yang namanya bicara atau tawar menawar, rakyat telah kehilangan tanah tradisional mereka dan telah diusir dari tanah mereka oleh pemerintah yang memberi kompensasi dengan seenaknya." Akibatnya rakyat cenderung berpaling untuk meminta bantuan OPM. Dalam kasus ini, penduduk Papua sebagai pihak yang dirugikan, sangat tidak mungkin jika meminta bantuan kepada pemerintah. Menurut Tapol, hal ini terbukti ketika pada tahun 1983 pimpinan sebuah kelompok perlindungan hak-hak atas tanah di Jayapura ditangkap dan kemudian dibunuh.

Pada akhir tahun 1984, 24 area transmigrasi dibuka di Papua dan lebih dari 700.000 ha tanah diambil untuk kepentingan proyek tersebut. Pemukiman yang terbesar adalah di desa Koya dan Arso, yang terletak di wilayah Utara, di mana masing-masing menampung lebih dari 2.000 orang Jawa. Mereka tinggal di deretan rumah-rumah yang beratap seng. Penduduk asli Papua melakukan protes keras, khususnya terhadap pembangunan perkebunan inti rakyat yang hanya khusus menanam kelapa sawit, yang artinya mereka akan kehilangan lahan ubi jalar dan sagu. Sementara itu area transmigrasi yang lebih kecil biasanya terletak di daerah terpencil dan hanya terdiri dari ratusan orang. Beberapa keluarga transmigran adalah mantan ABRI, yang ditempatkan di sana untuk tujuan keamanan. Sebagian kecil penghuni area tersebut adalah penduduk asli Papua yang disebut sebagai "translokal". Biasanya mereka diminta atau dipaksa untuk meninggalkan desa mereka supaya bergabung dengan kehidupan yang lebih "berbudaya". Presiden Soeharto mengeluarkan sebuah instruksi yang mengharuskan membagi

25% area pemukiman tersebut untuk penduduk asli Papua. Hanya sebagian kecil penduduk Papua yang menyambut baik keputusan tersebut, khususnya bagi mereka yang "ditempatkan kembali" ke daerah di mana sebelumnya mereka telah diusir. Menurut Tapol, tahun 1984, sikap enggan rakyat Papua tersebut dibenarkan oleh Yacob Pattipi, Bupati Merauke, yang mengatakan bahwa penduduk merasa takut meninggalkan desa, karena bila mereka pergi, pemerintah akan segera mengambil tanah mereka. Selain itu, persediaan air di desa juga lebih banyak dibanding dengan area transmigrasi. Di daerah sekitar Merauke, yang merupakan area transmigrasi terbesar, penduduk meminta agar pemerintah mengalokasikan dana 'translokal' untuk perbaikan desa-desa tradisional, tetapi usul tersebut tidak digubris. Pattipi juga mengatakan bahwa banyak pihak yang menyayangkan jumlah pengeluaran yang sangat besar untuk program transmigrasi dan kurangnya dana untuk proyek pembangunan lain.

Ketika target Repelita IV diumumkan, rakyat Papua semakin menyadari bahwa program transmigrasi benar-benar merupakan ancaman besar bagi mereka. Antara tahun 1984-1989, diharapkan 1 juta orang bisa ditempatkan di Papua, yang merupakan 20% dari seluruh target nasional dan satuan angka yang berarti melebihi jumlah penduduk Papua itu sendiri. Beberapa bulan kemudian, dengan tanpa alasan jumlah tersebut diubah menjadi 760.000 dan di tahun 1985 kembali berubah menjadi 685.000. Pada tahun 1983, penulis berada di bandara Papua dan melihat Hercules melintas di udara dua kali sehari, mengangkut para trans-

migran. Para transmigran diantar ke pemukiman mereka dan terkejut ketika mendapati ada banyak orang berkulit hitam. Jawa, kata mereka, tidak seperti itu. Dan akhirnya jumlah kesemuanya yang datang antara tahun 1984 sampai dengan awal tahun 1985 hanya 10.000.

Orang-orang Jawa tersebut segera menyadari bahwa mereka tidak disambut sebagai orang yang menguasai ketrampilan di bidang pertanian, melainkan sebagai pihak yang dibenci. Kehadiran ABRI di area tersebut semakin mempertegas kondisi itu. Sementara itu, adanya serangan oleh OPM membuat hubungan antara pihak pendatang dan penduduk Papua menjadi kian memburuk. Banyak di antara pendatang yang merasa kecewa, dan keadaan tersebut justru semakin menambah tinggi batas pemisah di antara kedua pihak. Walaupun mereka sekarang mempunyai tanah milik sendiri, yang bisa jadi merupakan yang pertama dalam hidup mereka, tetapi mereka cenderung bernostalgia dengan tanah Jawa dan tetap lebih memilih "hujan batu di negeri sendiri".

Sementara itu jumlah transmigran terus meningkat. Menurut berita RRI di akhir tahun 1983, di Merauke saja setiap bulannya ada sekitar 400 orang pendatang yang tiba. 2/3 wilayah itu, yaitu seluas 12.600 km2 telah dialokasikan untuk transmigrasi. Ekspansi serupa juga terjadi di wilayah Utara. Sementara itu Indonesia mempekerjakan konsultan asing yang bertugas mengidentifikasi area untuk proyek tersebut serta mengawasi pembabatan hutan untuk membuka lahan baru.

Seiring dengan meningkatnya grafik transmigrasi, meningkat pula suara-suara kritis menentang program terse-

but. Pada bulan Desember 1984, *the Minority Rights Grup* (kelompok hak-hak kaum minoritas) New York menulis surat protes yang bernada keras kepada presiden Bank Dunia, A.W Clausen. Pertemuan WCIP yang diselenggarakan pada tahun 1984, juga mengecam program itu. Sementara itu ACFOA dan para pengamat masalah HAM dari parlemen Inggris mengirimkan petisi kepada anggota IGGI yang sedang mengadakan pertemuan di Belanda guna membahas dana bantuan untuk Indonesia untuk tahun 1984-85. Mereka mendesak agar dana tersebut dapat digunakan sebagai sarana menekan Jakarta agar memperbaiki kondisi HAM di Papua Barat dan Timor Timur. Permohonan tersebut ditolak. Indonesia mendapat dana bantuan sebesar US$ 2.450 juta; jumlah yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selain itu Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari IGGI karena kebijakan ekonominya yang "tepat guna dan tepat waktu".

Sementara itu, rakyat Papua mengritik hampir semua aspek program tersebut, termasuk para birokrat pelaksananya. Dari 357 orang yang bekerja pada direktorat transmigrasi tingkat propinsi, hanya 27 orang di antaranya yang merupakan penduduk asli Papua, dan kedudukannya tak lebih tinggi dari sekedar karyawan biasa. Secara resmi Indonesia tetap akan mempertahankan program tersebut, dan tetap beranggapan bahwa hambatan yang mereka hadapi terletak pada permasalahan lokal. Pada tahun 1984, direktur bidang penasehat kebijakan politik, CSIS mengatakan bahwa transmigrasi,

> Seharusnya dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak akan menyingkirkan masyarakat Irian Jaya, dalam kaitannya

> dengan pembangunan masyarakat, cara hidup dan kebudayaan mereka .... Seharusnya dilakukan dengan cara yang disebut sebagai 'pendekatan interdisipliner'. Jadi tidak hanya ditekankan pada pendekatan ekonomi tetapi juga sosio-kultural secara bersamaan ... dengan demikian masalah penguasaan atas tanah akan dapat diatasi.[11]

Salah satu cara Indonesia dalam mengatasi permasalahan di propinsi tersebut adalah dengan membagi Papua menjadi tiga propinsi, yaitu Utara, Selatan dan Timur, yang memungkinkan adanya pengurangan pemusatan kekuasaan pada tingkat propinsi, dan mengefisiensi program transmigrasi. Tak dapat diragukan, pemerintah tetap bersikukuh untuk mempertahankannya. Pada pertengahan tahun 1984 di Jakarta, menteri transmigrasi Martono mengumumkan dengan bangga bahwa beberapa negara Afrika telah meminta Indonesia mengirimkan tenaga ahli yang bisa mengajari mereka mengenai transmigrasi. Tampaknya negara-negara tersebut, sama halnya dengan Indonesia, berharap untuk bisa meningkatkan loyalitas kepada negara mereka dengan cara mengirim penduduk dari suku-suku yang berkuasa, ke daerah-daerah yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri.

World Bank adalah pendukung setia Indonesia dalam menjalankan program transmigrasi, hal itu terlihat dari diterbitkan sebuah *booklet* mengenai suku-suku asli dan pembangunan ekonominya di tahun 1982. Dokumen tersebut mengakui adanya keterikatan yang kuat antara suku-suku tersebut dengan tanah mereka, tetapi dikatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk merintangi tindakan pemerintah.

> Hak atas tanah, akses terhadap tanah ulayat, dan pemeliharaan hubungan antarmanusia, adalah faktor vital dalam perekonomian, sosial maupun psikologis dalam diri masing-masing anggota suku-suku asli. Semua itu sama pentingnya dengan pemeliharaan stabilitas kultural kelompok bagi mereka. Negara-negara yang telah bersedia menandatangani Piagam PBB, dan berharap mendapatkan bantuan Bank, dapat mengacu kepada deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengatur masalah suku-suku asli dan kepemilikan atas tanah. Penyelesaian masalah kepemilikan atas tanah sering kali sulit dicapai, karena sebagian besar suku-suku asli memiliki tanah secara bersama-sama, dan batas kepemilikan tersebut dibuat berdasarkan persepsi anggota suku mereka. Tanah dianggap sebagai barang milik bersama, di mana setiap orang mempunyai hak untuk menggunakannya, tetapi tidak bisa memilikinya. Jangka waktu pemakaian atas tanah tersebut didasarkan pada rasa saling percaya bahwa — seperti halnya kematian, kehidupan dan kelahiran — mereka semua adalah sesama mahluk ciptaan Yang Maha Kuasa. Hak atas tanah secara komunal atau hak mengolah tanah secara kelompok, mungkin perlu pembaharuan secara legislatif sebagai bagian dari sebuah negara; inovasi semacam itu bukan merupakan hal yang tidak mungkin ataupun sulit untuk dilaksanakan. *World Bank dapat membicarakan hal tersebut dengan negara-negara yang bersedia mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati.*[12] (Cetak miring dari penulis).

Ada yang bertentangan dalam hal ini, karena dokumen tersebut menyatakan bahwa World Bank tidak akan mendukung proyek yang berkaitan dengan tanah milik suku-suku asli terkecuali negara peminjam bisa memberi jaminan bahwa tidak akan ada efek yang merugikan. Pada kenyataannya, dalam kasus Papua Barat hal itu diabaikan.

Dengan adanya fakta tersebut, OPM semakin percaya

bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri transmigrasi adalah dengan kemerdekaan Papua Barat. Bila hal ini terjadi, bagaimanakah sikap OPM terhadap transmigran yang sudah terlanjur tinggal di sana? Berikut adalah pendapat Seth Rumkorem:

> Mereka tidak bersalah. Mereka telah dipaksa oleh pemerintah Indonesia untuk pergi ke Papua Barat. Masalah ini menjadi tantangan berat bagi kami. Akan sangat tidak manusiawi bila kami mengembalikan mereka ke Jawa karena sudah tidak ada lagi tempat dan masa depan bagi mereka. Kami berkeinginan untuk mendirikan sebuah negara yang terdiri dari banyak suku, dan menerapkan kebijakan imigrasi terbuka yang mendorong kemungkinan orang-orang dengan keahlian khusus dari berbagai pelosok dunia untuk turut serta membangun dan menggali sumber daya alam negeri kami. Tentu saja hal itu akan menjadi masalah bagi kami, karena saat ini rakyat Papua belum siap untuk bersaing dengan para pendatang dari luar. Oleh karena itu pada saat ini — dan terlebih setelah kami meraih kemerdekaan — kami berusaha membangun tingkat kesadaran sosial, politik dan ekonomi masyarakat kami agar setara dengan para pendatang.
>
> Kami berpandangan bahwa para transmigran tidak harus dikembalikan ke Jawa, meskipun banyak orang Papua menghendakinya. Mereka sebaiknya tetap diperbolehkan tinggal, tetapi sayangnya sebagian besar mereka tidak berpendidikan tinggi dan tidak mempunyai keahlian yang bisa ditawarkan kepada rakyat Papua. Kedengarannya memang tidak manusiawi, tetapi para transmigran akan menjadi warga kelas dua. Kami terpaksa melakukan diskriminasi, walau dalam konteks yang positif: demi kepentingan penduduk asli. Ini bukan salah kami, melainkan salah pemerintah Indonesia yang telah mengirim sejumlah besar populasi pendatang yang tidak dibekali keahlian. Sementara itu akar permasalahannya adalah penolakan Indonesia untuk mengakui hak menentukan nasib

sendiri bagi bangsa kami. Oleh karena itu sikap anti-Indonesia telah berkembang secara luas di antara rakyat Papua, dan keadaan tersebut semakin diperburuk oleh adanya program transmigrasi. Jika Indonesia bersedia mengakui hak-hak kami, maka kami akan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi bagi para transmigran sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tetapi kami harus sangat berhati-hati dalam menyelesaikan masalah yang rumit itu. Karena kami sangat menderita akibat kebijakan tersebut.[13]

Sebagai tambahan, pelaksanaan pemerintahan secara umum di Irian Jaya juga berperan menambah kekecewaan rakyat Papua.

Pada tahun 1969, setelah pelaksanaan Pepera, Indonesia membentuk Seksi Khusus untuk daerah Irian Jaya dalam kantor Departemen Dalam Negeri. Secara teori, Pejabat di tingkat propinsi diberi kekuasaan untuk melakukan kontrol terhadap para aparat pemerintah. Dalam kenyataannya, seksi ini justru mendominasi semua perencanaan terhadap wilayah tersebut, karena mereka lembaga otonom yang berhak mengatur pendanaan dan staf sendiri. Sejak itu, ada pula sumber pendanaan lainnya, yang dikenal 'INPRES' (instruksi presiden) — yang merupakan sebuah perencanaan nasional, sehingga pengalokasian uang yang berasal dari dana bantuan khusus tersebut langsung diawasi oleh presiden. Proyek-proyek INPRES telah menjadi hal yang sering dibanggakan, walaupun nantinya belum tentu berhasil. Sebagai contoh adalah dana INPRES di Papua yang digunakan untuk membangun gedung sekolah negeri di desa-desa, padahal di sana para misionaris sudah menyediakan sarana pendidikan yang cukup memadai.

Untuk itu, ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana tersebut di Papua. Badan tersebut nantinya akan membuat laporan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Yang pertama adalah Pelaksana Pembangunan Daerah (Lakbangda), yang diketuai oleh gubernur Irian Jaya, sementara wakilnya adalah komandan militer propinsi tersebut. Pada level politik, gubernur dan DPRD memiliki hak yuridis untuk membuat kebijakan dalam wilayah kekuasaan mereka. Lalu ada lembaga penasehat yang anggotanya terdiri dari pejabat militer, disebut MUSPIDA, dan sangat berperan dalam segala perencanaan penting. Walaupun posisi gubernur biasanya dijabat oleh orang Papua, tetapi keputusan yang mereka buat seringkali dipengaruhi oleh militer, bahkan sampai kepada level yang paling bawah sekalipun. Eliezer Bonay — bekas gubernur — menyatakan bahwa ia tak lebih dari sekadar "boneka" pemerintah Indonesia. Seperti halnya beberapa gubernur lainnya, ia terlibat konflik dengan atasannya dan pernah ditangkap. Pada awal tahun 1980-an, ia melarikan diri ke PNG dan kemudian ke Belanda.

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, pemerintah telah menerapkan sebuah sistem pemerintahan baru di kampung-kampung Papua Barat. Sistem itu dinamakan "desa", dan seperti bisa diduga, akarnya berasal dari pola organisasi daerah di Jawa. Tokoh kunci dalam wilayah tersebut adalah kepala desa yang bertanggung-jawab kepada seorang pejabat pemerintah (camat) yang membawahi sebuah distrik terdiri dari beberapa desa. Kepala desa memiliki sebuah buku catatan yang berisi kegiatan penduduk desanya, ter-

masuk di dalamnya grafik jumlah penduduk dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Untuk menjadi kepala desa, seseorang harus memenuhi persyaratan; bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia. Pemerintah melakukan seleksi dengan memilih calon yang bersih secara politis, suatu pekerjaan yang lebih mudah dilakukan di Jawa ketimbang di Papua. Secara teori, kepala desa seharusnya dipilih dari beberapa orang calon yang ada; tapi kenyataannya calon terpilih pun harus mendapat persetujuan dari bupati, pejabat yang membawahi satu wilayah/kota. Bila diketahui bahwa yang terpilih adalah orang yang tidak mendukung pemerintah, maka pemilihan tersebut tidak hanya bisa dibatalkan tetapi juga bisa menimbulkan kegusaran pemerintah.

Struktur politik semacam ini tidak disukai oleh rakyat Papua, karena dua alasan. Pertama, sistem tersebut bertentangan dengan tradisi mereka dalam memilih pimpinan kampung, yang ditentukan oleh faktor keturunan dan martabat seseorang. Mereka juga membenci peran desa yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari birokrat kelas menengah, militer dan partai berkuasa di Indonesia, GOLKAR. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kehadiran militer di wilayah pedesaan pada hari-hari dilaksanakannya Pemilihan Umum di propinsi tersebut, selain itu para pemimpin rakyat Papua juga ditekan untuk mempromosikan program-program GOLKAR. Keengganan masyarakat Melanesia tersebut menimbulkan adanya intimidasi, dan bila usaha ini gagal maka akan dilakukan cara-cara pemilihan yang curang. Penulis mendapat informasi dari Badan intelijen

PNG bahwa selama diselenggarakan Pemilu pada tahun 1982, mereka melihat kotak-kotak suara untuk daerah pedesaan dibawa kembali ke Jayapura sebelum pemungutan suara diadakan. Seperti telah diperkirakan sebelumnya, GOLKAR memenangkan lebih dari 80% suara. Jika diadakan referendum untuk penentuan kemerdekaan Papua, maka jumlah yang sama akan dicapai.

Kebijakan Sosio-Kultural

Para pemimpin Indonesia sikapnya tidak pernah bergeming terhadap budaya masyarakat Papua. Pada awal pengambilalihan, Subandrio, menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan Indonesia terhadap masyarakat Papua dapat diibaratkan "untuk membuat mereka turun dari pepohonan, atau jika perlu dengan menyeret mereka". Setelah hampir dua dekade berikutnya, Daoed Yusuf, menteri pendidikan pada kabinet Soeharto pada waktu itu, mengatakan bahwa pemerintah telah berusaha keras untuk memodernkan masyarakat, tetapi butuh waktu "untuk menghilangkan tradisi yang mereka anut". Sementara itu menteri luar negeri, Dr. Mochtar, akan menyerang pihak-pihak luar yang menyarankan agar Indonesia berusaha melestarikan kebudayaan masyarakat Papua daripada mencari cara untuk memusnahkannya. Orang-orang yang berpendapat semacam itu dengan sendirinya adalah penganut rasisme, kata sang menteri, dan pemerintahannya tidak berkeinginan untuk menciptakan sebuah "kebun binatang manusia". Dalam wawancara panjang lebar yang diadakan oleh TV Australia, Dr. Mochtar menjelaskan pandangan pemerintah Indonesia dengan

gamblang:

> Kebudayaan adalah sesuatu yang selalu berubah, dan saya berpendapat adalah satu kesalahan bila kita berkeinginan untuk melestarikan suatu budaya tertentu dan membuatnya terhenti untuk kurun waktu tertentu. Terlepas dari pertanyaan apakah budaya tersebut penting untuk dipertahankan. Kami sedang mengembangkan suatu usaha — terlepas apakah anda setuju atau tidak — ke arah apa yang kami sebut sebagai budaya umum Indonesia. Yang sedang kami lakukan di Irian Jaya adalah memperkenalkan masyarakat Irian — tidak dapat disangkal bahwa mereka mempunyai level budaya yang berbeda — pada budaya yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan saya merasa tidak ada salahnya dengan hal itu ... karena mereka akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. [14]

Sejak awal pemerintah Indonesia tidak pernah bergeming dari tujuan yang hendak mereka capai di Papua, yaitu untuk "memajukan peradaban" masyarakatnya. Oleh karenanya sekolah-sekolah didirikan di hampir semua desa. Bahasa Indonesia sangat ditekankan, dan penggunaan bahasa suku setempat di tempat-tempat umum dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Sementara itu di daerah-daerah lain di Indonesia, penduduk tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya tanpa adanya tekanan apa pun. Ironisnya, penduduk Papua ternyata berbahasa Indonesia dengan lebih baik dibanding dengan para transmigran, karena sebagian besar pendatang masih menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian mereka.

Baru-baru saja pemerintah menyadari bahwa karena alasan budaya maka pola pengajaran di Irian Jaya seharusnya dibedakan dengan Jawa; Menteri Pendidikan pada

masa itu, pada tahun 1984, menyarankan agar dicetak buku pelajaran khusus.

> Saya dapat membayangkan betapa sulitnya anak-anak sekolah di Irian Jaya mempelajari sebuah lagu yang terdapat dalam buku pelajaran mereka, karena kata-kata yang digunakan di dalam lagu tersebut tidak pernah ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, lagu anak-anak;
> Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi kutolong ibu, membersihkan tempat tidurku.
> Bagaimana bisa mereka tahu akan keindahan lagu itu, kalau mereka tidak pernah mandi, tidak pernah menggosok gigi dan tidak pernah tahu seperti apa rupa sebuah tempat tidur?[15]

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Papua Barat tidak pernah mengajarkan sejarah masyarakat setempat, kecuali mengenai bagaimana propinsi tersebut dibebaskan dari Belanda. Mereka ditekankan untuk mempelajari sejarah utama Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa. Seperti halnya di daerah lain, nasionalisme menjadi sesuatu yang dipuja oleh para guru, dengan lagu "Indonesia Raya" yang dinyanyikan di kelas dan murid-murid yang melakukan upacara di bawah bendera. Dan yang terpenting adalah kesetiaan terhadap 5 butir dasar negara, Pancasila, yang secara teori menjamin kesejahteraan sosial bagi semua rakyat.

Pemerintah melakukan usaha untuk menyebarluaskan ideologi tersebut melalui Departemen Penerangan. Spanduk dan poster di pasang di tempat-tempat umum, berisi himbauan agar setiap warga negara mendukung kebijakan pemerintah. Radio dan TV nasional, yang disiarkan dari Jakarta, dan dapat diterima dengan jelas di Papua melalui satelit milik Indonesia, memberitakan kegiatan sehari-hari

presiden dan para pembantunya, sedang meresmikan sekolah-sekolah, jembatan dan proyek-proyek pertanian. Sekali lagi semuanya difokuskan di pulau-pulau yang dekat dengan kekuasaan, khususnya Jawa; sementara berita mengenai Papua jarang ada. Begitu pula dengan acara-acara lain, misalnya drama dan acara hiburan lainnya.

Berkaitan dengan slogan nasional, "Bhinneka Tunggal Ika", seluruh rakyat Indonesia diharapkan untuk tetap mempertahankan tradisi daerah mereka. Selain itu Undang-Undang Dasar juga menyebutkan bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah yang beraneka ragam merupakan bagian yang penting bagi kebudayaan nasional, begitu pula halnya dengan bahasa daerah. Tetapi sebaliknya, pemerintah memandang tradisi masyarakat Papua primitif dan tidak diinginkan. Untuk dianggap beradab, penduduk setempat harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara-cara yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Homogenitas kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang ideal.

Karena alasan tersebut, pengaruh asing juga dipandang sama buruknya dengan Melanesianisme. Belanda, melalui gereja-gereja, dipandang sebagai pembawa ide-ide dari Barat. Oleh karenanya gereja-gereja tersebut mengalami kesulitan setelah masa pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia. Salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi pada awal tahun 1965, di mana pemerintah terlibat konflik dengan gereja Katolik yang terdapat wilayah Selatan Agats. Menurut seorang penulis, John Ryan yang menjadi permasalahan adalah karena para uskup gereja tersebut bersikeras untuk tidak memindahkan murid-murid mereka ke sekolah milik

pemerintah. Peristiwa lainnya adalah seorang pastor bernama Fr. John Smit, yang dituduh menghina Indonesia karena menyebut penduduk setempat sebagai "orang-orang Papua". Smit diminta untuk berjalan ke dermaga Agats di bawah todongan senjata, lalu dipaksa untuk berlutut dan meminta maaf kepada seorang petugas Indonesia bernama Fijmbaj. Pastor tersebut menolak perintah dan kemudian ditembak hingga tewas. Karena kasus itu Fijmbaj dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tapi dilepas secara diam-diam setelah tiga bulan.

Pandangan para pejabat pemerintah Indonesia mengenai gereja hanya sedikit berubah, meskipun saat itu kebencian mereka tidak lagi diarahkan kepada para pastur dari luar negeri. Beberapa dokumen rahasia menunjukkan bahwa pemerintah menaruh kecurigaan besar terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kelompok yang mayoritas pendukungnya adalah pemeluk agama Kristen.[16]

Pada tahun 1984, di daerah tersebut diperkirakan terdapat sekitar 500.000 umat gereja protestan dan 300.000 umat gereja Katolik. Bertolak belakang dengan ketakutan Indonesia terhadap kondisi di atas, pihak gereja jarang sekali mengajukan protes berkaitan dengan situasi di Papua, sampai terjadinya peristiwa arus pengungsi secara besar-besaran yang terjadi pada bulan Februari dan menjadi berita nasional. Yap Thiam Hien, wakil direktur Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta saat itu menyayangkan sikap gereja yang hanya berdiam diri saja. Keadaan menjadi sangat berubah setelah pada bulan September para pengurus gereja dari Indonesia, PNG dan Australia mengadakan pertemuan di

Bali dan menyepakati sebuah kerjasama untuk tercapainya keadilan dan rekonsiliasi di Papua. Para anggota delegasi sepakat untuk lebih banyak melaksanakan proyek-proyek pembangunan, serta menyatakan keprihatinannya terhadap skema proyek transmigrasi.

Sering kali dikatakan bahwa Indonesia berusaha menyebarluaskan ajaran Islam kepada para pemeluk agama Kristen, dengan harapan bahwa mereka yang pindah agama akan menjadi lebih loyal kepada negara. Tentu saja, lingkup para pekerja misionaris di Papua Barat berusaha dihambat, yaitu dengan cara membatasi visa mereka. Kembali pada peristiwa di Agats, pemerintah melakukan berbagai upaya agar murid-murid sekolah milik gereja mau pindah ke sekolah negeri. Tetapi pemerintah tidak lagi berusaha untuk menyebarluaskan ajaran Islam; karena pemerintah lebih menekankan pada masalah loyalitas politik ketimbang masalah spiritual. Sebagai tambahan, Islam telah menjadi fokus perasaan anti pemerintah di Jawa dan rezim berkuasa melihat tidak ada untungnya untuk memaksakan hal itu lebih lanjut di Papua. Panglima ABRI, Jenderal Moerdani, dalam pidatonya di Wamena pada bulan Desember 1984, menyatakan bahwa pemerintah tidak memaksakan Islam kepada masyarakat setempat.

Metode lain yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan pemerintah adalah dengan cara membubarkan lembaga-lembaga bantuan sosial yang berada di desa-desa. Seperti halnya program-program lainnya, usaha ini menemui banyak hambatan. Pada pertengahan tahun 1984, para pekerja sosial mengeluh bahwa mereka merasa tidak tenang

tinggal di Papua, dikarenakan oleh faktor keamanan. Sementara kondisi jalan-jalan di Papua yang masih sangat buruk juga menjadi faktor utama kekecewaan mereka. Mereka cenderung lebih suka bekerja di Jawa.

Pemerintah khususnya, telah lama berkeinginan agar masyarakat Papua tinggal di desa-desa secara permanen dan memperkenalkan kepada mereka konsep pertanian campursari. Doktrin resmi pemerintah mengatakan bahwa pola pertanian dengan cara tebang dan bakar, atau berburu dan memungut hasil alam adalah praktek-praktek primitif yang harus dihapuskan. Sebagaimana dinyatakan oleh August Marpaung, duta besar Indonesia untuk Australia, pada tahun 1984: "Kami sedang memperkenalkan kepada mereka mengenai standar hidup yang layak, tinggal di sebuah desa secara permanen dan bekerja di ladang yang pasti lebih produktif daripada pekerjaan berburu dari satu tempat ke tempat lainnya." Pernyataan tersebut mengabaikan masyarakat pedalaman yang telah melakukan pekerjaan tanam-menanam selama ribuan tahun dan menyangkal kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Papua menyukai cara hidup yang mereka pilih, serta tidak menginginkan campur tangan Indonesia. Bagaimanapun juga, keberadaan orang-orang di perbatasan wilayah PNG merupakan bukti sikap masyarakat tersebut.

Sementara itu, pada tahun 1984, pemerintah mengumumkan bahwa 125.000 keluarga penduduk asli setempat direncanakan akan dimukimkan kembali, jika memungkinkan dalam PELITA pada tahun itu. Hal itu dikemukakan oleh menteri sosial, Nani Sudarsono, pada acara peresmian

kompleks pemukiman untuk keluarga "suku-suku terbelakang", yang terletak dekat Nabire. Gubernur Irian saat itu yang merupakan putra daerah Papua, Isaak Hindom mengatakan bahwa sebagian penduduk di propinsi tersebut, misalnya masyarakat Baudis dari Yapen Waropen, bahkan belum mengenal api dan mereka hidup dari berburu dan memakan hasil buruan yang masih mentah. Mereka tidur di atas pohon. Orang-orang semacam itu adalah sasaran utama untuk dimukimkan, dan akan disediakan perlengkapan pertanian, makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tetapi hanya untuk jangka waktu beberapa bulan saja.

Pada tahun 1984, karena meningkatnya aktivitas OPM di wilayah perbatasan PNG, maka diputuskan bahwa sasaran pemukiman adalah dusun-dusun kecil yang strategis untuk diorganisir OPM. Di tempat itu penduduk akan diawasi secara ketat oleh militer. Kebijakan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun di Timor Timur, sementara itu wakil gubernur Irian, yaitu Brigjen Sugiyono dan komandan ABRI, Brigjen Sembiring sebelumnya pernah ditugaskan di Timor Timur.

Tujuan yang ingin dicapai Indonesia di Irian Jaya, seringkali digambarkan sebagai "akulturasi" dari masyarakat Papua dan "asimilasi" masyarakat kepada kebudayaan yang dominan. Banyak pengamat yang mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pembasmian budaya. Tetapi beberapa pejabat penting luar negeri justru mendukung tindakan tersebut dengan alasan bahwa ini merupakan hal yang tidak bisa dielakkan, meskipun masyarakat Melanesia harus menderita, tetapi itu hanya untuk sementara. Pada

kenyataannya preseden yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai pembanding, pemerintah Australia telah berusaha "mengasimilasikan" masyarakat Aborijin ke dalam masyarakat kulit putih, sampai pada awal tahun 1970-an, kebijakan tersebut dihapus karena dipandang tidak manusiawi dan tidak berhasil. Di Papua pun nampaknya prospeknya akan sama. Walaupun begitu, gubernur Isaac Hindom, pada tahun 1984 memprediksikan bahwa dalam kurun 50 tahun mendatang orang-orang Papua tidak akan lagi berambut kriting tetapi akan berambut lurus seperti umumnya orang Indonesia lainnya. Lebih lanjut, Hindom mengatakan bahwa proses menuju ke sana akan bisa dipercepat dengan adanya program transmigrasi. Diperkirakan, propinsi tersebut akan cukup mampu menampung sampai sekitar 12 juta pendatang. Pernyataan gubernur tersebut dikecam oleh para pejuang Papua yang berada di luar negeri, meskipun sebagian mereka tahu bahwa ia hanya menyuarakan pendapat atasannya. Mungkin sang gubernur hanya sekadar basa-basi di mulut saja, karena menurut sebuah sumber di Jayapura, pada kenyataannya sang gubernur telah diinterogasi oleh pihak berwajib berkaitan dengan masalah keamanan. Pemerintah tampaknya menduganya sebagai simpatisan OPM (*National Times*, 30 Nov. 1984)

Hukum dan Pemerintahan

Seperti halnya pemerintah kolonial Belanda, dua kali masa pemerintahan republik Indonesia juga mempunyai rekor buruk dalam masalah hak asasi manusia. Di bawah pemerintahan Soekarno, orang yang dipandang sebagai pem-

bangkang akan diperlakukan buruk atau bahkan dipenjarakan, sementara pada pemerintahan Soeharto tindakan yang diambil sampai pada perintah pembersihan, terutama mereka yang dianggap "kekiri-kirian" dan hasilnya sekitar 1 juta orang tewas. Sejak rezim orde baru mengambil alih ke-kuasaan pada tahun 1965, peran kekuatan militer dalam masyarakat sangat meningkat. Sebagian besar politisi dan birokrat terkemuka berasal dari kalangan ABRI baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun dan mereka sangat tidak sabar menghadapi berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Kalangan intelektual, perwakilan pekerja dan — yang belakangan muncul — pembangkang muslim banyak yang diintimidasi dan dipenjarakan dalam jangka waktu yang lama. Tindakan pemerintah seringkali bertentangan dengan konstitusi dan KUHAP serta berlawanan dengan konvensi internasional. Karena adanya tekanan dari penguasa, pengadilan dipaksa untuk menyatakan bersalah terhadap para tahanan politik dengan tuduhan makar. Para pengacara, yang juga diintimidasi, tidak diperbolehkan membuat pernyataan pers. Sementara itu, klien mereka menceritakan kisah mereka dari balik tembok penjara dan pusat-pusat tahanan militer yang mengerikan.

Dalam laporannya yang berjudul "Torture in the Eighties", Amnesty Internasional mengatakan bahwa mereka mempunyai banyak informasi mengenai kisah-kisah penyiksaan yang dilakukan ABRI dan aparat KOPKAMTIB lainnya di Papua. KOPKAMTIB sendiri dibentuk dengan tugas "untuk memulihkan keamanan" selama masa kekacauan yang terjadi di tahun 1965, tetapi tidak pernah dibubarkan. Lem-

baga tersebut justru menjadi pelaku utama berbagai tindakan *extrajudicial*, khususnya dalam penginterogasian. Sejak tahun 1983, ujung tombak pelaksana penegakan hukum adalah pasukan baret merah, Kopassanda, yang telah menembak ribuan orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan di Jawa, dan juga para pejuang Timor Timur serta Papua Barat.

Banyak orang Indonesia yang merasa bahwa pemerintah telah mengkhianati cita-cita Republik. Seorang bekas tahanan yang juga mahasiswa bernama Ibrahim Zakir mengatakan:

> Yang membuat saya marah adalah kenyataan bahwa sistem kolonial (yang serupa dengan Belanda) sekarang dilakukan oleh orang-orang yang berkulit sama coklatnya dengan saya, berambut sama hitamnya dengan saya, dan berbahasa yang sama dengan saya pula. Saya mungkin akan lebih lega jika mereka adalah orang-orang kulit putih, berambut pirang dan bermata biru; paling tidak saya dapat merasa lega karena bangsa saya, "tidak meniru sebuah sistem yang telah beratus-ratus tahun menindas mereka, yang justru mereka gunakan untuk menindas bangsa mereka sendiri".[17]

Rakyat Papua yang pernah merasakan dijajah Belanda dapat merasakan bahwa metode yang digunakan Indonesia justru lebih kejam dibanding Belanda. Nugini memang dikenal mempunyai banyak kamp-kamp penahanan yang kondisinya sangat buruk, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tetapi pada masa itu tidak pernah digunakan untuk memenjarakan perusuh yang berasal dari penduduk setempat.

Semenjak Irian menjadi bagian "resmi" dari Indone-

sia pada tahun 1969, wilayah tersebut telah menjadi sebuah propinsi yang perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan masalah keamanan. Pada tahun 1984, LBH menyatakan bahwa Papua adalah wilayah yang mempunyai rekor terburuk dalam masalah HAM di Indonesia, dan berharap agar LBH membuka kantor di sana sebagai upaya membantu penduduk setempat. Pengacara dan aktivis penegakan hak asasi manusia T. Mulya Lubis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap diabaikannya KUHAP yang baru diperkenalkan pada bulan Desember 1981, oleh pihak penguasa. Para tersangka ditahan dalam jangka waktu tak terbatas tanpa adanya tuduhan yang jelas ataupun pelaksanaan pengadilan; bukti-bukti yang diajukan sering kali tidak masuk akal dan hukuman dilaksanakan dengan kejam. Sebagai tambahan, kondisi para tahanan yang dituduh terlibat dalam OPM kondisinya lebih parah dan mereka yang berkesempatan mendapatkan pengacara — hal ini sangat jarang terjadi — biasanya mengungkapkan bahwa mereka telah diperlakukan buruk atau bahkan disiksa.

Bukti-bukti penganiayaan yang telah dilakukan KOPKAMTIB dan kekuatan keamanan lainnya tampak dari foto-foto mantan tahanan baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas, yang diambil oleh keluarga ataupun teman — teman mereka. Sebagai pembanding, metoda yang diterapkan kepada para tahanan di beberapa negara lain tidak ada yang seperti digunakan di Papua. Tetapi, jika cara-cara interogasi KOPKAMTIB dianggap sebagai ukuran, maka metode tersebut terbukti berhasil menyaring informasi dari para tahanan. Walau begitu, catatan interogasi yang ada

menunjukkan bahwa banyak di antara tahanan yang bersikap sangat nasionalis. Catatan-catatan tersebut, yang diketik pada kertas berkop KOPKAMTIB berukuran A4, dimulai dari catatan informasi mengenai keluarga tahanan, yang lebih mirip sejarah pribadi tahanan. Lalu dilanjutkan dengan format tanya jawab; sering kali interogasi tersebut mencapai 30 lembar dan dilakukan dengan duduk terus-menerus. Sebuah tumpukan dokumen tahun 1982, menunjukkan bahwa sang tertuduh biasanya tetap berada dalam penjara selama proses tersebut berlangsung atau diperintahkan kembali ke tempat dilaksanakannya interogasi untuk melanjutkan proses selanjutnya. Para tahanan diminta untuk menyebutkan nama rekan-rekan mereka dan siapa saja yang menjadi penghubung serta diminta untuk menjelaskan mengenai organisasi OPM.

Salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Maret 1981, ketika Colombus Merabano diinterogasi oleh serma Musta'id. Merabano yang berumur 24 tahun dan pengangguran, ditahan di penjara Ifargunung, dekat Sentani. Menurut Tapol, penjara tersebut mempunyai sejumlah ruang bawah tanah yang dapat dialiri air untuk menggenangi sel yang dapat menenggelamkan tahanan. Merabano mengatakan pada yang menginterogasinya bahwa ia pernah mendaftar ke Angkatan Laut Indonesia, tetapi tidak diterima. Setelah masa penahanannya berakhir, ia bergabung ke hutan dan bertanggung jawab atas biro rekruitmen OPM. Unitnya, yang termasuk ke dalam faksi Pemka, terdiri dari 30 orang dan mempunyai lima buah senjata api; 1 Garand, 1 Thomson, dan 3 senapan Jepang ... dengan

amunisi berjumlah sekitar 30-40 buah. Bekas tahanan tersebut mengatakan bahwa mereka telah dilatih bagaimana bergerak dalam hutan, mempertahankan diri, dan cara menyerang dengan bayonet.

> Apakah anda membawa senjata pada waktu anda bergabung ke dalam hutan? Darimana anda mendapatkannya?
> Saya menemukan 2 Mauser dalam sebuah gua dekat padang rumput Kunai di sekitar desa Mamda Tua. Gagangnya sudah patah, tetapi masih dapat dipakai. Saya mengambil satu dan yang lainnya diambil oleh Yance Hembring (pimpinan sebuah unit yang berada di sekitar area transmigrasi Genyem).

Kemudian, ia menyebutkan nama-nama lainnya serta menjelaskan metode yang digunakan OPM secara detail:

> Kode apa yang sekarang ini digunakan oleh OPM?
> 1. Memukul-mukul batang pohon sebagai tanda bahwa yang datang adalah teman.
> 2. Mengenakan ikat kepala warna merah sebagai simbol persahabatan.
> 3. Mengelupas kulit kayu dari pepohonan sebagai petunjuk menemukan pos sesama rekan ... jika anggota GPL menemukan batang pohon yang terkelupas kulitnya, maka mereka akan memukul-mukul batang pohon tersebut.

Tahanan lainnya yang tertangkap pada tahun 1981 adalah Onesimus Ompe, yang catatan interogasi rahasianya memperlihatkan bahwa ia telah menyebutkan nama-nama *contact person* serta menjelaskan formasi dewan revolusioner OPM-Pemka pada tahun 1979:

> Saya dan ke-20 orang rekan saya dilantik sebagai anggota dewan revolusioner pada tanggal 23 Desember, di Imonda,

yang termasuk wilayah Waris, pada hari Sabtu jam 03.00 pagi dalam sebuah upacara resmi yang disaksikan oleh para pemimpin tertinggi Papenal dan para komandan militer serta para pendukung yang berjumlah sekitar 100 orang. Inspektur upacara tersebut adalah Martin Thabu, dengan komandan upacara Mayor Yan Sewi. Kami semua disumpah, dengan mengangkat tangan dan melakukan sumpah dengan cara Kristen ... Para anggota dewan tersebut berasal dari berbagai tempat, termasuk dari daerah pedalaman. Tugas kami adalah memberi pengertian kepada masyarakat sampai mereka benar-benar paham mengenai perjuangan OPM.

Ompe melanjutkan informasinya mengenai anggota dewan yang mempunyai beberapa poin penting yang akan disampaikan kepada masyarakat: Indonesia diminta untuk mengakui negara Papua Barat; negara tersebut harus didasarkan pada ajaran Kristen; penggunaan kekuatan keamanan sebisa mungkin harus dihindari; para pemimpin OPM di luar negeri juga sedang memperjuangkan hal yang sama dengan mereka.

Saat berlangsungnya interogasi, Ompe mengatakan kepada petugas bahwa ia tidak lagi percaya akan gerakan pembebasan. Ia "sepenuhnya menyadari" kesalahannya di masa lampau dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Pernyataan semacam itu juga ditemukan di transkrip interogasi rahasia lainnya, begitu pula dengan pertanyaan yang selalu diajukan pada akhir interogasi, "Apakah Anda merasa ada tekanan atau paksaan yang dilakukan interogator kepada anda?" Hasil catatan interogasi tersebut kemudian ditandatangani oleh tertuduh.

Contoh lain interogasi KOPKAMTIB yang tergolong

berhasil adalah yang mereka lakukan terhadap Fransiscus Wayne, 24 tahun, pada tahun 1980. Wayne meninggalkan kampung halamannya di Paniai untuk melanjutkan sekolah dan terakhir bekerja sebagai asisten bidang administrasi di sebuah sekolah tinggi keguruan. Ia telah yatim piatu sejak usia 4 tahun, dan merupakan penganut Katolik yang taat. Ia telah mengalami kehidupan yang keras di bawah kekuasaan Indonesia. Ia mengakui bahwa pada bulan Juli lalu ia telah terlibat dalam sebuah kelompok yang merencanakan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Abepura.

> Jika saya dan rekan-rekan berhasil mengibarkan bendera Papua, serta berhasil mempertahankannya, maka tindakan tersebut akan dapat dilihat baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh para simpatisan negara Papua, yang telah kami minta untuk bersiap di sekitar tempat itu, karena kemungkinan terjadinya peperangan di antara kedua belah pihak tersebut.

Wayne mengatakan bahwa selaku pemimpin regu pramuka, ia diharapkan dapat mengorganisir aksi pengibaran bendera dengan dalih sedang melakukan latihan pramuka. Selama interogasi pada tanggal 4 September tersebut, salah satu dari sekian banyak nama yang ia sebutkan merupakan pucuk pimpinan simpatisan OPM, termasuk di antaranya Laurenz Doga, yang merencanakan dalam waktu dua tahun akan masuk hutan menjadi menteri pertahanan Pemka. Saat itu Doga masih berstatus mahasiswa di sebuah universitas.

Wayne lalu dilepas, tetapi setahun kemudian ia dipenjarakan kembali. Masyarakat Papua menduga adanya kemungkinan bahwa ia merupakan salah satu orang yang

dipaksa Indonesia untuk memata-matai OPM. Tapol telah menerbitkan kisah para tahanan yang dilepas agar menjadi mata-mata, tetapi bila dianggap tidak memuaskan, mereka akan ditangkap kembali atau dibinasakan. Wayne ditanyai mengenai aksi serangan OPM — yang bisa dikategorikan berskala besar — terhadap penjara militer Abepura. Selama interogasi, Ia menyebut nama seorang Papua, Willem Joku sebagai salah satu pemimpin aksi tersebut. Petugas KOPKAMTIB menganggap Wayne berusaha mengalihkan kesalahan kepada anggota OPM lainnya, tetapi yang bersangkutan menyangkalnya. KOPKAMTIB tampaknya percaya padanya. Selanjutnya, pada tahun 1982, jasad Willem Joku, bersama dengan Jonas Tu, ditemukan telah membusuk di dalam sebuah karung di tepi pantai. Masyarakat menduga bahwa lima hari sebelumnya mereka telah diikat dalam karung lalu diceburkan ke dalam laut dekat Jayapura. Pada saat yang bersamaan, tiga mahasiswa UNCEN diciduk untuk diinterogasi.

Menurut sebuah dokumen HAM yang dibuat oleh para pendukung OPM-Pemka di Port Moresby, cara-cara penenggelaman tersebut telah sering kali dilakukan di Merauke. Pada tahun 1978, mereka mengklaim bahwa 122 orang (termasuk di antaranya 6 wanita) diikat tangan dan kakinya, lalu dimasukkan ke keranjang kopra yang telah diberi pemberat, kemudian diceburkan ke laut.

Celsius Wapai, seorang pengungsi yang berada di PNG menyatakan bahwa pada akhir tahun 1981, saat sedang ditahan oleh sebuah unit inteligen di Papua, ia menyaksikan 20 kepala manusia dikubur di sekitar kantor unit

tersebut. "Saya menyaksikan sendiri bahwa kesemuanya adalah kepala para anggota OPM," katanya kepada *Tapol*. Ia mengingat, "salah satunya adalah kepala seseorang yang matanya buta sebelah". Ia juga menyaksikan orang-orang Papua yang disuruh menggali sendiri kuburan mereka sebelum mereka dipukul dengan gada atau dibayonet hingga tewas.

Pada satu kesempatan, perlakuan brutal tersebut menjadi bahan penyelidikan tersendiri dalam tubuh militer secara internal. Pada bulan Desember 1980, seorang bintara bernama Soeyoto, yang beragama Katolik, memberikan keterangan secara rinci kepada KOPKAMTIB mengenai eksekusi yang dilakukan terhadap dua tertuduh OPM, Pilemon Wenda dan Oscar Kaso. Soeyoto adalah orang kunci yang telah banyak menyaksikan tindakan serupa di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Saat itu ia bertindak sebagai sopir yang mengangkut para tahanan dan juga tentara — yang dipimpin oleh Kapten Subekti (yang terlibat dalam kasus penipuan tanah si penjual tempe). Para tahanan dibawa ke semak-semak, matanya ditutup dan kemudian dibunuh. Salah satu pelaku eksekusi adalah Sersan Wiro Sudarmo, yang juga terlibat dalam kasus tanah penjual tempe. Orang-orang Papua tersebut dipukuli dengan alat yang terbuat dari besi, hingga tewas. "Dari jalan, saya hanya mendengar bunyi pukulan," kata Soeyoto, seraya menambahkan bahwa saat itu ia hanyalah mematuhi perintah untuk mengangkut para tahanan. Petugas investigasi KOPKAMTIB tampaknya tidak mempercayai Soeyoto dan permasalahan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.

Dokumen interogasi tersebut juga menunjukkan bahwa orang-orang Papua tersebut terkadang menunjukkan sikap menentang selama interogasi, terutama pada awalnya. Kebanyakan mereka yang ditahan pada tahun 1980-an, mengecam eksploitasi ekonomi di Papua dan juga praktek-praktek rasialis yang dilakukan di sana. Seorang anggota ABRI keturunan Melanesia yang berpangkat kopral mengatakan bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan sebuah kelompok "pengibar bendera" karena selama berdinas di militer, "saya merasa sangat menderita sekian lama dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari atasan". Salah satu pernyataan yang bisa dikatakan paling blak-blakan mengenai harapan OPM untuk bisa mengusir orang-orang Indonesia dari Papua berasal dari Felix Yaung:

> Yang kami sebut orang Indonesia adalah mereka yang berambut lurus. Motivasinya adalah karena mereka yang berambut lurus itu menguasai semua pekerjaan dan penduduk asli Papua tidak diberi kesempatan dalam banyak hal. Setelah berhasil mengusir si rambut lurus, kami akan mendirikan sebuah negara baru, yaitu negara Papua.[18]

Pada akhir wawancara, Yaung memperlunak sikapnya terhadap penguasa.

Laporan Amnesti Internasional pada tahun 1983 menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 1982, dilaporkan terdapat lebih dari 400 orang dari daerah sekitar Jayapura, Wamena dan Fak-Fak ditahan karena alasan politis. Kelompok hak asasi manusia tersebut paham bahwa kejadian tersebut pasti juga terjadi di banyak tempat lainnya, termasuk Serui, Biak dan Manokwari. Seperti halnya lem-

baga-lembaga lain, termasuk pula Palang Merah Internasional, Amnesti tidak diizinkan mengunjungi Papua untuk melakukan pengamatan secara langsung. Mereka diyakinkan bahwa "para tahanan diperlakukan dengan semestinya".

KOPKAMTIB, yang kekuasaannya di Indonesia hampir tak terbatas, telah mempelopori "perang tersembunyi" terhadap OPM. Hanya sebagian kecil kasus-kasus yang terjadi di daerah tersebut yang sampai ke meja pengadilan atau dipublikasikan oleh media masa. Seluruh rakyat Papua memahami bahwa perlakuan buruk ataupun menghilangnya seseorang tanpa diketahui nasibnya merupakan pengalaman sehari-hari di bawah kekuasaan Indonesia. Sebelumnya, memberi racun adalah metode yang paling umum digunakan untuk menghukum para tahanan, tetapi pada tahun 1980-an, militer tampaknya lebih suka menggunakan cara-cara seperti memukul bertubi-tubi, mencekik, menusuk bahkan menembak.

Tindakan kejam terhadap OPM dan mereka yang dituduh sebagai simpatisannya menjadi format operasi militer, dengan fokus sasaran daerah pedesaan. Beberapa kasus yang terjadi pernah diberitakan oleh pemerintah, tetapi tidak pernah menyebut mengenai perilaku para tentara, yang menjadi objek pemberitaan hanya di luar negeri. Pada tahun 1984, Seth Rumkorem yang membuat pernyataan terhadap kelompok kerja PBB untuk penduduk asli (*UN Working Grup on Indigenous Populations*) menyebutkan daftar operasi ABRI:

Operasi Tumpas	1964-1968	di bawah Jenderal Kartidjo dan Bintoro
Sadar	1969	di bawah Jenderal Sarwo Edhie.
Wibawa	1970-1974	di bawah Jenderal Acub Zainal
Kikis	1977	di bawah Jenderal Imam Munandar
Galang	1981	di bawah Jenderal Santoso
Sapu Bersih	1981-1984	di bawah Jenderal Santoso dan Sembiring.

Seharusnya ditambahkan dalam daftar itu "operasi sate", yang dilancarkan segera sesudah peristiwa desersi para serdadu Papua pada bulan Februari 1984.

Pemberitaan mengenai aksi Indonesia tersebut di luar negeri sangat merugikan Indonesia. Pada bulan November 1981, senator Australia bernama Cyril Primmer (ALP), pada sidang senat Australia mengajukan permintaan mengenai detail laporan peperangan antara Indonesia dan OPM. Ia menyarankan pemerintahnya agar menerjunkan personel intelijen mereka di wilayah tersebut untuk mengumpulkan fakta. Sebagai jawaban, pemerintahnya mengatakan bahwa di antara kedua negara tidak ada kerjasama intelijen semacam itu. Primmer memberi contoh yang spesifik. Apakah tentara melakukan pembumihangusan terhadap desa Bramali, Aip, Sabeap, Skorip dan Aimbai? Mengapa penduduk desa tersebut tidak dapat melarikan diri, terutama kaum wanitanya? Tak ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut.

Pada bulan Juni 1982, Niugini Nius memberitakan bahwa pesawat-pesawat milik pasukan Indonesia membom daerah Manokwari, tempat di mana OPM dilahirkan. Per-

tempuran tersebut juga dapat disaksikan dari area pertambangan Ok Tedi yang terletak di perbatasan.

Operasi semacam inilah yang menyebabkan tewasnya sebagian besar rakyat Papua. Kelompok Pemka yang berada di Port Moresby memperkirakan bahwa jumlah tewas keseluruhan sejak tahun 1962 mencapai 150.000 orang. Sesudah mengadakan investigasi pada tahun 1983, sebuah kelompok masyarakat anti perbudakan (*Anti Slavery Society*) di London mengatakan bahwa jumlah tersebut mencapai 200.000. Walaupun pernah dikecewakan PBB, masyarakat Papua tetap menginginkan adanya tekanan dunia luar terhadap para pemimpin Jakarta karena tindakan mereka dapat dikategorikan dalam *genocide*. Kaum intelektual Papua Barat mengerti bahwa tindakan pelanggaran terhadap Konvensi PBB yang mengatur masalah *genocide* dapat berbentuk segala tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan — seluruh atau bagian dari — suatu bangsa, suku bangsa, ras ataupun kelompok agama. Tetapi masyarakat Melanesia terkejut karena ternyata dunia mengabaikan mereka. Sebuah buku yang membahas masalah genocide menuliskan bahwa kurangnya dukungan terhadap mereka, disebabkan oleh anggota PBB yang saling berkolusi agar dapat melindungi praktek *genocide* yang terjadi di negara mereka masing-masing, dari usaha pengeksposan ke hadapan publik. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana OAU saling bersepakat untuk mencegah adanya pembicaraan mengenai pembasmian suku-suku asli di Afrika.[19] Barangkali itulah alasannya mengapa beberapa negara Afrika menyatakan ketertarikannya terhadap program transmigrasi Indonesia.

Rakyat Papua Barat, khususnya anggota penuh OPM, mengerti bahwa Indonesia mempunyai pendukung-pendukung "besar" dari luar negeri. Tanpa didukung persenjataan modern dan latihan militer tingkat tinggi dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, atau bahkan Israel, Indonesia tidak mungkin bisa mempertahankan mobilisasinya di Papua, ataupun Timor Timur. Dalam anggaran negara Indonesia tahun 1985-1986, 45% dana yang dialokasikan untuk dana pengembangan militer (total A$ 811.4 juta) berasal dari dana bantuan dan hutang luar negeri (*Weekend Australia*, 12 Januari 1985). Dana bantuan Australia untuk ABRI dalam tahun 1984 ini berjumlah A$ 10 juta, termasuk bantuan berupa pesawat jet, latihan penggunaan senjata ringan, pelatihan navigasi udara dan pemeliharaan pesawat serta kerja sama berkelanjutan dalam bidang penelitian dan pengembangan. Dalam satu dekade yang dimulai sejak tahun 1974, sejumlah 1.032 personel militer Indonesia telah diikutsertakan dalam pelatihan atau studi banding ke Australia. Sementara itu, penyokong militer terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat, yang merupakan pendukung kuat presiden Soeharto semenjak ia mulai "benar-benar" berkuasa pada tahun 1975.

Jika Indonesia tidak mempunyai jet tempur, pesawat yang dipersenjatai secara khusus, helikopter, pengangkut pasukan, jeep, kapal patroli, peluru, bom dan napalm, mungkin mereka akan masuk hutan dengan berjalan kaki serta menghadapi OPM dengan kekuatan berimbang. Hasilnya mungkin akan berbeda; maka dari itu ABRI bergerak dengan kekuatan penuh ditambah dengan kekuatan teknis.

Papua Barat merupakan satu-satunya zona perang sebelum bergabungnya Timor Timur pada tahun 1975, dan telah banyak menderita akibat aksi-aksi militer. Sekarang ini, militer ada di setiap sudut Papua Barat. Walaupun penjagaan di pos-pos penting seringkali hanya berjumlah dua orang, tetapi mereka dilengkapi dengan radio yang menghubungkan mereka dengan basis yang lebih besar. Bala bantuan dari udara atau kekuatan lainnya dapat segera didatangkan — situasi ini sudah sangat dipahami oleh masyarakat setempat.

Negara-negara Barat sangat mendukung presiden Soeharto dan hampir tidak pernah melontarkan kritik terhadap tindakan-tindakan Indonesia yang sudah melewati batas, oleh karenanya pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia di tahun 1984, para pemimpin Indonesia menyatakan kebanggaannya karena ABRI telah berhasil mencatat sejarah sebagai kekuatan stabilisator masyarakat. Pada kenyataannya, pola pendekatan ABRI di Papua Barat yang terkadang dilakukan dengan terang-terangan ataupun tersamar justru telah menghasilkan suatu langkah mundur sampai pada tingkat paling parah yang pernah tercatat dalam sejarah propinsi tersebut — sepersepuluh populasi penduduk wilayah itu melarikan diri ke pengasingan, sedang mayoritas yang masih tersisa semakin kecewa kepada pemerintahan Indonesia daripada sebelum-sebelumnya.

Strategi dua arah, yang berakibat pada pergolakan yang semakin besar pada tahun berikutnya, menjadi semakin intensif pada tahun 1983 ketika pasukan payung Kopassanda diterjunkan ke Papua. Reputasi resimen tersebut sudah sangat dikenal sebelumnya. Selama beberapa tahun keku-

atan Kopassanda telah teruji di Timor Timur, sedang di Jawa mereka dibayangi tuduhan mengeksekusi ribuan orang yang dituduh sebagai pelaku kriminal. Lebih lanjut, pendiri resimen tersebut adalah Benny Moerdani, yang kemudian pernah menjabat sebagai Panglima ABRI. Pengiriman pasukan tersebut ke Papua dilatarbelakangi oleh adanya sinyalemen yang menyatakan bahwa seluruh kekuatan OPM akan digabungkan, juga rencana kemunculan Rumkorem selama beberapa waktu di wilayah tersebut.

Sebagian pasukan diperintahkan berpakaian preman dan siap untuk melakukan tugas khusus. Mereka bertindak atas perintah langsung dari Jakarta, dan bukan atas perintah komandan militer tingkat propinsi. Sasaran utama mereka adalah kelompok elite masyarakat Papua di Jayapura serta kelompok intelektual universitas, baik mahasiswa maupun staf pengajar. Selain itu target lainnya adalah Pusat Informasi Pembangunan Irian Jaya (*Irian Jaya Development Information Service Centre — IrjaDisc*), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didanai oleh Asia Foundation yang bergerak pada pendampingan masyarakat melalui penerbitan jurnal *Kabar Dari Kampong*. Dengan tujuan untuk menghentikan aktivitas kelompok pembangkang dan mendapat informasi inteligen mengenai OPM, Kopassanda menangkap lebih dari 20 orang Papua yang dicurigai dan menahan mereka serta mengasingkan mereka supaya tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Salah satu di antara mereka adalah Titus Dansidan, seorang karyawan kantor gubernur yang berumur 50 tahun. Militer meminta keterangan darinya mengenai penyerangan yang dilakukan ter-

hadap tim geologi yang diketuai oleh seorang Australia di dekat lembah sungai Mamberamo, pada tahun 1982.

Pada tanggal 30 November, pasukan berpakaian preman menangkap seorang intelektual terkemuka Papua, Arnold Clements Ap yang berusia 38 tahun. Penangkapan tersebut berakibat fatal bagi diri Ap sendiri, selain itu juga mengundang kecaman dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Peristiwa itu telah menciptakan sebuah simbol martir Papua Barat.

Arnold Ap lahir di pulau Numfor, dekat Biak dan kemudian pindah ke Jayapura untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi, dengan spesialisasi mengenai masyarakat Papua. Salah seorang pembimbingnya adalah Dr. Malcolm Walker yang berasal dari Australia dan sedang ditugaskan oleh UNESCO. Walker mengajari Ap dalam bidang teknis dan berpendapat bahwa ia adalah "orang yang baik dan berprinsip". Menurutnya, Ap bukanlah tipe orang yang "suka mencari masalah". Ia hanyalah sosok yang berkomitmen memahami dan mempromosikan budaya masyarakatnya. Beberapa sarjana dari luar negeri juga mengungkapkan pendapat serupa, sementara itu rekan-rekannya sesama orang Papua mengatakan bahwa ia lebih merupakan pengejawantahan budaya mereka. Salah seorang yang menghadiri pemakaman Ap dan menuliskan obituari untuknya pada tahun 1984 menceritakan;

> Kita berjalan menuju rumahmu, dan menegur semua orang yang kita temui. Tampaknya setiap orang mengenalmu; anak-anak, para wanita, para orang tua, dan kamu berjalan pelan, berhenti untuk bercakap-cakap di sepanjang perjalanan itu,

kamu lebih mirip seorang pendeta.[20]

Ap bekerja sebagai kurator pada museum ethnology di UNCEN dan pada tahun-tahun terakhir tersebut sangat berperan dalam pencarian dana untuk usaha pengumpulan benda-benda hasil budaya masyarakat Melanesia. Tetapi hasil kerjanya yang paling berharga adalah dalam bidang tari dan musik. Pada tahun 1978, ia membentuk sebuah grup kebudayaan yang dinamakan Mambesak, yang artinya adalah "burung cendrawasih" dalam bahasa Biak. Kelompoknya berusaha mencatat tradisi kerakyatan dari seluruh pelosok Papua. Ia dan anggota Mambesak lainnya mengunjungi berbagai tempat dan merekam lagu-lagu rakyat untuk dibuat katalog dan bahkan sering merekamnya kembali di Universitas. Usaha yang dilakukan Mambesak banyak diketahui orang dan saat itu mereka mempunyai jadwal pertunjukan mingguan di radio milik pemerintah. Nama baik Ap selanjutnya semakin dikenal, dan ia dikenal sebagai orang Papua yang lebih mementingkan kesetiaan pada tanah kelahirannya. Walaupun pihak penguasa merasa khawatir, tetapi di sisi lain mereka juga mengakui pengaruh luas Mambesak; bahkan para tentara pun terkadang memperdengarkan lagu-lagu tersebut di hutan melalui pengeras suara, sebagai upaya mempengaruhi anggota OPM agar mau menyerahkan diri. Biasanya, dampak yang terjadi justru sebaliknya karena rakyat Papua justru memandang Mambesak sebagai barisan terdepan dalam usaha mempertahankan kebudayaan mereka.

Ap bukan saja bermaksud untuk sekadar mempertahankan budaya Papua, tetapi juga berusaha membangkit-

kannya kembali setelah 30 tahun tenggelam. Pada tahun 1981, ia memulai usaha untuk menghidupkan kembali legenda Koreri, yang mengajarkan bahwa Tuhan akan memberi kemerdekaan bagi rakyat Papua asalkan mereka taat dan setia pada kepercayaan adat tersebut. Ap kemudian dijuluki sebagai konor pada jamannya, yaitu seseorang yang dapat bermain gitar, menari, menyanyi dan melukis. Banyak rekan-rekannya, sebagian besar berasal dari Biak, yang memberi dukungan penuh kepadanya. Ajaran Kristen juga merupakan elemen penting, karena Injil, seperti halnya legenda kuno yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjanjikan bahwa keadilan pasti akan berpihak pada yang benar. Sebagian besar penganut ajaran Koreri aktif di Gereja Kristen Indonesia (GKI).

Pada tahun 1982, menurut seorang wartawan yang khusus mengamati Nugini, Geoff Heriott, para pengikut Ap telah merencanakan melakukan protes dengan aksi turun ke jalan sambil mengacung-acungkan Injil. Heriott, melalui programnya yang bernama Indian-Pasific di Radio ABC, mengatakan bahwa sebelumnya angka penjualan kitab Injil sangat meningkat dengan adanya rencana tersebut. Tetapi, demonstrasi yang telah direncanakan itu tidak pernah terjadi.

Salah seorang rekan Ap sejak kanak-kanak, adalah Rex Rumakiek yang kelahiran Biak dan pada tahun 1970 melarikan diri ke PNG, kemudian ke Vanuatu. Beberapa bulan setelah kematian Ap, Rumakiek yang sedang berada di Sydney menegaskan kepada penulis bahwa Ap memang dianggap sebagai konor oleh rakyat Papua.

Dalam bahasa Inggris, istilah itu sama saja dengan seorang filsuf, atau orang suci yang memiliki banyak kekuatan. Orang-orang semacam itu selalu memikirkan hal-hal yang baik, memahami kehidupan dengan sepenuh hati, atau bahkan dapat meramal masa depan. Contohnya adalah Ap, yang sebelumnya telah meramalkan akan kematiannya sendiri. Ia tahu bahwa takdir tidak dapat dielakkan. Dalam hal ini Anda dapat membuat perbandingan dengan kematian Yesus Kristus.

Rumakiek menjelaskan bahwa masih ada lagi konor di Papua dari berbagai tempat di luar Biak, tetapi Arnold Aplah yang paling dikenal. Sama dikenalnya dengan sikapnya yang kukuh mengenai kemerdekaan.

Ap juga telah melihat jauh ke depan cita-cita nasionalisme rakyat Papua dalam politik Indonesia secara keseluruhan. Dalam perjalanannya ke Jakarta ia telah bertemu berbagai aktivis hak asasi manusia, yang sebagian besar di antaranya anti-Soeharto. Mereka, juga mengagumi Ap dan memperkirakan bahwa nantinya ia akan sangat berperan dalam membawa perubahan di Papua.

Aspek-aspek semacam ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah. Dalam beberapa kesempatan ia pernah diinterogasi, tetapi karena nama besarnya maka ia dilepaskan. Sejak itu ia bersikap sangat berhati-hati dan seringkali menolak untuk diajak diskusi mengenai masalah politik, kecuali dengan teman dekat. Seorang asing yang pernah berkunjung ke Papua menyatakan bahwa Ap sangat berhati-hati dalam pembicaraan, khususnya bila menyerempet masalah kekuasaan Indonesia. Seorang lainnya mengatakan bahwa Ap pernah menghindar darinya dengan mengatakan, "Mari datang ke rumah saya malam ini, karena saya

hanya mempunyai kesempatan sekali ini saja untuk bisa mengundang anda."

Secara sepintas, tekanan dari penguasa tampaknya memang berpengaruh besar pada diri Ap. Ia adalah tipe orang yang ramah. Penampilan fisiknya, yang lebih gemuk daripada dulu menambah kesan tersebut. Tetapi sebenarnya, ia tahu masalah yang bakal ia hadapi. Ia pernah melontarkan hal tersebut di akhir bulan November 1983, di malam setelah Mambesak mengadakan pertunjukkan di depan para pejabat penting, termasuk di antaranya istri Jenderal Moerdani. Selama pementasan tari-tarian, wakil gubernur Irian, Sugiyono mengagumi burung cendrawasih yang menjadi bagian kostum yang dikenakan Ap. Ia menyarankan kepada sang pimpinan Mambesak agar memberikan burung tersebut kepada Ibu Moerdani sebagai cendramata. Ap merasa marah, bukan saja karena burung tersebut merupakan bagian terpenting dari kostum mereka, tetapi juga karena burung tersebut termasuk jenis yang langka dan hanya terdapat di Numfor, tanah kelahiran Ap. Walau begitu ia akhirnya memberikan burung itu kepada istri salah satu orang kuat di Indonesia tersebut. Anggota Mambesak memprotes tindakan Ap tersebut, dengan alasan utama bahwa burung tersebut termasuk jenis yang dilindungi dan dilarang dibawa keluar Papua. Jawaban Ap adalah, "Saya berharap suatu saat hadiah tersebut akan bisa berguna bagi saya di Jakarta, bila saya ditangkap." Tentu saja ia hanya bercanda, karena kemudian memang terbukti bahwa pemberian hadiah tersebut tidak membantu apa pun.

Keesokan siangnya 30 November 1983, Arnold Ap

diambil dari rumahnya oleh pasukan berbaju preman dari Kopassanda dengan menggunakan mobil tanpa plat. Keluarganya tidak tahu keberadaannya, hanya diberitahu bahwa ia berada di sebuah kamp penahanan bernama Panorama di Jayapura. Sebuah harian terbitan Jakarta, Sinar Harapan, mengetahui penangkapan tersebut dan memberitakannya. Koran tersebut mendapat teguran keras dari pemerintah dan sang editor diminta segera terbang ke Jayapura untuk menyampaikan permohonan maaf serta untuk mendengar kisah "yang sesungguhnya". Ini adalah langkah awal dari pemerintah dalam berbagai usahanya untuk menyebarluaskan cerita palsu mengenai nasib Ap.

Lembaga Bantuan Hukum, atas nama Ap, meminta agar sang tahanan diperlakukan sesuai dengan KUHAP tahun 1981, dan tuduhan yang dikenakan padanya harus dibuktikan di pengadilan. Pada saat permohonan tersebut sedang dijadikan pertimbangan oleh penguasa, pada tanggal 9 Februari 1984, sebuah aksi pengibaran bendera OPM berlangsung. Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh adanya desersi anggota militer, serta dimulainya arus pengungsi ke PNG. Di antara para pengungsi tersebut terdapat istri Ap, Corrie, yang sedang hamil beberapa bulan, serta ketiga anak mereka.

Pada tanggal 20 Februari, Ap dan keempat tahanan Kopassandha lainnya diserahkan kepada polisi. Tuduhan yang akan dikenakan padanya sedang dipersiapkan. Mereka menitikberatkan pada dugaan keterlibatannya sebagai penghubung OPM, khususnya bagi kelompok yang berada di area Genyem pimpinan oleh Yance Hembring. Hal itu disam-

paikan kepada atasan Ap di Universitas, di mana yang bersangkutan menyadari bahwa Ap tidak akan bisa bekerja untuk beberapa lama. Untuk itu gaji Ap lalu dipotong.

Seperti halnya kaum nasionalis Papua lainnya, Ap memang jelas-jelas pro-OPM. Belakangan, menteri luar negeri Dr. Mochtar menegaskan bahwa pemerintah telah mencurigainya selama beberapa lama, tetapi sangat kesulitan untuk membuktikannya. Setelah kematian Ap, Seth Rumkorem, dalam wawancara dengan radio ABC melalui telepon dari Athena, mengatakan bahwa Ap bukan saja merupakan anggota OPM, tetapi juga berperan sebagai "menteri dalam negeri dalam pemerintahan saya (PRG)". Tampaknya kedudukan Ap sebagai etnolog, konor dan anggota OPM telah berfusi.

Di tangan polisi, Ap merasa keadaannya menjadi lebih baik. Ia menceritakan kepada seorang teman yang diperbolehkan mengunjunginya bahwa ia telah diperlakukan dengan buruk oleh Kopassandha. Rekannya sesama tahanan mengatakan bahwa mereka juga telah disiksa. Sesudahnya, Ap diberi kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat di luar penjara, dengan dijaga oleh petugas. Ia dibawa ke kampus UNCEN, untuk memperlihatkan kepada mahasiswa bahwa ia tidak menghilang. Sekembalinya ke penjara ia dikunjungi oleh para pendeta GKI serta diberi sebuah radio.

Sementara itu di Jakarta, empat mahasiswa Papua mempublikasikan kondisi Ap, dan juga masalah penindasan hak asasi manusia lainnya melalui surat yang mereka tulis kepada anggota DPR. Segera sesudah itu, mereka diincar

oleh militer. Karena menyadari bahwa hari-hari kebebasan mereka tinggal sebentar lagi, maka mereka merencanakan sebuah tindakan cerdik. Pada hari dan jam yang telah ditentukan, mereka memasuki kedutaan besar Belanda dan meminta suaka politik. Sebelumnya mereka telah mengontak para wartawan di Belanda dan memberikan agenda rencana mereka. Beberapa saat kemudian, para wartawan mengontak kantor kementrian luar negeri Belanda dan meminta kepada mereka agar beberapa orang Papua yang sedang mencari perlindungan di kedutaan mereka di Jakarta, dapat diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Belanda menyetujui permohonan tersebut dan hasilnya keempat orang tersebut bisa terbang meninggalkan Indonesia, dengan diiringi aksi turun ke jalan, yang ditunggangi pemerintah, baik di Jakarta maupun di Papua Barat. Insiden tersebut menunjukkan bahwa generasi baru Papua telah belajar untuk tidak mudah percaya pada pemerintah negara lain, dan lebih menyadari arti penting media asing.

Penahanan terhadap Ap telah menarik perhatian pihak luar negeri. Para simpatisan yang berada di PNG berharap agar pemerintah PNG dapat menengahi permasalahan tersebut; tetapi PNG yang sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Jakarta, tidak melakukan tindakan apapun. Australia mungkin juga akan bersikap serupa, bila tidak ada desakan dari senator Alan Missen — yang telah lama menaruh keprihatinan atas berbagai peristiwa yang terjadi di Papua dan Timor. Missen adalah pimpinan kelompok amnesti dalam parlemen. Dalam rapat senat, ia mendesak agar pemerintahnya mencari fakta mengenai status

Ap dan kemudian ia diberitahu bahwa hal itu akan dilakukan oleh duta besar mereka di Jakarta, Rawdon Dalrymple. Sebenarnya Australia bisa lebih melakukan tekanan kepada Indonesia, tetapi seperti telah berulangkali ditegaskan oleh menteri luar negeri mereka, Hayden, intervensi tersebut tidak akan banyak pengaruhnya. Pada rapat senat berikutnya, tanggal 30 Mei, dalam pernyataannya Missen menyebut "almarhum Arnold Ap".

Pada hari Sabtu, 21 April, pukul 08.00 malam, Pendeta Bonay dari GKI meminta izin untuk mengunjungi Arnold Ap dan melakukan doa bersamanya. Besok adalah hari Paskah. Pendeta tersebut diizinkan bertemu Ap dan juga ketiga rekan tahanan lainnya. Pada pukul 09.00 malam, Bonay pulang ke rumah. Rupanya itu adalah terakhir kalinya ia melihat Ap dalam keadaan hidup.

Pada tengah malam, kelima orang tahanan meninggalkan sel mereka dengan ditemani seorang penjaga penjara yang juga orang Papua, Pius Wanem — yang tampaknya mempunyai masalah dengan alkohol. Apa yang terjadi sesudah itu hanya diketahui oleh pasukan Kopassanda yang mengawasi jalannya usaha melarikan diri tersebut. Menurut wartawan Peter Hastings, mereka memberi iming-iming uang dalam jumlah besar kepada Pius untuk mendalangi pelarian "yang telah diatur" tersebut (*Sydney Morning Herald*, 27 Agustus, 1984); Kopral John Kraar, salah seorang pembelot yang melarikan diri ke PNG, mengatakan jumlah yang ditawarkan adalah Rp 500.000,-.

Pada hari Senirnnya, jasad Eddy Mofu ditemukan oleh para nelayan di pantai dekat dengan Base-G, bekas markas

besar Amerika jaman dulu, yang berada di wilayah sekitar Jayapura. Jasad tersebut telah lebam dan bengkak sehingga sulit untuk dikenali. Dalam pemeriksaan tampak bahwa semua itu diakibatkan oleh siksaan. Keluarga Mofu sangat *shock* karenanya. Pada tahun 1979, ayah Eddy yang bernama Baldus juga tewas di tangan militer.

Sementara itu jasad Arnold Ap ditemukan di sebuah kamar mayat di rumah sakit Aryoko, Jayapura, pada tanggal 26 April, oleh seorang perawat yang seketika itu juga dapat mengenali Ap. Melihat kondisi Ap yang menampakkan bekas dipukuli, ditambah bekas tali di tangan dan luka di perut, perawat tersebut — yang terhitung cukup berani — memberitahu teman Ap sebelum jasad tersebut nantinya dikubur diam-diam. Karena beritanya sudah tersebar luas, pemerintah akhirnya mengirim jasad Ap kepada keluarganya. Jasadnya dikuburkan pada tanggal 1 Mei, dengan lebih dari seribu orang pelayat hadir pada upacara pemakamannya. Sementara itu kedua tahanan lain yang berusaha melarikan diri bersama mereka, kembali dipenjarakan sedangkan yang kelima, yaitu Alex Membri berhasil mencapai kamp pengungsi di PNG. Ia menceritakan bahwa saat itu ia telah meninggalkan Ap dan rekan-rekan, sebelum mereka sampai ke taxi yang telah disewa untuk mengantar mereka ke Base-G, di mana sebuah perahu motor telah menunggu untuk membawa mereka ke tempat yang aman.

Kematian Ap diumumkan oleh pemerintah seminggu kemudian. Saat yang dipilih sangat tepat, karena berita tersebut diumumkan di sela-sela seminar mengenai pembangunan di Papua Barat yang diadakan oleh Ikatan Warta-

wan Indonesia dengan peserta baik dari dalam maupun luar negeri. Pada acara pembukaan, seorang anggota ABRI menyampaikan informasi bahwa seorang Pembangkang dari Irian, Arnold Ap, telah terbunuh pada saat berusaha melarikan diri dari penjara. Para peserta seminar merasa terkejut dan sekaligus merasa curiga. Beberapa minggu sesudah acara tersebut, muncul berbagai pertanyaan yang sifatnya lebih detail. Apakah Ap dipukuli? Mengapa luka-luka, yang terbukti sebagai penyebab kematiannya — beberapa orang mengatakan lubang bekas peluru, dan beberapa orang lainnya mengatakan bekas tusukan bayonet — jaraknya berdekatan? Bukankah orang yang melarikan diri dari penjara biasanya ditembak secara serampangan, atau bahkan hanya ditembak kakinya untuk mencegahnya melarikan diri?

Indonesia tetap mempertahankan versi ceritanya, dan baru memberikan penjelasan rinci setelah adanya tekanan keras dari luar negeri. Dijelaskan bahwa Ap telah tertangkap pada saat sedang menunggu motor boat yang akan membawanya mengitari tanjung menuju PNG. Ia telah ditembak dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka-luka di perutnya. Sebelum itu penjelasan mengenai kasus Ap diungkapkan menteri luar negeri — Dr. Mochtar — pada sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di bulan Juni. Ia mengatakan bahwa Ap dan dua petugas penjara telah tertangkap ketika sedang terkatung-katung di laut. Saat itu perahu motor yang akan membawa mereka ke PNG kehabisan bahan bakar.

> Petugas telah berusaha keras agar mereka mau menyerah. Tiba-tiba kedua petugas penjara tersebut melepaskan tembakan ke

> arah kapal patroli petugas, yang telah berbalik arah, sehingga menimbulkan korban termasuk Ap.[21]

Mochtar mengatakan bahwa sebelumnya Indonesia merasa enggan untuk membeberkan cerita tersebut karena merasa bahwa selama ini pers, khususnya di Australia, suka membuat "tuduhan yang menyakitkan" terhadap Indonesia dan apa pun yang mereka sampaikan akan disangsikan. Ia juga mengritik sebuah pernyataan yang dibuat oleh 130 orang sarjana Australia yang berisi kecaman terhadap peristiwa pembunuhan tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Mochtar membuat kejutan dengan mengatakan bahwa informasi mengenai penembakan tersebut ia peroleh dari seorang duta besar negara asing yang tidak bisa ia sebutkan namanya. Duta besar tersebut mendapat informasi dari *contact person* di Papua. Hari berikutnya, diketahui bahwa yang dimaksud adalah duta besar Australia, Dalrymple. Berikut adalah komentar Peter Hastings dalam kolom mingguannya:

> Selama hampir 40 tahun terjun dalam jurnalistik, baru kali ini saya mendengar ada menteri luar negeri dari sebuah negara penting yang mengutip dari, "duta besar yang tidak bisa disebutkan namanya" sebagai dasar pernyataan kenegaraan. (*Sydney Morning Herald*, 2 Juli , 1984)

Mungkin pihak militer telah menginformasikan cerita yang sebenarnya, tetapi Mochtar yang menganggap Dalrymple mempercayai versi cerita penembakan tersebut lalu cenderung mengambil versi tersebut untuk dipublikasikan. Ada pula kemungkinan lain, yaitu semakin memburuknya hubungan antara Mochtar yang "seperti merpati" dengan

militer yang "seperti elang" sampai-sampai di antara kedua belah pihak memutuskan hubungan kerja sama sama sekali, sehingga Mochtar harus berusaha keras mencari fakta sendirian. Pada akhir bulan Juli, John Kraar, salah seorang polisi yang membelot dan mengungsi ke kamp Blackwater di PNG mengatakan bahwa Ap serta beberapa rekannya telah bersembunyi di sebuah gua di tepi pantai. Perahu motor mereka tidak bisa digunakan untuk laut yang ganas dan diduga mereka sedang berusaha mencari penggantinya. Saat itu, Pius Wanem telah kembali ke Jayapura. Pada hari kelima, pukul 7.00 pagi, Ap meninggalkan gua untuk buang air kecil. Selanjutnya, sebuah tembakan menghajar tubuhnya dan ia terjatuh ke pantai dengan luka di perut. Ketika pasukan Kopassanda mendekatinya, mereka mendapati bahwa ia belum meninggal. Kemudian seorang serdadu menusuknya dengan bayonet. Tetapi Ap masih tetap hidup dan baru meninggal setelah berada di rumah sakit militer dan masih sempat menyanyikan beberapa baris lagu kebangsaan Papua Barat.

Setelah kematian Ap, anggota Mambesak yang tersisa memutuskan untuk bergabung ke hutan, dan sebagian di antara mereka pergi ke PNG. Grup kesenian rakyat tersebut memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah puncak ketenarannya. Sementara itu, sisa anggota mereka yang masih ada diperingatkan oleh penguasa untuk tidak secara khusus mementaskan kebudayaan Papua, tetapi harus menyatukannya dengan budaya Indonesia. Pada bulan September 1984, salah seorang bekas rekan Ap, Sam Kapissa, diancam akan menghadapi nasib yang sama dengan Ap bila ia me-

lakukan pelanggaran. Kemudian pada bulan November ia bersama dengan pemimpin masyarakat Biak, Wompere, dilaporkan telah ditangkap. Sementara itu masyarakat Papua tidak bisa berlama-lama menyesali matinya grup Mambesak, karena Kopassanda masih saja melakukan berbagai aksinya. Di hutan masih ada ratusan pejuang OPM dan ribuan penduduk desa pendukungnya. Pemerintah menganggap mereka sebagai ancaman keamanan yang sama berbahayanya dengan elite perkotaan. Antara bulan Maret-Juni 1984, unit-unit ABRI melakukan gerakan penyusuran di daerah-daerah pedesaan dalam usahanya mencari OPM. Menurut para pengungsi yang berada di PNG, militer tidak mau bersusah payah membedakan antara orang-orang yang mendukung Indonesia, yang bersedia memberi informasi kepada mereka, atau yang mengambil sikap diam, mereka semua tetap saja dianggap OPM. Sebagaimana tercatat dalam laporan ICJ tahun 1984 mengenai kondisi kritis para pengungsi, ujung tombak pertahanan ABRI berada di tangan "baret merah" Kopassandha. Sasaran awal mereka adalah melakukan penangkapan secara mendadak terhadap penduduk desa yang dicurigai, menyiksa mereka sampai mati dan merusak atau menyita harta kekayaan mereka. Dan seperti biasa, desa-desa yang banyak terdapat babi akan dijadikan target latihan. Ketika berita penjarahan oleh ABRI telah menyebar di sepanjang wilayah perbatasan, banyak orang Papua yang memutuskan untuk meninggalkan Papua sebelum kedatangan ABRI. Pada bulan September, sebagian besar pelintas batas mengaku melarikan diri karena adanya isu mengenai aksi ABRI tersebut, dan mereka me-

milih untuk menghindar terlebih dahulu ketimbang harus menghadapinya.

Arus pengungsi pada tahun 1984, adalah yang paling akhir, tetapi bukan berarti tidak akan ada lagi orang Melanesia yang akan menentukan hidup mengikuti langkah kakinya. Dan salah seorang di antara mereka mengungsi ketika masih berada di perut ibunya, Corrie Ap. Pada bulan Agustus, bayi laki-laki tersebut lahir di PNG dan dinamai persis seperti ayahnya: Arnold C. Ap. Mungkin jika ayahnya masih hidup ia akan diberi nama tradisional seperti halnya ketiga kakaknya; yang masing-masing diberi nama yang artinya: Sang Matahari, Sang Prajurit, dan Kesatria Penjaga Para Pelaut. Arnold Ap telah menentang terhadap apa yang ia sebut sebagai "Melayunisasi" dan Westernisasi yang terjadi dalam masyarakat Papua, dan memilih hidup dengan kepercayaan yang ia anut. Dan karenanya, ia menjadi martir yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Papua.

Pada bulan Januari 1985, sebuah pengadilan berkaitan dengan kasus Ap digelar di Jayapura. Pada persidangan tersebut, empat orang Papua dituduh telah melakukan tindak pidana subversif, dan khususnya karena telah melakukan usaha membantu pelarian Ap beserta ke empat tahanan lainnya. Mereka adalah seorang pelajar bernama Jonas Rejauw, dua orang birokrat masing-masing Bob Souwela dan Izaak Arobaya, serta sang "penjaga penjara" yang berusia 24 tahun, yaitu Pius Wanem, yang dipercaya oleh para pengamat berperan sebagai titik kunci dalam konspirasi militer yang berakhir pada kematian Ap. Walaupun hasil akhir pengadilan tersebut tidak dipublikasikan di Papua Barat,

tetapi penulis menerima kiriman fotokopi keputusan pengadilan setebal 35 halaman segera sesudah persidangan tersebut selesai.

Kelima saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya, dua di antara mereka pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Arnold Ap. Bukti yang paling utama adalah sebuah senjata api jenis UZI, buatan Israel dan sebuah magazin berisi 16 peluru berukuran 9 mm. Prosekusi yang dipimpin oleh seorang pengacara militer tersebut menyimpulkan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Pius Wanem membubuhi obat pada kopi yang diminum dua rekan penjaga lainnya, dan ketika mereka tertidur, Wanem mengambil senjata mereka beserta kunci sel. Ia memimpin kelompok pelarian tersebut menuju ke sebuah taxi yang sudah menunggu lalu mereka berangkat ke Base-G. Di sana mereka memberi kode dengan menggunakan nyala korek api, tetapi karena ombak yang tinggi, perahu motor yang menunggu tidak dapat merapat ke pantai. Eddy Mofu berusaha mencoba untuk berenang sejauh 30 meter menuju perahu, tetapi ia tenggelam. Cerita berikutnya merupakan bagian yang paling tidak jelas dari transkrip tersebut, yang hanya menyatakan bahwa Ap telah tertembak "dalam sebuah operasi yang dilakukan Kopassanda", hingga tewas. Tidak ada penjelasan apa pun mengenai bagaimana pasukan baret merah mengetahui dan mencapai lokasi tersebut.

Kelompok Wanem dinyatakan bersalah karena telah "mengkhianati" negara Indonesia dengan bersimpati kepada musuh negara. Pius Wanem dituntut hukuman tujuh tahun penjara, tetapi kemudian diperingan menjadi lima setengah

tahun. Sementara yang lainnya masing-masing menerima tuntutan beragam antara dua setengah, lima dan setengah tahun. Entah berapa lama sebenarnya Wanem dipenjarakan.*

5.
Di Sisi Timur Perbatasan

"MASALAH perbatasan" antara Papua Nugini dan Indonesia berakar pada garis khayal yang dibuat para kolonialis Eropa di pulau itu. Di awal abad ke-20, Belanda, Jerman, dan Inggris memperluas wilayah koloninya demi membentuk imperium. Meskipun kekuasaan Jerman di Papua Nugini beralih ke Australia setelah Perang Dunia I masalah perbatasan sebagian besar tidak berubah. Saat Perang Dunia II pun, ketika Belanda hengkang dari sana bersama sederetan tahanan dari Tanah Merah dan kemudian kembali dengan membonceng Sekutu, hal yang sama tetap terjadi. Ketika tekanan Indonesia terhadap Belanda mencapai puncaknya pada tahun 1962, Australia mengawasi dengan ketat Papua Nugini yang sebenarnya berada dalam pengawasan PBB. Setahun kemudian Papua Nugini membagi wilayah perbatasan tersebut dengan "tetangganya dari Asia". Bagi para diplomat Canberra, Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dianggap sebagai negara komunis yang oleh karenanya men-

jadi tetangga yang tidak menyenangkan. Lebih jauh, mereka meramalkan akan timbul masalah antara orang Indonesia dan Melanesia. Perdana Menteri Sir Garfield Barwick mengatakan bahwa tak seorang pun mampu menggambarkan bagaimana cara pandang Indonesia terhadap orang kulit hitam. Soekarno hanya menghendaki wilayahnya, bukan masyarakat yang tinggal di sana.

Australia tidak terkejut dengan adanya gelombang pengungsi yang melintas perbatasan dan berjanji akan mengurusi masalah tersebut dengan simpatik. Tahun 1962 Barwick menjelaskan pada Parlemen bahwa:

> Selama masalah ini masih menjadi perhatian saya, apa pun persoalan yang muncul, apakah tentang suaka politik atau yang lainnya, akan ditanggapi dan diputuskan dari sudut pandang yang sangat manusiawi.[1]

Salah satu masalah yang dihadapi adalah penetapan batas-batas wilayah. Oleh karena itu Australia dan Indonesia mulai menentukan tanda-tanda yang tetap. Menurut rencana akan dibuat 14 tanda sepanjang 760 kilometer. Pada tahun 1984, ditentukan kembali 26 tanda yang lain meski pada awalnya hanya menentukan 4 tanda. Barwick menganggap kali ini Indonesia bersikap kooperatif.

Kemarahan massa yang sempat terjadi di Australia akibat "pengkhianatan" ini perlahan-lahan surut. Namun arus pengungsi menuju Papua Nugini tidak ikut surut. Di tahun 1965, tepatnya dua hari sebelum terjadi tragedi yang kemudian disebut sebagai usaha kudeta oleh komunis, Menteri Kewilayahan Australia menjelaskan kepada parlemen mengenai prosedur penyaringan pendatang dari Papua. Se-

muanya harus dimintai keterangan. Jika mampu mengungkapkan "alasan yang tepat" untuk tinggal, mereka akan diberi pertimbangan khusus untuk mendapat izin tinggal. Para pengungsi yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini akan diberi makanan, dirawat selayaknya oleh petugas perbatasan Australia dan dipulangkan ke Papua secepat mungkin. Sebulan kemudian, di Port Moresby, sang perdana menteri berjanji bahwa para pelarian politik akan ditangani dengan "pertimbangan kemanusiaan".

Di lapangan, pelaksanaan kebijakan Autralia itu dirasakan kurang toleran. Pertama, problem bahasa antara penjaga perbatasan dan para pendatang. Lalu juga problem perorangan antara para kiap (istilah bagi para petugas penjaga perbatasan saat itu) dengan pengungsi yang mayoritas berasal dari urban Papua Barat yang lebih mengerti situasi politik daripada pengungsi masyarakat awam yang sering dihadapi oleh para penjaga. Adakalanya mereka berusaha menyogok para penjaga perbatasan, hingga komunitas ini dikenal dengan julukan "tukang suap". Tapi tidak semuanya berhasil menyeberang

Seorang anggota dewan daerah, Wegra Kenu, menduga bahwa mereka yang benar-benar ingin mengungsi malah dipulangkan ke daerah asalnya oleh Australia dan kemudian dihukum oleh Indonesia. Juru bicara Departemen Kewilayahan menanggapinya dengan mengatakan bahwa belum terdengar adanya kabar bahwa mereka yang dipulangkan ke Papua Barat dijatuhi hukuman.

Paul van der Paur, mempunyai cerita tentang nasib seorang pengungsi (*New Guinea*, Desember 1965). Si pe-

ngungsi yang mantan pengurus Panitia Kemerdekaan Papua Barat mengatakan bahwa ia dipulangkan oleh pihak berwenang Australia padahal ia telah meminta izin tinggal di Papua Nugini. Berbulan-bulan ia berjalan menembus semak belukar untuk mengambil anak dan istrinya dari Jayapura. Akhirnya mereka berhasil lari ke PNG dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Sore hari pada tanggal 14 Mei 1965, mereka sampai di pos perbatasan Wutung lalu diwawancarai. Dalam surat keluhan terhadap pihak yang berwenang, keluarga tersebut menyatakan bahwa setahu mereka petugas perbatasan tidak bisa menghentikan mereka. Menurut para kiap, hal itu merupakan perintah "dari atas".

Saat diadakan Penentuan Pendapat (Pepera) di tahun 1969 kedatangan pengungsi menjadi hal yang rutin bagi PNG. Pada awalnya saja terdapat 1.900 orang yang datang. Mereka diizinkan tinggal di "kampung pengungsi" di wilayah perbatasan. Berikutnya, selama pemungutan suara kurang lebih tiga bulan, sebanyak 1.700 orang menyusul datang. Ada beberapa pihak yang melaporkan bahwa kiap mengusir para pengungsi layaknya "seperti binatang". *South Pacific Post* tanggal 11 Juni 1969 melaporkan bahwa setidaknya 28 orang Papua dikabarkan telah dibunuh oleh pasukan Indonesia di wilayah perbatasan. Banyak warga Papua yang dipulangkan memilih untuk mendirikan desa sendiri. Hal ini mendorong ABRI untuk melakukan "pembersihan" terhadap mereka. Langkah pembersihan ini dimulai dengan penyerangan terhadap sebuah kamp di wilayah utara perbatasan. ABRI menyatakan kamp tersebut dihuni bukan

oleh para pengungsi tetapi oleh para gerilyawan OPM. Ketika dikejar oleh ABRI, para pengungsi melarikan diri ke arah timur. Dengan cepat ABRI sampai di Wutung (di Papua Nugini) dan menembak seorang pegawai distrik pembantu dan dua orang temannya. Para kiap tak dapat berbuat apa-apa. Australia menanggapinya dengan mengirimkan 50 polisi dan tentara ke perbatasan. Beberapa hari sesudahnya unit kedua pasukan Indonesia masuk sejauh 12 mil ke wilayah Papua Nugini dan mereka menembaki sebuah kamp pengungsi berisi 250 orang. Pada malam selanjutnya sebuah unit patroli Australia diserang dan empat pesuruh yang berasal dari Papua dilaporkan terbunuh. Ini terjadi 6 mil di dalam wilayah Papua Nugini (*South Pacific Post*, tanggal 28 Mei 1969 dan Australian, tanggal 6 Juni 1969). Provokasi itu tidak mempengaruhi Australia untuk berkonfrontasi dengan Indonesia, namun Australia menjawabnya dengan memindahkan para pengungsi dari tempat yang rawan itu ke pulau Manus yang jauh.

Sebetulnya, perhatian utama Australia sama dengan perhatian utama Indonesia, yakni OPM. Dalam pesannya pada Canberra di tahun 1972, pemimpin Papua Nugini, Les Johnson, mengatakan bahwa Indonesia secara khusus tertarik membuat suatu persetujuan baru untuk mengatur arus orang dan barang yang melintasi perbatasan. Indonesia berharap adanya kerja sama yang lebih erat dengan Australia dalam bidang pengembangan patroli perbatasan. Johnson menganjurkan Australia bertindak hati-hati mengingat Papua Nugini bisa mendapat dampak politik bila Australia dan Indonesia menindak "gerakan pribumi" itu. Hal

itu tentunya akan menciptakan masalah baru bagi pemerintahan Papua Nugini pasca kemerdekaan. Anehnya, Johnson mau menerima pandangan Indonesia tentang kekuatan OPM, setelah gambaran tentang OPM diberikan Indonesia.

> Pemberontakan kelompok bersenjata telah melanggar hukum Indonesia di Papua Barat. Inti kekuatan mereka tampaknya cuma 30 orang atau lebih, namun mereka kadang-kadang didukung oleh penduduk lokal. Militer Indonesia menganggap OPM tak lebih dari sebuah gangguan kecil, namun mereka merupakan aib politik.[2]

Sikap meremehkan OPM itu juga dilontarkan para diplomat dan jurnalis yang mengunjungi daerah perbatasan. Sebagian besar dari mereka suka memakai istilah "gerilyawan kaos oblong". Pada tahun 1983, seorang editor asing dari *Sydney Morning Herald*, Peter Hastings, membuat sebuah deskripsi klasik tentang OPM pada tahun 1983. Menurutnya, "OPM hanya membanggakan kaca mata hitamnya, bukan senjatanya". Namun pada tahun 1985 ia mampu melihat bahwa "OPM sekarang ini haruslah dipandang sebagai suatu organisasi politik yang semakin efektif".

Para pemimpin Papua Nugini yang baru memandang OPM dalam cara yang berbeda. Mereka yakin bahwa para gerilyawan di sepanjang perbatasan bisa menimbulkan masalah serius bagi Papua Nugini dan Indonesia. Menteri luar negeri Papua Nugini Albert Maori Kiki menjelaskan masalah itu kepada para pemimpin OPM dalam pertemuan-pertemuan rahasia. Hubungan ini dimulai tahun 1973 dan berakhir sampai masa setelah kemerdekaan, tepatnya akhir tahun 1975. Para pemimpin OPM, termasuk Rumkorem,

Prai dan Nicolas Jouwe menyatakan jika perjuangan mereka tetap terus dilanjutkan maka pertemuan-pertemuan seperti itu harus dihentikan. Meski Kiki kecewa, ia pun tak siap untuk bekerja sama dengan Indonesia. Bahkan ia khawatir kalau penanganan militer yang tegas dapat semakin membulatkan tekad OPM dan memperluas masalah bagi Papua Nugini. Dengan memanfaatkan Australia sebagai penghubung dengan Jakarta, Kiki mendesak:

> Indonesia harus didorong untuk menganggap bahwa OPM hanyalah pembangkang kelas rendah, dan tidak perlu ada ancaman militer.[3]

Tak seperti pesan Kiki, reaksi Canberra tidak disiarkan secara umum. Oleh karena itu belum pasti apakah saran itu memang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia. Jika memang benar begitu, usaha itu tidak berhasil karena kurang lebih empat bulan berikutnya Indonesia melancarkan operasi berskala besar melawan OPM. Operasi ini begitu memusuhi orang-orang Papua dan membuat para pengungsi di sekitar perbatasan berhamburan mencari tempat yang aman. Saat itu Papua Nugini menjadi tak sabar terhadap OPM serta memulai pekerjaan serupa yang mendukung Indonesia dalam segala hal kecuali tentang patroli aktif di perbatasan. Sampai sekarang Papua Nugini tak dapat menerimanya jika pasukan mereka harus bertempur melawan "saudara Melanesia kita". Pengawasan perbatasan selanjutnya menjadi tanggung jawab polisi, sebuah langkah yang tidak disukai kepala pertahanan PNG, Ted Diro, yang memiliki hubungan yang dekat dengan bekas pendidiknya

dari Australia dan menerima pandangan mereka bahwa Papua Barat merupakan urusan dalam negeri Indonesia. Ted Diro mengusulkan solusi ala prajurit yaitu *frontier justice*. Secara pribadi dia merasa prihatin atas nasib warga Papua namun ia merasa tak mungkin mengubah rasa prihatin ini menjadi suatu kebijakan yang akan melindungi kepentingan Papua Nugini. Mayoritas pemimpin di Papua Nugini termasuk perdana menteri Somare setuju terhadap hal itu. Tetapi, sebagai negara demokratik, mereka tak mau menerima risiko tinggi yang diakibatkan oleh tindakan garis keras Diro. Keretakan antara tentara dan para menteri menimbulkan "kudeta yang tak pernah terjadi" yang beberapa tahun kemudian menciptakan publisitas atas manuver-manuver di atas (ABC "Background Briefing", 21 Agustus 1983).

Satu percobaan untuk mengetahui pendapat publik Papua Nugini terhadap Indonesia terjadi hanya dua bulan setelah hari kemerdekaan. Saat Indonesia menginvasi Timor Timur, para mahasiswa di Port Moresby mengepung kedutaan besar Indonesia. Didukung sejumlah birokrat dan politisi mereka menghujat Indonesia sebagai negara ekspansionis, menyetarakan Timor dengan Papua, dan mengingatkan bahwa Papua Nugini bisa saja menjadi korban berikutnya. Meski mendapat jaminan dari Australia, para pemimpin Papua Nugini merasa diperingatkan. Tapi posisi mereka tak memungkinkan untuk berbuat apa. Jika Port Moresby menjauhkan diri dari Jakarta, berarti dua dari tiga prinsip kebijakan luar negeri universal Papua Nugini yang baru akan dilanggar justru di bulan awal masa kemerdekaan. Dokumen kebijakan Port Moresby menyiratkan bahwa prinsip-

prinsip tersebut merupakan tujuan dari usaha menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin negara lain dan bahwa Papua Nugini merasa mendapatkan "kehormatan" menjadi jembatan atau penghubung antara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Sikap pragmatis ini berhasil mengatasi sikap sentimentil dan Papua Nugini tetap diam.

Invasi terhadap Timor Timur menyebabkan kemarahan tokoh-tokoh OPM. Mereka tahu benar apa yang bakal terjadi dengan sebuah koloni Eropa yang sedang "dibebaskan" oleh "sukarelawan" dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dari pedalaman, Seth Rumkorem mengirimkan pesan untuk Maori Kiki. Ia memintanya untuk mengakui keberadaan OPM dan mengadakan pembicaraan dengan Indonesia yang dihadiri perwakilan dari pemerintahan revolusioner sementara OPM. Kiki membalas dengan marah, dengan mengatakan bahwa Papua Nugini telah memutuskan hubungan dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Papua Barat yang ada di luar negeri. Ia mengingatkan Rumkorem sebagai seorang tokoh OPM bahwa segala masalah sekarang dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia. Langkah-langkah yang akan diambil oleh PNG adalah:

1. Meminta pemerintah Indonesia untuk menarik operasi militernya dari wilayah Papua Nugini.
2. Menindak tegas setiap kemunculan anggota OPM.
3. Menganggap anggota OPM yang ada di Papua Nugini sebagai imigran gelap atau menyerahkannya kembali ke pihak berwenang Indonesia di perbatasan.
4. Memerintahkan penghentian bantuan yang dilakukan

penduduk Papua Nugini terhadap OPM.

Sejak awal tahun 1976 Papua Nugini mulai menerapkan ancaman mereka itu sejauh masih bisa diterima secara politik. Rencana ini dilaksanakan secara tertutup untuk meminimalkan keengganan para petugas Papua Nugini. Sebagian besar tugas ini dilaksanakan oleh orang Australia yang dikontrak. Banyak yang memiliki hubungan dekat dengan pihak intelijen Australia. Jelasnya, OPM sedang dikeroyok. Perkembangan ini tidak luput dari perhatian para pemimpin OPM.

Pada tahun 1977, Michael Somare berusaha memperkuat hubungan dengan Indonesia melalui kunjungan kenegaraan. Dalam perjalanan menuju Jakarta, ia beserta rombongannya berhenti di Jayapura. Somare dikenalkan pada sejumlah pejabat orang Melanesia. Para pengamat Indonesia merasa bahwa kemenangan diplomatis telah ditorehkan saat semuanya ia salami satu persatu. Tapi, seperti perkataan Somare di depan para stafnya pada tahun 1983, pengalaman itu sangat menggugahnya. Itu terjadi saat ia melihat ke mata warga Papua dan kemudian merasakan jabat erat mereka. Ia sadar bahwa mereka saudaranya satu bangsa. Sayangnya, kebijakan luar negeri telah ditetapkan dan ia pun tiba di Jakarta tak lama kemudian. Di sana ia disambut tembakan salvo 19 kali. Presiden Soeharto menyambutnya dengan hangat.

Somare berbicara kepada pers bahwa pembicaraannya dengan Soeharto didominasi permasalahan perbatasan. Namun ia menegaskan bahwa Papua Nugini akan menjaga

status kemerdekaannya. Bagaimanapun juga, ketika pertemuan itu terjadi OPM mulai tidak disukai di Papua Nugini. Orang awam sekalipun mengalihkan perhatiannya terkecuali terhadap serangan Indonesia yang paling provokatif. Sebelum kembali, Somare bahkan sempat mengangkat ide untuk mengundang seorang perwira militer Indonesia di Papua Nugini. Ia berharap agar ada perwira ABRI yang dapat mengajar di Joint Services College di Lae. Usulnya memancing banyak kritik di Papua Nugini.

Tampaknya kunjungan Somare ke Jakarta secara tak langsung menunjukkan persetujuan atas kebijakan Indonesia di Papua. Selama awal tahun 1977, sebelum pemilihan umum bulan Mei di Indonesia, dilancarkan lagi tindakan militer. Papua Nugini mengkhawatirkan dampaknya saat pers memberitakan ancaman nekat yang dinyatakan oleh Nicolas Jouwe dari OPM untuk meniru terorisme gaya Arab untuk memperoleh pengakuan atas Papua Barat. Jouwe kemudian menyangkal berita itu. Ibu kota Papua Nugini mendapat penjagaan ketat, khususnya di sekitar tempat-tempat diplomat Indonesia, Australia dan Selandia Baru. Kelompok OPM-Victoria mencela Jouwe dan menyatakan kesetiaan pada pemerintah Papua Nugini. Beberapa hari kemudian, kelompok Pemka membalas kembali. Rumkorem beserta empat anak buahnya disergap saat melintas perbatasan oleh gerilyawan Tapenal. Jika Romkorem menolak ditahan maka Tapenal akan melenyapkannya. Tetapi ia lolos. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa wakil presiden kelompok Rumkorem, Herman Womsiwor, meninggal akibat serangan jantung di New York ketika ia hendak

mengajukan petisi terhadap PBB.

Pusat perhatian kali ini kembali lagi ke perbatasan ketika pengungsi mulai berdatangan mencapai jumlah yang hampir sama dengan waktu diadakannya Pepera. Sebagian besar pengungsi menceritakan kekejaman militer Indonesia kepada pers Papua Nugini. Tak semuanya berasal dari wilayah dekat perbatasan, ada juga dari daerah pegunungan. Mereka sampai setelah berjalan kaki dengan susah payah. Mereka juga berkata bahwa Pemilu gagal dilaksanakan dan dibatalkan di beberapa tempat. Sebuah kelompok yang terdiri atas 218 orang pergi ke propinsi Barat PNG dengan menempuh perjalanan 1 minggu. Mereka meminta izin untuk tinggal di sana dengan alasan tidak berani pulang. Indonesia tampaknya paling bisa menciptakan rasa takut mereka dengan cara mengirimkan tim patroli memasuki wilayah Papua Nugini untuk memburu anggota OPM. Tim ini menembak mati seorang penduduk West Sepik. Meski demikian, Papua Nugini mengumumkan untuk memulangkan para pengungsi. Tony Siaguru yang kemudian menjadi sekretaris Departemen Luar Negeri dan ketua Dewan Perbatasan menginformasikan bahwa para pengungsi memutuskan untuk pergi setelah mendengar kebijakan Papua Nugini. Tony secara tidak langsung menyatakan, "suatu hal yang wajar untuk menganggap bahwa mereka setuju pulang".

Meski provokasi Indonesia terus bertambah, Kebijakan pemerintah Papua Nugini tetap mendiamkan segala informasi tentang kejadian-kejadian di perbatasan. Hal itu menimbulkan kritik keras dari anggota parlemen baik pro pemerintah maupun oposisi. Kiki akhirnya angkat suara dan

mengontak Adam Malik untuk mencari keterangan atas terjadinya eksodus pengungsi. Ia mendesak Indonesia untuk tidak menghukum siapa pun yang kembali. Malik menjaminnya dan menjelaskan bahwa "bentrokan antar suku" merupakan faktor yang dapat memecah-belah. Ia mengkritik media asing dan menduga masalah ini ditimbulkan oleh para pendukung OPM di Papua Nugini. Somare puas. Ia menyatakan Papua Nugini harus menghormati perjanjian 1974 tentang perbatasan dengan Indonesia yang isinya memperbolehkan melintas perbatasan dengan tujuan-tujuan biasa dan menindak para pelintas gelap. "Kita ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita", jelas sang Perdana Menteri. Ia menambahkan, "tak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba melanggar dan menciptakan masalah untuk 3 juta penduduk Papua Nugini. Untuk terlibat masalah dalam negeri Indonesia bukanlah tujuan saya."

Banyak pengamat, termasuk Dewan Gereja Melanesia beserta Asosiasi Wartawan Papua Nugini, meyakini bahwa pengungsi bukan akibat dari pertempuran antar-suku ataupun para penentang pemerintah, melainkan hanya penduduk biasa. Bahkan, jika mereka memang benar-benar kebanyakan anggota OPM maka jumlah mereka tentunya akan jauh lebih banyak ketimbang perkiraan resmi. Kedatangan pengungsi mencapai 1.500 orang masih ditambah mereka yang datang tiap hari. Untuk mengetahui status mereka, maka UNHCR mengirim Tom Unwin (kepala program pembangunan Papua Nugini dari PBB). "Para penduduk Papua Barat punya alasan yang tepat," katanya setelah kembali di port Moresby. Somare dan Departemen Luar Negeri-nya

tidak menyukai hal itu. Sejak itu mulailah masa ketegangan antara pemerintah Papua Nugini dan UNHCR.

Unwin menyiarkan berita itu pada bulan Agustus ke perbatasan. Kemudian muncul permintaan untuk membentuk satu tim penasihat hukum yang bertugas memperjuangkan status untuk para pengungsi yang memang berniat tinggal di Papua Nugini. Proses ini terlaksana sesaat sebelum kepulangan Unwin, tepatnya saat para penghuni kamp Wabo dan Yako diizinkan bergabung dengan masyarakat setempat.

Di bulan yang sama, Pangu Pati (partai milik Somare) membentuk pemerintahan koalisi baru. Julius Chan dari *People's Progress Party* duduk sebagai menteri keuangan. Tampaknya pemerintah ini dipersiapkan untuk berjalan dalam jangka waktu lima tahun dan diharapkan dominasi pemikiran hanya berkait dengan masalah domestik dan bukan Papua Barat. Kebijakan mengenai pengungsi juga ikut terkatung-katung. Banjir pengungsi pun menyusut.

Namun masalah Papua tetap ada. Kedatangan delegasi-delegasi peserta Forum Pasifik Selatan di Port Moresby disambut oleh para demonstran yang membawa plakat mendukung Papua Barat. Mereka membagikan apa yang disebut sebuah harian "bundel tentang kumpulan daftar pemberontakan". Jacob Prai berpesan pada para pemimpin pasifik selatan untuk memprotes "kekejaman Indonesia" baik di Timor Timur maupun Papua Barat. Prai membuat seruan khusus agar Australia menghentikan operasi pemetaan di Papua karena peta tersebut akan digunakan Indonesia membom kampung-kampung atau desa desa yang mendukung

gerakan pemisahan diri. Forum tersebut tidak membahas masalah Papua Barat sama sekali. Hal ini berlanjut sampai tahun 1984.

Dengan harapan dapat bekerja sama lebih baik dengan Indonesia, Papua Nugini mengirimkan tim ke Jayapura untuk berunding. Papua Nugini kembali berkompromi dengan Indonesia dengan mengizinkan penghuni perbatasan melakukan kunjungan tradisional seperti tertera pada perjanjian tahun 1974. Menurut kantor berita *Antara* persetujuan itu memudahkan orang berkunjung dari satu negara ke negara lain tanpa harus repot mengurus prosedur imigrasi normal. Persetujuan ini nampaknya tidak mengindahkan peraturan yang menjelaskan bahwa orang-orang tersebut bukanlah subjek atas formalitas. Apakah Indonesia menolak ketentuan ini? Karena tak ada yang mematuhinya maka masalah tentang perijinan tidak dimunculkan kembali.

Pada bulan Oktober 1977, Michael Somare menemui Majelis Umum PBB di New York. Kritik yang dilontarkannya, tampaknya satu kesempatan yang pas untuk memperoleh simpati internasional atas dilema tentang pengungsi. Di samping itu, Somare juga mengkritik Uganda yang menekan kaum minoritas asal Asia di sana. Saat Somare kembali ke Papua Nugini, Perdana Menteri Pangu, yakni Toni Bais membalasnya dengan menyatakan bahwa sungguh ironis bagi seorang perdana menteri mencela negara lain sedangkan kekejaman yang sama juga sedang terjadi di negaranya. "Bagaimana ia dapat berbicara tentang HAM jika ia mengamini rezim Indonesia yang menindas di Papua Barat? Mereka saudara kami," kata Bais. Ia menyusun rencana yang

mencakup 3 poin. *Pertama*, diplomasi terselubung melawan Indonesia yang kemudian diikuti dengan membuat seruan terhadap PBB, dan memprotes pemerintahan Carter lewat kedutaan besar Amerika Serikat setempat. Jika ditinjau kembali, komentar Bais pun menjadi ironi. Ketika menjadi Menteri Kehakiman Pangu pada tahun 1984, ia melakukan pelanggaran pidana terhadap para pengungsi. Perdana menteri lain, kata Swokin, menghendaki PEPERA yang murni di Papua dan kalau gagal maka Papua Nugini harus menarik misinya dari Jakarta dan meminta PBB melihat apa sebenarnya alasan para pengungsi sekarang melintasi perbatasan. Ia menambahkan, "Tegakah kita jika menolak pengungsi dan tetap memulangkannya jika mereka hanya akan dikumpulkan dalam penjara dan 'dihilangkan' oleh Indonesia?"

Pemerintah Papua Nugini mejawab kritik tersebut dengan setengah hati lewat menteri luar negeri Patterson Iowa yang menandaskan bahwa Papua Nugini tidak ingin menyinggung perasaan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Iowa menyalahkan Somare atas tindakannya untuk 'tunduk' pada Indonesia.

Kini giliran Australia dipermalukan ketika terungkap tindakannya memata-matai penduduk Papua Barat. Mata-mata tersebut, Lindsay Burridge, mendekati seorang dosen ekonomi asal Australia untuk mencari keterangan lengkap mengenai pelajar asal Papua. Tindakan memata-matai itu salah satu dari sekian kesalahan terburuk yang dibuat Australia di Papua Nugini. Sang dosen, Profesor Brian Bragon ternyata bukanlah anggota dinas Intelijen Australia. Baik

kepada pemerintah Papua Nugini maupun pers, Bragon berkata bahwa sangat naif jika orang mempercayai itu. Sebagai orang Australia dia diharapkan untuk memberi keterangan lengkap yang rahasia ke Canberra. Komisi tinggi Australia mengkonfirmasikan tentang hubungan Burridge dengan JIO (*Australian Joint Intelligence organisation*). Namun hal ini dilanjutkan dengan mengklaim bahwa Burridge bekerja dengan sepengetahuan Papua Nugini. Jika memang benar, sepertinya Burridge secara sembunyi-sembunyi berhubungan lebih dekat dengan intelijen Papua Nugini daripada petinggi-petinggi Papua Nugini. Sebagai perdana menteri, Julius Chan mengajukan protes resmi dan mengadakan pertemuan selama 4 jam dengan komisaris tinggi, Tom Critchley yang mempunyai hubungan erat dengan pemimpin-pemimpin di Jakarta.

Karena marah akibat terungkapnya kasus ini, 500 mahasiswa Universitas Papua Nugini mendatangi gedung komisi tinggi. Mereka mematahkan ranting-ranting, menginjak-injak taman bunga, meludahi gedung dengan sirih dan melumuri kamera-kamera video dengan lumpur. Dalam petisinya, mereka berjanji untuk "menguliti hidup-hidup" siapa pun yang melakukan tindakan mata-mata di kampus. Burridge akhirnya dipulangkan.

Selanjutnya giliran Papua Nugini. Sesaat sebelum menteri luar negri Papua Nugini yang baru, Ebla Olewale berangkat ke Jakarta untuk menemui petinggi-petinggi Indonesia, kepala pemerintahan *de facto* Papua Barat, Nicholas Jouwe, terbang dari Belanda. Saat datang, Jouwe mengumumkan kabinet Pemka yang telah diubah. Kabinetnya

juga berisikan warga Papua Nugini yang telah bercampur dengan warga setempat. Somare dikritik karena memberi jalan bagi Indonesia untuk membuat provokasi terbuka. Noel Levi adalah orang yang paling getol menyuarakan hal ini. Ia adalah anggota parlemen yang menyatakan bahwa Olewale harus sadar akan tindakannya. Levi menentang kebijakan luar negeri Papua Nugini. "Tentu saja kita harus berkeliling untuk memilih teman dekat," ujar Levi. Kemudian, saat menjabat menteri luar negeri pada kabinet Chan, Ia membentuk suatu kebijakan baru yang disebut "perjanjian selektif" yang kian memperjelas bahwa Papua Nugini mengakui Papua Barat sebagai propinsi di Indonesia dan bukan negara yang berdiri sendiri. Kebijakan ini diteruskan oleh penggantinya dari Pangu.

Saat cekcok ini masih terus berlangsung, Olewale berambisi melebihi apa yang pernah dilakukan pendahulunya, Kiki, dengan mengadakan pertemuan rahasia dengan OPM. Pada bulan april tahun 1978, baik Prai maupun Rumkorem diboyong ke Vanimo. Sesudah itu ke Port Moresby dengan menggunakan pesawat Departemen Pertahanan. Tony Siaguru menjumpai Prai selama 4 jam dan esoknya, dengan Rumkorem selama 5 jam. Ia meminta Prai dan Rumkorem untuk memindahkan kamp OPM keluar wilayah Papua Nugini atau memilih risiko diserbu. Siaguru sebelumnya berkata: "kita tahu di mana kamp-kamp kalian. Jika kalian tidak pindah akan kita hancurkan."

Tidak seperti biasanya, Indonesia kali ini menyambung seruan Papua Nugini dengan menyatakan bahwa Papua Nugini jangan bersikap mendua. Pejabat penerangan kedu-

bes Indonesia, Siregar, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi segala pemberontakan. Namun hal ini akan menghambat proses pembangunan negara ..... "Akan terlalu banyak uang dan tenaga yang dibuang sia-sia". Ia menyangkal jika Indonesia mempunyai rencana atas Papua Nugini. Sebenarnya ini hal yang nyatanyata ada pada dokumen rahasia Indonesia yang telah banyak beredar. Dokumen tersebut diduga dibuat oleh Departemen Pertahanan dan berisi tentang rencana untuk menguasai Papua Nugini. Sandi operasi ini adalah "cendrawasih". Operasi itu dijabarkan dalam 13 langkah yang terdiri atas tindakan militer dan subversi. Indonesia dengan seketika langsung menyanggah dengan mengatakan bahwa ini adalah rekayasa buatan OPM. Pada akhirnya diketahui jika dokumen itu memang buatan Indonesia, namun tak resmi karena nyatanya hal ini merupakan salah satu keahlian yang diajarkan di AKABRI.[4]

Meskipun berang terhadap OPM, pemerintah Papua Nugini memutuskan untuk tidak menjadi boneka Indonesia. Olewale menyiratkan bahwa ia akan berbicara dengan tegas pada Indonesia. Ia mengatakannya sebelum berangkat ke Jakarta. Tambahnya, "Papua Nugini akan menolak tekanan untuk terlibat dalam patroli gabungan di perbatasan dan menjelaskan bahwa ini bukanlah pemberontakan tersembunyi". Ia berjanji untuk membahas masa depan para penduduk memiliki izin tinggal jika mereka ingin tetap aktif dalam politik. Masalah ini, lanjutnya, dapat dikaitkan dengan UNHCR.

> Kita ingin agar UNHCR mencarikan negara yang mau menerima mereka. Indonesia menghendaki agar kita memulang-

kan mereka ..... tapi kita tidak dapat memaksanya karena kita bisa melanggar konvensi PBB tentang pengungsi.

Sangat menarik jika Papua Nugini berkeinginan untuk menegakkan konvensi itu karena Papua Nugini tidak ikut menandatangani konvensi tersebut. Beberapa tahun kemudian pemerintah Papua Nugini bersikeras bahwa negaranya tidak memiliki kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pengungsi.

Saat kembali ke negaranya, Olewale berubah pendirian. Para pengamat memandangnya bukan sebagai pemimpin pertama Papua Nugini, atau Australia, yang berhasil dibujuk Jakarta. Olewale melaporkan bahwa Indonesia curiga terhadap Papua Nugini karena seharusnya Papua Nugini mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang membangkang terhadap Indonesia. Olewale mengulangi kembali garis kebijakannya yaitu OPM merupakan masalah dalam negeri. "Namun jika sampai melebar hingga wilayah kami, maka kami akan memperhatikan", ujarnya. Selama berkunjung, Olawale telah bertemu menteri luar negeri Indonesia, Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Ia juga singgah di Papua Barat dan Timor Timur. Di sana ia menanam "pohon persahabatan" di depan kantor gubernur di Dili.

Berdasarkan perjanjian 26 Juni, Papua Nugini bertindak dengan cepat. Suatu operasi militer yang melibatkan 360 prajurit mulai dilancarkan. Mereka ditempatkan di sepanjang perbatasan sektor utara dalam 5 lokasi. Nama operasinya *Rausimkwik* yang berarti "melenyapkan para pengacau secepatnya". Walaupun menurut pejabat Papua Nugini ini hanya latihan untuk dapat berhubungan dengan ma-

syarakat. Rausimkwik bertujuan untuk menjepit OPM di antara kekuatan 2 negara. Rausimkwik digelar lebih cepat mengingat pada waktu yang hampir bersamaan diketahui adanya 100 orang tentara Indonesia di timur perbatasan. Duta besar Indonesia untuk Papua Nugini, Busiri, mengatakan bahwa perbatasan bukan garis yang dapat dilihat dan sangat gelap. Lalu pasukan Papua Nugini pun mundur. Kemudian pada siang hari seorang penduduk Papua Nugini melihat sebuah helikopter yang sedang mengintai kemudian diikuti dengan pesawat yang lebih besar. Pesawat ini bolak-balik sebanyak 3 kali dan menurunkan 45 tentara yang kemudian mendirikan tenda dan berkemah selama 3 hari. Orang itu berkata pada pers bahwa kegiatan tentara Indonesia dipantau oleh tentara Papua Nugini dari balik semak-semak. Berita-berita di koran Papua Nugini kembali mempermalukan Kedubes Indonesia. Hal yang paling memalukan terjadi pada awal bulan Juli ketika tentara Indonesia menyerang desa-desa di sekitar perbatasan. Saat itu pasukan Papua Nugini harus mundur untuk menghindari bentrokan yang tidak diinginkan. Ada laporan yang memberitakan bahwa Somare telah diberitahu tentang rencana itu sebelumnya. Ia bahkan meminta memperluasnya sampai berjarak 5 mil dari perbatasan. Menurut dubes Busiri, sekitar 700 orang tentara ditempatkan di perbatasan.

Dalam jangka waktu 2 minggu, sekitar 300 penduduk memasuki wilayah Papua Nugini. Mereka bercerita pada Tom Unwin dari UNHCR bahwa rumah-rumah mereka dibakar oleh tentara dan desanya dihujani peluru. Unwin menyatakan penyerbuan dijadikan sebagai hukuman. Soma-

re menghadapi pertanyaan intensif di parlemen mengenai peran angkatan darat saat itu. Ia menyangkal bahwa angkatan darat Papua Nugini secara inkonstitusional telah diperbantukan pada Indonesia untuk "menangkap dan menghabisi saudara-saudara sebangsa". Somare berjanji untuk tidak melawan kehendak sekitar 700 orang pengungsi yang tidak mau pulang. Ia menambahkan bahwa pasukan penjaga perbatasan telah dikurangi hingga tinggal 13 orang.

Debat itu telah membuka celah terbukanya kritik terhadap kebijakan perbatasan yang telah dibuat Papua Nugini. Pemimpin oposisi Lambekey Okuk telah lebih dahulu pergi ke Papua dan Timor Timur. Ia kembali dengan laporannya yang berapi-api. Ia mengubah pandangannya. Lalu saat menjabat Deputi kabinet Julius Chan, ia menjadi pembela terkuat di kabinetnya atas kemerdekaan Papua Barat.

Akibat-akibat serangan Indonesia semakin terlihat pada bulan Agustus. 13 tentara anggota Tepenal pimpinan Prai meminta suaka ke Papua Nugini. Setelah mengumumkan hal itu, Olewale mendapat pukulan yang lebih mengejutkan yakni kedatangan 700 penduduk beberapa hari sebelum para gerilyawan. Mereka takut pada balas dendam pasukan ABRI. Olewale mengatakan 180 orang yang lain sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengikuti pendahulunya.

Di bulan yang sama juga ada beberapa pertemuan. Kabar tentang pertemuan itu tidak disiarkan hingga tahun berikutnya. Pertemuan tersebut diadakan di hotel Smugglers Inn, Madang, yang jauh dari perbatasan. Di situ, Jacob Prai menemui seorang pemasok senjata dari Prancis yaitu

Kolonel Tom Poang. OPM memesan 500 senjata, amunisi dan radio penghubung. Namun pesanan tersebut tidak dipenuhi. Akibat ditekan oleh Indonesia, Prai kembali keluar dari tempat persembunyiannya. Ia ditahan di Vanimo. Setelah itu, Prai dan Deputinya Ondowame diproses untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Indonesia meminta mereka dikembalikan agar bisa diproses sesuai prosedur hukum dengan tuduhan pengkhianatan tapi masyarakat Papua Nugini lewat pers menghendaki agar mereka diberi ampunan. Mahasiswa Papua Nugini berhasil menghimpun dana 4.000 dollar untuk menyewa pengacara terkenal dari Australia membela mereka. Di bulan Desember, sekitar 500 demonstran menyambut kedatangan Dr. Mochtar Kusumaatmadja di Papua Nugini. Dalam pembelaannya, para pengacara Prai mengajukan permohonan banding.

Empat bulan setelah ditangkap, atau 2 bulan setelah masa penahanannya habis, Prai masih tetap menghuni penjara utama di Port Moresby. Pemerintah Papua Nugini menolak permohonan pemindahan ke kamp penahanan agar bisa bertemu dengan keluarganya. Ketika Australia, Selandia Baru, Pulau Salomon, Tonga, Samoa Barat dan Fiji tak mau menerima Prai dan Ondowame, pemerintah Papua Nugini menganggap UNHCR tidak berhasil melobi mereka. Maka ketegangan antara Papua Nugini dan UNHCR semakin meningkat.

Ketegangan ini berakhir sebulan kemudian, ketika Swedia bersedia menerima mereka ditambah Nicholas Meset dan 2 orang anggota kabinet *de facto* yakni Amos Indey dan Darius Maury. Masing-masing mengajak keluarganya.

Papua Nugini tidak mau mengulur waktu dalam usahanya meringankan beban akibat para pemberontak itu. Mereka semuanya langsung diterbangkan sehari setelah Swedia mengumumkan kesediaannya. Menteri Luar Negeri Papua Nugini optimis bahwa akan ada era baru yang damai di Papua Barat. "Menurut saya, pemahaman yang lebih baik dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang pasti timbul ketika dua kelompok masyarakat yang berbeda etnik ditempatkan berdampingan," tambahnya. Indonesia membalasnya dengan mengirimkan delegasi untuk membahas perjanjian perbatasan yang baru untuk menggantikan perjanjian lama yang akan berakhir bulan November. Sesaat sebelum kedatangan delegasi Indonesia, Papua Nugini menangkap Max Ireeuw dan Tan Sek Tai, orang Papua Barat yang membawa uang kira-kira 20.000 gulden dari Belanda. Uang itu akan diberikan ke penghubung Rumkorem di Madang. Dideportasikannya mereka sungguh membuat Indonesia puas.

Pada bulan Juni 1979, Presiden Soeharto mengunjungi Papua Nugini. Pemerintah Papua Nugini menyambut "sang jenderal" dengan hangat. Meskipun demikian ia tetap didemonstrasi oleh sebagian massa Papua Nugini termasuk Utula Samana, seorang pemikir yang paling radikal yang tak lama kemudian menjadi gubernur propinsi Morobe. Pemerintah Indonesia kurang begitu menyukainya. Kunjungan Soeharto menghasilkan satu kesepakatan bersama dengan Perdana Menteri Michael Somare mengenai tindakan tegas yang akan diambil terhadap siapa-siapa yang telah mengacau wilayah perbatasan berdasarkan hukum yang berlaku

di negara masing-masing.

Di akhir tahun 1979 tidak ada pelintas perbatasan dalam kelompok besar. "Operasi Senyum Indonesia" tidak sebrutal sebelumnya. Penandatanganan perjanjian perbatasan yang baru dilaksanakan pada bulan Desember, sebagaimana layaknya perjanjian sebelumnya tetap tanpa membentuk patroli perbatasan gabungan. Yang dibentuk adalah Dewan Perbatasan Gabungan dengan harapan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat antara dua negara. Perjanjian ini memperbolehkan penduduk melintasi perbatasan atas dasar hubungan adat dan tradisi. Pelintasan batas dalam kategori ini tidak memerlukan prosedur imigrasi normal karena kegiatannya hanya bersifat sementara dan tidak untuk menetap. Pemerintah kedua negara setuju untuk mengurangi jumlah bangunan atau tempat hunian permanen di sisi perbatasan dan dalam radius 5 kilometer dari perbatasan. Pasal 8 yang mencakup bidang keamanan berbunyi:

> Dilandasi oleh itikad baik dan sikap saling pengertian untuk mejaga serta untuk memperkuat hubungan dekat yang bersahabat, kedua pemerintah akan melanjutkan kerja sama aktif satu sama lain untuk mencegah penggunaan wilayah masing-masing atau sekitar perbatasan dari usaha menjadikannya tempat perlindungan, daerah persiapan militer atau pangkalan segala aktivitas yang menyangkut peperangan maupun aktivitas ilegal yang melanggar hukum negara seberang perbatasan.

Poin signifikan lainnya adalah persetujuan kedua negara untuk bebas menggunakan seluruh aliran sungai Fly River Bulge di perbatasan. Aliran sungai ini merupakan satu-

satunya jalan terusan dari dan ke daerah pertambangan Ok Tedi. Mengingat terkait dalam hal ini jumlah uang yang sangat banyak, maka Papua Nugini membutuhkan suatu perjanjian yang sejauh mungkin melindungi pendapatan yang dihasilkan oleh hasil tambang tersebut di masa depan.

Meskipun penandatanganannya dilakukan bulan Desember namun perjanjian ini baru dilaksanakan pada bulan Februari 1980. Akibatnya pemerintahan pimpinan Pangu mendapat kekosongan penerimaan dari tambang itu selama 1 bulan. Pada tanggal 11 Maret, Sir Julius Chan mengajukan pemungutan suara di parlemen atas mosi tidak percaya terhadap Somare. Sebelumnya ia sudah tidak berkoalisi dengannya lagi. Hasil voting membuat Chan menduduki kekuasaan. Sesuai dengan konstitusi Papua Nugini, masyarakat tidak perlu berperan dalam hal itu. Koalisi baru itu terdiri atas PPP pimpinan Chan dan Partai Nasional pimpinan Okuk. Dengan demikian Okuk menjabat deputi perdana menteri meskipun Chan yang mengetahui sikapnya tentang Papua Barat menjauhkannya dari jabatan menteri luar negeri. Ini membawa berkah bagi Noel Levi yang berasal dari propinsi New Ireland yang tidak disenangi oleh suku-suku di perbatasan.

Naiknya Chan dihiasi perasaan kaget berbagai kalangan pada bulan-bulan awal pemerintahannya. Walau demikian OPM merasa segala sesuatunya akan lebih baik daripada pemerintahan Somare. Perasaan ini semakin bertambah saat Chan mengirimkan pasukan untuk membantu Vanuatu mengalahkan kelompok Santo. Keputusan Chan dipandang OPM sebagai solidaritas atas sesama bangsa

Melanesia. Perasaan ini hanya sesaat hinggap di diri Chan. Dalam kunjungannya ke Canberra, ia berjanji untuk menumpas kegiatan gerilyawan yang ada di wilayahnya.

> Demi stabilitas nasional, kita hanya akan berurusan dengan pemerintahan yang diakui. Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati akan dihormati ..... kita tidak akan pernah menjadi pihak yang akan menyetujui sebuah perjanjian jika kita tidak mau melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan ketetapannya.[6]

Pada jamuan kenegaraan di Jakarta beberapa hari kemudian, Chan memuji Soeharto dengan mengatakan bahwa Soeharto adalah pimpinan dunia yang dihormati secara luas. Ia juga menyebut perjanjian mengenai perbatasan sebagai langkah penting dalam hubungan kedua negara. Sikapnya berubah lagi tak lama kemudian setelah ia mengubah pandangannya terhadap Soeharto dan kebijakan mengenai Papua yang dibuatnya.

Sesaat setelah kedatangan Chan dari Indonesia, 103 orang Papua Barat dalam kondisi lapar dan sakit menyeberangi perbatasan. Papua Nugini menyatakan tidak dapat menerima mereka yang pergi hanya karena kesulitan ekonomi.

Sikap Papua Nugini makin jelas dengan digrebeknya sebuah rumah di Port Moresby milik pendukung OPM, Henk Joku serta satu rumah lain di Madang. NIO (Badan Intelijen Papua Nugini) mengklaim telah mendeteksi pesan rahasia dari surat yang dikirim dari Turki oleh "Mr. George" yang misterius, seorang agen rahasia Uni Soviet. Menurut NIO, surat ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh hasil operasi-

nya. Sehubungan dengan ini, Joku mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat secara politis sudah cukup dewasa untuk menjalankan urusannya.

Salah satu perhatian yang serius adalah terhadap kamp Wabo dan Yako. Kamp-kamp ini masih dihuni oleh sekitar 200 orang. Beberapa di antaranya digolongkan sebagai pendukung OPM. Pemerintah Papua Nugini membangun kamp-kamp tersebut direncanakan sebagai tempat hunian para pekerja proyek pengairan Purari. Ketika pembangunan bendungan itu ditunda, kamp-kamp tersebut dipergunakan untuk menampung para pengungsi yang dulunya tinggal di Oksapmin yang dekat dengan tempat militer Indonesia melakukan aktivitasnya. Kedua kamp tersebut diurus oleh UNHCR. Di kamp-kamp itu sering terjadi bentrokan antara dua kelompok utama OPM. Untuk mencegahnya dibuatlah "garis" yang memisahkan mereka. Saat pemerintah Papua Nugini mengumumkan rencana penutupan kamp-kamp ini, Tom Unwin mengatakan bahwa UNHCR menyambut baik penutupan "tempat yang mahal dan tidak diinginkan" tersebut. Ia berharap itu dapat menjadikan penghuninya berbaur dengan komunitas yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Noel Levi, menyatakan bahwa banyak pengungsi yang tidak semestinya telah tinggal dua tahun di kamp tersebut dan mereka akan dipulangkan. Namun pemerintah Papua Nugini menjadi iba dan mengumumkan untuk memberi kebebasan pada seluruh penghuni kamp-kamp itu kecuali 5 orang bermasalah yang harus diasingkan ke luar negeri sesuai dengan rencana PBB. Salah satu di antaranya adalah Eliezer Bonay, Gubernur Irian Jaya per-

tama yang asli Papua. Yang lainnya adalah John Hamadi, sarjana berusia 30 tahun yang bekerja di laboratorium di Papua Barat sebelum lari pada tahun 1978. Kali ini ia lari dari wilayah Papua Nugini ketika tak mampu menunjukkan tiket penerbangan ke Swiss. Surat perintah penangkapan terhadapnya diterbitkan. Polisi yakin ia bersembunyi di dalam kawasan mahasiswa kota Port Moresby. Seorang wartawan sempat berencana mengadakan wawancara dengannya sebelum para mahasiswa menyuruhnya pergi. Saat berada di kamp Hamadi diberitahu: "Anda berbahaya dan keberadaanmu di sini akan membahayakan keamanan negeri ini."

Setelah memberi konfirmasi bahwa Hamadi berada di kampus UPNG, pemimpin Dewan Mahasiswa, Gabriel Ramoi, memperingatkan pemerintah untuk tidak mencoba mengambilnya. Pemerintah menjawab dengan menangkap Ramoi dengan tuduhan bersalah menyembunyikan Hamadi. Namun Ramoi akhirnya dibebaskan dengan jaminan 100 Kina. Ancaman seperti ini tak membantu penguasa Papua Nugini menemukan buruannya yang pada tahun 1984 tetap bebas berkeliaran di Papua Nugini. Pada tahun 1984 Ramoi menjadi seorang anggota parlemen dari Pangu Pati yang berkuasa. Namun ia tetap tidak memberitahu di mana Hamadi berada.

Pertengahan tahun 1981, para imigran di Papua Nugini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dengan menyebarluaskan penyebab terjadinya masalah Papua Barat. Setelah dilakukan pertimbangan yang mendalam, mereka sepakat untuk mengadakan acara minggu solidari-

tas bangsa Melanesia yang berisi acara kultural. Juga digelar "pengadilan HAM Pasifik Selatan". Lelucon bernada menghina ini bertujuan untuk mengadili perbuatan-perbuatan Indonesia. Yang dipilih sebagai ketua pengadilan dengan 6 hakim adalah Bernard Narokabi, intelektual terkemuka yang lama menjadi hakim pengadilan negara. Seluruh anggotanya asli Papua Nugini yang terdiri dari seorang anggota parlemen, Tony Bais, para pengacara dan akademisi. Seorang pengacara HAM Amerika Serikat, Hank di Suvero dipilih sebagai Jaksa penuntut khusus.

Indonesia diberi kesempatan untuk mempertahankan diri lewat surat panggilan yang dikirim ke kedubes-nya dengan judul: "Masalah rakyat Papua Barat, penggugat, vs Republik Indonesia, tergugat". Pengadilan ini menyatakan Indonesia memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara saat pemeriksaan. Tetapi jika memang memilih untuk tidak datang sama sekali, pembelaan "tak bersalah" akan diberikan dan pengadilan tetap berlanjut.

Kedubes Indonesia tak mengindahkan permintaan itu dan memberi pernyataan pers bahwa mereka tak punya urusan dengan itu. Banyak petinggi-petinggi Papua Nugini yang juga mengutuk pengadilan itu. Levi menyebutnya sebagai hal yang tidak bermanfaat dan dapat membahayakan "sifat terbuka" pemerintah untuk menerima pengungsi. Namun Chan mengatakan kalau pengadilan tersebut diperbolehkan karena itu hak mereka untuk mengungkapkan pendapatnya.

Selama lebih dari 2 hari, pengadilan ini mendengarkan kesaksian 11 orang termasuk bekas Gubernur, Bonay, yang

baru saja dilepaskan dari kamp pengungsi. Kisah yang diceritakannya sangat brutal dan anti Indonesia. Setelah seluruh saksi didengar, pengadilan ini menyalahkan Indonesia atas pelanggaran HAM dan *genocida*. Pengadilan ini memberi "hak jawab" bagi Indonesia untuk 12 pelanggaran khusus atas hukum internasional dan mengumumkan bahwa seluruh temuannya akan dikirim kepada Sekjen PBB untuk diambil "tindakan yang pantas".

Walaupun tidak memiliki keabsahan resmi, pengadilan ini diliput secara luas oleh pers di Papua Nugini dan di luar negeri. Indonesia tentunya sangat tersinggung. Protes keras pun dibuat terhadap Papua Nugini. Indonesia bahkan mengurangi bentuk hubungannya dengan Papua Nugini. Hubungan kedua negara terus memburuk selama masa pemerintahan perdana menteri Julius Chan dan berakhir tahun 1982 saat Indonesia mendukung pemilihan ulang Michael Somare.

Pengadilan ini telah mengarahkan perhatian publik kembali ke masalah perbatasan. Julius Chan datang sendiri ke perbatasan untuk melihat keadaannya. Ia meninjau kamp Wabo yang hanya dihuni oleh 20 orang serta melihat 3 dari 14 pos penjagaan perbatasan Papua Nugini. Tiap pos ditunggui staf-staf dari kepolisian dan departemen dalam negeri. Di perkampungan perbatasan Wutung yang merupakan tujuan utama para pendatang selama bertahun-tahun, Chan beserta rombongan berjalan sepanjang 1500 meter meninjau tanda perbatasan.

Setelah berkunjung, Chan berkata bahwa ia memahami perasaan mereka, para penghuni perbatasan yang te-

lah kehilangan sanak saudara dan teman yang telah pergi ke Papua Nugini. Perbatasan memang sudah tetap dan mereka yang berada di seberang adalah orang Indonesia.

Tujuan dari kunjungannya adalah meninjau program pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan. Pada saat itu, program tersebut bernilai 2 juta Kina yang meliputi rencana-rencana pembangunan proyek infrastruktur (termasuk pembangunan jalan yang melintasi sungai Fly di bagian tenggara propinsi barat, senilai 750.000 Kina) serta proyek pengembangan pedesaan. Proyek terakhir meliputi usaha pencegahan penyakit, peningkatan gizi, dan proyek agrikultur. Kebijakan pemerintah Papua Nugini ini dikeluarkan dengan harapan agar pembangunan yang seimbang di kedua sisi perbatasan dapat menciptakan suasana yang harmonis. Yang terlupakan oleh pemerintah Papua Nugini adalah bahwa anggaran belanja pemerintah Indonesia lebih ditujukan pada penciptaan *"cordon sanitaire"* (lingkungan yang sehat) daerah transmigrasi, dan bukan pada pembangunan nyata perkampungan Papua. Tapi kondisi yang ideal tersebut juga gagal dibangun oleh Papua Nugini. Pada tahun 1983, anggaran untuk pelaksanaan sebagian dari program ini sudah mencapai 1 juta Kina. Menurut pejabat penting yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan ini, bagian terbesar anggaran digunakan untuk membangun rumah-rumah modern bagi para pegawai pemerintahan sementara dana untuk pembangunan yang efektif hanya sedikit. Pada periode pembangunan tahun 1983, 49,5 persen dana digunakan untuk kembali membangun rumah para pegawai pemerintahan, 23,9 persen untuk perawatannya, dan hanya

26,6 persen untuk "pembangunan" yang sesungguhnya.

Karena tidak mampu membendung datangnya para pelintas perbatasan, pemerintah Papua Nugini terpaksa harus mengeluarkan tindakan tegas untuk menguranginya. Tiga orang Papua Barat — yang sebelumnya telah mendapat izin menetap — dideportasi ke Indonesia karena diduga terlibat dalam kegiatan OPM. Hanya dua keluarga yang masih tersisa di Papua Nugini. Menurut Levi, trio teman kuliah Prai dulu yaitu Fred Pieger, Willie Jebleb, dan Bob Kubia adalah anggota senior Partai Sosialis Melanesia (*Melanesian Socialist Party*) pimpinan Henk Joku.

Levi sudah mewujudkan ancamannya bahwa siapa pun yang mengganggu keamanan nasional Papua Nugini akan menghadapi tindakan tegas pemerintah. Namun ia menuntut agar ketiga orang tersebut diperlakukan dengan baik. Indonesia pun memenuhinya. Dua minggu kemudian, ia menjelaskan bahwa di Jayapura mereka telah dikunjungi oleh utusan dari Departemen Luar Negeri Papua Nugini dan dinyatakan bahwa kondisi mereka sehat dan baik-baik. Lebih lanjut diharapkan agar mereka diberi pekerjaan menurut keahlian masing-masing. Namun, kenyataannya mereka dijatuhi tahanan luar dan wajib lapor tiap hari ke KODIM Jayapura. Akhirnya Pieger melarikan diri lagi ke Papua Nugini, sedangkan Jebleb dan Kubia dipenjara.

Noel Levi semakin terdesak oleh pemerintah yang berusaha membongkar rencana persekongkolan penyelundupan senjata dari luar negeri untuk gerilyawan. Dikatakan bahwa senjata-senjata tersebut berasal dari Kuba dan Uni Soviet. Henk Joku diduga sebagai pelaku dengan menghu-

bungi sumber Kuba di Sydney. Ia bertanya, "Lalu mengapa jika yang membantu Papua Barat adalah negara komunis? Saat Anda tenggelam, Anda tidak akan peduli siapa menyelamatkan diri Anda." Menurut NIO, aspek lain dari rencana ini adalah kunjungan aktivis mahasiswa, Daniel Kopi, ke Korea Utara. Ia diharapkan dapat membawa masuk senjata-senjata tersebut ke PNG dengan aman. Meski begitu, tak ada pihak yang menuntutnya. Sepertinya senjata-senjata tersebut tidak terkirim.

Meski terjadi perpecahan dalam koalisi Chan, mereka tetap kompak dalam hal kebijakan luar negeri. Kemudian Iambakey Okuk memperkeruh suasana dengan bergabung ke bagian pertahanan dan keamanan Papua Barat. Selanjutnya, ia membuat isu pemungutan suara dan juga mencalonkan dirinya. Usaha ini dilakukan hanya sampai dengan pertengahan tahun 1982 menjelang bubarnya koalisi kabinet Chan akibat campur tangan Indonesia.

Pada saat berkampanye Okuk menyatakan bahwa 99 persen masyarakat terpelajar PNG mendukung OPM dan Indonesia harus malu dengan hal itu. Ia memfokuskan kritiknya pada program transmigrasi di Indonesia. Ia bahkan juga menulis artikel di harian asing tentang transmigrasi. "Bagi bangsa melanesia, transmigrasi adalah hal yang tidak manusiawi," katanya di harian *National Times*. Ia memperkirakan bahwa jumlah pengungsi akan terus meningkat. Indonesia tampaknya tersentak karena kritik tersebut dilontarkan oleh seorang deputi pemimpin PNG. Indonesia merespon kritik itu lewat Kedubesnya. Perang kata-kata pun terus berlanjut. Chan mencoba untuk menengahinya. Ia ingin

PNG berdamai dengan Indonesia. Sulitnya, untuk menyatukan koalisi yang mulai retak, ia butuh Okuk. Usahanya bertambah berat sejak diterapkannya kebijakan "ikatan selektif" yang baru yang dinyatakan bahwa "kejadian dan kondisi" di Irian adalah "masalah dalam negeri" Indonesia. Buku putih yang disusun oleh seorang konsultan Australia yang bernama Dr. Ted Wolfers dari Universitas Macquaire, Sydney, menyatakan bahwa "orang yang mengkritik hubungan PNG dengan Indonesia tak mampu membedakan sentimen etnik dengan kepentingan nasional."

Pemerintah PNG sendiri tampaknya juga percaya apa yang ditakutkan oleh Okuk. Pada bulan Januari 1982, pemerintah PNG memutuskan untuk mengusir para pengungsi yang masih tersisa di kamp Yako dan kemudian memulangkan 29 diantaranya ke Indonesia. Pada awalnya sebagian besar menolak pergi. Mereka kemudian dibagi menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok Rumkorem ditempatkan di perbatasan Wutung sedangkan kelompok Prai di perbatasan Bewani. Kedua kelompok ini diperintahkan pulang. Namun dua hari kemudian kelompok Rumkorem kembali lagi ke PNG. Anehnya, tindakan ini mendapat dukungan dari harian *Post Courier* milik partai konsevatif.

> Mereka berhak mendapat perlakuan yang lebih baik lagi dari saudara Melanesianya...Sebenarnya dampak dari penderitaan yang mereka terima dapat diperkecil jika pemerintah menghormati hak mereka memberikan informasi tentang rencana pemerintah... Pengungsi, pendatang ilegal dan lain-lain seharusnya diperlakukan secara manusiawi... Jelas-jelas bahwa 29 penghuni kamp Yako mendapat perlakuan buruk (14 Januari 1982).

Dua hari setelah kembalinya para pengungsi ke PNG, Pemerintah PNG mengusir dua orang diplomat Indonesia. Dengan mengutip pernyataan sumber intelijen yang dapat dipercaya, *Times of PNG* melaporkan bahwa visa mereka tak bisa diperpanjang karena mereka diduga sebagai mata-mata. Pihak kedubes Indonesia menyatakan bahwa mereka bukanlah diplomat senior. Menurut pemerintah PNG, kedua orang tersebut adalah perwira dan salah seorang di antaranya diduga berpangkat kolonel.

Dalam minggu yang sama, beberapa wanita dan anak-anak juga dipulangkan ke Jayapura dengan pesawat *Air Niugini*. Tindakan Chan mendapat dukungan dari pejabat penting Departemen Luar Negeri PNG. Sekretaris Perdana Menteri Fred Reiher yakin, jika PNG mendukung OPM maka artinya PNG mencari masalah. "Tak seorang pun akan terjun ke sungai yang deras tanpa alat bantu, kecuali jika ia seorang perenang yang handal", tulisnya di sebuah memo. Ia juga menambahkan bahwa argumen moral, harus tetap dipertahankan. Memo tersebut ditujukan kepada deputi sekretaris departemen luar negeri PNG, Bill Dihm. Dalam balasannya ia menulis, "Menurut pandangan publik secara umum, OPM diibaratkan sebagai orang sial dan tertindas sedangkan Indonesia sebagai penguasa yang menindas... anda masih ingat bahwa enam bulan yang lalu, sebuah *Press Release* telah dibuat untuk menerangkan pada publik, atau setidaknya menghilangkan keragu-raguan akan situasi yang sebenarnya tentang OPM. Dan anda juga tahu bahwa media massa telah mengubah isinya hingga pada akhirnya Press Release itu dilupakan dengan sendirinya".

Dihm tampaknya menyesali apa yang terjadi dan mendesak media massa di sana untuk mengubah isi Press Release itu dan kemudian memberitakannya.

Saat Okuk terus mendesak agar PNG tidak meneruskan tindakannya yang "menjilat pantat orang lain", pemerintah PNG malah terus memberi dukungan penuh pada Indonesia. Tetapi sejak bulan Mei, PNG berubah pikiran karena pasukan Indonesia beberapa kali memasuki wilayah PNG tanpa izin saat mencari sandera yang diculik OPM dari kamp perusahaan kayu lapis Holtekang. Segalanya bertambah buruk saat sebuah helikopter yang memuat seorang komandan pasukan di Irian, Brigjen. Santoso, mendarat di sekitar gereja Katolik Wasengla yang terletak tujuh kilometer dari perbatasan. Helikopter ini terganggu cuaca buruk dan hampir kehabisan bahan bakar. Kru heli ini bersikap sopan terhadap staf gereja dan tak lama kemudian mereka semua kembali ke Papua Barat. Hal ini memang membuat malu Indonesia, namun yang jelas-jelas menciptakan ketegangan baru adalah masuknya pasukan Indonesia tanpa izin dalam operasi mencari sandera tersebut.

Meski sandera tersebut telah ditemukan, ABRI tetap memasuki wilayah PNG tanpa izin. Sebagai contoh, masuknya sekelompok tentara dengan sebuah kendaraan militer ke PNG. Mereka berhenti sebentar di sebuah desa lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Contoh lain yaitu enam tentara menyerbu dusun kecil di West Sepik dan membawa pulang 19 orang warga Papua. Akhirnya Levi menjadi sangat marah dan mengeluhkan adanya ancaman fisik terhadap wilayah PNG. Indonesia tak mempedulikannya, pada-

hal peristiwa tersebut terjadi saat dilakukan penghitungan suara di PNG dan Indonesia yakin Chan bakal kalah. Indonesia memang berharap Chan benar-benar kalah karena jika ini terjadi maka Okuk tak akan mampu lagi menghalangi Indonesia. Pada tanggal 29 Juni, *Harian Suara Karya* milik Partai Golkar yang berkuasa memuat artikel yang memuji Somare dan berisi perkiraan bahwa kemenangannya merupakan awal menguatnya kembali hubungan antara kedua negara. Sehubungan dengan hal ini, tampaknya provokasi yang dilakukan ABRI akan berhenti. Pada saat itu, helikopter yang dulu memuat Brigjen Santoso terbang berulang kali di atas gereja. Sesungguhnya, PNG mewaspadai kegiatan ABRI yang semakin meningkat. Saat menjadi seorang pembicara di sebuah seminar di Port Moresby, Chan menyatakan bahwa stasiun sinyal milik Australia di Vanimo berhasil mendengarkan komunikasi radio tentara Indonesia dan mengetahui sandinya. Oleh karena itu lokasi pasukan ABRI dapat diketahui.

Akhirnya kesabaran Chan pun habis dan ia memutuskan untuk 'menyerang' kedua musuhnya yaitu OPM dan Indonesia. Dalam menghadapi OPM, pasukan penjaga perbatasan yang terdiri atas beberapa detasemen (1 detasemen= 30 orang) digantikan dengan unit-unit pasukan tempur. Tiap unit terdiri dari 5 tentara dan sebuah radio. Unit ini telah dipersiapkan untuk bisa mendeteksi adanya pelintas ilegal. Chan bahkan juga memperjuangkan agar para prajurit bisa diberi wewenang melakukan penangkapan. Namun upaya ini gagal. Dalam menghadapi Indonesia, ia memilih jalur tertulis. Ia menulis surat kepada Presiden Soehar-

to. Dalam surat itu Chan menyatakan bahwa hubungan kedua negara telah memburuk sejak tahun 1980, yang kemungkinan besar disebabkan oleh masuknya tentara-tentara Indonesia tanpa izin ke wilayah PNG, dan memprotes artikel yang dimuat di harian *Suara Karya*. Dalam sejarah, surat itu merupakan surat yang paling cepat dibuat untuk memprotes Indonesia. Namun surat tersebut tak pernah dibaca oleh Soeharto. Menurut keterangan seorang pegawai Departemen Luar Negeri PNG pada penulis, surat tersebut dihancurkan ke dalam mesin penghancur kertas tanpa sepengetahuan Chan. Hal ini dilakukan atas perintah Paulias Matane, seorang pejabat departemen tersebut.

Matane merasa yakin bahwa akhir dari pemerintahan Chan tinggal sebentar lagi. Keyakinannya terbukti saat penghitungan suara berakhir. Partai Pangu Pati menang mutlak dan berhak mengatur pembentukan kabinet. Selama masa transisi, Papua Barat tetap menjadi pusat perhatian publik. Saat itu terjadi suatu insiden tentang 10 orang yang ingin melarikan diri dari Vanimo. Di dermaga Vanimo mereka menunggu sebuah perahu motor yang akan membawanya ke Jayapura. Saat datang perahu motor tentara Indonesia, mereka kabur. Para pendeta asing, yang telah memberi mereka tempat menginap di gereja, dikenakan tuduhan membantu imigran gelap. Uskup mereka, Rm. John Etheridge, bekas seorang tukang listrik di Adelaide, akhirnya melakukan pembelaan. Sejak saat itu ia menjadi figur penting daerah perbatasan utara.

Ketika Somare kembali berkuasa, ia berharap dapat cepat mewujudkan perdamaian dengan Indonesia. Hal itu

tak terwujud karena dua tahun kemudian hubungan kedua negara malah lebih tegang daripada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini diawali oleh kejadian pada akhir Agustus 1982 ketika Seth Rumkorem beserta sekelompok kecil anggota OPM mengadakan perjalanan ke Vanuatu dengan perahu motor. Mereka semua adalah pelaut tangguh. Semua problem di laut dapat diatasi meski ganasnya lautan hampir menenggelamkan mereka. Setelah berlayar menuju ke timur dan mengisi perbekalan di tengah perjalanan, mereka berniat menuju Rabaul. Penguasa PNG yang telah memonitor gerakan mereka memutuskan untuk menangkap mereka. Kapal polisi menangkap dan membawa mereka ke pelabuhan. Mereka dikenai tuduhan sebagai pendatang ilegal. Pemerintah PNG yang baru menjelaskan bahwa mereka harus dihukum berat atau bahkan diserahkan pada Indonesia. Saat disidang, pengacara mereka mengatakan bahwa mereka adalah pelaut yang sedang dalam perjalanan menuju negara lain dan harus diizinkan untuk berlabuh jika tujuannya adalah mengisi perbekalan. Dan lagi, saat itu mereka tidak di darat. Pengunjung sidang tersebut sangat lega saat hakim Rabaul membebaskan mereka. Pihak pemerintah segera mengajukan banding. Namun, karena tak ingin kehilangan muka untuk yang kedua kalinya, rencana itu dibatalkan.

Rumkorem dan kelompoknya menjadi terkenal. Mereka mendapat bantuan pakaian dan barang-barang kebutuhan lain. Restoran setempat memberi makan gratis pada mereka. Ada suatu kelompok yang memberi bantuan uang

500 kina. UNHCR juga memberi 2.000 kina per bulan untuk biaya hidup. Rumkorem, yang dengan memakai sandal dan celana pendeknya tak terlihat sebagai pemimpin gerilyawan, selalu mengisi halaman suratkabar di PNG. Rumkorem mengatakan tentang sungguh berbedanya antara hidup di PNG dan di Papua Barat. Perbedaan ini terjadi "hanya karena sebuah garis di peta".

Selama mereka menunggu persetujuan negara lain untuk menerima, kelompok Rumkorem menjadi bosan. Setelah minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, Vanuatu, sebuah negara di pasifik, tak jadi menerima mereka karena Rumkorem tidak mau mencabut pernyataannya bahwa dia pemimpin seluruh OPM. Banyak negara-negara di Eropa yang melakukan hal serupa. Pada bulan November 1983, ia mendapat suaka khusus dari pemerintah Yunani. Bulan berikutnya ia berangkat ke sana. Pemerintah PNG menarik napas lega atas hal itu.

Kasus Rumkorem membuat malu Menlu PNG yang baru, Rabbie Namaliu, karena ia berasal dari Rabaul dan tahu dengan jelas sulitnya berhadapan dengan Indonesia.

Sama seperti Menlu sebelumnya, tak lama setelah ia dilantik Namaliu pun datang ke Indonesia. Saat kembali ke Port Moresby, ia memerintahkan petugas perbatasan untuk turut mendukung suatu operasi baru untuk menghadapi OPM. Sandi operasi itu adalah *painim muruk* (artinya: memburu burung kasuari) dan seratus lebih tentara dilibatkan di dalamnya. Namun yang menjadi target operasi itu telah melarikan diri. Tampaknya mereka dibantu oleh penduduk setempat yang bersimpati. Tentara-tentara tersebut diperin-

tahkan untuk menghancurkan pondok dan kebun para "kasuari". Para pegawai Deplu PNG menyebut operasi itu sebagai "kekacauan terbesar yang pernah ada".

Salah seorang "kasuari" yang lolos adalah Fred Pieger. Ia pernah dipulangkan ke Papua namun kembali lagi ke PNG. Pemerintah PNG yakin bahwa ia akan menemui anak istrinya yang berada di pulau Manus. Akhirnya, ia dapat ditangkap pada tahun 1984.

Somare berharap agar operasi-operasi semacam itu dapat lebih efisien di masa datang dengan digantinya komandan pasukan penjaga perbatasan dari Brigjen Gogo Mamae ke Kolonel Ken Noga, bekas politisi dari partai Pangu dan atase militer di Canberra. Para petinggi partai Pangu menganggap Mamae kurang tegas pada OPM. Sedangkan Noga dianggap sama dengan komandan yang pertama, Ted Diro, yaitu selalu bertindak tegas. Noga pun lebih tanggap dengan apa yang diinginkan oleh para politisi.

Pusat perhatian kemudian beralih dari perbatasan ke sebuah insiden di Port Moresby. Pada bulan Desember, seorang penduduk pegunungan Papua Barat berusia 25 tahun, Simon Allom, membunuh seorang pegawai kedubes RI, Meinard Poluan. Poluan adalah sopir Kolonel Ismail yang dicurigai pemerintah PNG sebagai mata-mata. Karena Allom dapat segera diringkus, detail tentang kejadian itu dapat diketahui. Poluan juga diduga sebagai mata-mata yang mengawasi warga Papua Barat di PNG. Dulunya, Allom juga membantu Poluan. Allom direkrut setelah penutupan kamp Wabo. Poluan dibunuh di gedung KBRI.

Kasus ini mencemarkan nama baik Indonesia karena

adanya anggapan bahwa di PNG Indonesia melakukan spionase, dan di Papua Indonesia melakukan tindakan kejam yang menyebabkan orang Papua seperti Allom menjadi gila. Pengadilan kasus ini dipimpin oleh hakim agung Sir Buri Kidu. Dalam kesaksiannya, Allom mengatakan bahwa aktivitasnya di OPM membuatnya mendekam di penjara Sorong tahun 1977. Seorang intel (almarhum) juga pernah mendekam di sana bersamanya. Allom sering disiksa dan ia harus tidur di sel yang sangat kotor. Ia juga sering dimasukkan ke dalam kolam yang penuh dengan kotoran. Selanjutnya, ia berkata bahwa ayahnya, seorang pendukung OPM, dibunuh di sana oleh tentara Indonesia. Ibunya yang sedang hamil dimasukkan ke dalam api setelah perutnya dirobek. Tentara Indonesia pun membunuh dua orang saudara perempuannya. Sebelumnya mereka diperkosa dan anus mereka dimasuki tongkat hingga mereka akhirnya mati. Dua orang saudara laki-lakinya pun ikut dibunuh. Ia juga menyatakan kesaksiannya tentang pengeboman desa-desa. Pada kenyataannya, semua cerita Allom memang benar-benar telah terjadi di desanya, Akimuga, yang terletak dekat tambang Freeport. Cerita Allom dapat menggambarkan dengan jelas tindakan brutal Indonesia seperti yang tertera pada dokumen-dokumen OPM (lihat Bab 2). Lalu, Allom pun berniat menuntut balas atas kejadian-kejadian tersebut. Saat memberi kesaksian, ia mengatakan:

> "Saya menikamnya dengan sebilah pisau hingga tembus ke jantung. Saya menusuk perutnya di bagian kiri, kemudian yang kanan, hingga organ dalamnya terburai keluar. Ia menyebut 'Mama' sebelum jatuh ke lantai. Saya berjalan menuju ....

untuk memotong kabel telepon tapi kulihat ia bangun kembali dan berjalan keluar. Saya tinggalkan kabel telepon itu, dan menghampirinya. Lalu, saya tendang punggungnya hingga ia jatuh dari tangga ..... Saat itu ia belum mati. Saya melompat ke arahnya dan menjambak rambutnya. Kembali saya tikam tubuhnya di bagian antara leher dan pundak, lalu saya gigit lehernya ....." Allom lalu melarikan diri dan Poluan pun mati tak lama kemudian.

Dalam menetapkan putusannya, hakim Kidu C.J. menyatakan bahwa provokasi Indonesia tidak dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukumannya karena setelah dipenjara sebenarnya cukup waktu untuk menghilangkan dendamnya. Meskipun ia dituduh melakukan pembunuhan yang direncanakan, ia tidak dihukum seumur hidup. Allom hanya diganjar hukuman kerja selama 15 tahun. Pengacaranya adalah Bernard Narokobi yang dua tahun sebelumnya juga duduk di pengadilan HAM. Narokobi mengatakan bahwa dirinya dulu juga sasaran spionase Indonesia. Dengan melihat latar belakang Allom, Narokobi merasa bahwa hukuman 15 tahun buat Allom tidaklah pantas. Namun para hakim menganggap hukuman itu terlalu ringan. Meski juga beranggapan demikian, Indonesia hanya melakukan tindakan protes terhadap PNG melalui para diplomat Australia.

Pada awal tahun 1983, masalah pengungsi muncul kembali. Menurut pemerintah PNG, jumlahnya kali ini mencapai sekitar seribu orang. Seperti biasa, alasan yang diperkirakan adalah meningkatnya aktivitas militer Indonesia. Para pengurus gereja di Papua Barat menyatakan bahwa eksodus ini juga diakibatkan oleh adanya bahaya kelaparan.

"Ketidakpedulian" pemerintah Indonesia menyebabkan masyarakat mengungsi dan berjalan menyusuri jalan setapak ratusan kilometer. Toni Siaguru yang mewakili Namaliu tetap bersikeras bahwa arus pengungsi adalah masalah dalam negeri Indonesia dan ia tak ikut campur. Siaguru tak berniat untuk menyinggung perasaan Indonesia dengan mengatakan bahwa telah terjadi bencana kelaparan, karena memang ia memiliki laporan intelijen bahwa para pelintas perbatasan bukan anggota OPM melainkan penduduk yang berpindah-pindah tempat untuk mencari sagu untuk dimakan. Laporan itu juga menyebut sebuah masalah pembangunan jalan.

Pada bulan April, helikopter survei PNG memotret wilayah di perbatasan selatan. Saat hasilnya diteliti, PNG menemukan adanya pembangunan jalan raya lintas-Irian dari Merauke ke arah utara yang melanggar perbatasan di dua tempat (terakhir diketahui ada tiga). Yang *pertama*, terletak 22 kilometer sebelah utara merauke, jalan itu berada di wilyah PNG sepanjang 3,5 kilometer. Kelihatannya ini dikerjakan dalam jangka waktu tiga bulan. Yang *kedua*, 35 kilometer dari perbatasan, yang berada di wilayah PNG sepanjang 4,5 kilometer. Sekretaris Deplu, Matane, memperlihatkan fotonya ke Kedubes Indonesia dan meminta agar pembangunan jalan itu dihentikan. Menurut Kedubes Indonesia, pihak terkait di Papua belum bisa memberikan tanggapannya. Hal ini janggal karena laporan berkala Kedubes Indonesia pernah memuat kabar tentang akan dibuatnya jalur telepon Port Moresby-Irian.

Matane lalu terbang ke Merauke untuk menghadiri

pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Di sana ia mengangkat masalah pembangunan jalan ini. Ia menyatakan bahwa warga PNG sangat marah dengan hal ini. Ia kemudian berkata:

> Negosiasi berjalan sangat alot karena dari sejak awal delegasi Indonesia tidak yakin jika jalan tersebut telah melanggar wilayah PNG. Kita menunjukkan pada mereka foto-foto dan peta jalan yang melanggar itu. Kita memberi penjelasan secara detail pada mereka jika wilayah kita telah dilanggar. Hari berikutnya, bersama dua orang pengawas proyek, saya dan ketua delegasi Indonesia melakukan pengecekan terhadap jalan yang telah melanggar wilayah perbatasan. Kita ke sana menggunakan sebuah helikopter. Lalu kita berhenti di lima tempat berbeda sepanjang perbatasan. Saat itu ditemukan bahwa jalan tersebut benar-benar melalui wilayah PNG tidak hanya di dua tempat, namun tiga tempat.
>
> Saat kita meninggalkan lokasi terakhir, kemudian menuju Merauke, saya bertanya kepada ketua delegasi Indonesia "Apakah sekarang Anda sudah yakin?" Sambil melihat ke bawah untuk terakhir kalinya, ia menjawab, "Belum, jika kita belum melakukan analisa lewat satelit."

Setelah berbulan-bulan, barulah Indonesia mengakuinya dan kemudian setuju untuk merubah rute jalan yang salah itu. Kesalahan yang ada dibebankan pada para insinyur Jepang yang terlalu berprinsip untuk membangun jalan pada dataran yang tinggi manapun yang ditemui (mengingat kebanyakan tanahnya berupa rawa-rawa). Presiden Soeharto hanya meminta maaf pada PNG di bulan Desember. Pada saat itu PNG sudah tidak ingin bekerjasama lagi dengan Indonesia, seperti dimuat dalam tajuk rencana harian Niugini Nius: "Sungguh Somare merasa sakit hati. Tiap

kali ia menundukkan badan untuk menghormati tetangganya, ia malah dihina sedemikian rupa".

Banyak warga PNG yang merasa bahwa pembuatan jalan dekat perbatasan itu sangat erat kaitannya dengan rencana Indonesia menguasai negara mereka. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh intelijen Deplu PNG yang memberitakannya secara luas. Personel-personel penting di kelompok ini adalah para ekspatriat, dan tak lama kemudian mereka terlibat konflik dengan ekspatriat senior dari NIO. Selanjutnya terjadi perdebatan sengit antar kedua pihak tentang mungkin atau tidaknya Indonesia menyerbu PNG. Keyakinan NIO akhirnya diterima, dan sejak tahun 1983 NIO menjadi badan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas intelijen di perbatasan. Di mata masyarakat mandat NIO tidak cukup untuk itu. Saat delegasi para gubernur dari PNG mengunjungi Papua, seseorang anggota delegasi, yang berasal dari Australia, dilaporkan ke pihak berwajib Indonesia karena bertindak mencurigakan. Orang tersebut, Bob Welsh, ditahan untuk diinterogasi. Ternyata ia adalah seorang agen NIO yang ditugaskan melaporkan kegiatan delegasi dan situasi di Papua. Targetnya adalah Gubernur Morobe, Utula Samana, salah seorang tokoh nasionalis Melanesia tulen. Samanalah yang menyerahkan Welsh ke pihak berwajib Indonesia. Meski Somare menyatakan bahwa tak ada maksud tersembunyi di balik kedatangan Welsh. Kepala NIO, Charles Ali, mengatakan bahwa kasus ini adalah suatu "kesalahan fatal".

Seakan tidak mempedulikan opini masyarakat, Pemerintah PNG terus berusaha keras memperkuat hubungan

dengan Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah PNG tak akan menggunakan kekerasan meskipun perundingan dengan pemimpin-pemimpin OPM menemui jalan buntu. Namun, tak seperti dulu, para pejabat pemerintahan PNG tak begitu akrab dengan para komandan lapangan OPM. Pemerintah PNG tahu bahwa James Nyaro dan kawan-kawan tak akan mungkin turun gunung untuk melakukan perundingan di Port Moresby. Disamping itu mereka juga mengundang Nicolas Jouwe untuk datang mewakili kelompok Pemka. Nicolas bertemu dengan para pemimpin PNG, termasuk Somare. Seperti sebelumnya, ia diminta agar OPM menghentikan perjuangannya atau paling tidak, meninggalkan wilayah PNG. Sekalipun setuju pada keputusan itu, Jouwe tak punya wewenang yang cukup untuk melaksanakannya. Kemudian ia kembali ke Belanda. Selanjutnya, datang Dick Kereway. Ia, yang juga datang dari Belanda, adalah anak buah Rumkorem yang ada di Eropa. Namun Kereway tak jadi bertemu dengan para pemimpin PNG karena saat diperiksa di bandara Jackson ia kedapatan membawa kotak peluru, bahan peledak, dan sejumlah selebaran tentang Papua Barat. Ia pun dikembalikan ke Belanda. PNG tak lagi berharap untuk bisa bekerja sama dengan OPM.

Pembangkangan orang-orang Papua Barat terlihat secara jelas pada saat Dr. Mochtar mengunjungi PNG pada bulan Agustus dalam rangka lawatannya ke negara-negara pasifik untuk mencari dukungan dalam masalah Timor Timur di PBB. Selama berada di PNG, ia beberapa kali mengadakan dialog dengan bekas penduduk Papua. Pejabat Deplu PNG menjadi mediator dalam acara yang berbahasa Ing-

gris itu. Ketika Dr. Mochtar menyatakan bahwa masyarakat Papua boleh mengkritik kebijakan pemerintah, editor harian *Times of PNG*, Franz Joku, mengatakan, "Ya benar, dan mereka yang pernah melakukannya sekarang telah dikubur."

Tampaknya, setiap usaha membangun kerjasama antara PNG dengan Indonesia selalu dinilai negatif. Citra buruk ini juga disebabkan oleh kabinet Somare. Hal ini terjadi saat menteri pertahanan PNG, Epel Tito, berkunjung ke Australia pada bulan Agustus 1983. Ia melakukan pembicaraan di radio nasional Australia dengan seterunya, Gordon Scholes, dan Menlu Australia, Bill Hayden. Ia memperingatkan mereka agar waspada terhadap rencana agresi Indonesia. Ia mengatakan bahwa ia "sangat yakin" bahwa selama 20 tahun ini Indonesia akan berusaha menguasai PNG. Saat ditanyai oleh Australia, ia menjawab:

> Kata mereka saya gila.
> Apa benar begitu?
> Tentu saja tidak.[8]

Dalam perjalanan pulang ke PNG Tito diberitahu bahwa jabatannya akan digantikan oleh Boyamo Sali. Selama menjabat menteri penerangan, Sali tidak sering membuat kontroversi. Setahun kemudian, saat mengadakan kunjungan resmi yang pertama ke Canberra, ia juga mengkritik Indonesia. Ia menyatakan bahwa PNG sangat marah karena Indonesia tidak meminta maaf atas terjadinya perusakan kebun yang dilakukan oleh ABRI di pertengahan tahun 1984. Saat kembali ke PNG, ia tidak diperingatkan Somare karena memang pada saat itu PNG memang benar-benar marah terhadap Indonesia. Saat itu, sejumlah tentara Indonesia, kira-

kira 53 orang dan sebagian besar adalah orang Jawa, memasuki wilayah PNG tanpa izin dan merusak kamp Suhampa yang terletak 1,5 kilometer dari perbatasan. Tercatat 10 rumah beratap jerami dibakar habis dan 10 pohon kelapa, 171 pohon pisang, 109 pohon aren, serta sejumlah tanaman produksi lainnya juga diluluhlantakkan. Tony Bais, pejabat sementara Menlu PNG, mengatakan bahwa para tentara tersebut sungguh bodoh karena telah menuliskan namanya di pohon-pohon itu serta meninggalkan kotak ransumnya yang berstempel "Indonesia". Pemerintah PNG telah mengajukan protes resmi namun, seperti penjelasan Sali, Indonesia tidak menanggapinya. "Kita telah mencoba segala cara, namun gagal," keluhnya. Protes ini mungkin merupakan surat diplomatik yang terakhir dibuat PNG untuk Indonesia. Sebelumnya pernah dibuat surat yang sejenis ketika datang 10.000 pengungsi di bulan Februari. Di tahun 1984 tak ada lagi surat diplomatik PNG untuk Indonesia.

Eksodus pengungsi yang terbesar dalam sejarah Papua dipicu oleh kegagalan OPM mengibarkan bendera 'bintang kejora' di halaman gedung DPRD Tk. I Irian Jaya di Jayapura. Setelah pasukan OPM berhasil mencuri senjata dari batalyon 751, ABRI melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap mereka yang dicurigai sebagai pendukung OPM. Menurut seorang Papua yang menjadi pegawai pemerintah, banyak rumah di Jayapura dan sekitar Sentani yang digeledah oleh ABRI tanpa surat tugas. Ia juga menyatakan bahwa sepeda motor milik penduduk ikut disita padahal saat itu hanya sedikit orang Papua yang punya sepeda motor. Mereka yang menolak akan ditangkap. Target utama

operasi itu adalah warga berpendidikan yang digolongkan sebagai anggota inti OPM. Pada akhir bulan Februari, dari keseluruhan target yang ada, 245 orang di antaranya telah melarikan diri ke PNG. Di antara mereka ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan sampan. Seperti layaknya pengungsi di seluruh dunia, mereka hanya membawa sedikit harta benda serta takut pulang. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka tak bakal merasa tenteram kecuali jika Papua Barat telah merdeka. Keinginan untuk hidup tenteram ini juga disampaikan oleh sejumlah pengungsi yang berasal dari pedalaman, yang disebut pegawai pemerintahan PNG sebagai "orang kampung yang sederhana".

Yang jelas, kriteria internasional yang umum mengenai pengungsi yaitu adanya rasa takut akan penindasan yang didasari oleh ras, agama, hak politik, dan sebagainya, dialami oleh para pengungsi Melanesia ini. Meski demikian, PNG, yang sebenarnya berharap tidak ada lagi pengungsi di masa datang, menyebut mereka sebagai pendatang "gelap" atau "non-tradisional" dan mengumumkan bahwa 84 pria yang datang dalam gelombang pertama akan dituntut dengan UU imigrasi. Pemerintah PNG menyatakan bahwa PNG tidak turut menandatangani konvensi dan protokol PBB tentang masalah pengungsi sehingga mereka tak punya tanggung jawab dengan masalah itu. Pada awalnya, 84 pria tersebut dinyatakan bersalah namun setelah mendapat bantuan hukum seorang pengacara, mereka berubah pikiran. Pembela mereka menganggap bahwa penahanan mereka inkonstitusional. Para pengunjung sidang memperkirakan ada maksud politik tertentu di balik penangkapan mereka

oleh polisi. Dengan tidak meyakinkan, Inspektur polisi Billy Ni menyangkal hal itu.

Sebelum hadir pada persidangan, mereka mengungkapkan rasa takutnya akan ajal yang menunggu jika mereka kembali ke Papua. Di antara mereka ada yang bercerita tentang *"blacklist"* yang memuat nama-nama target operasi ABRI. Ada juga yang mengatakan bahwa balas dendam ABRI sangat indiskriminatif. Yance Hembring, seorang komandan OPM dari Genyem, bercerita:

> Di daerah Nimboram, Pasukan komando Indonesia membakar habis perumahan, menembaki hewan piaraan seenaknya, dan memperkosa wanita dan anak-anak perempuan di bawah umur 9 tahun.[9]

Persidangan yang dipimpin oleh hakim yang berbeda, di pagi dan sore hari, sungguh aneh. Saat mereka semua dinyatakan bersalah, hanya mereka yang disidang pada pagi hari yang diganjar hukuman penjara (6 minggu), sedang yang disidang di sore hari ditunda hukumannya. Tampaknya hakim persidangan sore kurang tanggap terhadap keinginan pemerintah PNG. Tapi tentu saja mereka semua tetap mendapatkan simpati dari masyarakat. Pada akhirnya, mereka, yang disidang sore hari, berpindah kewarganegaraan namun hal ini bukan bertujuan untuk menghindari hukuman. Setelah itu, mereka, yang disidang pagi hari, melakukan mogok makan di penjara. Pengacara mereka pun mengajukan banding. Dalam waktu kurang dari dua minggu, mereka dibebaskan. Mereka ditempatkan di sebuah kamp dekat Vanimo. Kemudian mereka dipindah ke tempat lain yang bernama Blackwater. Dinamakan *blackwater* ka-

rena warna mata air yang hitam akibat pencemaran. Para pemilik tanah tradisional sudah tidak lagi menggunakan tempat ini. Di sana, menurut pengamatan UNHCR, para pengungsi bergabung ke dalam kelompok yang berbeda menurut suku, dan latar belakang pekerjaan. Kelompok-kelompok pendukung OPM bergabung bersama. Hal ini berbeda dengan sebelumnya di mana mereka dibagi menurut kelompoknya masing-masing. Hal ini mengindikasikan adanya rasa persatuan yang baru dalam perlawanan mereka. Bahkan, kedua kelompok pendukung OPM ini berencana melakukan pemberontakan di bulan Februari.

Dengan adanya perkembangan itu, pemerintah PNG melakukan pendekatan terhadap Indonesia untuk mencari keterangan mengenai terjadinya gelombang pengungsi. Sebuah pertemuan kemudian diadakan di Jayapura. Delegasi PNG dipimpin oleh Sekretaris Deplu, Matane. Dalam perjalanan pulang ke PNG, rasa kecewa tampak di raut wajahnya dan bawahannya pun tahu akan hal ini. Ia mengatakan bahwa masalah sesensitif itu hanya didiskusikan dengan para pejabat provinsi, yang tak satu pun bertindak atas nama pemerintah pusat. Lebih lanjut, mereka tetap menyatakan bahwa yang baru-baru ini melarikan diri ke PNG hanyalah dua orang Papua yang merupakan penjahat biasa. Menurut mereka, jika PNG tetap yakin bahwa yang datang ke sana lebih dari itu, maka PNG harus menunjukkan daftar yang memuat nama-namanya. Yang membuat Matane dapat melupakan kekecewaannya terhadap pertemuan itu adalah kehadiran dua pejabat intelijen senior dari pusat yang mengaku sebagai pejabat daerah.

Tak lama kemudian, kantor berita *Antara* secara keliru memberitakan bahwa PNG telah setuju untuk memulangkan para pelintas perbatasan dalam waktu dekat ini. Meskipun jengkel atas berita itu, PNG tidak menanggapinya. Sampai pada saat itu, pemerintah PNG tetap yakin bahwa persetujuan damai dengan Indonesia masih bisa diupayakan. Bahkan Michael Somare menawarkan kesediannya untuk menjadi "perantara yang baik" antara Indonesia dan OPM. Indonesia menanggapinya dengan dingin. Tanggapan yang sama juga diberikan Indonesia saat PNG menawarkan bantuannya untuk menjelaskan pada Indonesia tentang tradisi dan budaya Melanesia.

Harapan PNG untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia sirna ketika dua pesawat tempur, yang diidentifikasi berjenis F5E Tigers buatan Amerika, masuk wilayah PNG sejauh 15 kilometer dan membom pos perbatasan Geen River. Dengan ketakutan, para petugas yang berada di sana melompat ke semak-semak. Mereka sungguh tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanya api dan asap. Petugas yang bertanggung jawab di distrik itu, Ebuc Sumata, tak habis pikir mengapa mereka terbang di atas sungai Green River padahal di situ tak ada gerilyawan OPM dan pengungsi pun masih jauh di sebelah utara. PNG kemudian melancarkan protes terhadap Indonesia. Lewat keterangan pers Menlu Namaliu, PNG menyatakan "sangat marah" atas terjadinya perusakan di wilayahnya. Sebelumnya, PNG mengetahui tentang adanya latihan militer di Papua namun ini dibiarkan oleh PNG. Latihan ini melanggar isi perjanjian perbatasan. Ada beberapa versi tentang bom yang digu-

nakan. Mungkin bom itu adalah bom sonic, yaitu roket yang dapat meledak di udara, atau jenis bom plastik yang hanya mengeluarkan suara keras tanpa merusak. Indonesia tidak melakukan tindakan yang berarti untuk menentramkan PNG. Menlu Mochtar menyatakan mungkin saja pesawat tersebut milik ABRI. Namun, sebagai orang sipil, ia tak memiliki jawaban yang pasti. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin militer Indonesia tidak banyak memberitahu Mochtar tentang segala hal yang ada di Papua. Karena kecewa dengan jawaban ini, PNG akan meninjau ulang hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, khususnya mengenai atase militer Indonesia, Kolonel Sebastian Ismail, yang telah lama diketahui sebagai perwira intelijen. Ismail kemudian kembali ke Indonesia. Menurut PNG, ia "ditarik", sedangkan dalam wawancara dengan majalah *Tempo*, Ismail berkata ia "dipaksa pulang". Walau demikian, tampak jelas bahwa PNG selalu berusaha untuk meminimalisasi rasa malu Indonesia. Setelah insiden ini, pemerintah Indonesia menekan media massa Indonesia untuk tidak menyiarkan berita itu. Namun hal itu tidak dapat dilakukan kepada harian yang independen.

Tampaknya, aktivitas ABRI di Papua bukan hanya penerbangan jet-jet tersebut, mengingat semakin banyaknya warga Papua yang datang ke pos perbatasan PNG. Di antara mereka ada yang berasal dari kota. Tetapi jumlah mereka masih lebih sedikit dibanding yang berasal dari desa, dan mereka inilah yang bercerita tentang ganasnya militer Indonesia. Beberapa bulan kemudian, para pengungsi di sembilan kamp diwawancarai oleh anggota delegasi ICJ (*Interna-*

tional Commission of Jurists). Salah satu anggota delegasi tersebut adalah seorang pendeta Belanda, Rm. L Van der Berg, yang selama bertahun-tahun pernah menjadi pengabar Injil di Papua Barat. Di kamp Green River, delegasi ICJ diberitahu oleh dua orang yang berasal dari Umuaf bahwa tentara Indonesia telah membunuh delapan orang yang tidak sempat melarikan diri. Pembunuhan itu katanya merupakan hukuman terhadap mereka yang tertinggal. Seorang pemuda berkata bahwa tentara Indonesia kemudian menghancurkan rumah dan kebun serta menembaki hewan piaraan. Di kamp *Blackwater* delegasi ini juga mendengarkan cerita tentang kebrutalan tentara Indonesia. Salah satu pengungsi di kamp Blackwater bercerita bahwa ia meninggalkan Papua pada tahun 1978 dan kemudian kembali lagi pada tahun 1982 karena ada jaminan keamanan. Di sana ia dipenjara selama 3 tahun. Ia terus menerus dihajar di malam pertama. Karena tulang iganya ditendangi, selama dua hari ia muntah darah. Ia juga dihajar dengan menggunakan popor senapan. Ia takut hal itu akan terulang kembali jika ia pulang. Seorang pengungsi lain menyatakan bahwa saudara laki-lakinya yang anggota OPM ditangkap oleh tentara Indonesia. Ia diikat layaknya babi dan kemudian ditembak.

Karena gusar dengan arus pengungsi, Pemerintah PNG mengirim Namaliu ke Jakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Indonesia. Sir Julius Chan menyatakan bahwa pertemuan seharusnya diadakan di Port Moresby karena problem yang terjadi bukan diakibatkan oleh PNG. Selama dua hari Namaliu berdiskusi dengan

Panglima ABRI, Jenderal Murdani. Namaliu kemudian melaporkannya ke parlemen bahwa meski masalah Papua Barat adalah masalah dalam negeri Indonesia, PNG juga ikut prihatin karena provinsi itu tidak diurus dengan baik. Saat Namaliu berhalangan, Pjs. Menlu, Tony Siaguru menyatakan bahwa PNG harus mengusahakan suatu jaminan agar warga Papua Barat di perbatasan tidak terusir dari daerahnya dengan diadakannya program transmigrasi. Pernyataan kedua menteri merupakan kritik resmi PNG yang paling keras terhadap Indonesia sejak masa Iambakey Okuk.

Para pengamat merasa PNG akan semakin berani berhadapan dengan Indonesia akibat bocornya dokumen "Dasar Strategi" yang menyatakan Australia akan membela PNG dari serangan (yang tampaknya tak akan ada) Indonesia. Setelah mendapat salinan harian *National Times*, sumber informasi yang berasal dari pemerintahan PNG menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin PNG merasa besar hati mengingat mereka tak akan menghadapi serangan Indonesia sendirian.[10]

Saat Namaliu berpidato di depan anggota parlemen, ia menyatakan bahwa jumlah pengungsi yang datang sekarang ini meningkat tajam. Sejak bulan Februari, jumlah "pelintas perbatasan ilegal" melonjak dari ratusan hingga mencapai 6.800 orang. Mereka datang melalui hampir semua celah yang ada di perbatasan. Tak sama dengan pengungsi terdahulu, yang berasal dari kota, kebanyakan yang datang sekarang adalah warga pedalaman yang jika dijumlahkan mencapai angka 1.000 orang. Ia menambahkan bahwa mereka tak mempunyai keinginan untuk segera pulang. Semen-

tara itu, Indonesia berniat menyumbang dana bantuan senilai 22.000 Kina. Saat itu, jumlah dana tersebut tampaknya besar. Namun jika melihat bahwa jumlah pengungsi semakin meningkat, dana tersebut tak ada artinya. Indonesia menolak segala bentuk pengawasan internasional terhadap proses pemulangan pengungsi, pejabat kedubes PNG di Indonesia, menurut penuturan Namaliu, tak diizinkan datang ke Papua dan melihat apakah Indonesia memang benar-benar tidak akan menghukum orang-orang yang pernah melarikan diri tersebut. Namaliu tidak menjelaskan bagaimana misi PNG, yang di antaranya ada yang bisa berbahasa Indonesia tersebut, melakukan tugasnya. Para pengungsi pun memberitahu para petugas dan pengurus gereja jika mereka tak akan kembali sebelum adanya kepastian operasi ABRI akan dihentikan. Mereka tidak sekadar cemas tapi benar-benar takut ketika Jenderal Moerdani menyatakan bahwa mereka termasuk "penjahat" dan oleh karena itu akan diperlakukan dengan semestinya.

Pers PNG saat itu memuat laporan, yang kemudian dibantah oleh Namaliu, tentang rencana PNG untuk menghentikan arus pengungsi dengan cara menghentikan bantuan bahan makanan. Kemungkinan tentang adanya penghentian makanan ini muncul dari uskup Vanimo, John Etheridge, di awal bulan Maret. Pada bulan Agustus ia juga mengirimkan surat ke Namaliu, meminta agar PNG tidak melakukan hal itu. Seorang pejabat senior mengungkapkan ada problem antara departemen kesehatan PNG yang mengurusi tentang makanan dan kesehatan pengungsi dengan Deplu PNG. Namun Namaliu merasa jika sebelumnya kondisi para

pengungsi memang sudah buruk dan tidak seharusnya bagi PNG untuk menanggung segala dosa Indonesia yang telah menyia-nyiakan rakyatnya sendiri. Menurutnya, yang membutuhkan bantuan rutin hanyalah pengungsi warga perkotaan sedangkan pengungsi mayoritas, yang berasal dari pedalaman, harus segera kembali. Saat 100 orang pengungsi warga pedalaman meninggal karena penyakit akibat kelaparan, pemerintah PNG merasa sangat bersalah dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bantuan makanan dan obat-obatan yang juga didukung oleh tenaga bantuan asing.

PNG berusaha menjelaskan bahwa penyebab 100 orang pengungsi itu meninggal bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, namun karena adanya salah penilaian, problem yang tak dapat diduga baik karena alam maupun manusia, dan kelalaian tragik akibat tidak cepat meminta petunjuk dari pemerintah pusat.[11] Ini merupakan penjelasan terhadap apa yang ditanyakan oleh Brian Brunton, orang Australia yang telah menjadi penduduk PNG. Ia adalah dosen fakultas hukum di Universitas Papua Nugini. Brunton meneliti apa yang dilakukan pemerintah PNG sebelum terjadinya peristiwa itu. Ia menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah PNG saat itu tidak didasari oleh pemikiran yang matang.

Para pengungsi menyadari betapa sedikitnya petugas yang bisa melayani mereka. Paus Johananes Paulus II, dalam rangkaian tur-nya ke negara Asia-Pasifik, menyempatkan diri mengunjungi PNG. Tur ini mencakup kunjungan ke kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan Thailand dan

Kamboja. Di Thailand, Paus menunjukkan perasaan ibanya terhadap orang Indochina yang sebagian besar bukan pemeluk Kristiani. Di PNG, ia tidak jadi mengunjungi kamp-kamp pengungsi, padahal di kamp-kamp ini pelayanan gereja merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari para pengungsi, dan di sini, para pastor Katolik aktif melakukan kegiatan amal. Protes para pengungsi dan bahkan berita gencatan senjata yang dilakukan OPM pun tak membuatnya goyah untuk membatalkan kunjungannya. Juga, ia tampaknya berani mengutuk negara-negara komunis, seperti apa yang dilakukan oleh negara Barat seperti AS dan Australia, namun ia tak memperdulikan tentang eksodus pengungsi dari sebuah bangsa yang seharusnya menjadi bagian dari dunia yang bebas. Seluruh warga Papua Barat sangat kecewa dengan hal itu.

Mereka juga sangat kecewa atas sikap PNG yang menyebut bahwa PNG tidak memiliki kewajiban melindungi pengungsi, karena tidak meratifikasi konvensi dan protokol PBB tentang pengungsi. PNG menyatakan tak perlu memberi perlindungan pada para pengungsi sekalipun mereka tampaknya penuh diliputi rasa takut, seperti apa yang dialami oleh pengungsi yang datang dari Jayapura dalam gelombang pertama. UNHCR meminta pemerintahan Somare menerimanya untuk tetap membantu para pengungsi dengan alasan badan tersebut telah berhasil menangani masalah pengungsi di belahan dunia lain, terutama di Afrika. Dinyatakan, sejak perang dunia II UNHCR telah memulangkan atau memberi tempat tinggal baru bagi 14 juta orang pengungsi. Karenanya, UNHCR dikatakan sebagai Badan

PBB yang paling berhasil dalam tugasnya, sehingga Indonesia tidak perlu malu meminta bantuan UNHCR. PNG juga mendapat penjelasan tentang hukum internasional yang berlaku pada umumnya, bahwa negara yang tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi pun juga diharapkan untuk melaksanakan ketentuan tentang pemulangan pengungsi dengan tanpa paksaan, dan memberi bantuan pada pengungsi sampai dengan ditemukannya satu penyelesaian. Contohnya Malaysia dan Thailand. Mereka tidak menandatangani konvensi itu, namun mereka mengizinkan pengungsi Indochina memasuki wilayah negaranya. Penjelasan dan saran yang diberikan bahwa sebagai anggota PBB, PNG harus melaksanakan ketentuan yang dibuat tahun 1980 tentang garis besar yang mengatur kriteria pemulangan pengungsi, tak berdampak apa-apa bagi PNG. Garis besar tentang kriteria pemulangan pengungsi tersebut meliputi hak para pengungsi untuk tahu tentang kondisi di tempat asalnya, serta adanya pantauan internasional.[12]

Dalam balasannya PNG malah mengkritik PBB dengan mengatakan bahwa PBB merupakan badan yang tidak efektif. Dalam waktu dua bulan, saat jumlah pengungsi telah mencapai 10.000 orang, PNG meminta bantuan UNHCR untuk mengatasi problem pengungsi, yang menjadi masalah utama di negara itu. PNG akan mengalokasikan dananya untuk para pengungsi yang menunggu "repatriasi ke negara yang bersedia" di bulan November. Sebanyak US$ 600.000 dari keseluruhan anggaran PNG diperkirakan sebagai bantuan dari Australia.

Ketika pengungsi mulai dibantu, tentu saja banyak

orang, serta media massa, yang bersimpati pada pemerintah PNG. Di Port Moresby, *West Papua Welfare Society* yang baru dibentuk mendapat dukungan yang cukup luas. Adik perempuan Michael Somare, Bertha, mengorganisir pengumpulan dana di sekolah-sekolah. Setiap kali pemerintah menampakkan gelagat untuk memulangkan para pengungsi, jika perlu secara paksa, para wartawan akan memberitakan hal itu di media massa. Pembelaan juga muncul dari para pengamat di dalam dan luar negeri. Adanya usulan agar militer PNG memaksa pengungsi untuk pulang membuat masyarakat waspada. Cara ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia.

OPM juga merasa diuntungkan dengan adanya perhatian publik. Pada bulan Mei, para wartawan PNG dan Australia diizinkan masuk ke kamp pengungsi. Saat berada di Vanimo, beberapa di antaranya mengadakan pertemuan dengan para pemimpin OPM di dekat batas hutan. Wawancara yang paling tersiar luas adalah wawancara yang dilakukan oleh "Four Corners" dari stasiun TV ABC dengan seorang pemimpin OPM, James Nyaro. Pemerintah PNG yakin hal itu dilakukan di dalam wilayahnya, dan mendesak agar hasil wawancara itu tidak disiarkan. Jika dilanggar, Somare mengancam akan melarang stasiun TV ABC menempatkan korespondennya di PNG. Hal ini menimbulkan kontroversi luas di Australia karena para staf ABC tetap menyatakan bahwa wawancara itu dilakukan tanpa melanggar peraturan. Kalaupun hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pihak manajemen ABC menegaskan bahwa penayangannya tidak boleh diganggu gugat. Beberapa

tahun sebelumnya, karena liputannya yang kritis tentang Timor Timur, ABC telah dilarang di Indonesia. Jika hal seperti ini dilakukan oleh PNG, masyarakat PNG tak bisa lagi menyaksikan liputan langsung dari Australia. Pada akhirnya, ABC pun mengalah. Namun hal ini dilakukan setelah pemimpin ABC, Ken Myer, membuat Somare tersinggung saat mengatakan bahwa Australia lebih demokratis ketimbang PNG. Setelahnya, wawancara tersebut akhirnya disiarkan dan tanpa sensor. Namun, PNG mengumumkan bahwa koresponden Sean Dorney tak akan diberi perpanjangan masa tugas padahal ia tak terlibat apa pun dengan wawancara itu. PNG lalu membatalkan rencana itu karena Sean Dorney ternyata telah menikah dengan seorang warga PNG dan ia, seperti apa kata Somare, adalah sahabat PNG.

Pada bulan September, PNG merasa lebih dipermalukan oleh liputan terakhir Dorney. Dilaporkan bahwa seorang komandan OPM di Papua bagian selatan, Tomy Gerard, akan melakukan perang gerilya dalam waktu dekat, dan telah memberitahu media massa PNG di Port Moresby melalui surat yang dikirimkan oleh anak buahnya dari Kiunga, dekat pertambangan Ok Tedi. Teman-temannya di PNG, yang kebanyakan adalah orang Australia, akhirnya tahu bahwa OPM merupakan masalah yang sangat gawat dalam kehidupan berpolitik di Papua. Michael Hodgman, yang merupakan tokoh oposisi dari partai konservatif di parlemen Australia, menyimpulkan bahwa Australia tidak menganggap enteng situasi yang terjadi di Papua. Hal ini diungkapkannya setelah ia mengunjungi kamp perbatasan pada bulan Juni.

Selama berbulan-bulan telah dilakukan pembicaraan antara Indonesia dan PNG yang membahas tentang cara yang cepat untuk memulangkan para pengungsi. Demonstrasi selalu ada tiap kali pertemuan diadakan. Para mahasiswa di Port Moresby juga melakukan hal itu. UNHCR, Amnesti Internasional, serta para anggota parlemen menekankan pentingnya kebijakan yang manusiawi. Salah satu protes yang terkeras dilakukan oleh Warren Dutton, seorang warga naturalisasi PNG yang duduk sebagai wakil provinsi barat di parlemen. Ia pernah menjadi menteri kepolisian di kabinet Chan. Ia mengingatkan Namaliu, yang berulang kali menyatakan jaminannya terhadap para pengungsi, agar tidak memulangkan mereka sebelum mereka ditanya dan statusnya ditentukan. Namaliu menjawab bahwa dalam jangka waktu hingga akhir tahun 1984, tak mungkin menanyai seluruh pengungsi yang ada. Karena ia keberatan terhadap permintaan itu, yang juga mendapat dukungan anggota parlemen. Somare kembali mendesak Jakarta untuk memberi jaminannya terhadap pengungsi.

Walaupun media massa Indonesia memberitakan bahwa para pengungsi Papua berbondong-bondong pulang, sebenarnya di perbatasan tak terjadi apa-apa. Seorang pengungsi yang pulang adalah Magdalene Hamadi, yang pulang sebentar untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Saat kembali ke PNG, ia bercerita tentang masih berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh ABRI. Buktinya, semakin banyak orang Papua yang mengungsi. Di bulan September, dua kelompok pengungsi yang terdiri 500 dan 200 orang datang ke PNG. Menurut cerita salah seorang di antaranya:

> Saat itu aku telah membuat keputusan yang penting ketika memimpin para penduduk untuk meninggalkan tanah kelahiran kami menuju PNG. Kami berjalan secara sembunyi-sembunyi selama seminggu. Sepanjang perjalanan, kami memakan apa saja yang bisa dimakan. Kita selalu berusaha untuk tidak kepergok pasukan "baret merah" Angkatan Darat Indonesia. Kami semua meninggalkan tanah leluhur karena tentara Indonesia semakin banyak. Proses kolonialisasi brutal mereka lakukan untuk menghapus identitas budaya kami sebagai bangsa Melanesia. Saat-saat sulit bagi kami bermula pada tahun 1977.....saat mereka dengan brutal membunuh salah satu guru kami. Orang-orang bersembunyi di hutan. Ada yang ditangkap, lalu disiksa, dan dibunuh. Seluruh desa dan ladang tanaman dihancurkan oleh tentara Indonesia. Di sana selalu ada transmigran dari Jawa, tindakan pelecehan terhadap gereja, penembakan, dan sejumlah orang yang dilenyapkan. Dari desa satu ke desa yang lain, OPM selalu mendorong kami untuk bergabung dan ikut berjuang demi terciptanya kemerdekan di Papua Barat.[13]

Seorang pejabat propinsi yang berasal dari West Sepik datang ke Jayapura. Secara diam-diam ia diberitahu oleh birokrat di sana bahwa PNG "seharusnya jangan hanya memulangkan seorang pengungsi". Ia juga telah mendengar cerita tentang dibomnya sebuah perkampungan pinggir pantai di dekat perbatasan oleh kapal perang Indonesia, dan juga cerita tentang dibantainya penghuni beberapa kampung, mulai dari binatang, bayi hingga orang lanjut usia.

Apa yang dirasakan oleh para pengungsi disadari Indonesia, saat seorang wartawan *Tempo* diizinkan mengunjungi kamp *Blackwater*. Susanto Pudjomartono datang ke sana bersama para petugas Deplu untuk melihat para pengungsi, yang berasal dari kota, yang mengibarkan bendera

"Bintang Kejora" dan menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat. Saat mereka tahu bahwa Susanto adalah orang Indonesia, mereka lalu memburunya. Ia berhasil diamankan di dalam sebuah mobil Deplu. Selanjutnya, Susanto ditangkap oleh agen NIO di bandara Port Moresby dalam sebuah operasi yang penuh kejanggalan. Operasi tersebut sungguh mencoreng muka pemerintahan kabinet Somare.[14] Sebuah delegasi dari Dewan Gereja Indonesia bahkan batal mengunjungi kamp *Blackwater* karena telah diberitahu di Vanimo bahwa para pengungsi menolaknya. Lalu delegasi ini kembali ke Indonesia.

Pada bulan Agustus 1984, rencana pemulangan pengungsi tampaknya sudah akan dilaksanakan. Namaliu menyatakan bahwa PNG hanya menunggu jaminan tertulis dari Indonesia bahwa para pengungsi tersebut tak akan dijatuhi hukuman. Dr. Mochtar berjanji secara lisan dan setelah ditulis dalam surat resmi, maka rencana ini pun dimulai. Militer Indonesia juga didesak PNG untuk melakukan langkah yang sama. Namun masalahnya, Jenderal Murdani tetap menganggap mereka sebagai "penjahat". Oleh karenanya rencana ini pun tersendat-sendat. Pada bulan September, Dr. Mochtar tampaknya mampu bekerjasama dengan pihak militer. Ia lalu menyampaikan jaminan tertulis ini ke Namaliu di New York, ketika mereka berdua menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Meskipun hal itu melegakan, namun pemerintah PNG, dan khususnya Namaliu sendiri, sudah terlanjur jengkel pada Indonesia serta berniat mengadukannya ke PBB. Tak seperti surat keluhan Chan yang masuk ke mesin penghancur dokumen dua tahun lalu se-

hingga tak terbaca oleh Soeharto, pidato Namaliu memprotes tentang tidak tanggapnya Indonesia terhadap keluhan yang disampaikan PNG akhir-akhir ini.

> Dalam beberapa tahun belakangan ini, kami telah memprotes pemerintah Indonesia tentang apa yang kami sebut sebagai pelanggaran di wilayah kedaulatan kami. Pelanggaran ini meliputi masuknya dua pesawat tempur Indonesia tanpa izin ke wilayah kami, perusakan terhadap sebuah desa di sekitar perbatasan, dan pembangunan jalan raya yang melewati empat daerah di wilayah kami... Pemerintah kami tidak puas dengan respon Indonesia terhadap sebagian besar protes kami.

Tentang keberadaan 10.000 orang pengungsi, ia menyatakan bahwa "tak seorang pun dapat melupakan keadaan-keadaan yang membuat mereka pergi dari kampung halaman. Seluruh keadaan ini bukanlah bikinan pemerintah PNG".[15]

Inilah pertama kali PNG membawa masalah ini ke dunia internasional. Dr. Mochtar gerah dengan pidato Namaliu dan menyatakan bahwa di masa yang akan datang Indonesia akan menanggapi kritik PNG dengan lebih serius. "Selama ini kita terlalu sabar," tambah Namaliu dalam nada yang tak menyenangkan.

Kemudian Indonesia membuat sepuluh kompleks penampungan pengungsi di sepanjang perbatasan. Tiap kompleks terdiri atas sejumlah barak yang dilengkapi dengan dokter, pendeta, dan (seperti biasa) tentara. Sugiyono, seorang pejabat daerah tingkat I, menyatakan bahwa pemerintahnya telah siap menampung pengungsi yang datang. Namun para pengungsi di PNG menduga barak-barak tersebut

dibuat hanya sebagai tempat penahanan, untuk menghukum mereka yang melarikan diri dari Indonesia. Dengan demikian dukungan mereka terhadap OPM akan terhenti. Cara ini pernah dipakai Indonesia untuk menghadapi Fretilin di Timor Timur.

Para pengungsi tetap tak mau pindah sembari menunggu bantuan-bantuan internasional yang lain. UNHCR memperkirakan bahwa dana yang dikeluarkan untuk satu orang pengungsi tiap hari adalah tiga dolar. Dua pertiga dari keseluruhan jumlah pengungsi ditampung di propinsi barat PNG, dekat Merauke yang merupakan kawasan transmigrasi. Meski mereka tinggal di tenda-tenda dan gubuk jerami, tampaknya mereka ingin tetap tinggal lebih lama. Di sekitar gereja Katolik Kamberatoro, para pengungsi membuat tempat bermain. Di tempat lain, para pengungsi membuat gereja tanpa atap dan bahkan, menanam tanaman pangan. Para pemimpin ketiga negara (Australia, Indonesia dan PNG) juga terus mencari solusi atas masalah pengungsi ini. PNG menyatakan bahwa mereka akan diberi tempat tinggal baru di negara dunia ketiga. Pernyataan ini dibuat untuk mengkritik negara-negara Pasifik yang tak pernah membantu menyelesaikan masalah ini. Indonesia berjanji akan menerima dengan baik siapa pun yang pulang, jadi mereka tak perlu khawatir. Pemerintah Australia menyatakan bahwa itu adalah masalah antara PNG dan Indonesia. Namun jika dibutuhkan, mereka bersedia menjadi mediator bagi kedua belah pihak.

Di akhir bulan Oktober, Indonesia dan PNG menandatangani parjanjian perbatasan lima tahunan yang baru,

yang isinya merupakan pembaharuan atas perjanjian yang pernah dibuat Indonesia dan Australia dalam dekade sebelumnya. Setidaknya hal ini adalah tanda bahwa hubungan diplomatik kedua negara akan membaik. Agar tak terjadi masalah lagi di masa datang, maka ditambahkan satu ketentuan baru di dalam perjanjian tersebut, yaitu bahwa tiap negara harus menginformasikan kegiatan militer yang dilakukan di dekat perbatasan kepada negara lainnya. Dr. Mochtar menandatangani perjanjian ini di PNG. Dalam pernyataan bersamanya bersama Namaliu, ia menyatakan momen ini menandakan "suatu era baru untuk menciptakan kerjasama yang erat antara kedua negara".

Namun awal yang buruk menghadang era ini. Ini terjadi tanggal 4 November saat delegasi gabungan Indonesia dan PNG datang ke kamp *Blackwater* untuk meyakinkan pera pengungsi bahwa mereka semua dapat pulang dengan aman. Setelah melihat anggota delegasi dari Indonesia, 800 orang pengungsi, termasuk juga anak-anak, berkata, "Kita tidak mau melihat muka mereka. Kita semua lari karena mereka. Mereka mengancam kebebasan kami. Kita orang Papua Nugini." Para pengungsi juga membawa gambar Arnold Ap. Anak Arnold, Arnold Jr., yang masih bayi pun ditunjukkan ke delegasi Indonesia. Mereka pun lalu menyerang ketujuh orang anggota delegasi Indonesia. Ketujuh orang tersebut luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan, pimpinan delegasi Indonesia, Sugiono, menderita luka bacok. Luka yang paling parah justru diderita oleh seorang anggota delegasi yang berasal dari Melanesia. Aksi ini akhirnya dapat dihentikan oleh polisi PNG dengan meng-

gunakan gas air mata. Peristiwa ini membuat Indonesia sangat marah. Indonesia lalu menyatakan tak akan melanjutkan misi ini kecuali jika pemimpin aksi tersebut telah dihukum. Tuntutan Indonesia ini ditolak oleh Henk Joku. Namun polisi PNG menyatakan pemimpin aksi itu akan tetap ditangkap, cukup oleh polisi bersenjata genggam. Sembilan orang pengungsi kemudian ditahan. Sembilan orang pengungsi lalu ditangkap. Hakim ketua pengadilan Vanimo yang menangani kasus ini mengundurkan diri karena ia "dapat mengerti" mengapa mereka melakukan hal itu. Tindakan birokrat yang tak simpatik dilakukan oleh Laurence Sapien, seorang tokoh dalam peristiwa penyanderan di Holtekang. Ia menempeleng dua orang wanita pengungsi. Akibatnya ia dikenai dakwaan atas penyerangan. Kemudian ia dipenjara dan didenda. Kesembilan orang pengungsi bernasib lebih baik ketimbang Sapien. Tiga orang di antaranya mendapat keringanan hukuman karena berperilaku baik dan enam orang lainnya dibebaskan dari segala dakwaan.

Hubungan Indonesia dan PNG semakin lebih buruk saat tentara patroli perbatasan Indonesia memasuki wilayah PNG tanpa izin. Ini terjadi seminggu setelah terjadi peristiwa kamp *Blackwater*. Mereka berpura-pura mencari air minum. Tentara-tentara itu dipandu oleh dua penduduk Melanesia. Pada saat yang sama dilaporkan telah terjadi bentrokan di dekat perbatasan, antara ABRI dan OPM. Seorang anggota OPM, Rex Rumakiek, yang saat itu berada di Ausralia, mengatakan bahwa ABRI melakukan *sweeping* karena sebulan sebelumnya OPM telah membunuh 25 tentara Indonesia saat terjadi penyerangan terhadap sebuah pangkalan milik

ABRI di mulut sungai Tami, 20 kilometer dari perbatasan. Hampir semua anggota pleton ABRI terbunuh. Sejak saat itu, kekuatan pasukan ABRI semakin ditambah. Para pendukung OPM di wilayah itu menduga akan ada aksi balas dendam.

Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, PM Somare meminta persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional PNG untuk menempatkan pasukan di perbatasan. Lalu ditempatkanlah satu pleton pasukan di Vanimo. Hal ini untuk menambah kekuatan pasukan yang telah ada. Mereka mendapat tugas untuk mengambil alih pengawasan perbatasan dari polisi. Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika mereka diserang oleh dua pihak musuh.

Pasukan tersebut bermarkas di wilayah utara. Akibatnya, mereka tak dapat mendeteksi dua kejadian penting di perbatasan. Yang pertama adalah masuknya James Nyaro, seorang pemimpin OPM, ke PNG untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan para tokoh oposisi, Rm. John Memis. Berita tentang pertemuan itu mencoreng muka pemerintah PNG. Yang kedua yaitu lewatnya 570 orang pengungsi dari gereja Kamberatoro dan 90 orang dari Green River. Mereka mengatakan telah bertempur di hutan selama lima minggu. Enam orang di antaranya meninggal.

20 tahun telah berlalu dengan pemerintah PNG mengalah pada aturan-aturan Indonesia, meski sebenarnya penduduk PNG sendiri sangat enggan untuk diatur oleh negara lain. Di Sydney, tokoh masa peralihan dari Australia, Sir Garfield Warfick mengatakan bahwa ia sama sekali tidak heran dengan perkembangan yang terjadi. "Ini adalah

'Ulster' baru di dunia kita," katanya. Ia, seperti juga diplomat-diplomat yang terlibat dalam hal ini, selalu memiliki anggapan bahwa Indonesia akan memperlakukan suku bangsa Melanesia dengan buruk. Namun apa yang terlupakan dan tak terpikirkan oleh Barwick adalah kemampuan warga Papua Barat dalam melawan Indonesia serta keenggananan pemimpin PNG untuk mengamankan perbatasan, yang dalam sejarahnya penuh dengan petaka.•

Penutup

PERTENGAHAN Desember 1984 — setelah melakukan wawancara dengan para pengungsi di kamp perbatasan — pemerintah PNG menyatakan kepada pers diperkirakan ada sekitar 5.000 pengungsi berminat kembali ke Papua Barat secara sukarela. Tetapi pers tidak diberitahu tentang keberadaan kelompok perintis — terdiri dari 102 laki-laki, wanita, dan anak-anak — yang telah direpatriasi (pemulangan kembali). Kelompok itu telah meninggalkan tempat tinggal mereka yang berada di sekitar Arso, pada bulan April 1984. Ketika sampai di PNG mereka mengatakan kepada para petugas bahwa mereka berkeinginan untuk kembali ke kampung halaman mereka segera setelah aktivitas militer mereda. Akibatnya, mereka dijadikan sasaran awal program repatriasi tersebut. Mereka memang dipulangkan, tapi kenyataannya jauh dari harapan mereka.

Pada hari Jumat, tanggal 21 — hari di mana Michael Somare mengumumkan *resuffle* kabinetnya (termasuk John Giheno, menteri kepolisian yang ditunjuk untuk menggan-

tikan menteri luar negeri Rabbie Namaliu) — para pengungsi Arso tersebut mulai dipisahkan dari kelompok lainnya di kamp *Blackwater*. Pada hari Sabtu, pukul 4.00 pagi, para pengungsi tersebut dibangunkan dengan kasar oleh pasukan anti huru-hara PNG. Mereka diperintahkan untuk segera mengumpulkan barang-barang dan bersiap-siap pulang ke kampung halamannya. Menurut Uskup Katolik Vanimo, John Etheridge, para pengungsi tersebut berharap akan diangkut dengan truk ke arah perbatasan dan dari sana mereka akan kembali ke kampung dengan berjalan kaki. "Tentu saja mereka merasa terkejut ketika dibangunkan dan diminta untuk siap berangkat dengan mendadak, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu," kata sang Uskup, yang sering berhubungan dengan penghuni *Blackwater* tersebut. "Tetapi mereka menjadi lebih bingung," katanya pada penulis, "ketika mendapati bahwa mereka akan diberangkatkan dari dermaga Vanimo, yang tidak ada hubungannya dengan wilayah perbatasan di mana mereka tinggal."

Pada pukul 7.30 pagi, para pengungsi dinaikkan ke sebuah kapal penumpang milik Indonesia dan diberitahu bahwa tujuan mereka adalah Jayapura, ibu kota Irian Jaya, yang bisa ditempuh dalam waktu satu jam dari tanjung tersebut. Pada saat informasi tersebut diberitahukan, dua pemuda berusaha melarikan diri. Kapal tersebut mulai berlayar pada pukul 10.00 pagi dan setibanya di Jayapura disambut oleh pemerintah Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan. Pesta tersebut dipimpin oleh Pangdam Irian Jaya, Brigadir Jenderal Sembiring dan Gubernur Isaac Hindom. Setelah acara pidato dan menikmati hidangan, mereka

diperkenalkan kepada media masa Indonesia — yang diharapkan untuk membuat berita bahwa sejumlah besar pelintas batas sekarang telah kembali ke kampung halaman mereka, dan krisis tampaknya sudah berlalu. Menteri luar negeri, Dr. Mochtar, menambahkan sebuah pernyataan bahwa 2.000 orang pengungsi telah kembali dan sisanya diharapkan akan segera menyusul.

Sementara itu, hal yang digembar-gemborkan sebagai kisah sukses Indonesia tersebut justru menimbulkan kemarahan PNG. Kritik keras ditujukan kepada pemerintah PNG karena dianggap telah berkolusi dengan pemerintah Indonesia. Seminggu kemudian, mantan menteri luar negeri PNG, Namaliu berada di Jakarta untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah pengungsi. Pada pembicaraan tersebut PNG menyatakan sepakat terhadap program repatriasi. Sesudahnya, ia membuat komentar bahwa kerja sama militer antara kedua belah pihak — yang meliputi patroli gabungan dan pemberian wewenang "untuk menangkap buronan" — dianggap sebagai langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada saat itu. Pada satu kesempatan, Uskup Etheridge mengatakan bahwa membiarkan para pengungsi tanpa arah yang jelas merupakan tindakan tidak terpuji, sementara itu Fr Greg Mongi — seorang pastor dari PNG dan sekretaris Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian (*Catholic Commision for Justice and Peace*), mendesak pemerintahnya untuk tidak ikut berperan serta dalam usaha "pemindahan" rakyat Papua Barat (*Times of PNG*, 30 Desember 1984). Kritik lainya muncul dari para petugas UNHCR (dalam kapasitas mereka sebagai pribadi), yang selama ini

tidak dilibatkan dalam pengawasan repatriasi, padahal mereka telah mendedikasikan diri selama berbulan-bulan untuk mengurusi para pengungsi. UNHCR merasa kesal karena kedua pemerintahan, baik PNG maupun Indonesia, telah mengumumkan melalui sebuah pernyataan resmi pada pertengahan bulan Desember, bahwa lembaga internasional tersebut akan diundang untuk berpartisipasi di dalamnya (*Sydney Morning Herald,* 14 Desember 1984).

Menanggapi berbagai kritik tersebut, departemen luar negeri PNG mengatakan bahwa para pengungsi telah "diminta" (oleh PNG) untuk pergi dengan kapal tersebut karena khawatir akan adanya perlakuan buruk dari OPM dan sebagai usaha untuk melindungi para wanita dan anak-anak. Penjelasan tersebut tidak meyakinkan *Times of PNG,* yang mengamati bahwa daerah Arso letaknya memang lebih dekat dengan Vanimo daripada dengan Jayapura; dan jalan darat yang ada dari Jayapura tidak sampai menjangkau Arso. Media massa Indonesia memberitakan bahwa pemerintah telah membangun sekitar seratus hunian baru bagi para pengungsi di desa Workona, Arso. *Sinar Harapan,* yang salah seorang wartawannya diizinkan untuk mendampingi para pengungsi dalam perjalanan dengan kapal tersebut, menulis bahwa mereka sangat ingin kembali ke kampung halaman mereka serta berharap agar dapat memperbaiki masa depan dengan bekerja pada Perkebunan Inti Rakyat yang telah dibangun di Arso. Harian itu, yang merupakan salah satu harian terbesar saat itu, tidak menjelaskan alasan mengapa rumah-rumah penduduk harus dibangun kembali. Alasan sebenarnya adalah karena rumah-rumah tersebut telah diru-

sak dan dibakar oleh pasukan Indonesia selama masa Operasi Sate, dengan tujuan untuk menghancurkan OPM.

Di balik sikap damai Indonesia terhadap mereka yang telah melanggar hukum karena meninggalkan negara tanpa izin, ternyata ada tujuan lain yaitu untuk mengontrol para pemberontak. Dalam sebuah kunjungan Natal di lembah Baliem, Wamena, menteri pertahanan negara, Jenderal Moerdani, menyampaikan pidato yang bernada mengancam terhadap rakyat Papua agar tidak berusaha membuat masalah dengan mengangkat isu kesukuan atau agama. Indonesia adalah satu negara, walau di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Ia juga menjamin bahwa pemerintah pusat tidak pernah berkeinginan untuk "mengislamisasi" Irian Jaya.

Sementara itu, di bagian lain perbatasan Nugini, pemerintah PNG juga telah menunjukkan tanda-tanda untuk menerapkan kebijakan yang tegas terhadap masalah Papua Barat. Karena merasa marah terhadap berbagai pemberitaan pada saat itu, khususnya dari media masa Australia, pemerintah setempat mengumumkan kebijakan pembatasan kunjungan wartawan asing. Untuk dapat mengunjungi PNG, seorang koresponden harus mengajukan visa berkunjung 30 hari sebelumnya. Daftar tempat yang akan dikunjungi dan siapa-siapa saja yang mereka kunjungi harus ditulis secara jelas dalam aplikasi visa. Selanjutnya, daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh wartawan juga harus diserahkan. Pada pertengahan Januari, 1985, menteri luar negeri yang baru, Mr. Giheno, menyatakan bahwa Bill Hayden pun, yang notabene sesama menteri luar negeri, tidak akan mendapat izin bila tidak memenuhi persyaratan itu. Ketika dimintai komentarnya,

Bill Hayden mengatakan bahwa peninjauan terhadap kamp pengungsi yang terdapat di perbatasan mungkin ada gunanya. Ia pernah ditolak untuk berkunjung, tetapi segera setelah itu ia tiba di Kiunga di mana sebuah pesawat carteran (yang dibayar $ 6000 diambil dari dana pajak negara) telah menunggu rombongannya untuk menuju kamp Kungim yang terletak di daerah terpencil. Pada saat yang sama, beberapa harian ternama Australia mulai memberitakan analisa kebijakan luar negeri awal tahunan, dan sepakat bahwa masalah perbatasan PNG — Papua Barat merupakan masalah terberat bagi pemerintahan partai buruh pimpinan Hawke. Sementara itu masalah mendesak lain yang harus segera diperhatikan oleh Canberra adalah perjuangan kemerdekaan masyarakat Melanesia lainnya di New Caledonia. Untuk hal ini Australia mau mengambil risiko untuk berhadapan dengan kekuatan kolonial Prancis, dengan mengajukan usulan agar hak-hak penduduk asli Melanesia tersebut dihargai. Tetapi tindakan tersebut sebenarnya membawa konsekuensi yang bisa membahayakan sikap politik Australia, karena negara bagian Kanak yang otonom walaupun secara finansial masih tergantung pada Prancis, sudah pasti akan menjadi pendukung bagi perjuangan Papua Barat.

Sementara perhatian media massa cenderung pada masalah *New Caledonia*, para pengungsi yang berada di sepanjang perbatasan PNG masih tetap bertahan. Mereka tidak lagi menjadi perhatian, dan tidak tahu harus menunggu berapa hari lagi, atau bahkan tahun, hidup di pengasingan.•

Catatan Kaki

Bab 1

[1]Orang-orang Melanesia yang berada di selat Torres diperlakukan dengan buruk oleh Australia. Selama masa PD II, terjadi pengerahan tenaga kerja di kepulauan tersebut, yang sebelumnya didahului oleh merosotnya industri mutiara. Dalam angkatan bersenjata, para penduduk asli kepulauan tersebut hanya dibayar 3,10 pound per bulan, dibandingkan dengan kaum kulit putih menerima 8 - 9 pound. Mereka mogok, namun dipaksa bekerja dengan ancaman tembak jika menolak. Empat puluh tahun kemudian, pada bulan Oktober 1983, Canberra mengumumkan bahwa 800 penduduk Selat Torres dan sebagian orang Aborijin, akan mendapat ganti rugi upah mereka selama itu, yang mencapai jumlah 7.4 juta dollar Australia.

Orang-orang Papua Nugini yang dulu pernah membantu Australia selama masa perang masih menunggu adanya kompensasi serupa, yang diperkirakan berjumlah 8 juta Kina. Pada bulan Oktober 1984, Australia akhirnya bersedia untuk mengganti hutang tersebut. Tuntutan para veteran ini juga tergambar pada film dokumentar *Angels of War* yang diputar tahun 1982.

[2]Ian Hogbin (ed.), *Anthropology in Papua New Guinea*, Melbourne University Press, 1973, hal. 106.

[3]*Ibid.* hal.107

[4]Petugas kepolisian Indonesia, wawancara dengan penulis, daerah Balim, Papua Barat, Desember 1982, Nama tidak dicantumkan.

[5]Denis Reinhardt dalam *Nation Review*, 21 September 1977.

[6]*Kompas*, 28 November 1977

[7]Surat dari de Torres, di Manila, kepada Raja Spanyol, 12 Juli 1607. Dikutip dari Whittaker *et. al., Documents and Reading in New Guinea History: Prehistory to 1889*. Jacaranda Press, 1975, hal.191.

[8]Rupert Lockwood, *Black Armada*, Hale and Iremonger, 1982, hal. 19.

[9]Peter Worseley, *The Trumpet Shall Sound*, dikutip dari Bryan Wilson, *Magic and The Millennium*, Paladin, 1975, hal. 204-205. Subjudul dari buku Wilson mengindikasikan betapa berharganya sebuah sumber dalam konteks ini: "Religious Movements of Protes Among Tribal and Third-Wold Peoples '.

[10]Wilson, *Magic and The Millennium*, hal, 196.

[11]Tapol Group, *West Papua: The Obliteration of A People*, Tapol, UK, 1982, hal. 16.

[12]Alan Renouf, *Let Justice Be Done, The Foreign Policy of Dr H.V Evatt*. University of Queensland Press, 1983, hal. 165. Biografi ini telah banyak membantu, khususnya pada bab 8, "The Indonesian Revolution".

[13]*Ibid.* hal.173

[14]Osmar White, *Parliament of a Thousand Tribes, PNG, the story of an Emerging Nation*. Wren, 1965, hal.236

[15]Ross Garnaut adalah mantan penasihat ekonomi untuk pemerintah PNG. Pada tahun 1983-84, ia bekerja untuk Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Setelah mengunjungi Papua Barat dan melakukan penelitian bersama seorang ahli demografi, Chris Manning, ia menerbitkan *Irian Jaya: The Transformation of a Melanesian Economy*, ANU Press, Canberra 1974. Data statistik dan kesimpulan mereka sangat berharga, meski sebagian sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang.

[16]Paul Hasluck, *A Time For Building: Australian Administration in PNG, 1951-1963*, Melbourne University Press, 1976, hal. 366-367. Memoar mantan menteri tersebut mengemukakan pandangan yang mendalam tetapi agak terbatas mengenai berbagai peristiwa yang terjadi. Misalnya pernyataan bahwa dokumen-dokumen pemerintah akan dinyatakan tertutup sampai waktu tertentu.

[17]Kebangkitan nasionalisme Papua Barat telah diliput oleh seorang peneliti dari Australia yang menggunakan nama samaran "Peter Savage". Lihat "The Nasionalist Struggle in West Irian: The Divisions Within the Liberation Movement" dalam *Australia and New Zealand Journal of Sociology*, vol. 14, no.2, Juni 1978. "The National Liberation Struggle in West Irian: From Millenarianism to Socialist Revolution" dalam *Asian Survey*, vol. 18, no. 10, 1978. Untuk poin ini, lihat juga John Ryan, *The Hot Land, Focus on New Guinea*, Macmillan, 1970, hal 190 yang memuat daftar banyak partai,

platform dan aktor-aktor personal.

[18]Savage, *op. cit., Asian Survey*, hal. 984

[19]Lockwood, *Black Armada*, hal. 263

[20]Arthur M. Schlesinger Jnr., *A Thousand Days*, Andre Deutcsh, 1965, hal.464. Sebuah pandangan mengenai Kennedy pada saat berkuasa. JFK dilaporkan menyatakan hal yang serupa tentang Laos, yang akan segera "dibela" oleh Amerika Serikat.

[21]Sir Garfield Barwick, percakapan dengan penulis, Sydney, 10 April 1984.

[22]Perdana Menteri Belanda J.De Quay, surat kepada Sekjen PBB, U Thant, 16 Mei 1962.

[23]Barwick, percakapan dengan penulis, 10 April 1984.

[24]Ian Downs, *The Australian Trusteeship, Papua New Guinea 1974-75*, Badan Penerbitan Pemerintah Australia, 1980. Laporan resmi pemerintahan PNG di bawah penjajahan Australia, hal. 230.

[25]P.J. Mollison, percakapan dengan penulis, 13 Juli 1984.

[26]Savage, *op. cit., Asian Survey*, hal. 984, mengutip Paul van der Veur dari ANU, Canberra.

[27]Peter Hastings "The Indonesian-PNG Relationship", 1976, makalah yang tidak diterbitkan, hal. 7.

[28]Savage, op.cit., hal. 143.

Bab 2

[1]Brian May, *The Indonesian Tragedy*, Routledge & Kegan Paul, 1978, hal. 169. May, perwakilan kantor berita Agence France — Presse, meliput pelaksanaan Pepera, Bab 5, "The United Nations Fiasco", menceritakan dengan lebih detail.

[2]Peter Savage, *Asian Survey*, hal. 988

[3]Mathew Rak Rain Mayer, pernyataan kepada Departemen Imigrasi dan Urusan Kesukuan dalam rangka mendukung klaim bagi status para pengungsi di Australia, Brisbane, 2 Juli 1984.

[4]Sidang Pleno Majelis Umum PBB ke 1812, sesion ke 24, agenda item 98, 19 November 1969.

[5]*Tapol Bulletin* No. 63, May 1984, hal. 9.

[6]*Ibid* no. 61, Januari, 1984, hal. 9

[7]Bob Kubia, interpiu (tidak disiarkan) dengan wartawan radio ABC Geoff Heriot, Port Moresby, 1978.

[8]*Tapol Bulletin* no. 62, Maret 1984, hal. 7.

[9]*Ibid* no. 63, Mei 1984, hal. 9

[10]Surat kepada Les Johnson, pegawai pemerintahan Australia di PNG, dari Albert Maori Kiki. Surat tersebut mengenai isi telegram yang dikirim oleh Komisi Tinggi Australia di Port Moresby kepada Canberra, 6 Maret 1974. Dikutip dari kompilasi dokumen-dokumen rahasia yang bocor, *Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975*, Richard Walsh dan George Munster (editor dan penerbit) 1980. Lihat bab 9, "Dekolonisasi PNG", hal. 319-326.

[11]Informan, nama tidak dicantumkan, percakapan dengan penulis, Port Moresby, November, 1981.

[12]Radio ABC, *Background Briefing*, 21 Agustus 1983. Produser Geoff Heriot, mantan koresponden PNG.

[13]Cerita mengenai kup, pertama kali diberitakan oleh *Sydney Morning Herald* oleh John Waugh, tetapi dianggap mengada-ada. Berita itu kembali muncul pada tahun 1983 ketika sebuah rekaman suara yang disamarkan, dipercaya sebagai bekas Kolonel Tom Poang, menceritakan mengenai rencana persiapan kup tersebut kepada *Background Briefing*, Radio ABC.

[14]Robert Mitton, *The Lost World of Irian Jaya*, Oxford University Press, 1983, hal. 227. Pemuda Australia tersebut telah menghabiskan waktu selama beberapa tahun di PNG dan Papua sebagai geolog untuk perusahaan-perusahaan besar. Ia sangat menaruh minat terhadap budaya Papua, mengoleksi berbagai hasil kerajinan suku-suku setempat, dan mengabadikan berbagai foto. Buku ini merupakan sebuah cerita bergambar yang sangat bagus, sekaligus bentuk penggambaran kekecewaan Milton terhadap penguasa Indonesia.

[15]Pernyataan seorang misionaris, nama tidak disebutkan, 1984.

[16]Percakapan penulis dengan seorang mantan personil RAAF, Agustus 1984, nama tidak disebutkan.

[17]Terry Doyle, percakapan dengan penulis, Agustus 1984, Canberra. Setelah menyelesaikan kontrak kerja dengan Freeport, pilot tersebut lulus ujian sebagai seorang pengacara di Australia.

Bab 3

[1]Laporan, satu dari 50 yang diterbitkan, yang disita oleh OPM pada tahun 1981 ketika mereka menyerang sebuah minibus yang mengangkut para pejabat senior, termasuk di antaranya kepala kepolisian propinsi setempat. Anggota OPM membawa dokumen tersebut beserta barang-barang lainnya ke PNG dengan maksud untuk dijadikan alat tukar supaya mereka mendapatkan perlindungan. Tetapi mereka tidak berhasil. Doku-

men tersebut diberikan kepada penulis oleh seorang sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya. Sedangkan dokumen rahasia Indonesia lainnya dibawa oleh seorang pegawai negeri Papua yang membelot ke PNG. Hal-hal tersebut di atas "dibocorkan" kepada penulis, sekali lagi oleh sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai negeri PNG.

[2]*Tapol Bulletin* no. 62, Maret 1984, hal. 9

[3]Selama beberapa tahun, banyak surat-surat OPM yang jatuh ke tangan intelijen PNG, baik dari para agen maupun yang direbut dari kurir. Beberapa di antara surat-surat tersebut dibagi dengan Australia dan kemudian juga dengan Indonesia. Adanya koneksi tersebut berakibat pada penangkapan orang-orang Papua Barat. Diduga bahwa dokumen-dokumen OPM yang tercantum dalam buku ini juga sudah sampai ke jaringan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh penulis dari sumber-sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

[4]Surat dari J.H Prai di Swedia, 13 Oktober 1980.

[5]Prai kepada Fisor Yarisetouw, *Markas Pemka*, Papua Barat. 10 November 1980

[6]Laporan Kerja OPM 005/5/LT/1981. Mayor Infantri Wellyp kepada pimpinan staf Pemka di Numbay.

[7]*Tapol West Papua* hal. 81-3. Termasuk foto-foto beberapa tahanan wanita.

[8]'Laporan Investigasi Darurat' OPM — *Papenal*, 16 November 1981.

[9]J.H. Prai kepada Kolonel E. Bemey, Juni 1981.

[10]Surat Kepada koresponden ABC Sean Dornay, 9 Oktober 1981.

[11]Siaran Pers Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, 67/82, 27 Mei 1982.

[12]Laurence Sapien, percakapan dengan penulis, Vanimo, Desember, 1982.

[13]John Holloway, wakil duta besar Australia untuk Indonesia, percakapan dengan penulis, Jakarta, Desember 1982.

[14]Hank di Suvero, bekas pengajar bidang hukum, universitas PNG, percakapan dengan penulis, Sydney, Agustus, 1984.

[15]*Tapol Bulletin*, no. 62, Maret 1984, hal. 7-9, no. 63, Mei 1984, hal. 10.

[16]Cara memuja menurut kepercayaan masyarakat setempat tetap dipertahankan. Pada akhir tahun 1982, misalnya, para petugas PNG di Vanimo menyita surat-surat yang dibawa seorang misionaris Amerika yang mengabdi di Papua Barat. Surat-surat tersebut ditulis oleh seorang lelaki bernama W. Mes yang menyatakan bahwa sebuah ramalan membuatnya

percaya bahwa suatu hari Papua Barat akan merdeka. NIO—PNG semakin meningkatkan penyelidikan mengenai gerakan maseanetik — Koreri. Dikatakan bahwa bila ajaran tersebut dikombinasikan dengan ajaran Kristiani, maka ide ajaran tersebut akan hilang. Penelitian menunjukkan bahwa *Masyarakat Injili Indonesia* telah mendistribusikan 707.793 risalah agama pada tahun 1981.

[17]*Pasific Island Monthly*, Juli 1984. Oleh Alfred Sasako dari Niugini Nius.

[18]Laporan kunjungan ke kamp perbatasan PNG, 27-30 Juli 1984, oleh pekerja lembaga bantuan Kristiani. Nama-nama mereka dirahasiakan atas permintaan yang bersangkutan.

[19]Penculikan Wyder menarik perhatian media massa dan ia diwawancara panjang lebar oleh Dagmar Steinemann dari mingguan *Swiss, Sonntags Blick*. Informasi yang dicantumkan di sini, kebanyakan tidak dipublikasikan saat itu, diberikan oleh nona Steinemann kepada penulis di Sydney, Mei, 1984.

[20]'Four Corners', 26 Mei 1984, reporter: Alan Hogan. Seperti biasanya wawancara oleh pihak asing dengan anggota OPM, Nyaro diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Seperti halnya rekan-rekannya yang lain, bahasa Inggris bukanlah suatu bahasa yang ia kuasai dengan baik. Makanya, tanggapan yang ia berikan kabur dan terkesan kaku.

[21]*Times of PNG* 8 Maret 1984, oleh Neville Togarewa.

[22]*Times of PNG* 26 Juli 1984, "Partai Vanuatu mendukung OPM".

[23]*World Council of Indigenous Peoples* (Dewan Masyarakat Adat Sedunia), 27 Juni 1984. Menghadirkan: Jose Ramos Horta — Timor Leste, August Siapo — Kanaky (New Caledonia), Jacqui van Bastolaer — Polynesia jajahan Perancis, Henk Joku — Irian Barat, Dr Rangi Walker — Selandia Baru, Francis Kauhuane, Rob Burges, Haydon Burgess — Hawaii, Ronan Bedor — Micronesia, Ossie Cruse, Patrick Malone, Bill Hollingsworth. — Australia-National Aboriginal Congress. WCIP terdiri dari masyarakat adat yang tidak menguasai tanah mereka sendiri.

[24]Bekas petugas intelijen, nama tidak disebutkan. Percakapan dengan penulis, Oktober 1984.

[25]*West Papuan Observer*, Vol. 7:4, 1984, hal. 20. Dijual dengan cara berlangganan (P.O Box 38033, 6503 A. A Nijmegen, Netherlands).

Bab 4

[1]Untuk detail mengenai perencanaan dan pendanaan FUNDWI, lihat John Ryan, *The Hot Land*, hal. 247-58. Paul Hasluck, *A Time for Building*, hal. 114 c.f, dan hal. 319 c.f, yang membahas kebijakan Australia mengenai

pertanahan di PNG.

[2]Brian May, *The Indonesian Tragedy* hal. 196

[3]Robert Mitton, "Development of the Freeport Copper Mine". Paper ini dibuat untuk seminar Waigani ke-9, Port Moresby, Mei 1975. Lihat *The Melanesian Environment*, John H. Winslow (ed.), ANU, 1977, hal. 367.

[4]Terry Doyle, percakapan dengan penulis, Agustus 1984

[5]Tapol, *Obliteration of a People* hal. 43-4

[6]Skandal kayu Asmat dipaparkan dengan lengkap dan jelas dalam buku *Tapol*, hal. 46-51.

[7]Ampo, *Japan-Asia Quarterly Review*, Vol. 16, 1-2, 1984, hal. 103-4. "Fisheries in Asia and the Pacific — Japan's Involvement and its Problems," oleh Yamako Junko, *et al.*

[8]Garnaut dan Manning, *Irian Jaya* hal. 81

[9]Francis Moore Lappe dan Joseph Collins, *World Hunger: Ten Myths*, Institute for Food and Development Policy, USA, 1978, hal. 9. Meskipun masalah kepemilikan tanah di Indonesia tidaklah separah, sebut saja, di India, (Rex Mortimer, Stubborn Survivors, hal. 44), tetapi masalah kepemilikan tanah di negara ini belakangan cukup memprihatinkan. (*Tapol Bulletin* no. 67, Januari 1985, hal. 16-18).

[10]Laporan KOPKAMTIB berkenaan dengan interogasi terhadap Karsikun Atmo Suwarno, 10 November 1980, oleh Sersan Decky Gardjalay.

[11]Jusuf Wanandi, CSIS, wawancara dalam acara "Indian-Pacific", radio ABC, 21 Juli 1984.

[12]World Bank, *Tribal Peoples and Economic Development — Human Ecologic Considerations*, World Bank, Washington, 1982, hal. 19.

[13]*Tapol Bulletin*, No. 63, Mei 1984

[14]Dr. Mochtar Kusumaatmadja, wawancara dengan Huw Evans dalam acara "Pressure Point", TV ABC, Mei 1984.

[15]*Indonesia Times* 14 Juni 1984, statemen yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, Nugroho Notosusanto. Kenyataannya sehari-hari, anak-anak Papua lebih sering mandi di sungai dan laut, tidur nyenyak dan jarang memakan makanan olahan yang mengharuskan untuk menggosok gigi sesudahnya.

[16]Laporan rahasia oleh KOPKAMTIB, Agustus 1980. PDI, salah satu dari tiga partai politik di Indonesia saat itu, banyak elemennya terdiri dari kelompok Kristen maupun Nasionalis. Badan intelijen percaya bahwa komponen PDI terkuat di Irian adalah para mantan Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan bahwa mereka menggunakan pendekatan agama sebagai alat untuk mendapatkan dukungan pada pemilihan umum. Laporan ter-

sebut juga mengkhawatirkan bahwa PDI akan disusupi oleh "tokoh-tokoh separatis" dari OPM. Mereka berupaya mengganggu jalannya Pemilu, sebagaimana telah terjadi pada tahun 1977, serta berusaha mencari dukungan massa bagi pembebasan Papua.

[17]Julie Southwood dan Patrick Flanagan, *Indonesia — Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, 1983, hal. 141. Studi ini membahas "rapor" para aparat keamanan di Indonesia secara detail.

[18]Dokumen-dokumen KOPKAMTIB yang dikutip, termasuk apa yang dikenal dengan "Wapai Papers", dibawa ke PNG pada bulan Juli 1982 oleh seorang pengungsi bernama Celsius Wapai dan diberikan kepada pemerintah setempat. Dalam sebuah memo rahasia tertanggal 5 Oktober 1983, Direktur Jendral NIO — PNG, Charles Ali, menyebutnya sebagai "usaha intelijen pertama yang benar-benar sulit untuk mencapai perbatasan".

[19]Leo Kuper, *Genocide*. Its Political Use in the 20 th Century, Pelican, 1984. Ditulis ulang dalam *the Age Monthly Review*, Agustus 1984, oleh Mary Maxwell, yang isinya mempertanyakan mengapa bangsa-bangsa Pasifik belum berani bicara keras mengenai "Irian Jaya".

[20]*Arena*, No. 67 1984, obituari oleh Hank di Suvero.

[21]*The Sydney Morning Herald* 11 Juni 1984, dari berita tertulis oleh Leigh Mackay, AAP Jakarta.

Bab 5

[1]Debat Parlemen Persemakmuran (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) 15 Agustus 1962. Dikutip dalam *New Guinea Journal*, Desember 1965 — Januari 1966, "West Irians' Refugees — What is Permissive Residence?" oleh Paul van der Veur.

[2]*Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975* bab 9.

[3]*Ibid.*

[4]*Nation Review* 1 Februari 1979, '13 Steps to Moresby', oleh Helen Ester

[5]*Post — Courier*, 11 Mei 1978

[6]*Post — Courier*, 10 Desember 1980

[7]*Niugini Nius*, 21 April 1983

[8]Radio ABC, "PM", September 1983

[9]*Times of PNG*, 1 Maret 1984

[10]*National Times*, 5 April 1984 dan 12 April 1984

[11]Hon. John Nilkare, Menteri Urusan Kepropinsian, PNG. Pernyataan kepada parlemen, Agustus 1984. Kasus melawan pemerintah diung-

kapkan dalam, "Refugees, Human Rights, and Irian Jaya: A Critique of Policy", yang disampaikan oleh Brian Brunton pada konferensi mengenai "PNG and Australia: PNG Perspectives", ANU, Canberra, September 1984, hal. 6-10.

[12]Untuk detail mengenai hukum yang mengatur masalah pengungsi, lihat *Lawasia Journal*, Vol. 1, No. 3, 1981, hal. 229-284 "An Appraisal of the Development of the Protection Afforded to Refugees Under International Law".

[13]*Times of PNG*, 13 Desember 1984

[14]Jon. R.L. Namaliu, ditujukan untuk UNGA, 1 Oktober 1984, hal. 7-8

[15]*Tempo*, 9 Juni 1984. PNG bersikeras bahwa Susanto bukanlah pihak yang dicurigai sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Adams, Cindy. *Soekarno My Friend.* Gunung Agung, Singapore, 1971

Amarshi, Azeem; Good, Kenneth and Mortimer, Rex. *Development and Dependency, The Political Economy of Papua New Guinea.* Oxford University Press, 1979

Amnesty International. *Torture in the Eighties.* Amnesty, 1984

Crocombe, Ron and Ali, Ahmed (eds.). *Politics in Melanesia.* University of the South Pacific, Fiji, 1982

Downs, Ian. *The Australian Trusteeship, Papua New Guinea, 1945-75.* Australian Government Publishing Service, 1980

Dunn, James. *Timor, A People Betrayed.* Jacaranda Press, 1983

Hall, D.G.E. *A History of South-East Asia.* Macmillan, 1970

Harrer, Heinrich. *I Come from the Stone Age.* Rupert Hart-Davis, 1964

Hasluck, Paul. *A Time For Building; Australian Administration in Papua and New Guinea 1951-1963.* Melbourne

University Press, 1976

Hastings, Peter. *New Guinea: Problems and Prospects Cheshire,* 1969

Hogbin, Ian (ed.). *Anthropology in Papua New Guinea.* Melbourne University Press, 1973

Indonesian Government. *West Irian — An Essential Part of Indonesia.* Indonesian Embassy, Canberra, 1961

Jackson, Richard. *Ok Tedi: The Pot of Gold.* R. Jackson, Port Moresby, 1982

Jolliffe, Jill. *East Timor, Nationalism and Colonialism.* University of Queensland Press, 1978

Kolia, John. *Irian Jaya 1980's.* Aklat/Indonesian Embassy, Hong Kong, 1982

Lappe, Frances Moore and Collins, Joseph. *World Hunger: Ten Myths.* Institute for Food and Development Policy, San Fransisco, 1978

Leifer, Michael. *Indonesia's Foreign Policy.* George Allen & Unwin, 1983

Lockwood, Rupert. *Black Armada: Australia and the Struggle for Indonesian Independence 1942-49.* Hale & Iremonger, 1982

Marr, David. *Barwick.* George Allen & Unwin, 1980

May, Brian. *The Indonesian Tragedy.* Routledge & Kegan Paul, London, 1978

May, Ronald J. (ed.). *The Indonesian — Papua New Guinea Border: Irianese Nationalism and Small State Diplomacy.* Australian National University, 1983

May, Ronald J. and Nelson, Hanks (eds.). *Melanesia: Beyond Diversity.* Australian National University, 1982

McDonald, Hamish. *Soeharto's Indonesia.* Fontana/Collins, 1980

Mitton, Robert. *The Lost World of Irian Jaya.* Oxford University Press, 1983

Mortimer, Rex. *Stubborn Survivors.* Monash University, 1984

Renouf, Alan. *Let Justice Be Done, The Foreign Policy of Dr H.V. Evatt.* University of Queensland Press, 1983

Roeder, O.G. *The Smiling General.* Gunung Agung, Jakarta, 1969

Rowley, C.D. *The New Guinea Villager.* Cheshire, 1965

Ryan, John. *The Hot Land, Focus on New Guinea.* Macmillan, 1970

Sastroamijoyo, Ali. *Milestones on My Journey.* C.L.M. Penders, University of Queensland Press, 1979

Sharp, Nonie. *The Rule of the Sword, The Story of West Irian.* Kibble Books/Arena, 1977

Sinclair, James. *KIAP, Australia's Patrol Officers in Papua New Guinea.* Pacific Publications, 1981

Southwood, Julie and Flanagan, Patrick. *Indonesia: Law, Propaganda and Terror.* Zed Press, London, 1983

Tantri, Ketut. *Revolt in Paradise.* Ketut Tantri, 1970

Tapol. *West Papua: The Obliteration of a People.* Tapol, London, 1983

Walsh, Richard and Munster, George. *Document on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975.* Walsh and Munster, 1980

White, Osmar. *Parliament of a Thousand Tribes, Papua New Guinea: The Story of an Emerging Nation.* Wren, 1965

Willey, Keith. *When the Sky Fell Down, The Destruction of the*

Tribes of the Sidney Region, 1788-1850's. Collins, 1979

Wilson, Bryan. *Magic and the Millenium, Religious Movements of Protest among Tribal and Third-World Peoples*. Paladin, 1975

Makalah dan Artikel

Arrendt, H.W. "Transmigration: Achievements, Problems, Prospects", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (ANU, Canberra) Desember 1983

Dick, Gerry. "Where the Ice Age Lingers", *Panorama* (Ansett) November 1984

Heider, Karl G. "What Do People Do? Dani Auto-Ethnography", *Journal of Anthropological Research* vol. 31, 1975

International Commission of Jurists (Australian section), "Report on mission to Papua New Guinea 2-16 September 1984 concerning the refugee status of 'border crossers' from Irian Jaya", Sydney, Desember 1984

De Iongh, Rudy. "West Irian Confrontation", *Soekarno's Guided Indonesia*. T.K. Tan (ed). Jacaranda Press, 1967

Routley, R. and V. "Destructive Forestry in Australia and Melanesia", *The Melanesian Environment*. Papers to Ninth Waigani Seminar, Port Moresby, 1975. John H. Winslow (ed.) ANU, Canberra, 1977.

Savage, Peter. "Petty Bourgeoisie and Proto-Peasants: from Nationalism to National Liberation in West Irian". Paper for Class and Class Analysis Conference, Sydney, October 1977. Published in *Asian Survey* vol. 18 no. 10, 1978

"The Nationalist Struggle in West Irian: the Divisions Within

the Liberation Movement", *Australia and New Zealand Journal of Sociology* vol. 14, no. 2, 1978

van der Veur, Paul. "West Irian's Refugees — What is Permissive Residence?" *New Guinea* Desember 1965/ Januari 1966.

Indeks

A

A.K Collins, 242
Abdul Karim, 20
Aboriginal Affairs Department, 233
action-minded, 218
Adam Malik, 61, 138
Adolf Tombo, 234
Agence France Presse, 94
Alex Derey, 187
Alex Ruben, 218
Ali Murtopo, 62
Amerika Serikat, 68, 312
Amos Indey, 44
Angganita Menufandu, 23
Arfak, 77
Arnold Clements Ap, 204, 315
Arthur Calwell, 47
Asia Tenggara, 27
Asiaweek, 166
Austcare, 214
Australia, 21, 48, 60, 68
Australian Aboriginal Community, 233
Australian Development Assistance Bureau, xii

B

Barat, 313
Barwick Plan, 66
Belanda, 16, 21
Belanda Nugini, 17
Bemey, 186
Ben Chiefley, 32
Benny Moerdani, 62
Biak, 94
Bintang Kejora, 24
Black Armada, 20
Black Brothers, 230
blacklist, 384
blackwater, 384
BPKI (Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 28

Brigjend Sarwo Edhie, 80
Bryan Wilson, 24

C

C.B.H von Rosenberg, 14
C.D Rowley, 11
cargo cults, 180
Casey, 48
Celsius Wapai, 113
Cendrawasih, 99, 241
Chairul Saleh, 74
Chan, 359
Charles Jones, 107
Colombus Merabano, 302
concern, 33
cordon sanitaire, 364
Corinus Kery, 38
Corrie Ap, 329
counter-inteligent, 157
Crash program, 98

D

D.G.E Hall, 13
Dading Kalbuadi, 63
Daoed Yusuf, 290
de Bruijn, 24
de facto, xli, 136
dekolonisasi politik, 55
Determination of Refugee Status committee, 237
Dr H.V. Evatt, 32
Dr. Evatt, 34
Dr. Fernando Ortiz-Sanz, 83
Dr. H.J. van Mook, 31
Dr. Joseph Luns, 54
Dr. Mochtar, 290, 380
Dr. Subandrio, 45
Dr. Van Roijen, 58
Dumont d'Urville, 2

E

Ebla Olewale, 349
El Dorado, 242
electric shock, 132
Eliezer Bonay, 44, 70, 288
Epel Tito, 381

F

F. C. Kamma, 24
factional-minded, 167
Fisor Yarisetouw, 224
Fort Coronation, 16
Fort Dubus, 16
Fr. Walter Lini, 228
Fransiscus Wayne, 305
Franz, 44
Franz Kaisiepo, 31
Franzalbert Joku, 16
Fred Korwa, 229
Freeport, 17, 243, 251
Frits Awom, 80
Front Nasional Papua (FPN), 70
frontier justice, 340
FUNDWI 247

G

GOLKAR, 289
Gough Whitlam, 47

H

Henk Joku 219, 365

Herman Wayoi, 44, 68
Herman Womsiwor, 44
hit and run, 109, 208
Homogenitas, 293

I

I Come from the Stone Age, 420
Iambakey Okuk, 366
Ide Anak Agung, 44
Indonesia, 58, 68, 192, 350
Indonesianisasi, 135
Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle..., I xxi
Injil, 317
Iryan, xliii
IRIAN, 31
Irian Barat Indonesia, 65
Irian Jaya Joint Development Foundation, 247
Isaac Hindom, 297, 298
Islam, 295

J

Jacob Prai, 114, 223
James Nyaro, 196
James Sinclair, 10
Jan Carstensz, 15
Jenderal Moerdani, 295
Jenderal Nasution, 50
Jenderal Sembiring, 79
Jepang, 20, 21
Johan Ariks, 37, 44, 53
John Etheridge, 406
John F. Kennedy, 57
John Guise, 68
John Hamadi, 360
John Hayes, 15
Jos Sudarso, 57
Jose Ramos Horta, 231
Jouwe, 71
Julianus Tarumaselly, 38

K

Kaisiepo, 70
Kapten Benny Moerdani, 66
Kapten Imam Subekti, 278
Karl G. Heider, 9
Kebijakan Jepang, 27
Kerr, 47
Kesultanan Tidore, 13
Ketut Tantri, 18
kiaps, 7, 10
Kolonel Marwoto, 79
Kolonel Soeharto, 56
koloni internal, 244
kolonialisme, 53
konferensi Asia Afrika, 47
Konferensi Malino, 32
konor, 317
Kopassanda, 203, 205, 300
KOPKAMTIB, 125, 161
Koreri, 22, 24
Kubia, 116
Kumiseri, 22

L

Lawrence Doga, 226
leaflet, 210
Les Johnson, 337
Linggarjati, 33

Lockwood, 20
Lodewijk Mandatjan, 53
Lord Mounbatten, 30
Lucas Rumkorem, 52
Luiz Vaes de Torres, 12
Lukas Rumkorem, 38, 44
Luns Plan, 55

M

Majapahit, 13
Malaysia, 393
Mambesak, 316
Manamakeri, 22
Mandatjan, 44
Manseren Mangundi 22
Markus Kaisiepo, 44, 53
Marthin Indey, 52
Marthin Tabu, 152, 154
Martin Indey, 44
Martono, 284
Matane, 385
Mathew Major (Mayer), 95
Mathew Mayer, 236
Mayer, 237
Mayjen. Amir Mahmud, 104
Meinard Poluan, 374
Melanesia, 1, 2
Melanesianisme, 293
Merauke, 44, 81
Messianic, 22
Michael Somare, 235, 342
Michael Somare, 96
Mohammad Hatta, 28
Mohammad Yamin, 28
Mohd. Yusuf, 153
Mr. T.K (Tom) Critchley, 37
MV Both, 20

N

Nani Sudarsono, 297
nasionalisme, 292
National Times, 58, 366, 389
Ndani, 7, 139
Negrito, 1
neokolonial, 55
New Albion, 15
ngotot, x
Nicolaas Jouwe, 44, 53
NIO (Badan Intelijen Papua Nugini), 359
Noel Levi, 350
Nueva Guinea, 14
Nugini, 2, 6, 36
Nugini (*New Guinea*), 1
Nyaro, 221

O

Obahorok, 155
Ok Tedi, 256
Olewale, 352
Onesimus Ompe, 303
Operasi Sate, 209
OPM, 97, 123, 235
Ortiz Retez, 14
Ortiz-Sanz, 96

P

P.J. Mollison 68
Pancasila, 292
Papua, 1, 15, 241

Papua Barat, 16, 43, 45, 244
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), 294
Partai Nasional (PARNA), 53
Patrick Mollison, 48
Patterson Iowa, 348
Paul Hasluck, 49
Paus Johananes Paulus II, 391
PBB, 108
Pemerintah Indonesia, 9
PEPERA, 87
Permenas Joku, 72
Peter Hastings, 326
PKI, 39, 63
PM Menzies, 48
PNG, 126, 192, 213
Prai, 169
Prapantja, 13
Presiden Soeharto, 82
Presiden Soekarno, 49
Press Release, 138, 368
preventif, 204
Prof. Otto Soemarwoto, 269

R

Rabbie Namaliu, 211, 373
rasisme, 290
Rausimkwik, 352
Release, 138
release, 157
Revolt in Paradise, 18
Rex Rumakiek, 78, 168
Robert Komer, 59
Robert Menzies, 39
Robert Mitton, 253
rock'n roll, 230
Roy Edwards, 10
Royal Dutch Shell, 17
Rumkorem, 167, 198, 373
Rupert Lockwood, 20

S

Sabang, 44
Sampari, 22, 207
Saudi Arabia, 107
Schouten, 21
Seth Jafeth Rumkorem, 110
Seth Rumkorem, 194
Silas Papare, 44, 52
Simon Allom, 374
Sinar Harapan, 408
Sir Albert Maori Kiki, 127
Sir Garfield Barwick, 60
sir Julius Chan, 358
slogan, 182
Soeharto, 359
Soekarno, 28, 44
Soeyoto, 307
Solomon, 1
Sriwijaya, 11
Stephanus Simiopiaref, 23
Subandrio, 290
Sudarsono, 271
Sudomo, 62
Sultan Wahab Alam, 14
Susanto Pudjomartono, 397
Suwarno, 277
Swedia, 355

T

T-shirt, 201

T. Mulya Lubis, 301
Tabu, 155
Tanah Merah, 18
Ted Diro, 131
Tempo, xi
Tentara Pembebasan Nasional, 113
terorisme, 343
Terry Doyle, 145
Thailand, 393
The Nugini Villager, 11
Times of PNG, 236, 368, 408
Toni Bais, 347
TPN, 119
Trans Irian, 273
transmigran, 75
transmigrasi, 266, 283
Trikora, 51

U

U. Thant, 61
Uganda, 347
UNHCR, 392
UNTEA, 71
Untung, 63
Utrecht, 23
Utula Samana, 356

V

Vanuatu, 1, 194
Victoria, 195
voting, 9

W

Walt Rostow, 59
warga negara, 120
Werner Wyder, 215
Willem Janz, 15
World Bank, 284
Wynn Sargent, 155

Y

Yap Thiam Hien, 294
Yours faithfully, 196
Yunani, 373

Lampiran Foto

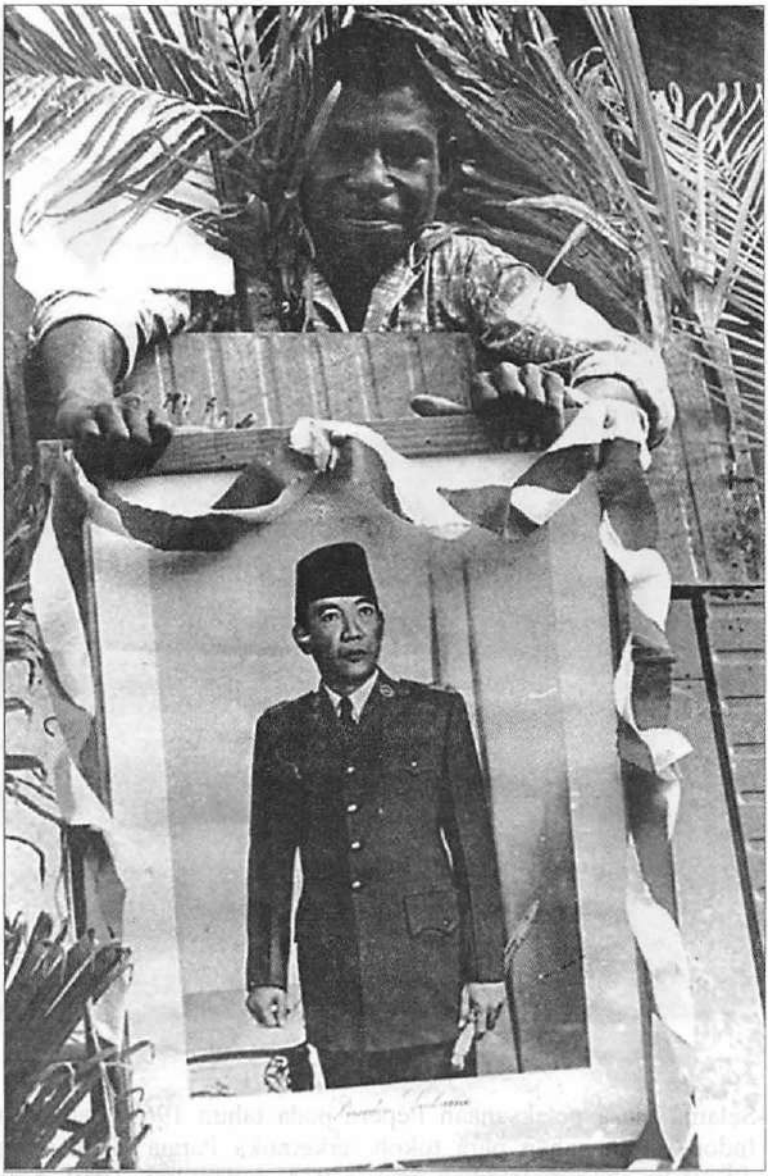

Pada tahun 1963, Nugini menjadi Irian Barat, Indonesia dan penduduk Melanesia diminta untuk menggantungkan gambar pemimpin baru mereka, Presiden Soekarno

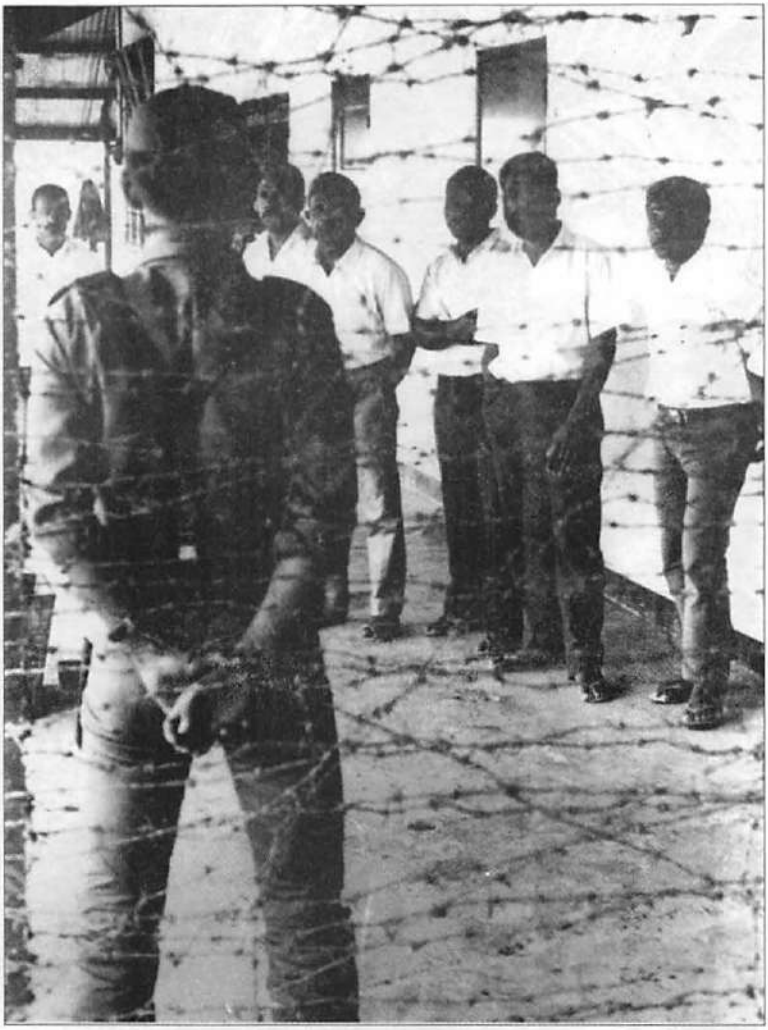

Selama masa pelaksanaan Pepera pada tahun 1969, penguasa Indonesia menahan para tokoh terkemuka Papua Barat yang disinyalir akan melakukan protes. Pada bulan Juni 1969, para tahanan politik ini dibawa ke bekas markas besar Jenderal Mc.Arthur semasa perang dulu, yang terletak dekat Jayapura.



Di sebuah kamp pelatihan rahasia, Jacob Prai (mengenakan topi ternak, tangan dibalut) sedang membalas hormat yang diberikan oleh para gerilyawan OPM. Persenjataan yang mereka miliki di antaranya terdapat sebuah senapan dari Perang Dunia I dan satu jenis *bushknife*. (foto: G.Heriot)



Prai dan para pengikut inti dengan membawa bermacam-macam jenis senjata api kuno, di depan bendera Bintang Kejora. (foto: G. Heriot)



Connie Ap, yang mengungsi ke PNG, menggendong Arnold Ap Jnr., yang lahir di kamp pada akhir tahun 1984, sebulan setelah terbunuhnya sang ayah di Irian Jaya (foto: G.Nettheim).



Blackwater, sebuah kamp pengungsi di PNG. Pada gelombang pertama para pengungsi yang meninggalkan Irian Jaya yang terjadi pada bulan Februari 1984 banyak terdapat orang-orang Melanesia yang bekerja dalam tubuh birokrasi Indonesia, anggota militer dan akademisi. Sesudah melakukan kebaktian di sebuah gereja darurat, kelompok pengungsi menunjukkan lambang negara Papua Barat disertai semboyan "*One People, One Soul*". Mereka termasuk dalam kelompok yang melakukan protes keras saat seorang pejabat Indonesia mengunjungi kamp Blackwater beberapa waktu sesudahnya di tahun yang sama. (foto: G.Nettheim)



Pada tahun 1983, James Nyaro, yang menyebut dirinya sebagai "Jenderal", mengambil alih kepemimpinan Pemka kelompok OPM yang berbasis di wilayah Utara perbatasan. Pada tahun 1984, para pengikut Nyaro menangkap sebuah pesawat pesawat ringan milik misi katolik di Yuruf dan membunuh dua orang penumpangnya yang berkebangsaan Indonesia. Pilot pesawat tersebut yang berasal dari Swiss, Werner Wyder, berdiri di antara Nyaro (kiri) dan menteri pertahanan Pemka, A.B "Donald" Derey. (foto: A. Sasako)



Pasukan milisi "Satgas Papua" sedang berlatih di Sentani, dekat Jayapura (Port Numbai), dalam rangka persiapan Kongres Papua. Foto diambil bulan Mei 2000. (foto: Andrew Kilvert)

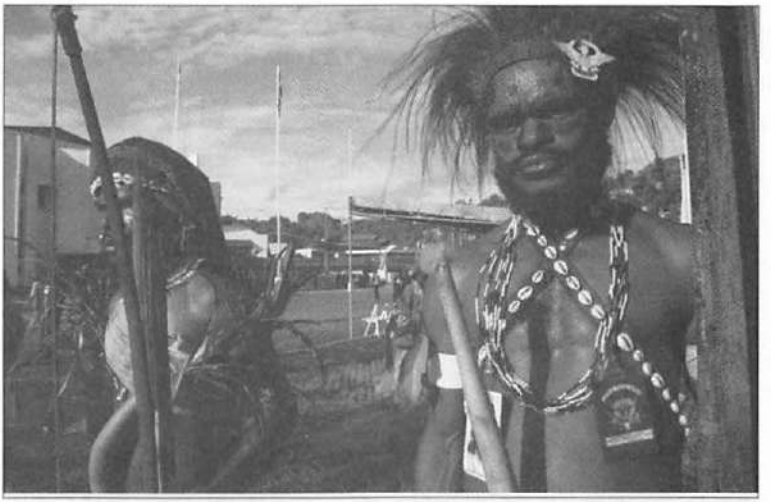

Para "pejuang" dari daerah dataran tinggi mengenakan atribut "Satgas Papua" turut mengawasi jalannya Kongres Papua, Juni 2000. (foto: Andrew Kilvert)



Pemimpin Dewan Presidium Rakyat Papua, Theys Eulay. (foto: Andrew Kilvert)



Rumkorem dan beberapa orang rekan seperjalanannya sedang berada di dalam sampan tradisional yang telah diberi motor. Sampan tersebut mereka gunakan untuk mengarungi lautan luas sampai di Rabaul, sebelum ditangkap secara ilegal oleh polisi PNG. Selanjutnya mereka diperbolehkan untuk pergi dari kota Rabaul dan dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk setempat.



Harmoko, ketika menjabat menteri penerangan RI, mengenakan pakaian adat Papua saat kunjungannya di propinsi Irian Jaya tahun 1982. (foto: TEMPO)



Almarhum Arnold Ap, peneliti kebudayaan dan aktivis gerakan sosial Papua Barat yang tewas dibunuh secara diam-diam oleh pasukan Kopassandha.

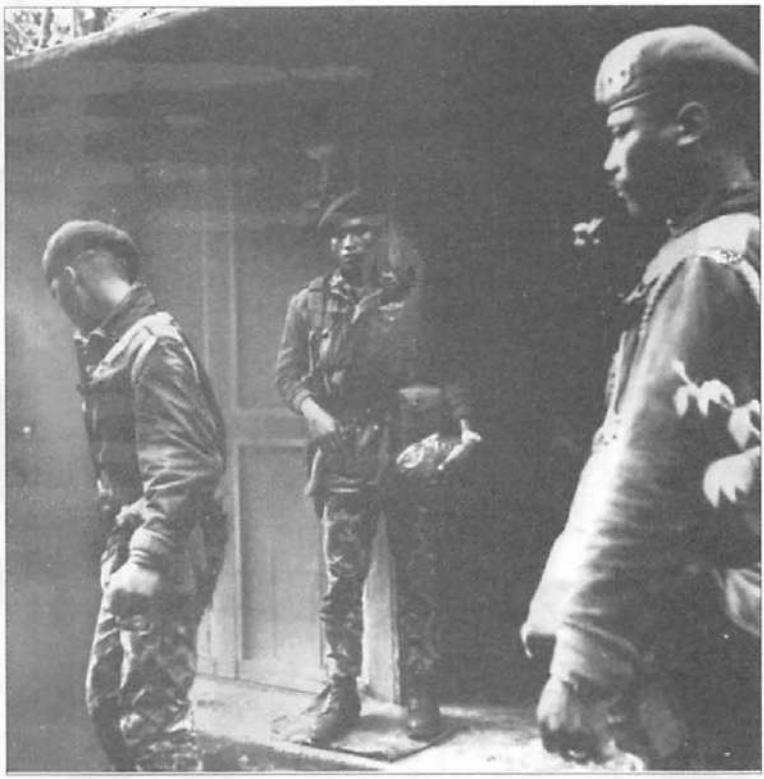

Anggota Pasukan Para (tengah), Kapten L.B. "Benny" Moerdani belakangan menjadi seorang jendral yang juga figur politik penting pada masa rezim Soeharto saat bertugas di Papua pada masa kampanye Indonesia melawan pendudukan Belanda tahun 1961.



Perjuangan Papua Barat mendapatkan dukungan dari Republik Vanuatu, sebuah negara kepulauan Pasifik yang penduduknya juga berkebangsaan Melanesia. Tampak saat dua orang pengungsi OPM, Seth Rumkorem dan Jacob Prai, bertemu di Port Vila, ibukota Vanuatu, tahun 1985. Turut menyaksikan adalah Perwakilan Internasional OPM, Rex Rumakiek (kiri) dan politikus Vanuatu, -di tahun 2000 menjadi Perdana Menteri yang tetap mendukung penuh kemerdekaan Papua Barat- Barak Sope. Pria di sebelah kanan tidak dikenal.

Profil Penulis

ROBIN OSBORNE lahir pada tahun 1947 di Sydney, Australia, di mana ia pernah mengabdikan dirinya pada industri periklanan dan jurnalistik. Pernah bekerja sebagai koresponden *freelance* di Asia Tenggara pada tahun 1972-1980 untuk berbagai macam media massa, termasuk di antaranya *The Australian, Far Eastern Economic Review,* dan *Pacific News Service* (AS).

Pada tahun 1981-1983, ia menjabat sekretaris bidang pers sekaligus penulis naskah pidato untuk Perdana Menteri Papua Nugini saat itu, Sir Julius Chan, dan deputinya, Hon. Paias Wingti.

Ia juga pernah bekerja untuk radio ABC, stasiun televisi SBS, dan beberapa organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang proyek pelatihan buruh di negara-negara berkembang. Saat ini sebagai Media Manager pada Southern Cross University di Lismore, New South Wales, Australia.•



Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang ber-diri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, mema-jukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya — sebagaimana di-amanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama seba-gai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advo-kasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan ELSAM terdiri dari:

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh ELSAM maupun hasil terjemahan sejumlah naskah instrumen internasional hak asasi manusia atau buku hak asasi manusia.
2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia. Persidangan yang menjadi fokus di sini adalah persidangan kasus-kasus politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Buletin, merupakan media untuk mengkomuni-kasikan peristiwa-peristiwa hak asasi manusia se-cara reguler kepada masyarakat umum. Buletin ini diberi nama *ASASI*.

Susunan Organisasi ELSAM

Dewan Pengurus: Ketua: Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LL.M; Sekretaris: Asmara Nababan, SH; Bendahara: Ir. Yosep A. Prasetyo; Anggota: Drs. Hadimulyo, M.Sc.; Sandrayati Moniaga, SH; Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc.

Pelaksana Harian: Direktur Eksekutif: Ifdhal Kasim, SH; Koordinator P-1: Amiruddin; Asisten: Indriaswati Dyah S., SH; Koordinator P-2: Agung Putri Astrid Kartika; Asisten: Atnike Nova S; Agung Yudhawiranata, S.IP., LL.M; Koordinator P-3/Kabid Keuangan: E. Rini Pratsnawati; Staf: Elisabeth M. Sagala; Maria Ririhena; Kabid Personalia: Y. Dian Indraswari, S.Psi.; Sekretaris: Fierly Hanna; Tata

Usaha: Khumaedi; Koordinator P-4/Kabid Pelayanan Hukum: A. H. Semendawai, SH; Asisten: Supriyadi, SH; Kabid Pengelolaan Informasi: Otto A. Yulianto, SE; Unit Pengembangan Pangkalan Data: Sentot S. Siswanto; Unit Perpustakaan: Fatimah A.; Unit Kliping: Paijo; Unit Penerbitan (Editor): Eddie Riyadi

Alamat.
Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510.
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail: elsam@nusa.or.id atau advokasi@rad.net.id



Kapankah Papua dapat meraih kemerdekaannya? Asumsi-asumsi apa yang berada di balik pertanyaan seperti itu? Ada asumsi *perlu* yang berarti *mengharuskan* Papua memperjuangkan kemerdekaannya; Ada pula asumsi *cukup* yang berarti *memungkinkan* Papua mengibarkan bendera kemerdekaannya. Maka, jauh lebih penting dari pertanyaan di atas adalah: Mengapakah Papua menggemakan teriakan merdeka dari lembah-lembah minyak dan gunung-gunung emas, dari padang kesukaan dan belantara kemakmuran? Merdeka berarti ganda yakni "dari" dan "untuk". *Nah*, gerangan apakah yang dipertaruhkan Papua dalam geliat gerakan pembebasannya itu? Artinya, bicara tentang Papua perlu dicermati dalam dua hal: Papua sebagai satu kesatuan entitas tunggal, dan Papua sebagai sekadar jumlah entitas-entitas tunggal sehingga siapa berjuang untuk siapa dan apa bisa menjadi jelas. Sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai *starting point* dalam mengnyikapi klaim-klaim, gerakan, dan operasi atas nama "kemerdekaan" dan "kedaulatan negara" baik dari Papua maupun Indonesia.

Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk *policy* yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif-ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA). Boleh dibilang, *buku ini merupakan satu diantara yang tidak banyak!*

ISBN: 979-8981-22-7

